

Alexandro F. Ranga OFM, Bernadus B. Koten,
Frits Ramandey, Helmi, Hipolitus Wangge, Paskalis
Kossay, Petrus Pit Supardi, Yuliana Langowuyo

Seri Memoria Passionis No. 41

Terpasung di Rumah Sendiri



Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2022

Seri Memoria Passionis No. 41

Terpasung di Rumah Sendiri

Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2022

Seri Memoria Passionis No. 41

Terpasung di Rumah Sendiri

Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2022

Alexandro F. Ranga OFM, Bernadus B. Koten, Frits Ramandey,
Helmi, Hipolitus Wangge, Paskalis Kossay, Petrus Pit Supardi,
Yuliana Langowuyo

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SEKRETARIAT KEADILAN, PERDAMAIAN, DAN KEUTUHAN
CIPTAAN FRANSISKAN PAPUA

Terpasung di Rumah Sendiri: Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2022

Copyrights©2023, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan I, April 2023

Penerbit:

SKPKC Fransiskan Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius, Sentani, Jayapura

Papua 99352

www.fransiskanpapua.org

Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis:

Alexandro F. Ranga OFM

Bernadus B. Koten

Frits Ramandey

Helmi

Hipolitus Wangge

Paskalis Kossay

Petrus Pit Supardi

Yuliana Langowuyo

Editor: Alexandro F. Ranga OFM

Layout: Anastasia Lintang P.

ISBN: 978-623-94589-2-8

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	vii
BAB I HIGHLIGHT MEMORIA PASSIONIS 2022	I
Catatan Kritis Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru	4
Kronik Daerah Otonomi Baru	10
Kronik Otonomi Khusus Papua dan Majelis Rakyat Papua	97
“Dialog Tidak Membunuh Siapa Pun”	111
Kronik Membangun Perdamaian dan Dialog di Papua	118
BAB II BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	147
Papua Sedang Tidak Baik-Baik Saja	148
Kronik Pertahanan dan Keamanan	155
Potret Runyam Konflik Bersenjata di Papua	179
Kronik Konflik Bersenjata dan Pengungsian Internal	185
BAB III BIDANG SIPIL DAN POLITIK	219
Penyelesaian HAM Papua Masih Sebatas Kebijakan Politik	221
Kronik Penyelesaian Kasus-Kasus HAM Papua	227
Laporan Khusus Penembakan Warga Sipil di Kabupaten Mappi	267
Terpasung di Rumah Sendiri	271
Kronik Kebebasan Berekspresi	279
Korupsi dan Kemiskinan di Papua	298
Kronik Korupsi	303

BAB IV BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	323
Yang Klasik Belum Tuntas, Muncul Masalah Baru	324
Kronik Pendidikan	330
Stunting dan HIV/AIDS Makin Menyebar	365
Kronik Kesehatan	371
Biodata Penulis	411

Kata Pengantar

Buku *Memoria Passionis* ditulis berdasarkan kronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kronik merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya; susunan waktu; yang berhubungan dengan waktu. Kata kronik sendiri berasal dari bahasa Latin *Chronicus*, pinjaman dari bahasa Yunani *Chronicós*, yang merupakan turunan dari kata *Chronos*, yang berarti waktu. Kata jamak netral, *Chronica* dikembangkan untuk merujuk pada karya sejarah yang menceritakan peristiwa dalam urutan kronologis. Oleh karena itu, *Memoria Passionis* adalah karya sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa di Papua dalam urutan kronologis disertai analisis berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam arti inilah *Memoria Passionis* tidak semata-mata ingatan akan penderitaan (baca: pelanggaran HAM) tetapi catatan sejarah yang menjadi bukti tentang keberadaan suatu masyarakat atau bangsa bernama Papua. Dalam lintasan sejarah, kronik menjadi catatan masa lampau keberadaan dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di China seperti dinasti Chou, Chin, Tang, Ming, atau Sung. Di Indonesia, kita mengenal *Kronik Revolusi Indonesia* yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, Edianti Kamil, dan Koesalah Soebagyo. Nama yang terakhir juga menyusun *Kronik Irian Barat*. *Memoria Passionis* meneruskan tradisi ini agar peristiwa Papua terekam secara baik dan rapi.

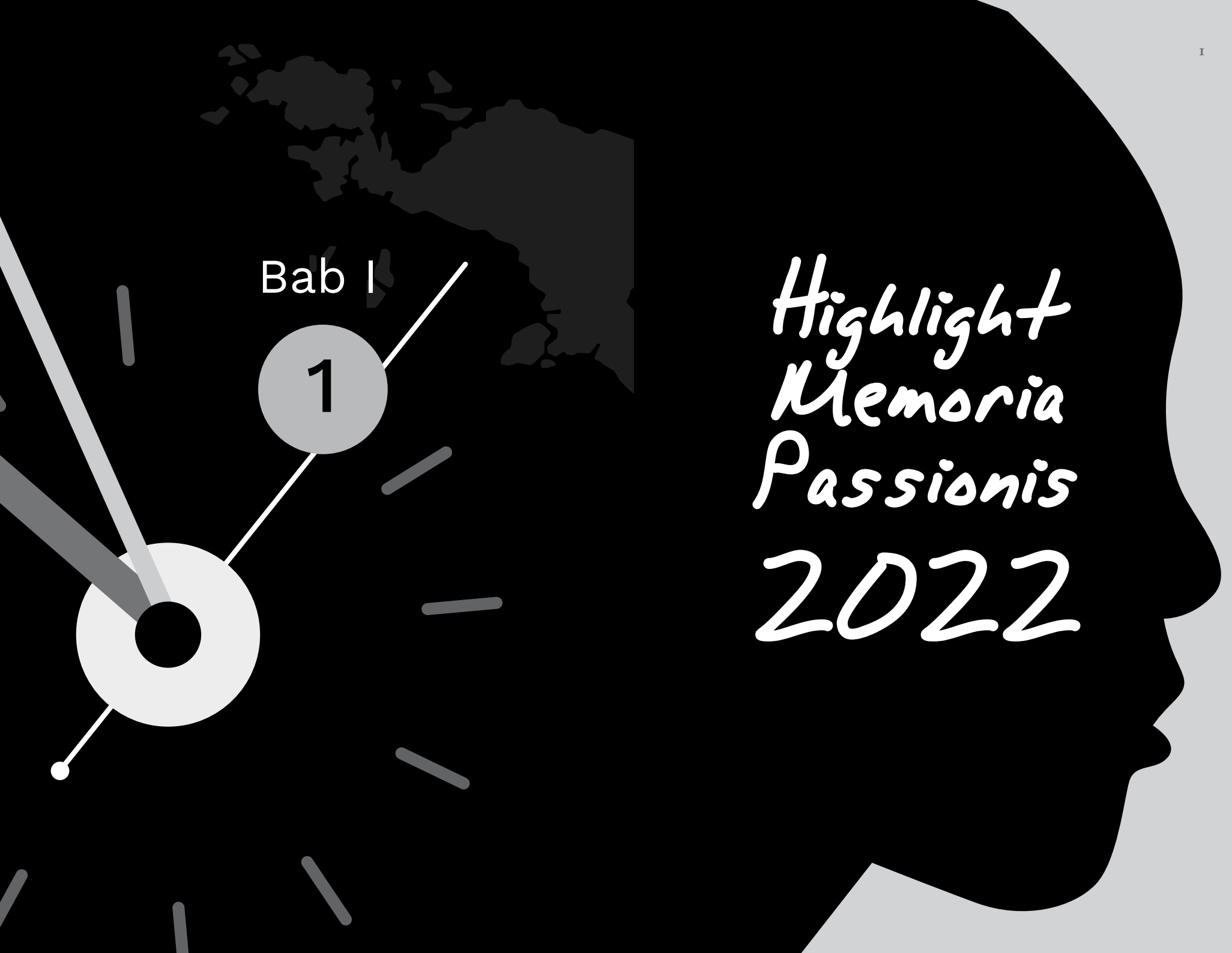
Kami membagi buku *Memoria Passionis 2022* dalam 4 bab. Masing-masing bab terdiri dari analisis dan kronik. Bab pertama menjadi *highlight* tahun 2022 karena menyita perhatian banyak pihak sepanjang tahun yakni Otonomi Khusus Jilid II, Daerah Otonomi Baru, dan gagasan dialog Jakarta-Papua oleh Komnas HAM RI. Bab kedua yang juga mempunyai kaitan erat dengan mencuat kembalinya gagasan dialog, memuat analisis bidang pertahanan dan keamanan serta konflik bersenjata di Papua. Bab ketiga membahas bidang sipil dan politik secara khusus penyelesaian kasus-kasus HAM Papua, kebebasan berekspresi maupun korupsi. Bab keempat menyentil kembali persoalan hak-hak dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang tak kunjung membaik.

Sebagaimana telah disebutkan, setiap bab terdiri dari analisis dan kronik. Jika kronik menjadi catatan sejarah, analisis menjadi pemicu sikap kritis untuk membaca kronik Papua secara lebih komprehensif dan reflektif. Komprehensif karena informasi tentang Papua seringkali tidak utuh dan stigmatik. Reflektif karena dibutuhkan ruang untuk merenung sebelum menetapkan suatu kebijakan baru non afirmatif di Papua. Oleh

karena itu kami berterima kasih kepada para penulis analisis yang berkontribusi dalam edisi kali ini yakni Paskalis Kossay, Frits Ramandey, Hipolitus Wangge, Helmi, Petrus Pit Supardi, dan tim dari SKPKC Fransiskan Papua.

Selamat membaca,

Editor



Bab I

1

*Highlight
Memoria
Passionis
2022*



Aksi demonstrasi menolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru pada 14 Juli 2022 di Kantor DPR Papua. Foto: Dokumentasi SKPKC Fransiskan Papua/ Yokke Felle.

Catatan Kritis Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru

— *Paskalis Kossay*

Pengantar

Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II merupakan upaya Pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatannya atas Papua. Dikatakan demikian karena Otsus Jilid I tidak hanya mendapat penolakan keras dari Orang Asli Papua (OAP) tetapi juga dinilai gagal selama 20 tahun implementasinya. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, Pemerintah malah merevisi UU No. 1 Tahun 2001 yang berakhir pada 21 November 2021 dan menetapkan menjadi UU No. 2 tahun 2021. Belum lama ditetapkan, Undang-Undang baru ini telah menghadirkan 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) setingkat provinsi yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya yang juga kontroversial dan memicu pro kontra di Papua.

Tulisan ini akan menyoroti kontroversi penetapan Otsus Jilid II dan DOB. Kontroversi muncul karena selama 20 Tahun pemberlakuan Otsus Jilid I belum tampak perubahan yang signifikan pada standar hidup, kesejahteraan, dan kemajuan Sumber Daya Manusia Papua. Menurut pemerintah pusat dan para elit politik lokal, rentang kendali geografis serta rumitnya

birokrasi dan administrasi pemerintahan dinilai sebagai penyebab. Menurut OAP yang menolak Otsus Jilid II, proses *check and balances* terhadap kebijakan pembangunan daerah selama era Otonomi Khusus Jilid I tidak berjalan sehingga kebijakan pembangunan seringkali tumpang tindih, tanpa arah dan sasaran yang jelas.

Kontroversi maupun Pro Kontra Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru

Kontroversi maupun pro kontra Otonomi Khusus di Papua dapat dicermati secara kronologis sejak tahun 2001. Kami akan membaginya secara tematik yakni Otonomi Khusus Jilid I, Otonomi Khusus Jilid II, dan Daerah Otonomi Baru.

Otonomi Khusus Jilid I

1. Tahun 2001 adalah periode lahirnya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pemerintah dan DPR-RI menetapkan Otonomi Khusus dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai implementasi dari TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor IV/MPR/2000. Kedua TAP MPR ini mengharuskan agar segera dibuat suatu Undang-Undang yang bersifat khusus untuk Papua untuk mengatasi gejolak politik Papua saat itu yang mengarah pada disintegrasi bangsa.
2. Tahun 2002, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dimulai. Pada tahun 2002 inilah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara efektif diberlakukan di seluruh tanah Papua yang dulunya disebut Provinsi Irian Jaya.
3. Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Khusus dicerai oleh terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaktifan Kembali Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur. Pengaktifan Undang-Undang ini bertentangan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang wilayahnya meliputi seluruh tanah Papua. Inpres ini menimbulkan polemik panjang dan konflik hukum yang serius dalam peraturan perundang-undangan. Namun pemerintah bersikukuh memberlakukannya hingga melahirkan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) sampai hari ini.

4. Tahun 2004, lahir lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui PP Nomor 54 Tahun 2004. PP ini terlambat terbit karena menurut amanat Undang-Undang 21 Tahun 2001, pembentukan MRP sudah harus segera dibentuk setelah pemberlakuan Otonomi Khusus. MRP merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menjadi representasi kultural Orang Asli Papua baik wakil masyarakat adat, wakil perempuan maupun wakil agama. MRP bertugas dan berwenang untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus. Belakangan ini, keberadaan MRP justru dikooptasi menjadi lembaga politik yang bisa memveto arah kebijakan pemerintah menuju diintegrasikan. Seiring waktu lahir pula MRP Provinsi Papua Barat yang seharusnya hanya ada satu MRP yang berkedudukan di Provinsi Induk.
5. Tahun 2005-2021 adalah periode pasang surut pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam dinamika politik Papua yang cenderung fluktuatif dan memanas. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era Otsus Jilid I melenceng jauh dari semangat awal kehadiran Otonomi Khusus sehingga menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

6. Tahun 2021 adalah akhir dari 20 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid I sekaligus dimulainya Otonomi Khusus Jilid II dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Secara praktis, tahun 2021 lebih merupakan tahun transisi. Dalam masa transisi ini, pemerintah dan DPR RI segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua dan pemerintah daerah.

Otonomi Khusus Jilid II

Secara singkat sikap pro kontra terhadap pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Selama 20 tahun Otonomi Khusus Jilid I, pemerintah tidak konsisten melaksanakan amanat Otonomi Khusus. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang bertentangan dengan amanat Otonomi Khusus sebagaimana disebutkan sebelumnya seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, dan Provinsi Irian Jaya Timur serta PP No 54 Tahun 2004 Tentang MRP yang mengatur pembentukan MRP di provinsi pemekaran.
2. Adanya pola pendekatan pembangunan di tanah Papua yang sering berubah-ubah. Pola pembangunan yang paling sering dipakai ialah dengan pendekatan keamanan yang bersifat represif, militeristik, dan otoriter.
3. Pemerintah cenderung berpandangan negatif secara berlebihan kepada OAP dengan stigma separatistis atau OPM. Hal ini tidak hanya berakibat buruk bagi usaha membangun nasionalisme keindonesiaan dalam diri OAP tetapi juga berujung pada peminggiran OAP dari kebijakan publik

maupun kebijakan pembangunan yang memberdayakan Sumber Daya Manusia Papua dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Daerah Otonomi Baru (DOB)

Sikap pro kontra juga mewarnai pembentukan DOB. OAP pada umumnya menolak dengan tegas rencana pemerintah melakukan pemekaran provinsi di Papua. Pemerintah beralasan tujuan pembentukan DOB adalah untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah, serta mempercepat kemajuan pembangunan daerah. OAP menilai, di balik alasan-alasan normatif tersebut, termuat alasan politis untuk meminimalisir aksi-aksi Kelompok Separatis Bersenjata (KKB) yang semakin meningkat.

Dengan perspektif yang demikian, banyak pihak yang khawatir bahwa partisipasi OAP dalam kebijakan publik OAP akan makin dibatasi. Negara tentu akan lebih berpihak pada OAP yang mendukung agenda-agenda integrasi dan kedaulatan Negara di Papua dalam proses-proses pemilihan kepala daerah, anggota DPRD maupun MRP. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah strategis yang lebih bersifat protektif dengan regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan/atau Peraturan Presiden (Perpres) tentang proteksi dan pemberdayaan OAP yang dibarengi oleh pembatasan arus migrasi spontan ke Papua. Jika tidak, proteksi dan pemberdayaan OAP yang terabaikan sejak tahun 2001 akan terus berlanjut di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Penutup

Pro atau kontra, siap atau tidak, Otsus Jilid II dan Daerah Otonomi Baru telah sah. Belajar dari implementasi Otsus Jilid

I selama 20 tahun, Pemerintah Indonesia mesti memperbaiki pendekatan pembangunan di Papua. Pendekatan ini mesti menjamin proteksi dan penghormatan terhadap Orang Asli Papua. Selain itu pemerintah perlu memberdayakan SDM Orang Asli Papua supaya dapat bersaing dengan bebas sekaligus berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik. Semua ini mesti sejalan dengan amanat dan semangat dasar Otsus Jilid II yang afirmatif dan berpihak pada hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Bertolak dari kontroversi maupun pro kontra yang ada, Otsus Jilid II dan DOB seharusnya bisa menghadirkan kondisi ideal sebagaimana diharapkan OAP. Seharusnya bisa mewujudkan visi Pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan OAP dengan pendekatan yang humanis, demokratis, dan partisipatif secara tegas, konsisten, dan konsekuen.

Kronik Daerah Otonomi Baru

14 Januari

Bupati Nduga, Wentius Nimiange mengajak seluruh bupati di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk menyambut wacana pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, kebijakan ini baik agar pembangunan di daerah masing-masing dapat berjalan dengan baik terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua (Kamis, 13/1) (Cenderawasih Pos).

18 Januari

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan bahwa mengacu pada UU RI No. 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa syarat sebuah pemekaran harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, MRP, dan DPR Papua tidaklah berjalan semestinya. Kebijakan ini kemudian

disederhanakan di dalam UU RI No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 tahun 2001 yang menyatakan bahwa tidak perlu ada rekomendasi dari MRP. Lebih Lanjut Timo mengharapkan sebaiknya pemerintah pusat menunggu uji materi yang dilakukan oleh MRP terhadap UU tersebut. Selain itu pemekaran merugikan warga Papua. Orang Papua menginginkan kemerdekaan bukan Otsus. Secara terpisah anggota DPR RI perwakilan Papua, Yan Mendenas mengatakan, pemekaran yang direncanakan oleh pemerintah pusat itu adalah enam provinsi tetapi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat (Cenderawasih Pos).

29 Januari

Usulan pembentukan DOB Provinsi Saireri terus didorong. Bupati Biak Numfor yang juga Ketua Forum Komunikasi Bupati se-Teluk Saireri, Herry Ario Naap menyampaikan hal ini ketika melakukan audiens dengan DPR RI pada 27 Januari 2022 (Cenderawasih Pos).

31 Januari

Paskalis Kosay, Tokoh Papua, mengatakan bahwa pemaksaan rencana pemekaran Provinsi Papua tanpa mempertimbangkan faktor politik, sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk masyarakat Papua sangatlah ambisius dan merupakan proyek pemerintah pusat di Tanah Papua (Sabtu, 29/1) (Cenderawasih Pos).

04 Februari

Wenan Watori, Tokoh Papua, mengkritisi sikap pemerintah pusat yang memaksakan pemekaran di Papua. Menurut Wenan, sikap pemerintah pusat ini adalah sikap nekat tanpa memikirkan kelayakan dan pikiran orang Papua yang jelas menolaknya. Menurutnya, pemekaran ini untuk pelunasan

hutang dan strategi pemecah belah masyarakat Papua dan orang Papua akan semakin termajinal (Cenderawasih Pos).

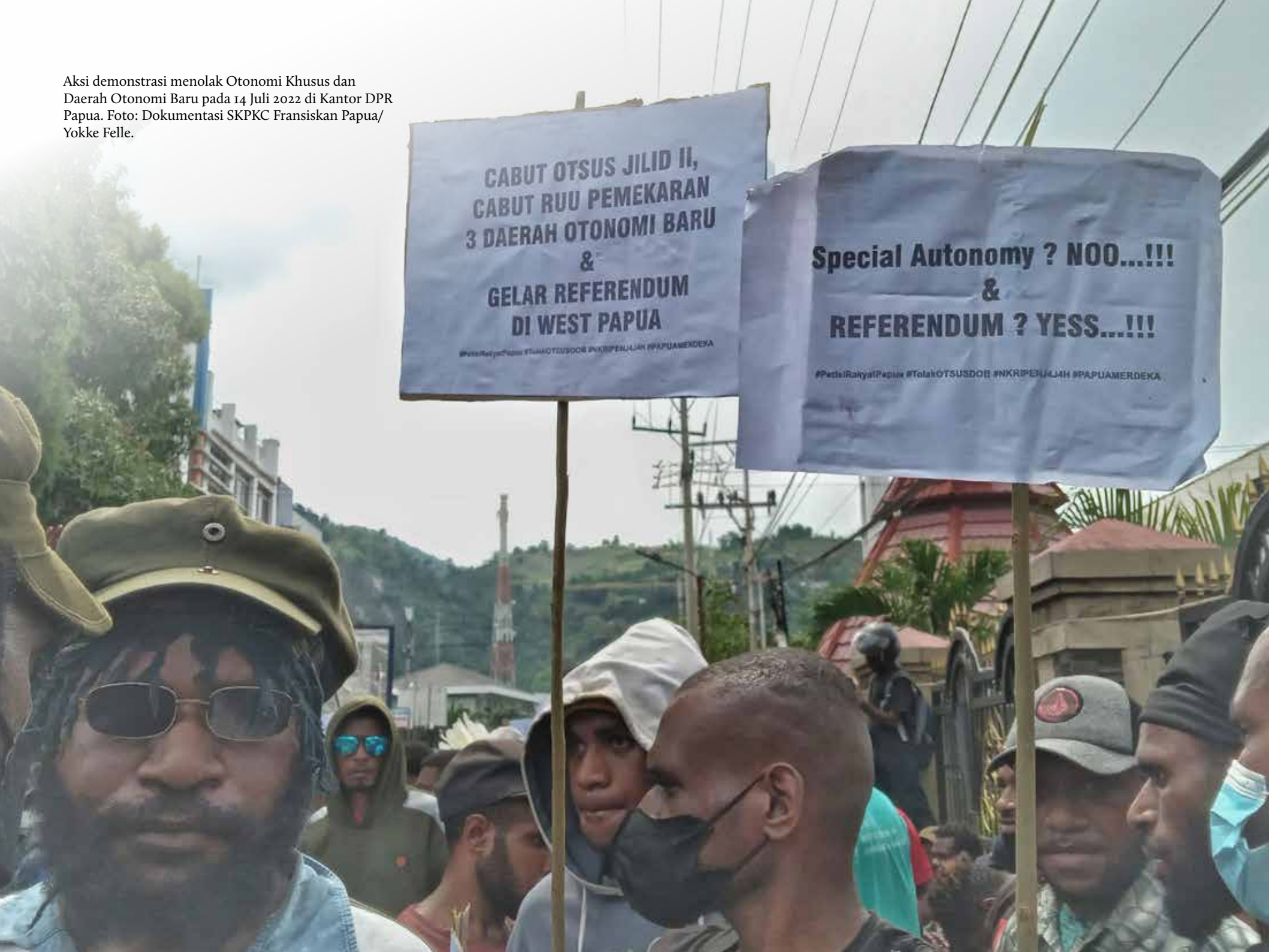
07 - 08 Februari

- Anggota Kelompok Kerja Perempuan MRP, Sarah Wahla mengatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak bermanfaat bagi Orang Asli Papua (OAP). Lebih lanjut, Wahla menjelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak memberikan dampak positif bagi Orang Asli Papua sehingga harus ditolak (Koran Jubi, 7-8 Februari).
- Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menilai pemekaran provinsi di Tanah Papua berpotensi pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis Orang Asli Papua. Lebih lanjut Theo mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah berpikir dan menganalisa resiko dan masalah yang akan terjadi dengan adanya pemekaran wilayah (Minggu, 6/2) (Cenderawasih Pos).
- Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, Selasa, (8/2), menyampaikan bahwa pemekaran menjXadi penting untuk memperpendek rentang kendali tetapi juga bagaimana melakukan terobosan keterisolasian. Tapi yang perlu diingat adalah pemekaran jangan sampai menjadi problem marginalisasi Orang Asli Papua (Cenderawasih Pos).

09-10 Februari

Aktivis Papua Merdeka, Markus Haluk menilai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua berupa Otsus dan pemekaran DOB merupakan tawaran murah ibarat gula-gula kepada orang Papua. Menurut Markus, Otsus dan Pemekaran DOB bukanlah solusi bagi Papua (Koran Jubi, 9-10 Februari).

Aksi demonstrasi menolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru pada 14 Juli 2022 di Kantor DPR Papua. Foto: Dokumentasi SKPKC Fransiskan Papua/ Yokke Felle.



16 Februari

Terkait dengan pemekaran DOB, para bupati di wilayah adat Meepago sepakat bahwa Ibu Kota pemekaran Papua Tengah adalah Nabire. Ini berkaitan dengan UU No. 45 tahun 1999 karena Kabupaten Nabire adalah kota induk dari Kabupaten Paniai dan Nabire. Hal ini disampaikan oleh Bupati Paniai, Meki Nawipa yang didampingi Bupati Nabire, Mesak Magai dan Bupati Puncak, Yunus Wonda pada saat memberikan keterangan pers di Abepura, Selasa (15/2) (Cenderawasih Pos).

17 Februari

Enam suku yang berada di Kabupaten Nabire meminta agar bagian pesisir Nabire menjadi bagian dari Saireri. Ketua Umum Saireri Papua, Gifli Buinei menyampaikan enam suku ini meminta agar Kabupaten Nabire tetap menjadi bagian dari wilayah adat Saireri (Cenderawasih Pos).

23 Februari

Pihak MRP menilai bahwa para bupati dan walikota terlalu dini berbicara tentang pemekaran DOB dan lupa memperhatikan kinerja masing-masing di wilayahnya. Menurut Ketua MRP, Timotius Murib, sebaiknya para pejabat lebih memikirkan bagaimana menjalankan tugas untuk perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (Selasa, 22/2) (Cenderawasih Pos).

01 Maret

Anggota DPR RI asal Papua, Sulaeman L. Hamzah pada saat melakukan kunjungannya di Merauke mengatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua akan dilakukan pada tahun 2022. “Menurut target dari pemerintah dan DPR RI, kita berusaha menyelesaikannya sampai akhir 2022. Selanjutnya, pemerintah

akan mengatur penempatan karateker Gubernur. Tugas kami di DPR RI hanya membahas sampai diundangkan atau ketok palu. Artinya, kalau sudah diketok, tugas DPR RI sudah selesai,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

09 Maret

- Meskipun Kota Jayapura diguyur hujan, demonstrasi penolakan DOB tetap berlangsung di sejumlah titik yaitu di Tanah Hitam, Gapura Kampus Uncen, Expo Waena, Perumnas II, dan Perumnas III Waena. Sejak pukul 08.00 WIT. “Aksi yang dilakukan ini murni dari mahasiswa dan masyarakat di Papua, untuk menolak rencana DOB di Papua. Kami tidak butuh pemekaran. Kita lihat sendiri, selama ini ada UU Otsus tetapi OAP jadi minoritas. Otsus Papua sudah gagal. Pemekaran merupakan kepentingan kapitalis yang didukung pembangunan pos militer dan berujung pada terjadinya pelanggaran HAM di Papua,” tegas koordinator aksi demonstrasi, Alfa Hisage pada Selasa, 8 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, Jhon Gobay menemui massa pendemo tolak DOB di Perumnas III, Waena dalam kondisi hujan. Ia menjelaskan bahwa para pendemo menyampaikan terkait penolakan DOB dan meminta DPR Papua membuka dialog terbuka dengan mengundang elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, kemudian ditindaklanjuti ke Jakarta. “Saya ingatkan pemerintah pusat, jangan ciptakan konflik di Papua. Kita punya memori soal konflik di Timika yang bicara soal pemekaran. Kami tidak mau masyarakat berbenturan dengan aparat dan menjadi korban, sementara aparat sendiri bukan pihak yang membuat keputusan,” tegas Jhon Gobay pada Selasa, 8 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

10 Maret

- Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menerima anggota DPD RI asal Papua, Yoris Yaweray di kantor DPRP pada Rabu, 9 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut, pihaknya telah menyerahkan aspirasi penolakan DOB kepada Yoris Yaweray. Ia berharap pemerintah pusat jangan mengambil kesimpulan untuk memekarkan Papua karena melakukan pertemuan dengan satu kelompok atau satu dua tokoh saja, tetapi harus juga mendengarkan suara yang menolak pemekaran DOB. “Kita tidak bisa hanya ketemu satu kelompok dan buat keputusan. Kalau konflik terjadi karena keputusan pemerintah pusat, silakan pemerintah pusat menyelesaikannya. Jangan kami yang menjadi bulan-bulanan. Jangan ketika konflik justru mengirim pasukan, akhirnya masyarakat menjadi korban. Ingat Papua ini bukan tempat anjing buruan! Coba buat orang Papua mencintai negara ini dan jangan buat kegagalan,” tegas Yunus Wonda pada Rabu, 9 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Menyikapi aksi demonstrasi penolakan DOB di tanah Papua, yang dilakukan di Jayapura, Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina mengatakan, Papua Selatan yang terdiri atas 4 kabupaten tetap konsisten memperjuangkan DOB Provinsi Papua Selatan. Ia menyampaikan bahwa di masing-masing wilayah adat memiliki kepentingan, pola pikir, dan konsep berpikir yang berbeda. “Saya harap kita di Papua Selatan terus sosialisasikan tentang DOB. Kita di 4 kabupaten harus tetap konsisten memberitakan dan mensosialisasikan hal yang benar tentang DOB kepada masyarakat di Papua Selatan,” tuturnya pada Rabu, 9 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

- Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (ABPTP) melakukan pertemuan dengan Ketua Panja RUU Provinsi Papua Pegunungan, Willi Aditia di Gedung DPR RI pada Rabu, 9 Maret 2022. Ketua ABPTP, Befa Yigibalom mengatakan tujuan pertemuan tersebut untuk menanyakan proses perkembangan RUU Provinsi Papua Pegunungan. “Dari hasil pertemuan kami pada tanggal 15 Maret 2022, ada sidang paripurna dan akan dilanjutkan dengan persidangan-persidangan di DPR RI. Dalam tahun ini, provinsi akan ditetapkan. Provinsi Papua Pegunungan akan lahir bersama dengan provinsi Papua lainnya. Negara kasih pemekaran dengan tujuan apa pun, sebagai warga negara dan intelektual, kita harus terima,” tegas Befa Yigibalom di Jakarta pada Rabu, 9 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Maret

Ribuan warga yang berasal dari 8 kabupaten di wilayah Lapago menggelar demonstrasi menolak pemekaran DOB Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis, 10 Maret 2022 di Wamena. Juru bicara aksi, Dano Tabuni menegaskan bahwa pemekaran Papua bukan hal yang mendesak. Orang Papua perlu hidup damai di negerinya. Maka, hentikan pemekaran Papua. Ia menegaskan kalau pemerintah tidak mengindahkan tuntutan rakyat Papua, maka pihaknya akan menutup semua aktivitas kantor pemerintah di wilayah Lapago. “Masyarakat membutuhkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, bukan pemekaran, karena pemekaran membawa masyarakat ke genoside. Kita lihat pemekaran kabupaten saja membawa konflik. Karena itu, pemerintah benahi sistem penyelenggaraan pemerintahan bukan pemekaran,” tegas Dano Tabui di hadapan

anggota DPRD Jayawijaya di Wamena pada Kamis, 10 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

12 Maret

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw menegaskan pemekaran DOB merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya menjawab persoalan dasar Papua, mulai dari keterlambatan pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menambahkan bahwa pemekaran merupakan solusi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan Papua berdasarkan wilayah adat. “Forum ini hanya mau menegaskan bahwa DOB itu penting. Penolakan itu biasa saja, itu dinamika, kenapa kita harus terpengaruh. Ada yang suka dan tidak suka itu biasa, kenapa kita harus terpengaruh,” tegas Mathius Awoitauw pada Jumat, 11 Maret 2022. Pada kesempatan itu, tokoh adat sewilayah adat Tabi mengeluarkan empat poin dukungan terhadap DOB di tanah Papua yaitu, 1) mendukung DOB di Provinsi Papua meliputi DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan; 2) Meminta Gubernur Papua, DPRP, MRP, untuk merespon dan menangani dinamika politik yang berkembang di tanah Papua; 3) Mendorong pemerintah pusat untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua; 4) Meminta kepada Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi untuk melakukan perlindungan dan konsolidasi terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Tabi (Cenderawasih Pos).

13 Maret

Tokoh Adat Biak, Yosef Korwa didampingi Ketua LMA Biak, David Rumansara dan Ketua KNPI Biak Numfor, Jimmy Krobo menyerahkan aspirasi pembentukan DOB Provinsi

Papua Utara (Wilayah Adat Saireri) kepada anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun di Biak pada Sabtu, 12 Maret 2022. Ia menjelaskan bahwa aspirasi itu sudah diserahkan ke sejumlah pihak untuk mendorong pembentukan Provinsi Papua Utara, agar bisa mengurus wilayah adatnya sendiri. (Cenderawasih Pos).

15 Maret

- Masyarakat Papua Selatan yang tergabung dalam masyarakat adat Animha yang meliputi Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi melakukan demonstrasi damai mulai dari kantor Sekretaris Provinsi Papua Selatan, Jalan Ahmad Yani menuju kantor DPRD Merauke untuk mendukung pembentukan Provinsi Papua Selatan pada Senin, 14 Maret 2022. “Kami mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke bahwa ini bukti kerinduan kami. Ini sebuah rintihan dan harapan kami yang telah lama kami nantikan. Kalau ada wilayah adat lain menolak silakan, tapi wilayah adat Animha sangat mendukung pemekaran DOB,” tegas koordinator aksi, Paskalis Imadawa (Cenderawasih Pos).
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Salmon Wantik mengatakan negara melakukan tindakan represif, pembungkaman, penghadangan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan DOB. “Jangan lagi ada konflik di antara masyarakat yang pro kontra DOB, karena kepentingan penjabat Papua. Kami lihat DOB memiliki dampak buruk bagi OAP dan tidak ada dampak baiknya,” tutur Salmon Wantik. Sementara itu, anggota DPD RI, Elina Murib yang menerima aspirasi mahasiswa mengatakan bahwa penolakan DOB sudah lama. “Saya

bilang pemekaran DOB hentikan dulu, selesaikan kasus pelanggaran HAM dan tarik polisi dan tentara,” tegasnya di Waena pada Senin, 14 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

16 Maret

Aksi demonstrasi penolakan pemekaran DOB di tanah Papua, yang berlangsung di Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo pada Selasa, 15 Maret 2022 berujung ricuh. Empat orang tertembak, dua diantaranya meninggal dunia yaitu Yakob Del (30 tahun, luka tembak di bawah ketiak kanan) dan Erson Weipsa (22 tahun, luka tembak di punggung kiri); sedangkan dua orang yang mengalami luka tembak yaitu Itos Itlay (luka tembak di paha kiri) dan Lucky Kobak (luka tembak di paha kanan). Selain itu, ada pula anggota polisi yang mengalami luka-luka yaitu Briptu Muhammad Ali. “Demo dilakukan mulai pukul 10.00 WIT. Pada mulanya berjalan lancar, tetapi setelah orasi terjadi gesekan sehingga massa membakar kantor Dinas Kominfo dan beberapa ruko, termasuk rumah warga di sekitar Dekai. Penembakan terjadi karena aparat hendak menghentikan pembakaran, tetapi ada penyerangan dari kelompok pendemo sehingga aparat mengeluarkan tembakan,” tutur Kapolda Papua, Iren Pol Mathius D. Fakhiri pada Selasa, 15 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

17 Maret

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk mengundang semua perwakilan dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua, bupati, DPRD, tokoh gereja, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa untuk duduk bicara tentang keinginan masyarakat terkait pembentukan DOB di Provinsi Papua. “Kita duduk dan kita tanya rakyat mau apa? Dari sini, kita tahu apa alasan rakyat menolak atau menerima

Daerah Otonomi Baru. Ini akan terlihat kalau kita duduk bersama. Kalau masyarakat tolak DOB mereka pikir provinsi datang mereka bisa dapat tempat atau tidak. Masyarakat butuh pembangunan, tetapi selama ini tidak diisi oleh OAP,” tutur Bupati Ricky Ham Pagawak pada Rabu, 16 Maret 2022. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi juga meminta pemerintah Provinsi Papua segera melakukan diskusi terbuka untuk membahas pembentukan DOB di tanah Papua guna meredam aksi protes penolakan DOB karena masyarakat menilai mereka tak pernah dimintai pendapat. Ia mengatakan peristiwa demonstrasi penolakan DOB di Yahukimo akhirnya jatuh korban jiwa. “Ada yang pro dan ada yang kontra mengenai DOB dan respon masing-masing kelompok juga berbeda. Ada yang bilang baik untuk kepentingan masyarakat. Ada yang bilang ini hanya kepentingan elit politik untuk mencari kekuasaan dan jabatan,” tutur Yonas Nusi pada Rabu, 16 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

18 Maret

Menyikapi pro kontra pemekaran DOB di tanah Papua, akademisi Universitas Cenderawasih, Prof. Batlazar Kambuaya mengatakan pemekaran perlu dikaji dengan baik. Jika pemekaran menjadi kebutuhan untuk mengatasi masalah sosial di Papua, maka kita perlu mendorongnya, tetapi kalau tidak menjadi kebutuhan, maka tidak perlu didorong. “Dari provinsi hingga ke kabupaten, pembuat keputusan itu Orang Asli Papua. Mulai dari menempatkan orang hingga mengangkat orang menjadi pegawai, lalu kita mau salahkan siapa? Kita perlu evaluasi soal pemekaran ini. Kalau pemekaran untuk menyelesaikan persoalan Papua, maka kita lalukan, tetapi kalau tidak maka pemekaran tidak perlu,” tegas Prof. Batlazar Kambuaya pada Kamis, 17 Maret 2022 di Abepura (Cenderawasih Pos).

19 Maret

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, MRP sebagai lembaga representasi kultur OAP tetap bersikap bahwa pemekaran DOB di tanah Papua harus ditunda, bukan dibatalkan. “Penundaan pemekaran DOB maksudnya kita benahi dulu semua regulasi Otsus yang ada saat ini. Kemudian, regulasi lain yang berbenturan dengan Otsus, itu yang kita perbaiki dan semua pihak harus terlibat. Kalau sudah bagus baru kita bicara pemekaran di kemudian hari,” tutur Timotius Murib di Jayapura pada Kamis, 17 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

21 Maret

- Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, dirinya dan tiga Bupati lainnya di Papua Selatan diundang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk membicarakan pemekaran Provinsi Papua Selatan. “Pak Mendagri mengundang kami kepala daerah untuk pembahasan akhir tentang persiapan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Persyaratan untuk Provinsi Papua Selatan sudah final. Tersisa beberapa hal yang harus dikomunikasikan secara tertulis dan tidak tertulis. Setelah pembicaraan dengan Mendagri, kami akan diskusikan dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda),” tutur Romanus Mbaraka pada Sabtu, 19 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Tokoh pemuda Tabi, Yohanes Manggo mengatakan, masyarakat Tabi mendukung penuh dan konsisten memperjuangkan pemekaran DOB sampai terwujud. “Pemekaran DOB sangat diperlukan di Papua karena kondisi geografis Papua sangat luas. Angka pengangguran masih tinggi. Kesejahteraan masyarakat belum merata. Pelayanan pendidikan dan Kesehatan masih minim.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan pemekaran DOB di tanah Papua. Karena itu, kami masyarakat Tabi mendorong pemekaran DOB dan memperjuangkan hak kesulungan atas wilayah kami,” tutur Yohanes Manggo pada Sabtu, 19 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

22 Maret

Terkait pro kontra pemekaran DOB di tanah Papua, tokoh Papua Selatan, Johaness Gluba Gebze mengatakan bahwa jika ada pihak yang menolak DOB merupakan hak dari daerah dan wilayah adatnya masing-masing, karena tanah Papua terbagi dalam 7 wilayah adat dan di Provinsi Papua ada 5 wilayah adat. “Kalau ada yang menolak provinsi itu hak mereka, karena masing-masing memiliki otoritas atas wilayah adatnya. Misalnya, mereka mau tolak Pegunungan Tengah, mereka mau tolak Papua Barat Daya, silakan. Tetapi, kami di Provinsi Papua Selatan tidak, karena kami bukan jadi subordinasi dari suku manapun. Kita otonom masing-masing,” tegas Gluba Gebze di Merauke pada Senin, 21 Maret 2022. Sementara itu, Dewan Gereja Papua, dalam jumpa pers di Jayapura, pada Senin, 21 Maret 2022, melalui anggota Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giay mengatakan pembentukan provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan politik pendudukan dan penguasaan tanah Papua, yang juga tampak melalui pembangunan jalan trans Papua, dermaga, bandara, rencana jalur kereta, penguasaan Sumber Daya Alam, serta penetapan konsensi dan pemberian perizinan untuk eksploitasi Sumber Daya Alam (Cenderawasih Pos).

25 Maret

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Cahyo Pamungkas dalam diskusi virtual pada Kamis, 24 Maret

2022 mengatakan pembentukan DOB tidak dikehendaki masyarakat Papua. Ia mengatakan dalam pertemuannya dengan dewan adat, yang dominan adalah suara penolakan pembentukan DOB. Alasannya, ada ancaman depopulasi OAP, kekhawatiran menguatnya militer karena bertambahnya markas-markas di daerah baru nanti. “Pemekaran saat ini lebih pada kepentingan pusat. Sejumlah penelitian BRIN tidak ada yang merekomendasikan pemekaran DOB di tanah Papua sebagai penyelesaian konflik di Papua. Karena itu, BRIN merekomendasikan dialog, bukan hanya dengan pihak yang pro pembentukan DOB, tapi juga dengan pihak yang kontra terhadap pembentukan DOB di tanah Papua,” tuturnya pada Kamis, 24 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

28 Maret

Asosiasi Bupati Wilayah Saireri mendatangi Badan Legislasi DPR RI untuk membawa aspirasi pembentukan DOB Kepulauan Papua Utara yang diserahkan oleh Ketua Asosiasi Bupati wilayah Saireri, yang juga Bupati Biak, Herry Ario Naap yang diterima langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Andi Suparman. “Kami tidak datang sendirian, melainkan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan sejumlah komponen masyarakat lainnya. Mereka meminta supaya Kepulauan Papua Utara menjadi Daerah Otonomi Baru dengan harapan ada percepatan pembangunan,” ungkap Herry Ario Naap pada Senin, 28 Maret 2022 di Jakarta (Cenderawasih Pos).

29 Maret

Ketua MRP, Timotius Murib meminta pemerintah Indonesia dan DPR RI supaya tidak melakukan pemekaran di Provinsi Papua lantaran belum ada kajian akademik yang mengatakan bahwa Papua membutuhkan pemekaran atau

pembentukan DOB. “Saat ini masih berlaku masa moratorium pemekaran daerah. Selain itu, indikator dilakukannya pemekaran provinsi juga belum ada sama sekali, baik dari kajian akademis maupun dampak positif di masyarakat, maka kami MRP menolak pemekaran saat ini,” tutur Timotius Murib pada Selasa, 29 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

01 April

- Demonstrasi penolakan DOB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tumaritis, Kabupaten Nabire pada Kamis, 31 Maret 2022 berakhir rusuh lantaran massa dan aparat kepolisian terlibat baku pukul dan saling menyerang. Polisi melepaskan tembakan. Kerusuhan ini juga menyebabkan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil secara brutal, penganiayaan, perampasan kendaraan dan handphone milik warga. “Ada dua korban warga berinisial U (40 tahun) mengalami luka di sebelah pipi bagian kanan dan kendaraan motor miliknya dirampas massa. Sedangkan korban PIS (32 tahun) mengalami luka robek di bagian belakang dan mendapatkan 5 jahitan, bibir atas memar dan bengkak,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa pada Kamis, 31 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Masyarakat Papua Selatan yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Adat Marind melakukan demonstrasi ke kantor DPRD Merauke pada Kamis, 31 Maret 2022. Massa berkumpul di Mangga Dua, Kelurahan Kelapa Lima dan melakukan perjalanan ke kantor DPRD Merauke, di Jalan Brawijaya. Akan tetapi polisi menghadang dan membubarkan massa di Lingkaran Brawijaya. “Kemarin baru mereka ajukan izin kegiatan hari ini maka kami tidak izinkan karena tidak sesuai UU

yang mengharuskan tiga hari sebelum kegiatan. Tadi, kami arahkan untuk perwakilan saja, tapi mereka nekat lakukan *long march*. Kita tawarkan juga audiens tetapi mereka bubar,” tutur Kabag Ops Polres Merauke, Kompol Vicky Pandu pada Kamis, 31 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

02 April

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, yang meliputi lingkaran Abepura, Uncen Abepura dan pertigaan Buper, Waena, pada Jumat, 1 April 2022, pukul 09.00-16.30 WIT. Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw hadir di lingkaran Abepura, dan menemui massa pada pukul 13.50 WIT. Sedangkan Kapolda Papua, Mathius D. Fakhiri tiba di lingkaran Abepura pukul 14.05 untuk memantau jalannya aksi demo tolak DOB. “DOB hanya akan menyusahkan OAP karena banyak hal belum disiapkan. Terlihat sekali DOB ini terlalu dipaksakan. DOB untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau hanya demi kepentingan elit?” tanya Musa Kaleb dalam orasinya. Sementara itu, Ketua DPRP, Johny Banua Rouw mengatakan pihaknya siap menerima aspirasi masyarakat tetapi bisa melalui perwakilan. “Aspirasi yang diberikan dan kami terima ini, kami akan teruskan,” tutur Johny Banua Rouw (Cenderawasih Pos).

06 April

- Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terhadap demo penolakan DOB di Yahukimo yang berujung pada tertembaknya dua orang peserta demo pada tanggal 15 Maret 2022. “Dari hasil investigasi, kami menemukan dua orang tewas ditembak polisi dan lima orang mengalami luka-

luka. Selain itu, ada 10 unit ruko dan 1 kantor pemerintahan dibakar,” tutur Frits Ramandey (Cenderawasih Pos).

- Polemik seputar pemekaran DOB di tanah Papua masih belum reda. Anggota DPR Papua, John Gobai mengatakan DPR Papua, DPR RI, dan Baleg DPR RI harus membuka diri terhadap aspirasi penolakan pemekaran. “Selama ini, kami di DPR Papua menerima aspirasi di jalan-jalan, di bawah terik matahari, sementara mereka di DPR RI enak saja membahas pemekaran dalam ruang ber-AC. Ironis memang, karena hanya pihak yang mendorong pemekaran saja yang diterima, sedangkan aspirasi penolakan pemekaran tidak diterima,” tuturnya. (Cenderawasih Pos).

11 April

- Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan bahwa anggota Badan Legislasi (Baleg), Fraksi maupun anggota DPR RI utusan Papua tidak mendalami persoalan Papua dalam pengesahan tiga DOB di Papua. “Kami tidak bicara pemerintah tapi DPR RI. Mereka turun ke Papua kesannya hanya simbolis saja tapi kembali tetap mendorong pemekaran dan tidak melihat kepentingan orang Papua secara keseluruhan yang akhirnya membuat orang Papua tersisih dan menjadi korban,” tegasnya pada 8 April 2022. Yunus juga mengatakan bahwa permasalahan Papua erat kaitannya dengan ideologi. “Harusnya pusat menyelesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan atau pemekaran. Papua bukan soal makan minum tapi soal ideologi. Hari ini pertumpahan darah terus terjadi tapi malah dikasih pemekaran. *Grand design* pemerintah salah dalam memetakan persoalan Papua. Papua tidak akan aman sebab rakyat tidak pernah meminta

pemekaran,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

- Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo menegaskan bahwa aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah berlangsung sejak 20 tahun silam, tepatnya tahun 2002, yang kemudian dideklarasikan pada tahun 2007. Sehubungan dengan adanya usulan penggunaan Provinsi sesuai nama wilayah adat, yaitu Provinsi Animha oleh Baleg DPR RI, Thomas menegaskan bahwa sejak awal perjuangan rakyat Papua Selatan menggunakan nama Provinsi Papua Selatan sehingga tidak bisa diubah lagi. Selain itu, secara antropologis, Animha hanya merujuk pada suku Marind saja. “Animha itu berasal dari bahasa Marind dan merujuk spesifik bagaimana orang Marind menyebut diri mereka sebagai manusia sejati dan sempurna. Manusia yang tinggi derajatnya. Di luar orang Marind, yang secara antropologis, orang Marind menyebut suku-suku di luar orang Marind itu sebagai suku atau bangsa yang lebih rendah, yang tidak setara dengan mereka sehingga suku-suku lainnya bisa dibunuh dan sebagainya. Itu sesuai penelitian antropolog, Pastor Hendrikus Georsen MSC yang dilakukan sekitar tahun 1920, sehingga kami menolak menggunakan nama itu,” tegasnya pada Jumat, 8 April 2022. Demikian halnya, Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina mengatakan bahwa nama Provinsi Papua Selatan sudah final. “Saya pikir nama Provinsi Papua Selatan itu sudah final. Sejak diperjuangkan nama itu yang diusung dan menjadi kesepakatan bersama dari empat kabupaten yang menjadi cakupan dari Provinsi Papua selatan ini,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

14 April

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah menyampaikan aspirasi penolakan DOB di Provinsi Papua kepada Baleg DPR-RI di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki pada 13 April 2022 di Jakarta. “Kami menghargai rakyat Papua dari beberapa wilayah adat, dengan konsistens menyampaikan kepada DPRP terkait penolakan pemekaran. Kami membentuk Bamus dan meneruskan aspirasi utuh langsung ke DPR RI,” katanya (Cenderawasih Pos).

16 April

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay meminta Presiden Jokowi memerintahkan DPR RI untuk membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. “Ketua DPR RI segera perintahkan Panja batalkan pembahasan RUU pemekaran provinsi-provinsi di Papua sebab perumusannya tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua sesuai perintah pasal 72 (ayat 2) dan pasal 76 (ayat 5) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 junto pasal 18 huruf h dan UU Nomor 15 Tahun 2019,” tegas Gobay di Jayapura pada Rabu, 13 April 2022 (Cenderawasih Pos).

19 April

Menyikapi pro kontra pemekaran DOB di tanah Papua, Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Petrus Bonyadone mengatakan ada pro kontra tentang pemekaran, tetapi kalau Tuhan kehendaki, maka pemekaran DOB di tanah Papua akan terwujud sehingga ada pemerataan kesejahteraan di tanah Papua. “Melalui pemekaran, maka rentang kendali yang selama ini jauh menjadi dekat; daerah-daerah terisolir bisa terbuka. Setiap

provinsi akan membangun wilayah adatnya masing-masing. Para pendahulu sudah berpikir tentang pemekaran menurut wilayah adat. Pihak legislatif dan eksekutif juga menghendaki pemekaran, supaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat sampai ke wilayah terisolir,” tutur Pdt. Petrus Bonyadone pada Minggu, 17 April 2022 (Cenderawasih Pos).

19 April

Anggota DPR Papua, John NR Gobay dan tokoh masyarakat Intan Jaya, Bartol Mirip pada tanggal 14 April 2022 melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doly Kurniawan dan anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun. Selain membahas kasus di Intan Jaya, dirinya meminta agar pembahasan pemekaran DOB di tanah Papua melibatkan DPR Papua sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat Papua. “Saya sampaikan agar komisi II DPR RI mengundang resmi DPRP, karena kami sudah menampung aspirasi masyarakat Papua yang menolak pemekaran dan yang mengusulkan pemekaran. Kami juga menyampaikan perlu ada jalan keluar untuk pro kontra pemekaran di Provinsi Papua, pemekaran kabupaten harus dilakukan lebih dahulu,” tutur John NR Gobay pada Senin, 18 April 2022 (Cenderawasih Pos).

21 April

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menerima Ketua MRP, Matius Murib, didampingi oleh Wakil Ketua MRP, Yoel Luis Mulait dan staf serta Amnesty Internasional, Usman Hamid di Jakarta pada Selasa, 19 April 2022. “Kami mendukung kebijakan pemerintah tentang moratorium DOB. Kami berharap para petinggi di

Jakarta bisa memperhatikan aspirasi OAP,” tutur Timotius Murib. Menanggapi hal tersebut, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa ia setuju apabila pemekaran DOB dilakukan atas pertimbangan dan persetujuan dengan MRP sambil menunggu keputusan judicial review UU Otsus yang dilayangkan oleh MRP ke Mahkamah Konstitusi (Cenderawasih Pos).

22-23 April

Ketua MRP, Timotius Murib, Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta pada 15 April 2022. “MRP berharap kebijaksanaan dari Jokowi terkait hal tersebut. Saat ini, MRP meminta pembentukan DOB ditunda sampai ada putusan final dari Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa uji materiil UU Otsus Papua hasil amandemen kedua,” tegas Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait (Koran Jubi Edisi 22-23 April).

22 April

- Mantan tokoh Papua Merdeka, Nicolas Meset mengatakan bahwa pemekaran Papua bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua. Ia mengatakan pemekaran di Papua sebagai berkat Tuhan. Dengan pemekaran, maka setiap DOB memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan menyejahterakan daerahnya masing-masing. “Pemekaran provinsi sesuai wilayah adat, maka semua punya tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemerintah sudah kasih sinyal pemekaran, persiapkan diri, jangan harap seperti bintang jatuh dari langit atau bintang kejora turun dari langit. Sekarang, kita kerja untuk negeri

sendiri dan menjadi tuan di negeri sendiri,” tutur Nicolas Meset pada Rabu, 20 April 2022 (Cenderawasih Pos).

- Ketua MPR, Timotius Murib dan timnya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra Jakarta pada Rabu, 20 April 2022. Ia menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi OAP sesuai tugas dan wewenang MRP. “MRP telah menerima aspirasi masyarakat Orang Asli Papua. Sebagian besar menolak pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi karena dilakukan tanpa persetujuan MRP dan DPRP. Kami sangat berharap adanya kebijaksanaan para pimpinan di partai politik dan para menteri terkait agar kebijakan pemekaran DOB dapat ditunda,” tutur Matius Murib di Kompleks Widya Chandra Jakarta pada Rabu, 20 April 2022 (Cenderawasih Pos).

26 April

Presiden RI, Joko Widodo menerima delegasi pimpinan MRP Provinsi Papua dan MRP Provinsi Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, 25 April 2022. Pada pertemuan itu, Ketua MRP provinsi Papua menyampaikan dua hal, yaitu *pertama*, MRP menyesalkan perubahan UU yang tidak melalui usulan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 UU Otsus. Substansinya merugikan hak-hak Orang Asli Papua sehingga MRP mengajukan uji materi ke MK. *Kedua*, MRP menyesalkan pembentukan DOB yang tidak melibatkan MRP sesuai ketentuan pasal 76 UU Otsus yang menyatakan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP. Menanggapi pernyataan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menerima laporan bahwa proses

perubahan kedua UU Otsus telah melibatkan DPR-RI, DPD-RI, DPRP, dan MRP. Tetapi, kalau ada materi yang masih diuji di MK pihaknya akan menghormatinya. Sedangkan terkait pemekaran, Jokowi mengatakan bahwa pada saat dirinya berkunjung ke daerah selalu ada tuntutan untuk pemekaran daerah. Pemerintah juga memperhitungkan kondisi fiskal keuangan negara termasuk potensi APBD daerah. Ia berharap apabila ada hal-hal yang belum baik, bisa berkoordinasi dengan para menteri dan jika tidak puas, dirinya tetap membuka diri (Cenderawasih Pos).

28 April

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengatakan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat merupakan opsi kebijakan yang realistis, solutif, dan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. “Sesungguhnya pemekaran daerah menjadi provinsi di Papua dimaksudkan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Papua ke arah yang lebih baik,” tuturnya di Jakarta pada Rabu, 27 April 2022 (Cenderawasih Pos).

29 April

Anggota Komisi II DPR-RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II terbuka terhadap berbagai masukan berbagai pihak termasuk dari MRP terkait pembahasan RUU provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. “Kami membuka diri dengan seluruh elemen stakeholder dari Papua, termasuk MRP yang beberapa waktu lalu meminta agar ketiga RUU tersebut ditunda pembahasannya sampai ada

keputusan MK terkait uji materi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua,” tutur Rifqi di Jakarta pada 28 April 2022 (Cenderawasih Pos).

30 April

Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw mengatakan, suara penolakan DOB oleh MRP tidak mewakili masyarakat Papua. Ia minta MRP jangan bikin “kabur air” mengenai pemekaran DOB karena masyarakat Papua menghendaki pemekaran DOB. “MRP tidak menyaring informasi, hanya memaksakan kehendaknya dan itu hanya sekelompok orang saja. Jangan hanya sepihak menerima yang lain dan menolak yang lain, makanya ada suara dari Tabi, MRP dibubarkan saja. Selama 20 tahun, MRP tidak melakukan fungsi kontrol, memanggil bupati, walikota, gubernur, untuk menanyakan implementasi pasal-pasal di dalam UU Otsus,” tegas Matius Awoitauw, pada Jumat, 29 April 2022 di Sentani (Cenderawasih Pos).

07 Mei

Masyarakat adat Tabi melalui Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto menegaskan bahwa dalam pemekaran DOB pemerintah pusat harus memahami kultur, budaya, dan adat-istiadat Papua. “Kami mendukung penuh rencana pemerintah pusat terhadap pelaksanaan DOB yang meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,” demikian bunyi pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat adat Tabi, di Sentani pada Rabu 4 Mei 2022. Sementara itu, Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw mengatakan masyarakat perlu mendukung DOB karena melalui DOB setiap daerah dapat menjalankan roda pemerintahannya

dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya serta dapat menjangkau wilayah terisolir (Cenderawasih Pos).

09 Mei

Tokoh Papua, Paskalis Kosay menegaskan apabila pemerintah pusat memaksakan pemekaran DOB di tanah Papua, maka perlu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjamin perlindungan hak Orang Asli Papua. Ia menjelaskan bahwa pemekaran DOB di Papua harus bermuara pada proteksi dan pemberdayaan OAP sekaligus harus membatasi arus migrasi penduduk non-Papua ke Papua, karena jumlah OAP semakin menurun dan SDM OAP belum siap bersaing. “Akibat pemekaran, peluang kerja akan diisi oleh mereka yang punya SDM lebih siap yaitu non-Papua. OAP akan tersisih. Bisa jadi pemerintah akan dituduh hendak memusnahkan OAP dan isu politik Papua akan terus bergema di Pasifik dan menimbulkan dukungan dari Melanesia untuk Papua,” tegas Paskalis Kosay di Abepura pada Sabtu, 8 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

10 Mei

- Menyikapi adanya pro kontra pemekaran DOB di tanah Papua, Bupati Asmat, Elisa Kambu menegaskan bahwa untuk Papua Selatan sudah final. “Dengan adanya pemekaran, setiap wilayah bisa mengatur dirinya. Kita bisa berlomba-lomba untuk membangun daerah kita masing-masing. Kalau di Papua Selatan setiap stakeholder menerima pemekaran karena sudah diperjuangkan sejak lama,” tutur Elisa Kambu pada Senin, 9 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).
- Menyikapi pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, bahwa 82% rakyat Papua mendukung pemekaran DOB di tanah Papua, Majelis Rakyat Papua akan menulis surat

resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopulhukam untuk meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Ketua MRP, Matius Murib mengatakan SDM OAP tidak siap menghadapi pemekaran. Selain itu, tidak ada partisipasi OAP dalam pemekaran Papua. Ia menjelaskan bahwa Otsus selama 20 tahun harus dievaluasi secara total, tetapi dalam kenyataannya UU Otsus direvisi tahun 2021 tanpa evaluasi dan konsultasi dengan lembaga negara yang ada di Papua. Demikian halnya rencana DOB juga diteruskan oleh pemerintah pusat secara sepihak. Tomotius Murib juga membeberakan empat alasan rakyat Papua menolak DOB di tanah Papua. “Ada empat hal yang bikin OAP tolak DOB yaitu *pertama*, DOB masih dalam status moratorium oleh pemerintah pusat; *kedua*, DOB provinsi lain dan daerah-daerah kabupaten di Papua tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan membebani APBN; *ketiga*, SDM OAP hampir tidak ada atau sedikit; *keempat*, aspirasi DOB bukan berasal dari masyarakat akar rumput dan MRP sesuai UU,” tegas tegas Timotius Murib pada Sabtu, 9 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Mei

Masyarakat sipil Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi demonstrasi serentak di seluruh tanah Papua menolak pemekaran DOB, menolak Otsus jilid II, dan menuntut refrendum. Aksi tersebut dibubarkan secara paksa oleh aparat gabungan militer TNI-Polri, baik yang dilaksanakan di kota Jayapura, Sentani, Wamena, maupun Manokwari. Bahkan di Jayapura, polisi menangkap koordinator aksi PRP, Jefry Wenda dan enam orang lainnya yaitu Ones Suhuniap, Onikson Balingga, Mery Itlay, Maxi Manga, Iman Kogoya, dan Abi Douw. Ketua DPR

Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan aksi penolakan DOB dan Otsus jilid II terus berlangsung dan telah diterima oleh DPRP. Jadi kalau pemekaran dipaksakan maka harus ada proteksi dan afirmasi khusus bagi OAP. “Kami sudah terima aspirasi dan teruskan ke DPR RI, karena pembahasan DOB melalui hak inisiatif DPR RI. Kalau pemekaran DOB di Papua dipaksakan, maka harus ada proteksi yang lebih kepada OAP di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat,” tegasnya di Wamena pada Selasa, 10 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

12 Mei

- Pemerintah Kabupaten Merauke menyambut kehadiran Provinsi Papua Selatan dengan menyerahkan Kantor Bupati Merauke sebagai awal kantor Gubernur Provinsi Papua. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan sertifikat kantor Bupati Merauke sebagai awal berdirinya kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan. “Sertifikat kantor Bupati ini, saya sudah serahkan sebagai awal berdirinya kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan. Bapak/ibu semua perlu ketahui hal ini, karena menjadi syarat pendirian Provinsi Papua Selatan. Demikian halnya, kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Selatan telah menyediakan anggaran di APBD untuk operasional Provinsi Papua Selatan,” tutur Romanus Mbaraka di Merauke pada Selasa, 10 Mei 2022. Sementara itu, Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC menegaskan bahwa sesungguhnya pemekaran Provinsi Papua Selatan adalah untuk kemanusiaan. Maka, kalau pemekaran hanya bertujuan menghancurkan OAP harus ditolak, tetapi kalau dengan pemekaran membuat OAP bertumbuh dan berkembang, maka harus didukung. “Saya rasa dengan pemekaran orang Papua Selatan

akan bertumbuh dan berkembang. Jadi saya setuju. Saya Kembali garisbawahi poin kemanusiaannya, supaya di masa mendatang, kita janganlah hanya sibuk dengan kekuasaan dan jabatan, tetapi manusianya hancur,” tegas Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC (Cenderawasih Pos).

- Masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) konsisten menolak UU Otsus, DOB, dan meminta referendum. Aksi demonstrasi PRP Kembali dilakukan pada Rabu, 10 Mei 2022. Pada hari yang sama polisi menangkap juru bicara PRP, Jefry Wenda di kantor Kontras Padang Bulan, Jayapura. Kemudian, pada Kamis, 11 Mei 2022, juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda dibebaskan oleh penyidik Polresta Jayapura. “Jefry Wenda dibebaskan demi hukum,” tutur Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay. Sementara itu, Koordinator Kontras Papua, Samuel Awom mengatakan aparat keamanan melakukan tindakan sewenang-wenang memasuki kantor Kontras pada Rabu, 10 Mei 2022. Mereka menyita peralatan kantor berupa 1 unit CPU, laptop, printer, handy talk, dan sejumlah buku serta menangkap para aktivis. “Polisi beralasan aksi demonstrasi pada 10 Mei 2022 tidak mendapat izin dari kepolisian. Maka, polisi tangkap tujuh orang di kantor Kontras yaitu Jefry Wenda, Ones Suhuniap, Omikzon Balingga, Max Mangga, Ester Haluk, Iman Kogoya Abbi Douw,” tutur Samuel Awom pada Rabu, 11 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

13 Mei

Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina mengatakan pihaknya mendukung keputusan Bupati Romanus Mbaraka untuk memberikan kantor Bupati Merauke sebagai kantor sementara Provinsi Papua Selatan. “Kita siap memfasilitasi

sarana dan prasarana Provinsi Papua Selatan, sehingga pada tahun 2024 dapat dilaksanakan pemilihan Gubernur definitif dan anggota DPR Provinsi Papua Selatan dengan baik,” tutur Benjamin Latumahina di Merauke pada Kamis, 12 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

18 Mei

- Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan Deiyai menyerahkan aspirasi penolakan DOB kepada DPR Papua pada Selasa, 17 Mei 2022. Aspirasi ini diterima oleh Wakil Ketua I DPRD, Yunus Wonda dan Ketua Kelompok Khusus, John Gobay. Ketua Pansus aspirasi rakyat Dogiyai, Simon Petrus Pekey menyampaikan tiga poin aspirasi rakyat yaitu, *pertama*, penolakan pembentukan Polres dan Kodim di Dogiyai. *Kedua*, penolakan DOB di Papua. *Ketiga*, penolakan perpanjangan Otsus di tanah Papua. “Kami minta aspirasi ini diteruskan sampai ke pemerintah pusat karena masyarakat banyak demo tolak DOB. Kalau tidak dijawab, maka masyarakat akan ambil inisiatif melakukan mogok sipil nasional yang akan dimulai dari Dogiyai,” tegas Simon. Sementara itu, Yunus Wonda mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi penolakan DOB ke DPR RI karena bukan saja dari Dogiyai dan Deiyai tapi dari banyak kabupaten di Papua yang menolak DOB. “Kita bisa bilang 80% rakyat di Papua menolak pemekaran, salah kalau bilang 80% menerima pemekaran. Pemekaran itu kepentingan elit, bukan aspirasi masyarakat. Kalau terjadi pemekaran, kita menuju gerbang kepunahan,” tegas Yunus Wonda (Cenderawasih Pos).
- Johanes Gluba Gebze mengatakan untuk merancang lambang daerah Provinsi Papua Selatan, maka masyarakat dari empat kabupaten, Merauke, Boven Digoel, Mappi,

dan Asmat perlu duduk bersama untuk berembuk dan memutuskan lambang daerah Provinsi Papua Selatan. “Kita harus duduk bersama dan undang pakar. Salah satu pakar adalah Rektor Uncen, Apolo Safanpo, sesuai disiplin ilmunya. Kita akan minta pandangan dan pengalaman dia ke Jerman dan Belanda, terkait tata kota yang ramah terhadap berbagai aspek. Kemudian, titik Ibu Kota provinsi jangan main patok. Kita bicarakan bersama, karena terkait pengendalian pemerintahan, koordinasi pembangunan, dan koordinasi kemasyarakatan,” tutur Johanes Gluba Gebze di Merauke pada Selasa, 17 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

20 Mei

Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Ricky Ham Pagawak mengatakan pemekaran DOB manfaatnya untuk apa, demi kepentingan siapa dan ke depan akan bagaimana karena pemerintah pusat terus mendorong pemekaran DOB provinsi di tanah Papua ini. “Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah akan berdiri di tengah, tidak memihak, dan tidak melihat kepentingan, karena harus mengacu pada kemauan rakyat. Kaum intelektual pemerintah dan Gereja harus duduk sama-sama membicarakan dan menyepakatinya, apakah akan menerima DOB atau tidak. Kalau suara terbanyak mengatakan tidak mau DOB, maka Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah harus mendengarkan suara rakyat,” tutur Ricky Ham Pagawak pada Kamis, 19 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

21 Mei

Presiden Joko Widodo menerima MRP dan MRPB di Istana Bogor pada Jumat, 20 Mei 2022. Pertemuan itu bertujuan membahas DOB di tanah Papua. Bupati Kabupaten Jayapura,

Matius Awoitauw mengatakan rencana pembentukan DOB adalah murni aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak lama. Misalnya, Papua Selatan telah memperjuangkan Provinsi Papua Selatan selama 20 tahun. “Pemekaran DOB di tanah Papua bukan hal baru yang muncul tiba-tiba. Ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan, Tabi, Saireri, La Pago, dan Meepago,” tutur Matius Awoitauw. Ia menjelaskan bahwa pembentukan DOB demi mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Ia menjelaskan tantangan geografis menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat di tanah Papua. “Berapa pun dana Otsus yang diturunkan, tetapi kalau geografis sulit, seperti yang ada sekarang, maka akan mengalami hambatan luar biasa. Karena itu, Daerah Otonomi Baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” tutur Matius Awoitauw (Cenderawasih Pos).

23 Mei

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas mengatakan DPR RI telah menerima surat Presiden terkait pembahasan tiga DOB di Provinsi Papua, yaitu terkait RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Ia menjelaskan bahwa surat Presiden itu diberikan ke DPR RI pasca disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 12 April 2022. Melalui surat itu, DPR RI telah menerima poin-poin yang akan dibahas dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU pembentukan DOB bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri PAN-RB, dan Menteri Keuangan. “Pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada masyarakat Papua lewat implementasi UU Otsus dan sekarang ditambah pembentukan tiga DOB

dari lima provinsi yang direncanakan. Saya mengharapkan semua elemen masyarakat Papua, elit politik Papua, yang ada di Papua maupun di luar Papua agar kita bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran masyarakat Papua di masa depan,” tutur Yan Mandenas pada Minggu, 22 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

24 Mei

Tokoh birokrat senior Papua, Michael Manufandu menegaskan bahwa pemekaran DOB di Papua harus dilakukan mengingat Provinsi Papua terdiri atas 29 kabupaten/kota, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pembangunan dan perekonomian tidak berjalan maksimal. “Pemekaran DOB ini harus didukung oleh semua pihak supaya Papua ini damai, sejahtera, dan penduduknya merasakan peningkatan ekonomi secara merata. Pemerintah perlu sosialisasikan maksud dan tujuan DOB itu. Mereka yang tidak setuju DOB, pemerintah harus lebih bijak untuk menjelaskan agar mereka tahu dan bisa terima DOB,” tutur Michael Manufandu di Jayapura, pada Senin, 23 Mei 2022 di kantor Walikota Jayapura (Cenderawasih Pos).

27 Mei

- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jayawijaya, Fransiskus Sorabut menyatakan PMKRI dan 9 kampung yang ada di Jayawijaya melakukan aksi penolakan terhadap rencana deklarasi DOB oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), yang dipimpin oleh Lenis Kogoya pada 1 Juni 2022. “Intinya kami menolak kegiatan tersebut yang diselenggarakan tanggal 30 Mei sampai 1 Juni. Kami paham setiap kegiatan ada

regulasinya, sama dengan DOB meskipun Gubernur dan MRP menolak, tetapi pemerintah pusat memaksakannya,” tegas Fransiskus Sorabut di Wamena, pada Rabu, 25 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

- Majelis Rakyat Papua (MRP), secara resmi menyerahkan berkas berisi kesimpulan dari langkah uji materi atas UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 25 Mei 2022. “Harapan terakhir sekarang ada di pundak hakim Mahkamah Konstitusi. Kami telah berusaha melakukan yang terbaik, agar tidak ada perubahan kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua,” kata Ketua MRP, Timotius Murib pada Kamis, 26 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

28 Mei

Forum Diskusi Aliansi Masyarakat Papua Selatan menggelar diskusi terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan di Noken Sai, Hotel Asmat, Merauke pada Jumat, 26 Juni 2022. Acara itu dipandu oleh tokoh masyarakat, Johannes Gluba Gebze, dengan Narasumber, Rektor Uncen, Apolo Safanpo dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat dari empat kabupaten, Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Fokus diskusi meliputi titik Ibu Kota PPS, lambang daerah PPS, penyusunan *grand design* dan *master plan*, Ibu Kota PPS, persiapan pengucapan syukur penetapan UU PPS, penjemputan Penjabat Gubernur, serta persiapan perangkat daerah (Cenderawasih Pos).

30 Mei

Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik mengatakan

bahwa pemekaran wilayah Papua tidak akan menghilangkan identitas Orang Asli Papua. “Pemekaran Papua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Martabat Orang Asli Papua tetap sama, hanya terjadi perubahan administrasi kewilayahan bukan menghilangkan identitas OAP,” tutur Willem Wandik di Jayapura pada Jumat, 27 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

31 Mei

- Menyikapi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Ketua MRP, Matius Murib yang dengan tegas menolak pembentukan DOB di tanah Papua, Ketua Asosiasi Bupati se-wilayah Tabi, yang juga Bupati Jayapura Matius Awoitauw mengatakan bahwa semua pihak di Papua harus jujur dengan fakta yang ada bahwa pemekaran yang diwacanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan wilayah adat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat di wilayah adat itu. “Pemekaran berdasarkan wilayah adat yang diaspirasikan oleh masyarakat adat dari wilayahnya masing-masing bukan berdasarkan pikiran orang perorangan, bukan pikiran yang dibicarakan di jalan-jalan,” tegas Matius Awoitauw di Sentani pada Senin 30 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).
- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi usul inisiatif DPR RI. Seluruh anggota Baleg dari 9 fraksi yang hadir menyatakan setuju, kecuali fraksi Demokrat yang meminta agar RUU dikembalikan kepada pengusul untuk disempurnakan kembali (Cenderawasih Pos).

04 Juni

Demonstrasi penolakan pembentukan DOB di tanah Papua kembali digelar oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) di Jayapura, Merauke, dan Jayawijaya. Di Jayapura, massa berkumpul di lingkaran Abepura dan Perumnas III Waena, tetapi aparat keamanan membubarkan massa. Di Merauke, aksi dilakukan di sekitar pasar Managa Kudamati, Kelurahan Kamandu. Polisi menangkap 12 orang peserta aksi demo tolak DOB. Aksi demo tolak DOB juga berlangsung di Wamena Jayawijaya dengan tuntutan tolak DOB dan DPRD Jayawijaya melakukan sidang istimewa untuk tolak Otsus jilid II. Anggota DPR Papua Yulius Miagoni menyayangkan sikap represif aparat keamanan yang tidak memberikan ruang kepada massa untuk menyampaikan aspirasinya. “Rakyat mengantar aspirasi ke DPR Papua itu seperti menghormati wakil mereka. Tetapi, aparat keamanan melakukan penyekatan dan pembubaran, seperti tidak menghargai DPRP. Kami siap terima aspirasi, tetapi justru polisi yang sibuk, sehingga aspirasi itu mau dibawa ke DPRP atau ke Polda,” ungkap Yulius Miagoni dengan nada kesal pada Jumat, 3 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengajak para pemuda dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan DOB di tanah Papua agar menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa turun ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas umum. Ia mengajak para pemuda dan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dalam forum-forum diskusi sehingga kota Jayapura tetap tertib dan aman. “Untuk mahasiswa dan pemuda Papua, hari ini tugas kalian adalah belajar dan belajar agar menjadi orang berkualitas untuk membangun Papua, karena masa depan

Papua ada di tangan kalian. Tidak usah demo-demo karena demo akan menghambat studi kalian dan juga mengganggu kenyamanan orang lain,” tutur Frans Pekey pada Jumat, 3 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

07 Juni

- Pimpinan TPNPB Kodap 10 Lany Jaya Wilayah Lapago, Brigjen Okiman Purom Wenda mengeluarkan pernyataan keras kepada elit yang mendukung pembentukan DOB di tanah Papua. TPNPB mengatakan akan menembak mati elit politik yang mendukung pemekaran DOB dan Otsus Jilid II. “Brigjen Okiman Purom Wenda mengatakan bahwa TPNPB wilayah Lapago mendukung aspirasi rakyat untuk menolak DOB dan Otsus jilid II. Purom Wenda dan pasukannya siap mengejar mereka yang dukung DOB dan Otsus jilid II, sebelum dilakukan kami sampaikan peringatan lewat media massa,” tegas juru bicara TPNPB, Sebbi Sambom pada Senin, 6 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).
- Kepala Seksi Humas Polres Merauke, Iptu Bambang Soetrisno mengatakan 12 orang yang ditahan karena melakukan aksi tolak DOB dan meminta referendum pada 3 Juni 2022 telah dibebaskan oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. “Sebelum dipulangkan, mereka diminta membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut,” tuturnya pada Senin, 6 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

09 Juni

Menyikapi demonstrasi penolakan DOB yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP), anggota DPRD dari tiga Kabupaten yakni Tolikara,

Mimika, dan Jayawijaya mendatangi kantor DPR Papua. Mereka menyerahkan aspirasi penolakan DOB yang disampaikan oleh masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Tolikara, Yendiles Afrika Towolom mengatakan di Tolikara Sebagian besar masyarakat tolak DOB. Ia mengatakan bahwa masyarakat lebih fokus pada pelayanan pendidikan, kesehatan infrastruktur, pembangunan jalan, dan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima anggota DPRD dari wilayah Lapago mengatakan pemerintah seharusnya peka karena sebagian besar masyarakat menolak kehadiran DOB. Ia mengatakan kalau pemerintah pusat mau serius membangun Papua, maka bangunlah industri, membangun perusahaan yang mempekerjakan OAP. “Pemerintah harus berpikir bahwa menyelamatkan OAP jauh lebih penting dibandingkan menyelamatkan pembangunan, tapi saat ini manusia OAP tolak DOB, mengapa pemerintah pusat harus paksakan? Kalau dikatakan dengan pemekaran OAP akan sejahtera, saya pikir itu omong kosong! Apa jaminan OAP akan sejahtera melalui pemekaran,” tanya Yunus Wonda pada Rabu, 8 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Juni

- Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menerima aspirasi pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Daya yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Papua dan Masyarakat Nusantara di Manokwari pada Jumat, 10 Maret 2022. Kepala suku Maybrat di Manokwari, Marthen Nauw mengatakan bahwa pemekaran akan mengakselerasi pembangunan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Hadirnya DOB akan memperpendak rentang kendali pembangunan di Papua dan Papua Barat sekaligus memperluas lapangan kerja bagi

masyarakat,” tutur Marthen Nauw saat penyerahan aspirasi di Manokwari pada Jumat, 10 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

- Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak, David Rumansara menegaskan pihaknya mendukung DOB di tanah Papua, termasuk pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara. Sedangkan Wakil Ketua LMA Kabupaten Biak, Marthinus Randongkir mengatakan tujuan DOB adalah untuk kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Tujuan DOB untuk kesejahteraan masyarakat, memperpendek, dan mengefisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya di Biak pada Jumat, 10 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

16 Juni

- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa sejak tahun 2004, dirinya telah mengusulkan pemekaran di tanah Papua menjadi 7 provinsi sesuai wilayah adat, bukan dicicil 2 hingga 3 provinsi dan wajib diikuti dengan pembagian keuangan yang berkeadilan dari pemerintah pusat. “Pemerintah pusat jika mau lakukan pemekaran, maka silakan buat 7 provinsi, tidak boleh dua hingga tiga. Harus sekalian 7 provinsi sehingga tidak mengorbankan rakyat. Sampai sekarang, saya tetap konsisten dengan pandangan saya tersebut. Saya yakin bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan Papua hanya dapat kita wujudkan bukan dengan cara biasa-biasa saja, tetapi harus ada komitmen dan keberanian untuk melakukan terobosan dengan cara-cara yang luar biasa, *out of the box*,” tutur Lukas Enembe pada saat kegiatan Rapat Kerja Bupati dan Walikota Se-tanah Papua pada Rabu, 15 Juni 2022 di Jayapura (Cenderawasih Pos).

- Perwakilan tokoh masyarakat adat, ondoafi, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama di wilayah Tabi melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk berdialog terkait dengan bergabungnya Pegunungan Bintang di Provinsi Papua. Dalam pertemuan itu, perwakilah tokoh dari wilayah Tabi setuju apabila Pegunungan Bintang masuk dalam wilayah Provinsi Papua. “Hari ini, kami beberapa tokoh adat atau ondofole dari Mamberamo, Sarmi, Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura sepakat bahwa kami orang Tabi selalu menerima siapa saja yang datang di atas tanah kami. Itulah pesan dari para leluhur kami. Jadi, kalau Tabi tidak terima, maka Pegunungan Bintang akan masuk ke PNG, tapi tadi kami sudah tanya dan semua masyarakat menerima Pegunungan Bintang masuk ke wilayah Tabi,” tutur Ketua Umum Presidium Pusat Masyarakat Adat Tabi, Ondofolo Ismail Isak Mebri di Sentani pada Rabu, 15 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

18 Juni

Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Sekda, Ridwan Rumasukun, Asisten Bidang Pemerintahan, Doren Wakerkwa, Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra, M. Musa’ad melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta pada Jumat, 17 Juni 2022. Setelah pertemuan Lukas Enembe mengatakan bahwa sejak tahun 2014, dirinya sudah pernah mengajukan pemekaran Papua berdasarkan wilayah adat kepada pemerintah pusat. “Harapannya Ketika pemekaran ini terjadi, otomatis diikuti dengan percepatan pembangunan dan kebijakan anggaran sebagaimana kemauan dari pemerintah pusat,” tutur Lukas Enembe. (Cenderawasih Pos).

24 Juni

Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk pembentukan DOB di Tanah Papua, melakukan rapat perdana pada Rabu, 22 Juni 2022 dan berhasil menyepakati 151 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan oleh pemerintah. Satu-satunya poin yang belum disepakati yakni Pegunungan Bintang, apakah tetap berada di Provinsi Papua atau di DOB Provinsi Papua Pegunungan. “Dalam rapat Panja, mayoritas menginginkan Kabupaten Pegunungan Bintang masuk ke DOB Provinsi Papua Pegunungan, tapi Panja mempertimbangkan sikap dari Bupati Pegunungan Bintang yang menginginkan tetap berada di Provinsi Papua. Jadi, PR kita tinggal Pegunungan Bintang,” tutur Ketua Panja DOB, yang juga Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia di Jakarta pada Rabu, 22 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Juni

Ketua Komisi II DPR RI, yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU₃ DOB di Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan Undang-Undang DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan akan disahkan pada tanggal 30 Juni 2022. Ia menjelaskan pihaknya datang ke Merauke untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. “Intinya, ada keinginan dari masyarakat untuk terbentuknya Provinsi Papua Selatan, sehingga masyarakat tambah maju dan dapat mencapai kesejahteraan, ekonomi semakin bagus, tetapi tidak meninggalkan adat-istiadat, keberadaan OAP untuk mengelola pemerintahan, asset, dan tanah tetap dijaga,” tutur Ahmad Doli Kurnia Tanjung pada saat rapat bersama stakeholder terkait di auditorium Kantor Bupati Merauke pada Jumat, 24 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

27 Juni

Pro kontra menjelang penetapan tiga DOB di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 30 Juni 2022 tidak kunjung reda. Menyikapi situasi tersebut Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya akan menyiapkan pasukan Brimob dan Samapta Polda di Merauke, Wamena, dan Nabire. Ia berharap penetapan DOB tidak menimbulkan gangguan keamanan. “Ada bantuan dari Brimob Nusantara sebanyak 500 personil dan 800 personil sudah ada. Saya juga berharap penentuan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire atau Mimika tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kami aparat keamanan siap mengawal proses pembentukan provinsi baru,” tutur Irjen Mathius D. Fakhiri pada Sabtu, 25 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

28 Juni

- Tokoh intelektual Yahukimo, Andru A. Pahabol berharap agar Kabupaten Yahukimo tidak masuk dalam DOB Lapago, Provinsi Papua Pegunungan, melainkan tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua. Alasannya, terkait pembangunan infrastruktur dan ekonomi, yang mana Yahukimo tidak memiliki akses memadai ke Wamena, kalau dipaksakan ke Wamena maka harga sembako akan sangat mahal. “Kami minta DPR RI masukan Yahukimo tetap di Provinsi Papua, karena faktor infrastruktur dan tidak punya akses ke Wamena. Kami punya akses ke Pegunungan Bintang,” tutur Andru A. Pahabol pada Senin, 27 Juni 2022. Sementara itu, mantan Bupati Yahukimo, Ones Pahabol mengatakan Kabupaten Yahukimo, Nduga, Yalimo, dan Pegunungan Bintang merupakan satu sebaran

yang penduduknya padat sehingga layak dimekarkan menjadi provinsi sendiri yaitu Provinsi Papua Timur. “Wilayah adat Ngalum harus jadi satu provinsi yang terdiri atas Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, dan Nduga. Hal ini sesuai dengan adat, etnis, sosial, geografis, dan pelayanan pemerintahan,” tutur Ones Pahabol (Cenderawasih Pos).

- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli mengatakan sebagai bentuk kegembiraan dan dukungan terhadap pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan pada tanggal 30 Juni 2022 nanti akan dilakukan pawai yang melibatkan semua stakeholder. “Kita akan pawai bertepatan dengan DPR RI mengesahkan RUU Provinsi Papua Selatan menjadi UU PPS. Begitu pula pengesahan RUU PPS menjadi UU PPS diketok maka kita akan pawai sebagai ungkapan kegembiraan atas disahkannya UU Provinsi Papua Selatan,” tutur Ruslan Ramli pada Senin, 27 Juni 2022 di Merauke (Cenderawasih Pos).
- Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-wilayah Tabi, Matius Awoitauw mengatakan pemerintah pusat harus tetap mengesahkan pembentukan DOB sesuai wilayah adat masing-masing, kecuali wilayah Saireri yang sejak awal bergabung dengan Provinsi Papua. Ia menegaskan keinginan Pegunungan Bintang untuk bergabung dengan Provinsi Papua telah ditolak oleh masyarakat adat Tabi melalui rapat yang digelar pada bulan Mei 2022. “Kabupaten Pegunungan Bintang minta bergabung menjadi bagian dari wilayah adat Tabi dan Saireri di Provinsi Papua, tapi masyarakat Tabi sudah rapat bulan Mei dan memutuskan untuk menolak Pegunungan Bintang masuk di wilayah Tabi. Pegunungan Bintang tetap di DOB Papua Pegunungan, wilayah adat

Lapago,” tutur Matius Awoitauw di Sentani pada Senin, 27 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

29 Juni

- Sembilan fraksi di DPR RI bersama Komite I DPD RI dan pemerintah sepakat untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap tiga RUU yaitu, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah dan Provinsi RUU Papua Pegunungan. Keputusan tersebut diambil setelah poin krusial yakni pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai titik temu. Semua pihak sepakat bahwa birokrasi pemerintahan di ketiga provinsi tersebut akan diisi oleh ASN OAP. “Sebanyak 80% OAP akan mengisi birokrasi pemerintahan di ketiga provinsi DOB, karena eksistensi OAP akan tergerus kalau ASN datang dari luar. Maka, akan ada kebijakan perekrutan ASN. Calon ASN OAP berusia 48 tahun dan tenaga honor 50 tahun, dapat diangkat menjadi ASN,” tutur Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pada 28 Juni 2022 di Jakarta. Ada pun poin-poin penting dalam RUU tiga provinsi yaitu 1) Provinsi Papua Selatan, Ibu Kota Merauke, dengan wilayah kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. 2) Provinsi Papua Tengah, Ibu Kota Nabire, dengan wilayah kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai. 3) Provinsi Papua Pegunungan Ibu Kota Jayawijaya, dengan wilayah kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya dan Nduga. Hal lain yang diatur yaitu Gubernur akan diisi oleh Pejabat Gubernur sampai dengan Pilkada 2024; pemerintahan tanpa DPRD sampai pemilu legislative 2024; birokrasi pemerintahan akan diisi oleh 80% OAP; MRP akan

dibentuk di setiap provinsi; aspek politik seperti dapil dan alokasi kursi diatur dalam revisi UU Pemilu (Cenderawasih Pos).

- Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Papua yang terdiri atas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, JERAT Papua, KPKC Sinode GKI di tanah Papua, YALI Papua, PAHAM Papua, UKM Demokrasi HAM dan Lingkunan Uncen, AMAN Sorong, WALHI Papua, Terjau Fondation, Yayasan Pusakan Bentala Rakyat, yang diwakili oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan sikap pemerintah pusat yang terus mendorong kebijakan DOB tanpa melihat perpecahan dalam masyarakat serta melihat fakta pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh masyarakat Papua sangat dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik sosial antara kelompok yang menolak DOB dan yang menerima DOB. “Sudah sepantasnya pemerintah pusat menghentikan rencana pembahasan rencana kebijakan DOB Papua yang merupakan dasar pro kontra masyarakat Papua karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial. Maka, SOS menegaskan kepada Presiden segera batalkan DOB Papua yang telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Papua demi meredam konflik sosial,” tegas Emanuel Gobay pada Selasa, 28 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

30 Juni

- Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni mengatakan penetapan DOB, termasuk Jayawijaya sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan merupakan inisiatif DPR RI dan keputusan pemerintah pusat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, semua pihak harus menerima dan

mengikutinya. Ia menjelaskan bahwa semua demonstrasi penolakan DOB telah disampaikan kepada DPR Papua, tetapi kewenangan ada di pemerintah pusat. “Kita di daerah sudah suarakan apa yang diinginkan masyarakat untuk menolak DOB, tetapi semua itu kebijakan dari pusat jadi kita jalani saja. Kita di daerah tidak bisa melangkahi aturan dari pusat. Kita ikuti saja keputusan pemerintah pusat,” tutur Mathias Tabuni di Wamena pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

- Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan titik kumpul pawai konvoi menyambut penetapan UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan di Jakarta pada 30 Juni 2022. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Merauke, Agustinus Joko Guritno mengatakan titik kumpul pawai penyambutan penetapan Provinsi Papua Selatan di kantor sementara Provinsi Papua Selatan. Ia menjelaskan bahwa sidang paripurna DPR RI untuk penetapan DOB akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIT. Pihaknya akan memasang layar lebar sehingga masyarakat dapat mengikuti sidang penetapan Provinsi Papua Selatan. “Konvoi tergantung selesainya sidang paripurna. Jadi, bisa sore. Kami harap semua etnis hadir sebagai ungkapan kegembiraan setelah penantian selama 20 tahun. Sebelum konvoi, pagi hari pukul 08.00 WIT akan dilakukan doa bersama di taman Hati Kudus Yesus, Bandara Mopah,” tutur Agustinus Joko Guritno di Merauke pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).
- Ribuan warga di kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan demonstrasi menolak Kabupaten Pegunungan Bintang yang akan digabungkan dengan Provinsi Papua Pegunungan. Pelaksana tugas Sekda

Pegunungan Bintang, drg. Aloysius Giay mengatakan elemen masyarakat yang terlibat dalam demo damai itu terdiri atas dewan adat, perwakilan pemerintah, dan mahasiswa. “Intinya, massa menolak rencana pemerintah pusat yang akan memasukkan Pegunungan Bintang ke dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan. Kami akan menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Presiden Jokowi, Mendagri, dan Komisi II DPR RI bahwa Pegunungan Bintang wajib hukumnya tetap berada di provinsi Papua,” tutur Aloysius Giay pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

- Mantan Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan alasan di balik perlunya pemekaran di tanah Papua karena Provinsi Papua saat ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling luas dengan pembangunan infrastruktur yang masih minim dan tidak mudah. “Karena itu, untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat di Papua, maka diperlukan pemekaran daerah otonom baru supaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih dekat,” tutur Jusuf Kalla di Sentani pada Rabu, 29 Juni 2022. (Cenderawasih Pos).

01 Juli

Meskipun menuai pro dan kontra terkait pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua, akhirnya DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada Kamis, 30 Juni 2022 di Jakarta. Pengesahan pembentukan tiga DOB itu terkesan berlangsung singkat, mengingat Panitia Kerja (Panja) baru dibentuk pada 21 Juni 2022. Artinya hanya dalam waktu sembilan hari DPR RI mengesahkan RUU pembentukan Provinsi

Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan meskipun mendapatkan penolakan dari Orang Asli Papua (OAP). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan dengan pemekaran provinsi di tanah Papua, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih pendek, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, dan pembangunan lebih cepat. “Guna mempercepat pembangunan dan menyejahterakan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua,” tutur Tito. Ketua MRP, Matius Murib mengatakan pemekaran di tanah Papua terkesan sangat terburu-buru karena dasar hukum untuk melakukan pemekaran masih diuji di Mahkamah Konstitusi. “Seharusnya mereka menunggu kepastian hukum. Ada keputusan MK baru pengesahan RUU menjadi UU,” tutur Matius Murib. Ia menambahkan bahwa MRP akan menunggu janji-janji pemerintah pusat untuk menyejahterakan OAP melalui pemekaran. Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI telah mengakomodasi kepentingan OAP di dalam UU DOB, salah satunya syarat maksimal usia ASN, berusia 48 tahun dan tenaga honorer 50 tahun. “Melalui ketiga UU tersebut, ASN di wilayah DOB diprioritaskan OAP. Saya berharap peraturan teknis bisa segera diterbitkan untuk melindungi keberadaan OAP,” tegas Puan. Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan pemekaran tiga wilayah DOB di tanah Papua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Pemekaran untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, koordinasinya lebih dekat dengan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan karena kalau jaraknya jauh, pelayanan kurang optimal,” tutur Wapres Ma’ruf Amin (Cenderawasih Pos).

02 Juli

- Tokoh Pemuda Lapago, Ozzi Hisage mengatakan bahwa sejak awal rencana pemekaran DOB di wilayah Lapago,

Provinsi Papua Pegunungan sudah ditolak oleh masyarakat melalui aksi demonstrasi di Wamena. Meskipun demikian, DOB Provinsi Papua telah ditetapkan pada 30 Juni 2022. “DOB ini seperti dipaksakan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Lapago makanya kami tidak melakukan penyambutan, sebab aspirasi kami menolak DOB bukan mengesahkan DOB. Karena DOB ini sudah dipaksakan kepada kami, maka harus ada regulasi yang mengatur keberpihakan khusus kepada OAP di wilayah Lapago,” tegas Ozzi Hisage di Wamena pada 1 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Frederikus Wanim Mahuze menyatakan dukungannya terhadap Nikolaus Kondomo menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Ia mengatakan Nikolaus adalah putra asli Papua yang berasal dari wilayah adat Animha, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. “Kami sangat mendukung Nikolaus Kondomo menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan karena beliau seorang putra asli Papua yang berasal dari Animha. Dia sudah mampu tangani dan selesaikan kasus-kasus besar di Papua yang tidak diselesaikan oleh penjabat sebelumnya,” tegas Mahuze di kantor Bupati Merauke pada Jumat, 1 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan ditetapkannya tiga provinsi baru di tanah Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah pusat harus lebih memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami

menghargai dan mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memutuskan untuk pemekaran tiga wilayah baru di Papua. Kami berharap pemerintah konsisten dalam melaksanakan semangat dan tujuan pemekaran yaitu kesejahteraan bagi OAP. Kami juga minta supaya 80% OAP yang harus mengisi komposisi pegawai, baik di sektor negeri, swasta, anggota TNI-Polri, BUMN, dan BUMD,” tegasnya di Jayapura pada Jumat, 1 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

06 Juli

- Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda mengatakan pihaknya akan melakukan demonstrasi memprotes penetapan tiga DOB di Tanah Papua yang dilakukan secara sepihak, tidak demokratis, dan demi kepentingan ekonomi serta militeristik tanpa mempertimbangkan kondisi Orang Asli Papua. “PRP bersama masyarakat Papua akan kembali turun jalan untuk mengecam tindakan Jakarta dalam pengesahan 3 DOB di Papua, yang sepihak, tidak demokratis, eksploitasi sumber daya alam, dan militeristik tanpa mempertimbangkan OAP. Kami akan mobilisasi massa tidak hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia. Kami akan turun jalan pada tanggal 14 Juli 2022,” tegas Jefri Wenda melalui zoom pada 5 Juli 2022 di Jayapura (Cenderawasih Pos).
- Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegeg mengatakan bahwa pemerintah sedang mengelola konflik bersenjata di Papua. Ia menjelaskan bahwa TPN-PB akan bergerak dengan bebas demi mempertahankan ideologi Papua merdeka. Pemerintah di Jakarta merasa bahwa dengan DOB akan memadamkan api Papua merdeka. “Pemekaran justru akan menambah

konflik bersenjata menjadi subur, berkembang pesat dan berkepanjangan. Pemerintah tidak tanya rakyat penguasa tanah Papua, melainkan menggunakan pikiran Jakarta tanpa analisa risiko yang akan terjadi. Pemekaran hanya menjadi cara menguasai Sumber Daya Alam Papua, bukan demi kesejahteraan manusia Orang Asli Papua,” tegas Theo Hesegeg di Wamena pada Selasa, 5 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

08 Juli

- Rapat paripurna DPR RI ke-28, masa persidangan V tahun 2021-2022 di gedung parlemen Jakarta, pada 7 Juli 2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai usul inisiatif DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel yang memimpin sidang meminta juru bicara setiap fraksi menyampaikan pandangan selama lima menit. “Sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksi. Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” Pertanyaan itu dijawab, “Setuju!” oleh 337 orang dewan yang hadir (Cenderawasih Pos).
- Ketua Himpunan Alumni se-Jawa, Bali, Sumatera Kabupaten Yahukimo, Elius Pase meminta Komnas HAM Perwakilan Papua segera melakukan investigasi atas penembakan dua orang warga di Yahukimo pada 15 Maret 2022 pada saat demonstrasi penolakan DOB. Kedua korban yang ditembak dan meninggal dunia yaitu Yakob Dell (30 tahun) dan Erson Yepsa (22 tahun). “Hingga saat ini, kami masih menunggu tindak lanjut pengusutan kasus ini. Pemerintah Yahukimo

dan lembaga lainnya terkesan mengabaikan peristiwa ini. Pemda Yahukimo harus bersuara kepada pihak keamanan, keadilan harus ditegakkan. Pelaku perlu diadili sesuai peraturan yang berlaku. Jangan diamkan kasus ini!” tegas Elius Pase pada Kamis, 7 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

09 Juli

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey merespon positif pengesahan tiga DOB di tanah Papua yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022. Ketiga DOB tersebut adalah Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke; Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota di Wamena, Jayawijaya. “Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Jadi kita dukung secara maksimal sehingga kemajuan di Papua tidak hanya berfokus di kota Jayapura saja, tetapi juga ada 3 Ibu Kota baru maka akan ada lagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan serta dalam pengembangan SDM. Karena itu, pembentukan DOB di Papua sangat penting,” tutur Frans Pekey di Jayapura pada Kamis, 7 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

09 Juli

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan bahwa pihaknya telah selesai melakukan investigasi terhadap kasus meninggalnya dua orang warga atas nama Yakob Dell (30 tahun) dan Erson Yepsa (22 tahun) pada saat demonstrasi penolakan DOB, 15 Maret 2022 di Yahukimo. “Terkait kasus Yahukimo kami sudah memeriksa dan meminta keterangan sejumlah anggota polisi yang diduga waktu itu ada di

lokasi. Kami akan cek ke internal Polda tentang perkembangan tindak lanjut dari rekomendasi kami,” tutur Frits Ramandey di Jayapura pada Jumat, 8 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

12 Juli

Koordinator aksi Petisi Rakyat Papua (PRP), John Giyai mengatakan PRP yang terdiri atas 122 organisasi akan menggelar demonstrasi serentak di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2022. Demonstrasi tersebut bertujuan menolak pemekaran DOB di Papua. “Kami sudah saksikan dampak Otsus selama 20 tahun, kondisi rakyat semakin tertindas, termarginal, miskin, dan tersingkir dari tanahnya sendiri. Selain itu, lingkungan alam pun hancur dengan kehadiran Freeport dan perkebunan sawit,” tegas John Giyai dalam konferensi pers di Perumnas 3 Jayapura pada Senin, 11 Juli 2022. Sementara itu, mewakili perempuan Papua, Yokbet Felle, anak asli Tabi mengatakan menolak dengan tegas Otsus dan pemekaran yang sewenang-wenang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan Orang Asli Papua, terutama perempuan di akar rumput. “Kami jadi target dikuasai pendatang, dan ini berdampak buruk bagi kami karena hak-hak kami dirampas mulai dari tanah, jabatan politik, ekonomi, dan lain-lain. Selama ini kami sudah tersingkir. Maka, saya menolak tegas Otsus dan pemekaran DOB di Papua,” tegas Yokbet Felle (Cenderawasih Pos).

13 Juli

- Kapolresta Jayapura, Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan pihaknya tidak mengizinkan rencana *long march* ke DPR Papua yang dikoordinir oleh Petisi Rakyat Papua (PRP). Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan koordinator aksi, Jefry Wenda yang

menyampaikan bahwa dalam aksi itu akan menyampaikan tiga hal yaitu tolak DOB, bebaskan Viktor Yeimo, dan referendum. “Semua harus menghormati ketertiban umum, memperhatikan kesatuan, dan persatuan. Kegiatan *long march* akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Prinsipnya kami menolak izin terkait aksi unjuk rasa tanggal 14 Juli 2022. Kami siapkan 2.000 personal gabungan, TNI, Brimob Polda Papua, BKO Brimob Nusantara, dan Polresta Jayapura yang akan diturunkan,” tegas Victor Dean Mackbon di Jayapura pada Selasa, 12 Juli 2022. Sementara itu, Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw mengatakan bahwa pihaknya siap menerima segala bentuk aspirasi dari masyarakat. “DPRP adalah honai aspirasi masyarakat, maka silakan masyarakat datang membawa aspirasinya. Kami berharap demo yang dilakukan dengan cara yang baik dan santun dengan tidak mengganggu ketertiban umum,” tutur Johny Banua Rouw di Jayapura pada Selasa, 12 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. “Penjabat Gubernur PPS akan ditentukan oleh Mendagri. Waktunya, sekitar 6 bulan setelah UU pemekaran Provinsi Papua Selatan disahkan,” tutur Mbaraka di Merauke pada Selasa, 12 Juli 2022. Ia menambahkan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 ini, kabupaten akan memberikan kontribusi pembiayaan, karena dana PPS baru terakomodir dalam APBN tahun 2023. Sedangkan untuk perangkat OPD di PPS terdiri atas eselon IA satu orang (jabatan Sekda), eselon IIA sebanyak 20 orang (pimpinan OPD), eselon IIB sebanyak 5 orang (setingkat

kepala biro), eselon IIIA 89 orang, dan eselon IVA 174 orang (Cenderawasih Pos).

14 Juli

- Anggota Dewan Gereja Papua, Pdt. Beny Giay meminta kepada Kapolda Papua Irjen Pol Matihius D. Fakhiri agar memerintahkan anggotanya supaya tidak bertindak kasar dan represif terhadap masyarakat yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) yang akan menggelar demonstrasi pada 14 Juli 2022. Ia menegaskan hal ini lantaran dalam tiga kali aksi PRP aparat keamanan selalu bertindak represif dan tidak menunjukkan sikap menghormati hak demokrasi rakyat Papua. “Polisi harus membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk membicarakan nasib mereka tentang Daerah Otonom Baru yang sepihak dan tidak aspiratif serta pembentukan otonomi khusus yang sepihak. Ini tidak demokratis. Masyarakat tolak DOB yang dipaksakan tanpa konsultasi dengan orang Papua. Mereka menyampaikan hak mereka yang selalu dihalangi dan disangkal,” tegas Pdt. Benny di Sentani pada Rabu, 13 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Maclariboen mengatakan pihaknya menolak tegas rencana aksi *long march* yang akan dilakukukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) untuk menolak DOB, UU Otsus jilid 2 pada 14 Juli 2022. Alasan pihak kepolisian menolak aksi demo dan *long march* yang akan digelar oleh PRP karena dianggap dapat mengganggu aktivitas masyarakat umum dan juga bertentangan dengan konstitusi. “Kami menolak tegas rencana demo atau *long march* di Sentani, Kabupaten Jayapura, maka kami mengimbau untuk tidak melakukan

demo atau *long march*. Kalau tolak UU Otsus dan DOB, silakan lakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Selain itu di pamflet-pamflet yang beredar demo minta referendum yang bertentangan dengan konstitusi maka kita tidak berikan izin,” tutur AKBP Fredrickus Maclariboen di Sentani pada Rabu, 13 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

15 Juli

Masyarakat sipil Papua, yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar demonstrasi ke kantor DPR Papua. Massa berhasil datang secara perorangan ke kantor DPRP meskipun pihak kepolisian tidak memberikan izin demonstrasi. Di kantor DPRP aparat kepolisian pun tidak memberikan ruang orasi, tetapi setelah melalui pembicaraan dengan koordinator aksi, Jefry Wenda dan Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, akhirnya perwakilan massa diperkenankan menyampaikan aspirasinya. Juru bicara PRP, Jefry Wenda yang membacakan pernyataan sikap menyampaikan bahwa pengesahan UU DOB tidak melibatkan masyarakat Papua, MRP, dan DPRP sehingga menimbulkan aksi protes. “Pemekaran DOB hanya menguntungkan pemodal dan Otsus tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Demikian halnya, perlawanan tidak akan berhenti meskipun ada DOB dan Otsus,” tegas Jefry Wenda. Berikut ini adalah poin-poin pernyataan sikap PRP yang dibacakan Jefry Wenda:

1. Cabut Otsus jilid II, hentikan pemekaran, membuka akses jurnalis di Papua, tarik militer organik, dan non organik.
2. Hentikan pembunuhan terhadap OAP, hentikan diskriminasi terhadap OAP, hentikan perampasan hak masyarakat adat, hentikan kriminasilisasi, tutup bandara antariksa di Biak, bebaskan Tapol di Papua, tolak blok Wabu, dan perusahaan nasional.

3. Tangkap dan adili jenderal pelanggar HAM, hentikan rasisme, hentikan operasi militer di Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Maybrat.
4. Mendesak Indonesia memberi akses Komisi Tinggi HAM PPB ke Papua, memberi jaminan kebebasan informasi, dan berpendapat di Papua, serta memberikan hak penentuan nasib sendiri.
5. Mendukung perjuangan masyarakat Wadas di Jawa Tengah atas penindasan yang dilakukan oleh kapitalis, menolak omnibus law, hentikan perampasan hak ulayat masyarakat adat di Tamberauw oleh PT Nuansa Lestari Sejahtera, dan semua perusahaan sawit.
6. Meminta Bupati Jayapura dan Gubernur Papua, segera mencabut perizinan PT Permata Nusa Mandiri di atas tanah adat milik masyarakat Grime dan Nawa, stop militeristik di kampung, rektor aktifkan kuliah, dan gratiskan biaya Pendidikan, DPRD segera gelar sidang paripurna mencabut Otsus dan tolak DOB.
(Cenderawasih Pos).

16 Juli

Ketua DPRD Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir menerima aspirasi dari DPRD. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa hadir karena bersamaan dengan jadwal dirinya mendampingi tim dari DPRD RI yang berkunjung ke Papua. Akhirnya, demonstrasi masyarakat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) diterima oleh anggota DPRD Papua, Yonas Nusi, John Gobay dan Tan Wie Long. "Saya tidak bisa hadir karena harus menemani kunjungan tim DPRD RI. Meskipun demikian, aspirasi sudah sampai di saya. Kami akan pilah dan kaji, yang menjadi tupoksi pemerintah pusat,

kami akan sampaikan ke pusat, dan yang menjadi kewenangan DPRD Papua, juga akan kami bicarakan," tutur Jhony Banua Rouw di Jayapura pada Jumat, 15 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

22 Juli

Anggota tim pemekaran DOB Provinsi Papua Pegunungan, Briyur Wenda mengatakan pendirian sekretariat Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Wesaput bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang proses pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. "Pada tanggal 27 Juli 2022, Wakil Menteri Dalam Negeri bersama staf, pejabat dari Provinsi Papua, akan ke Wamena untuk membahas dan mengecek kesiapan lokasi kantor sementara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan kantor pemerintahan provinsinya," tutur Briyur Wenda pada Jumat, 22 Juli 2022 di Wamena (Cenderawasih Pos).

26 Juli

Demi mendukung pembangunan perkantoran pemerintahan Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat Watae menyerahkan tanah adat seluas 75 hektar untuk pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Tanah yang diserahkan tersebut terletak di Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. "Dukungan dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan DOB luar biasa, termasuk dari Bupati Nabire yang merelakan rumah dinas ditempati Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Masyarakat sudah dukung sehingga kami akan merespon cepat supaya semua proses dapat berjalan dengan baik," tutur Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo di Nabire, Senin, 25 Juli 2022. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Doren Wakerkwa mengapresiasi dan mendukung tiga DOB di Papua. Ia bersama

Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengunjungi Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, pada Selasa, 26 Juli 2022. Dalam kunjungan itu, pihaknya melakukan pertemuan dengan para bupati dan forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat se-Wilayah Papua Tengah di Nabire. “Kami datang ke Nabire dan melihat masyarakat antusias mendukung pemekaran. Ke depan, semua masyarakat di Papua Tengah harus bersatu. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Jayawijaya dan Merauke, mudah-mudahan tiga provinsi ini benar-benar aksesibilitas untuk sama-sama membangun menuju kesejahteraan masyarakatnya, terutama Orang Asli Papua,” tutur Doren Wakerkwa di Nabire, Selasa, 26 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

28 Juli

- Menyikapi rencana demonstrasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) untuk menolak DOB dan Otsus pada Jumat, 29 Juli 2022, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan mahasiswa jangan mudah terprovokasi dengan demonstrasi penolakan DOB dan Otsus jilid II karena sudah disetujui DPR RI sehingga perlu dikawal dengan baik. Ia meminta para mahasiswa untuk belajar, agar kelak dapat membangun daerahnya. “Kita harus punya kompetensi, skil, wawasan, dan pola pikir yang maju dan berkembang dalam membangun daerah kita. Kalau kuliah tidak pernah selesai, kapan bisa bangun daerah kita di Papua ini? Jangan salahkan orang lain yang datang bangun daerah kita ini. Karena itu, kita sebagai tuan rumah harus memberikan contoh yang baik dan benar kepada orang lain,” tegas Frans Pekey di Jayapura pada Selasa, 26 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Menyikapi pengesahan Undang-Undang Pembentukan

Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan oleh DPR RI pada 30 Juni 2022, politisi senior asal Wamena, Jayawijaya, Pakalis Kosay mengatakan pemerintah, DPRP, dan MRP perlu mendorong agar Penjabat Gubernur Papua adalah Orang Asli Papua sesuai amanat UU Otsus. Selain itu, dalam jabatan birokrasi pemerintahan harus memprioritaskan Orang Asli Papua. “Pengisian jabatan pada birokrasi 80% harus OAP dan 20% non OAP, maka DPRP dan MRP harus segera menyurati Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar Presiden mematuhi amanat UU Otsus,” tegas Paskalis Kosay di Jayapura pada Rabu, 27 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dalam kunjungannya di Wamena, pada Rabu, 27 Juli 2022 mengatakan melalui pemekaran DOB, ada banyak kekhususan untuk Orang Asli Papua. Salah satunya, yaitu batas usia penerimaan ASN yang biasanya kalau SI batas 35 tahun, tapi dengan kekhususan bagi Papua, maka bisa sampai usia 48 tahun. “Untuk perekrutan ASN, ada kebijakan khusus yakni batas akhir usia 48 tahun untuk SI. Selain itu, penempatan anggota DPR Papua Pegunungan, DPRK, dan MRP. Khusus DPR Provinsi Papua Pegunungan ada 45 kursi di luar jatah Otsus sehingga banyak kesempatan menjadi legislator untuk mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Jhon Wempi Wetipo di Wamena pada Rabu, 27 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Demi menunjang aktivitas pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, maka Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua sepakat memberikan dana hibah sebesar Rp 10 miliar. Selain itu Pemda Jayawijaya juga menyerahkan

asset pinjam pakai Mall Wamena sebagai Kantor Gubernur sementara. “Sesuai kesepakatan para Bupati, maka setiap kabupaten akan menghibahkan 10 miliar untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Didimus Yahuli, Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua pada Rabu, 27 Juli 2022 saat pertemuan dengan Wakil Mendagri, Jhon Wempi Wetipo di Wamena. Sementara itu, Wakil Mendagri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran dalam APBD mini, tetapi tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan, maka dukungan dari 8 kabupaten sangat dibutuhkan. “Tadi 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan sudah sepakat memberikah hibah daerah pada APBD 2023 sebesar Rp 10 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembenahan kantor-kantor pemerintahan, karena di Provinsi Papua Pegunungan nanti ada 22 OPD,” tutur Jhon Wempi Wetipo (Cenderawasih Pos).

01 Agustus

- Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, dan Asisten II Setda Provinsi Papua, Muh. Mus’ad melakukan kunjungan ke Merauke, Ibu Kota Provinsi Papua Selatan pada Jumat, 29 Juli 2022. Kunjungan itu bertujuan memastikan kesiapan implementasi Provinsi Papua Selatan. Tim melakukan peninjauan di lokasi Gedung Negara, Jalan Trikora, yang akan digunakan sebagai kantor sementara Provinsi Papua Selatan. Selain itu, tim juga mengunjungi calon Ibu Kota Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kampung Ivimahad, Salor, Distrik Kurik. Perjalanan ke

sana membutuhkan waktu, 1-1,5 jam. Ada dua tempat lain yang disiapkan sebagai alternatif calon Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu kampung Serapuh, distrik Semangga dan Kebun Coklat, Distrik Tanah Miring. “Saya dan bapak/ibu, kita Orang Asli Papua, saya mengajak kita dapat membawa berita yang baik kepada semua saudara-saudara kita di kampung bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kami berharap dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan, harkat dan martabat Orang Asli Papua menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” tutur John Wempi Wetipo di hadapan masyarakat adat di kampung Ivimahad, 29 Juli 2022. Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Papua, Muh. Mus’ad mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam bidang fasilitas dan anggaran agar DOB dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Papua juga sudah mengambil langkah-langkah strategis terkait ASN dan keuangan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ini kegiatan besar memerlukan kolaborasi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Secara khusus, sejak awal Gubernur Papua mengusulkan pemekaran 7 provinsi sesuai wilayah adat dengan harapan OAP yang mendiami wilayah adatnya dapat memimpin wilayah adatnya masing-masing,” tegas Mus’ad di auditorium kantor Bupati Merauke pada Jumat, 29 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Masyarakat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) tetap menggelar demonstrasi menolak DOB meskipun jumlahnya terbatas karena dijaga ketat oleh aparat keamanan Indonesia. Bahkan pada pukul 03.00 dini, pihak

kepolisian menangkap koordinator aksi, Jefry Wenda dan Ruben Wakla di Pasar Mama-Mama Papua, Jalan Percetakan Kota Jayapura. “Kami dapat informasi pukul 03.00, ada orang masuk ke pasar Mama-Mama Papua. Kami merespon informasi tersebut dan menemukan keduanya berada di lantai tiga yang sepi. Kalau niatnya baik, tidak mungkin berada di lokasi yang sudah tutup. Kami juga mendapat informasi soal demonstrasi PRP yang akan berlangsung anarkis,” tutur Kapolresta Jayapura, Victor Dean Mackbon di Jayapura pada Jumat, 29 Juli 2022. Sementara itu, Jefry Wenda mempertanyakan penangkapan terhadap dirinya dan rekannya yang tidak berdasar itu. “Saya ditangkap, kemudian dimintai keterangan mengenai status saya di media sosial beberapa bulan lalu. Kalau mau klarifikasi, kenapa tidak undang saya, malah tangkap saya jam 3 pagi?” tegas Jefry Wenda (Cenderawasih Pos).

02 Agustus

Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan Ibu Kota Provinsi Papua Selatan sudah ditetapkan di kampung Ivamahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sebagai lokasi pembangunan infrastruktur kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian ruang eksternal dan internal, polarisasi ruang dan optimalisasi kehadiran provinsi. “Saya harap tidak ada stigma jauh dan dekat. Kita mau ada pemerataan dan pertumbuhan. Pembangunan harus maju dan merata ke semua wilayah, bukan soal jauh dan dekat,” tegas Romanus Mbaraka di Merauke pada Senin, 1 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

03 Agustus

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRP, Paskalis Letsoin mengatakan Penjabat Gubernur di tiga daerah pemekaran harus diisi oleh Orang Asli Papua (OAP). Meskipun saat ini OAP yang menduduki jabatan eselon I hanya Velix Wanggai, tetapi pemerintah bisa menerbitkan kebijakan khusus sehingga Penjabat Gubernur dapat diisi oleh OAP. “Kami mengharapkan kebijakan khusus sehingga OAP yang memiliki kemampuan dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur sehingga tidak perlu mengambil dari luar yang tidak memahami kondisi daerah,” tutur Paskalis Letsoin di Jayapura pada Selasa, 2 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

04 Agustus

Ketua MRP, Matius Murib dan timnya melakukan pertemuan dengan Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta pada Selasa, 2 Agustus 2022. Pada kesempatan itu, Timotius Murib menyampaikan pemerintah pusat harus dapat mengantisipasi gejolak akibat pemekaran DOB yang dipaksakan itu. Selain itu, ia berharap agar jabatan Gubernur di tiga daerah DOB itu diisi oleh penjabat OAP. Sementara itu, Wakil Ketua MRP, Yoel Luis Mulait mengatakan Mendagri sebaiknya menunjuk OAP untuk menjadi Penjabat Gubernur agar sejalan dengan semangat Otsus. “Kalau yang ditunjuk penjabat dari luar Papua maka akan semakin mengurangi rasa memiliki OAP terhadap Otsus yang masih menuai pro kontra sampai saat ini. Mohon perhatian serius pemerintah pusat,” tegas Yoel Mulait pada Rabu, 3 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

06 September

Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Sumule Tumbo menyatakan, kedatangannya ke Jayawijaya guna melihat

persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan. “Ini terkait kesiapan hibah, pinjam pakai asset yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, kita harapkan tim dari 8 kabupaten ini bekerja luar biasa dan sangat solid untuk mendukung persiapan peresmian,” ungkapnya Senin (5/9) kemarin saat ditemui di Gedung Aithosa Wamena. Menurutnya, dari hasil pertemuan dan melihat kesiapan yang dilakukan maka pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan di Kemendagri sehingga keputusan akan dikeluarkan untuk peresmian Provinsi Papua Pegunungan. “Hari ini dapat dilihat sudah merapatkan barisan dan komitmen bersama mendorong percepatan peresmian Provinsi Papua Pegunungan, ini merupakan harapan bersama agar semua bisa berjalan dengan baik serta peresmian 3 DOB ini bisa dilakukan dari Provinsi Papua Pegunungan,” jelas Tumbo (Cenderawasih Pos).

07 September

Plang nama Provinsi Papua Pegunungan akhirnya terpasang sementara waktu di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Selasa, (6/9), kemarin. “Kami hanya memberikan pinjam pakai bangunan dinas pendidikan untuk menjadi kantor gubernur provinsi Papua pegunungan sementara waktu agar pelayanan administrasi dari provinsi yang baru ini bisa berjalan Semestinya,” Ujar Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi. Ia menyatakan, adanya Kantor Gubernur sementara karena menjadi salah satu syarat dari Kementerian untuk peresmian Provinsi Papua Pegunungan (Cenderawasih Pos).

08 September

Plang nama Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang dipasang di Kantor Dinas Pendidikan Jayawijaya dirusak

oleh oknum mahasiswa yang tidak setuju jika Pemkab Jayawijaya meminjamkan kantor tersebut untuk digunakan sementara waktu, Rabu (7/9). Aksi spontan tersebut luput dari pengamanan Kepolisian. “Dari 11 oknum mahasiswa itu, 9 orang diantaranya merusak papan yang terbuat dari baliho serta dua orang yang mengambil gambar,” ungkap Kapolres Jayawijaya, AKBP Usman Napitupulu saat ditemui di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan. “Motif mereka melakukan aksinya diduga karena mereka menginginkan kantor sementara gubernur provinsi Papua pegunungan ditempatkan di mall Wamena bukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya,” ungkapnya. Kapolres menjelaskan, oknum mahasiswa tersebut tergabung dalam HMKJ (Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya) dan HMPJ (Himpunan Mahasiswa pelajar Jayawijaya) (Cenderawasih Pos).

09 September

Papan nama Provinsi Papua Selatan (PPS) telah ditancapkan di depan Gedung Negara, Jalan Trikora Merauke, Rabu (7/9). Sementara untuk sekretariat daerah akan menggunakan Hotel Asmat yang berhadapan dengan Gedung Negara tersebut. Secara timeline memang direncanakan pada Oktober. Tapi semuanya itu tergantung pada kita Pemerintah Daerah atau kita dari tim transisi dalam persiapan. “Kita sudah siap, ini juga merupakan bagian yang terpenting dan pasti juga sesuai dengan rencana Oktober akan segera ditunjuk penjabatnya,” kata Sri Handoko Taruna selaku ketua tim transisi Kelompok kerja 1 Provinsi Papua Selatan (Cenderawasih Pos).

10 September

- Rapat koordinasi satuan tugas pengawalan Daerah

Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dan Kementerian Dalam Negeri di Wamena, Kamis (8/9). Ketua Pokja III Yang juga direktur fasilitas dana perimbangan dan pinjaman daerah (FKPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina keuangan daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo menyampaikan, provinsi maupun kabupaten yang ada di wilayah Papua pegunungan sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. “Para pihak sudah melakukan langkah-langkah strategis, persiapan percepatan sudah kita tentukan bersama gedung-gedung pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan pemerintah provinsi induk Papua yang sudah ditunjuk untuk digunakan sementara,” Kata Sumule dalam kunjungannya ke Wamena (Cenderawasih Pos).

- Staf ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Triwarno Purnomo menyampaikan, satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat mutakhir terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pemakaian antar instansi pusat dan instansi daerah. Terlebih kata Triwarno, ketersediaan data memiliki peran yang sangat penting sebagai basis data pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. “Dengan data yang akurat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan provinsi tersebut,” Kata Triwarno saat rapat koordinasi Papua integrasi satu data (PAITUA), Rabu (7/9) (Cenderawasih Pos).

14 September

- Pemerintah Provinsi Papua dan 4 Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Pemkab Merauke, Pemkab Asmat, Pemkab Mappi, dan Pemkab Boven Digoel sepakat menyalurkan

dana hibah untuk Provinsi Papua Selatan. Penyaluran dana hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesediaan pemberian dana hibah kepada pemerintah provinsi Papua Selatan di kantor Badan pengelola keuangan dan Aset daerah kabupaten Merauke, Rabu (7/9) lalu. Dalam berita acara itu disebutkan, Pemprov Papua akan memberikan dana hibah sebesar 20 M. Kemudian Pemkab Merauke sebesar 20 M, Lalu Pemkab Mappi bersama Pemkab Asmat dan Pemkab Boven digoel juga masing-masing sebesar 10 M. “APBD Mini ini ini disokong oleh dana hibah 4 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan dan dari hasil itu tadi kita telah tandatangani kesepakatan hibah itu untuk 3 bulan ke depan,” Kata Hendoko yang juga merupakan direktur kewaspadaan nasional (Dirwarnas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan pemerintahan umum (Pol dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Cenderawasih Pos).

- Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyerahkan surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kepada 694 guru di kantor BKD Provinsi Papua, Senin (13/9) kemarin. Sebanyak 694 guru sk-nya secara simbolis telah diserahkan, dengan begitu bisa melakukan penyesuaian. Sedangkan untuk 204 orang kami berharap bisa cepat selesai dan diserahkan sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” Ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. “Adapun 922 orang ini akan tersebar di tiga daerah otonomi baru (DOB),” ucapnya (Cenderawasih Pos).

17 September

Rencana pembangunan Polda Papua Selatan seiring

dengan Terbentuknya Provinsi Papua Selatan Polres Merauke telah memiliki lahan seluas 10 ha untuk membangun Polda Papua Selatan tersebut. “Kalau disetujui oleh Kapolda dan Mabes Polri maka posisinya seperti itu, sudah bersertifikat. Kurang lebih 10 hektar di sana (kurik-red). Insya Allah Untuk sementara lahan tersebut cukup,” ungkap Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, Jumat (16/9) (Cenderawasih Pos).

20 September

Pemerintah Provinsi Papua akan memberikan dana hibah sebesar 10 Miliyar kepada masing-masing provinsi pada daerah otonomi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua pegunungan. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan, dana hibah untuk ketiga provinsi baru tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Pemprov Papua pada tahun ini. “Untuk memberikan dana hibah akan berlangsung selama 3 tahun dari 2022 hingga 2024 mendatang,” kata Musa’ad kepada wartawan, Rabu (14/9) (Cenderawasih Pos).

07-08 Oktober

Rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempercepat peresmian dan pelantikan pejabat gubernur tiga DOB Papua akhir Oktober ini dinilai terburu-buru. Ketua MRP, Timotius murib saat dihubungi Jubi, Rabu (5/10) mengatakan, memang sejak awal pemerintah pusat terkesan ingin semuanya serba cepat. Pemerintah terburu-buru mengubah undang-undang Otsus dan membentuk DOB, hingga pengisian perangkat dan pelantikan pejabat Gubernur dengan perizinan MRP. “Ini harus konsisten, pemerintah jangan abal-abal, saya jadi heran bagaimana pemimpin hari ini semua keliru, emosional,

titik. Makanya itu MRP berikan masukan dan saran, supaya harus sesuai aturan jangan dilanggar aturan itu,” katanya. Timotius menilai pemerintah pusat dan DPR RI kompak mempercepat pemekaran provinsi di Papua meski melanggar batas-batas atau aturan. Sebelumnya wakil menteri dalam negeri RI, Wempi Wetipo menyatakan bahwa Kementerian akan mempercepat proses pelantikan pejabat gubernur dan pembentukan struktur pemerintahan di 3 Provinsi baru hasil pemekaran Papua yaitu Papua pegunungan Papua Tengah dan Papua Selatan (Koran Jubi Edisi 07-08 Oktober).

01 November

- Kendati sebelumnya pihak Kemendagri mendorong agar pelantikan pejabat gubernur dan peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dilakukan di Papua namun pelantikan dan peresmian tersebut akan dilakukan di Jakarta. Bupati Merauke, Romandus Mbaraka mengungkapkan bahwa usulan nama pejabat Gubernur Provinsi sudah di meja presiden. “Nah, kita tunggu dalam satu dua Minggu ke depan di awal bulan November ini. Kemarin dengan pak Mendagri sudah memberi informasi resmi dan nanti surat resmi akan menyusul, para bupati yang ada di Selatan Papua ini akan mengikuti pelantikan di Jakarta,” tandasnya. Bupati memastikan bahwa pelantikan pejabat gubernur PPS tersebut akan dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan di Merauke akan dilakukan syukuran setelah pelantikan dan peresmian 3 DOB provinsi tersebut (Cenderawasih Pos).
- Pada Rapat Badan Legislasi (Baleg) di DPR RI, salah satu anggota Baleg Papua, Yan Mandenas pernah mengusulkan soal pembentukan Provinsi Papua Utara (Tabi dan Saireri). Ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Itu

disampaikan Mandenas dalam rapat dengan pendapat Baleg dengan mengusul atas rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Papua Utara pada beberapa waktu lalu. Terkait dengan aspirasi ini menurut Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw sejatinya usulan tersebut pernah bersamaan dengan Papua Barat Daya. Jhony sendiri setuju jika ada kabupaten yang sepakat untuk saling mendukung terkait pemekaran DOB. “Dan untuk pemekaran yang saya pikir karena semangatnya adalah semangat wilayah adat maka sebaliknya kita menunjukkan keadilan dimana jika Papua Utara sudah siap maka tak perlu ragu lagi,” kata Jhony di ruang kerjanya, Senin (31/10). Jadi teman-teman dari tim pemekaran itu sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya. “Dan ingat tujuan dari pemekaran adalah memberikan pelayanan yang lebih baik dan tak ada rentang kendali sehingga saya pribadi mendukung pemekaran tersebut,” bebernya (Cenderawasih Pos).

02 November

Masa transisi dari keberadaan tiga DOB di Papua dikatakan perlu dikaji lebih jauh terutama soal kebijakan anggaran. Pasalnya bila hanya melakukan pemotongan dari anggaran yang diterima oleh Provinsi induk Papua, maka diyakini ada banyak program yang sudah berjalan selama ini akan terganggu. Aspek pendidikan, Kesehatan, dan gaji pegawai termasuk semua sistem yang diterapkan di DPRP terkait kunker atau reses juga berpotensi ikut terganggu. “Kemarin kami sudah menemui dua menteri, pertama pada Rabu (26/10) dengan Menteri Keuangan setelah itu menemui Mendagri pada Jumat (28/10),” ujar Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw di ruang kerjanya, Senin Malam (31/10) (Cenderawasih Pos).

- Belum lama ini Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi

Wetipo pastikan peresmian tiga DOB di Papua, diundur hingga awal November 2022. Terkait ini Kemendagri mengaku bahwa jika tanggal 26 Oktober sudah melakukan pra peresmian. Ia juga meminta laporan dari 3 Pokja yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pengunungan Tengah untuk melaporkan semua persiapan. Hal di atas didukung oleh Musa’ad bahwa sudah terbentuk kelompok kerja. “Bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota cakupan DOB untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan implementasi atas UU nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pengunungan Tengah,” terangnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/11). Lebih lanjut Musa’ad mengatakan bahwa untuk Provinsi Papua pada tahun 2022 dianggarkan sebanyak Rp 10 M dan direncanakan tahun 2023 mendatang akan disalurkan masing-masing untuk tiga provinsi baru yang sudah dimekarkan. “Diharapkan juga tahun 2023 sudah ada APBD dari DOB yang baru, tapi karena belum ada DPR-nya maka APBD-nya dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala daerah,” pungkasnya (Cenderawasih Pos).

- Ketua MRP Timotius Murib mempunyai keinginan agar pembentukan MRP di setiap Provinsi hasil pembentukan DOB hanya satu kantor, yaitu di Jayapura sebagai provinsi induk. “Provinsi boleh berbeda-beda tapi kantornya dalam keputusan itu kami minta supaya berkantor di provinsi induk yaitu di Jayapura,” kata Murib kepada wartawan di kantornya, Senin (31/10). Karena, kata dia, saat ini gedung MRP sudah ada 7 lantai, itupun dipersiapkan untuk nanti

MRP dari 7 Provinsi Papua. Hal ini dipersiapkan sebagai representasi tujuh wilayah adat di tanah Papua yang direpresentasikan dalam MRP sebagai wadah aspirasinya, agar kepentingan rakyat tidak dibicarakan masing-masing wilayah setelah provinsi baru berjalan tetapi berpusat di satu tempat (Cenderawasih Pos).

05 November

- Mempercayakan Orang Asli Papua (OAP) sebagai penjabat Gubernur di tiga Provinsi Baru di Papua adalah wujud nyata dari afirmasi sekaligus pemberdayaan OAP. Hal ini ditegaskan anggota DPRI Dapil Papua, Kamarudin Watubun Tanawini Mora kepada Cendrawasih Pos, Jumat (4/11). “Keprihatinan dan pemberdayaan OAP adalah roh dan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” kata Watubun (Cenderawasih Pos).
- Dengan hadirnya DOB di tiga wilayah adat yaitu Lapago, Meepago, dan Anim-Ha, maka putra asli daerah diharapkan dapat memanfaatkan peluang dengan bekerja sungguh-sungguh membangun masyarakatnya sendiri. Hal ini disampaikan oleh ketua Senat Universitas Cenderawasih, Balthasar Kambuaya. Menurutnya, DOB menjadi peluang bagi putera-puteri asli Papua untuk menentukan masa depannya nanti. “Dengan adanya provinsi baru banyak putera daerah dan menduduki jabatan eselon 1, 2, dan lainnya. Ini menjadi peluang untuk mereka bekerja sungguh-sungguh,” ujarnya (Cenderawasih Pos).

08 November

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Papua, Triwarno Purnomo menyebut,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 sedang dalam proses revisi. “Terbitnya undang-undang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni UU No.12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan Selatan, UU No.15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU No.16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pengunungan turut berpengaruh karena merubah wilayah perencanaan yang semula 29 Kab/Kota, menjadi 9 Kab/kota untuk provinsi Papua induk,” terang Triwarno dalam Rapat Pembahasan Singkronisasi Materi Subtansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua tahun 2022-2024 dengan kabupaten se-Provinsi Papua, Senin (7/11) (Cenderawasih Pos).

09 November

Kodam XVII/Cenderawasih memastikan setelah Provinsi Papua Pengunungan disahkan oleh pemerintah pusat maka bakal didorong pembentukan Korem yang baru terlebih dahulu di wilayah itu dan juga membuka Kodim di beberapa kabupaten yang ada di wilayah Lapago guna menunjang provinsi baru ini. “Saya sudah bilang, karena ini akan mejadi Ibu Kota provinsi maka di sini harus ada pejabat dari TNI yang berpangkat bintang satu dalam jabatan komandan Korem tapi Kodim tetap ada karena ada daerah kabupaten,” ungkapnya, Selasa (8/11) (Cenderawasih Pos).

11 November

- Jumat (11/11), Kementerian Dalam Negeri meresmikan tiga Provinsi yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan

Papua Pengunungan Tengah serta pelantikan Penjabat di tiga Provinsi Baru tersebut. Dalam pelantikan tersebut, beredar nama-nama dari Penjabat Provinsi yang diangkat sebagai Sekda, yakni Doren Wakerwa di Papua Tengah, Yohanes Walilo di Papua Pengunungan dan Muhammad Musa'ad di Papua Selatan. Berkaitan dengan ini juga pasti dibutuhkan tenaga ASN yang berkualitas untuk berbagai jabatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marten Kogoya menyebutkan bahwa hal ini tidak akan berpengaruh pada roda pemerintahan di provinsi induk, Provinsi Papua. Menurutnya, bila ada pelantikan penjabat di tiga wilayah DOB dan pergeseran definitif jabatan maka akan diisi oleh asisten. "Sama sekali tidak mempegaruhi kinerja pelayanan di provinsi induk, begitu juga dengan ASN yang akan ditempatkan di provinsi baru karena ASN yang dari induk telah memiliki kemampuan, secara SDM-nya sudah siap sehingga ketika ditempatkan di provinsi baru mereka langsung bekerja dan melakukan aktivitasnya seperti biasa," jelasnya (Cenderawasih Pos).

- Plt. Kepala BPSDM Papua, Anthony Mirin mengatakan khususnya di provinsi induk ada kurang lebih 7.000 ASN. Masing-masing DOB sudah disiapkan 1.000 ASN. Sehingga total 3.000 ASN yang akan ditempatkan langsung dari provinsi induk. "Ini sangat penting, apalagi Pemrov Papua secara kewilayahan dan geografis sangat luas, sehingga ASN yang ditempatkan di tiga DOB ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik," ucap Anthony (Cenderawasih Pos).

14 November

Usai dilantik Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta pada

Jumat (11/11), Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengaku akan melakukan banyak hal. Menurutnya, yang menjadi prioritas saat ini ialah pembentukan pemerintahan bahkan minggu depan pihaknya akan melantik Sekda dan menyusul perangkat-perangkat penting lainnya sesuai prosedur yang ada. "Penjabat gubernur tidak mungkin kerja sendiri jadi pasti kita siapkan kelembagaannya," ujar Ribka (Cenderawasih Pos).

15 November

Anggota DPR Papua dari Kursi Otsus Jhon NR Gobai mengharapkan agar pemerintah pusat jangan hanya melantik ASN OAP sebagai kontrol untuk memenuhi syarat sebagai penjabat Gubernur, tapi harus ada juga jabatan lain. "Pemerintah Pusat harus bisa mempromosikan ASN OAP di Kementerian Lembaga Pemerintahan Pusat. Hal ini dapat juga dilakukan dengan mengangkat anak-anak Papua yang sedang bekerja pada Kementerian dalam jabatan tertentu serta adanya usulan dari daerah," kata Jhon Gobay di Jayapura, Sabtu (12/11) (Cenderawasih Pos).

19 November

- Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut, sekitar 3.200 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal ditempatkan di tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pengunungan. "Penempatan ASN itu diatur oleh Kemendagri dan kami hanya koordinasi saja," kata Walilo pada Rabu (16/11) (Cenderawasih Pos).
- Penjemputan Penjabat Gubernur Papua Pengunungan telah dibahas bersama Forkopimda dan sudah disepakati Asosiasi Bupati Pengunungan Tengah yang akan bertugas melakukan

penjemputan pada 22 November. “Kami himbau kepada masyarakat membuat satu syukuran yang merupakan satu rekonsiliasi, sebab dalam perjuangan pemekaran, pro dan kontra, ada yang menolak dan menerima, bahkan ada jatuh korban, acara ini dibuat sekaligus secara adat agar menerima pembangunan untuk masa depan Papua Pengunungan,” kata Briur Wenda (Cenderawasih Pos).

- Penjabat Sekda, Valentinus S. Sumito menyampaikan, program 100 hari kerja Penjabat Gubernur Papua Tengah yang pertama adalah pembentukan perangkat daerah dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini yang akan kami kejar, kalau bisa minggu depan kita sudah melakukan pelantikannya terlebih yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni inspektorat, pengelola keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian dan ini semua harus dibentuk duluan,” kata Valentinus kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11) (Cenderawasih Pos).

21 November

Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menyampaikan, tidak menutup kemungkinan pejabat aktif di lingkungan Provinsi Papua seperti kepala Dinas atau badan digeser ke Provinsi DOB. “Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job maupun pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,” ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11) (Cenderawasih Pos).

22 November

- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adam Ariso menyampaikan, hingga kini tahapan pemilu tetap jalan.

Sebagaimana Partai Politik mulai dari pendaftaran hingga dinyatakan lolos untuk mempersiapkan administrasinya. “KPU Papua telah melakukan verifikasi administrasi beberapa partai yang dinyatakan lolos,” kata Adam, Senin (21/11). Sementara untuk tiga DOB, pada prinsipnya KPU menunggu putusan pemerintah yaitu Perpu. “Jika perpu sudah ditetapkan, dengan sendirinya tiga DOB baru ini berjalan, terlebih saat ini Penjabat Gubernurnya sudah dilantik. Tapi aturan tentang Pemilu harus diubah terutama UU nomor 7 baru bisa dipersiapkan 3 DOB,” terangnya (Cenderawasih Pos).

- Ketua Pemuda Baptis West Papua, Sepi Wanimbo mengatakan, pemekaran tiga provinsi baru di Tanah Papua membuka pintu besar bagi transmigrasi di tanah Papua dan Papua Barat yang mengancam eksistensi Orang Asli Papua (OAP). Transmigrasi dalam jangka panjang adalah memindahkan orang-orang ke Tanah Papua,” katanya di Jayapura, Senin, (21/11) (Cenderawasih Pos).
- Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Muhamad Musa’ad menyampaikan, sekalipun nanti ada banyak provinsi di wilayah Papua, tetapi semangat untuk bahu membahu harus menjadi komitmen bersama. “Istilah kita semua ini bersaudara, tidak dibedakan oleh administrasi pemerintahan. Sebab administrasi pemerintahan hanya manajemen atau cara mengelola pemerintahan yang dibagi menjadi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan, dan Papua Induk,” kata Musa’ad kepada Cenderawasih Pos, Senin (21/11). “Semangat dalam ikatan ke-Papuaan, semangat untuk maju bersama, semangat untuk memperjuangkan hak bersama itu tidak terpisahkan, karena itu aspek-aspek kultural yang melekat di

sanubari kita,” sambungnya (Cenderawasih Pos).

- Asosiasi Bupati Papua Pegunungan telah mempersiapkan penyambutan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, Didimus Yahudi, menyatakan bahwa untuk acara syukuran yang digagas tim pemekaran Provinsi Papua Pegunungan, masing-masing Kabupaten telah menyumbang dana sebesar RP 500 juta. “Provinsi Papua Pegunungan untuk masa depan anak cucu kita, sehingga besok kita akan bakar batu besar, karena Tuhan sudah memberikan berkat besar ini untuk kita semua, ini bukan satu orang punya, tapi semua masyarakat Lapago punya,” bebernya saat ditemui di Wamena (Cenderawasih Pos).
- Polres Jayawijaya menyiapkan 579 personel gabungan, baik dari Polres Jayawijaya, Brimob, Amanusa, dan Brimob Batalyon D Wamena serta dari TNI untuk pengamanan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo dan acara syukuran yang dilakukan di Kama, Distrik Wesaput (Cenderawasih Pos).
- Sebelum kedatangan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM lebih dulu datang ke Wamena untuk melihat persiapan yang dilakukan sekaligus menyusun rencana pemerintahan yang akan mulai berjalan. “Yang pertama dilakukan di provinsi yang baru ini membuka rekening kas daerah untuk menampung pendapatan daerah yang bersumber dari hibah 8 kabupaten yang sudah dilakukan MoU beberapa waktu lalu,” ungkapnya (Cenderawasih Pos).

23 November

- Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Provinsi Papua

Pegunungan secara resmi memperkenalkan diri dihadapan ribuan masyarakat yang bergabung dari 8 Kabupaten di Wilayah Lapago di Lapangan Kama, Distrik Wesaput, Selasa (22/11). “Tokoh adat, pemuda, agama, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat bersama pemerintah yang ada membangun masyarakat kita guna menuju pada kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM),” ungkap Nikolaus Kondomo saat acara syukuran (Cenderawasih Pos).

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua masih melakukan tahapan Pemilu di 3 DOB Provinsi di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. “Kami dari KPU Provinsi Papua masih tetap melaksanakan tahapan pemilu serentak di 3 DOB Provinsi di Papua tersebut. Tapi, kalau nanti Perppu sudah ada, maka kami tidak melaksanakan tahapan pemilu serentak di tiga DOB baru ini. Tapi akan dilakukan oleh KPU RI sambil melakukan seleksi komisioner KPU di 3 DOB baru ini. Jadi kami hanya untuk 29 Kabuapten saja,” tandas Melkias Kambuaya, Ketua KPU Provinsi Papua (Cenderawasih Pos).

24 November

Kekhawatiran DPR Papua terkait banyaknya persoalan yang dapat muncul pasca terbentuknya tiga Daerah Otonomi Baru akhirnya dibicarakan dengan pemerintah pusat. Sejumlah hal penting dibahas dan didorong agar menjadi perhatian pemerintah pusat, diantaranya mendesak Kemendagri segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI untuk penetapan APBD Tahun 2023 agar mencari solusi pendanaan di Provinsi Papua dan untuk formasi PNS di 3 DOB di Papua yang harus mengutamakan OAP (Cenderawasih Pos).

25 November

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Keseharian Daerah (Rakerkesda) di Hotel Suni Abepura, Kamis (24/11). Rakerkesda tersebut dihadiri seluruh jajaran dinas kesehatan dari 28 Kabupaten/kota yang ada di Papua. “Rakerkesda kali ini bertemu untuk berpisah sehingga harapannya dari ini bisa buat satu *mapping* pembangunan kesehatan berdasarkan provinsi-provinsi baru,” ujar Robby kepala Dinkes Provinsi Papua. “Rakerkesda ini bertujuan untuk bagaimana lebih lanjutnya mempersiapkan di pemekaran provisi baru,” lanjutnya (Cenderawasih Pos).

26 November

Bagi ASN yang ingin pindah ke Daerah Otonomi Baru, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memberikan kebebasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di bumi Cenderawasih untuk mendaftarkan diri ke BKD. “Walaupun selama ini status kepegawaiannya sebagai pegawai di Provinsi induk, tetapi yang bersangkutan mau pindah ke DOB silahkan saja dan peluangnya terbuka bagi siapa saja yang berstatus sebagai ASN,” kata Kepala BKD, Marten Kogoya, Jumat (25/11) (Cenderawasih Pos).

29 November

- Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengkhawatirkan dampak lain dari lahirnya tiga Daerah Otonomi Baru di Papua. Pasalnya dengan kondisi daerah yang siap baik dari segi infrastruktur maupun perangkat pegawai, diyakini akan ada banyak ASN dari luar Papua yang mengisi kekosongan birokrasi. “Prediksi kami seperti akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini

sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Ia pun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih ‘menganut’ Otsus (Cenderawasih Pos).

- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya siap mendorong agar pembentukan 42 anggota Majelis Rakyat Papua Pengunungan segera dilakukan. “Untuk DOB, kita sepakati ada 42 orang. Ini melalui jalur pengangkatan bukan partai politik,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jayawijaya, Tenus Gombo, Senin (28/11) (Cenderawasih Pos).

02 Desember

Sekda Papua, M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. “Sehingga perlu dilakukan percepatan dalam rangka penyiapan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dengan dilakukannya fasilitas penyusunan dokumen perencanaan daerah oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI berupa asistensi penyusunan RKPD tahun 2023 dan RPD tahun 2024-2026 di 3 DOB,” kata Sekda Papua pada rapat penyerahan hasil fasilitasi penyusunan RKPD 3 Provinsi DOB, Rabu (30/11) (Cenderawasih Pos).

03 Desember

Ada sejumlah usulan yang disampaikan kelompok khusus DPR Papua berkaitan dengan pengisian jabatan pada 3 DOB. Poksus DPR Papua telah menerima aspirasi masyarakat yang

menolak penjabat eselon I, II, dan III yang berasal dari luar Papua. Masyarakat meminta agar ASN yang diangkat yang berasal dari DOB tersebut. “Kami pikir ini semangat dari masyarakat yang perlu diapresiasi. Mereka menganggap sudah mampu dan bisa ikut berkontribusi untuk daerahnya. Masyarakat sampaikan bahwa mereka ingin mewujudkan bagaimana terlibat aktif membangun daerah mereka sehingga kami pikir pemerintah pusat perlu mendengar ini,” ucap Ketua Poksus DPR Papua, John Gobay, Rabu (30/11) (Cenderawasih Pos).

05-06 Desember

Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa meminta Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari delapan Kabupaten di wilayah adat Meepago untuk mengisi kebutuhan ASN Provinsi Papua Tengah. Hal itu disampaikan Badokapa saat dihubungi Jubi via telepon pada jumat (2/12). Mewakili asosiasi DPR Papua Tengah, Badokapa mengatakan bahwa banyak ASN Papua yang bertugas di delapan kabupaten yang kini disatukan menjadi Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat kepangkatan untuk ditunjuk sebagai penjabat untuk menduduki lingkungan Provinsi Papua Tengah. Ia meminta Penjabat Gubernur Papua Tengah memprioritaskan para ASN dari kabupaten Nabire, Dogiai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Mimika, dan puncak Jaya untuk mengisi formasi kepegawaiyan Provinsi Papua Tengah (Koran Jubi Edisi 05-06 Desember).

06 Desember

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Kantor Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang berlokasi di lantai 5 Kantor GKN Jayapura

Selasa (29/11) Pekan lalu. Koordinator BPOKP, Pdt. Alberth Yoku menyampaikan, BP3OK adalah badan yang vertikal dan dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal-hal yang sifatnya khusus afirmatif. Sekjen BP3OPK, Velix Wanggai menyebut, kehadiran badan ini untuk memperkuat sinkronisasi antara Pusat dan Papua. “Kehadiran BPP merupakan sebuah langkah yang bersejarah di dalam perjalanan Otonomi Khusus,” kata Velix usai peresmian Kantor Sekretariat BPP. Sementara itu, Anggota MRP, Toni Wanggai menyebut BPP atau BP3OK memiliki peran strategis untuk mendesain Otsus 20 tahun ke depan yang diprogram dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar. “BPP nanti ada perwakilan OAP dari setiap provinsi tiga DOB, dengan begitu pembangunan Papua benar-benar berdasarkan kearifan lokal OAP sehingga target pembangunan Otsus 20 tahun ke depan tercapai,” ucapnya (Cenderawasih Pos).

08 Desember

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Muhammad Musa'ad menyampaikan, lantaran belum memiliki DPR maka kerja pemerintah daerah di tiga DOB akan langsung diawasi oleh pemerintah pusat. “Tetapi juga diberikan ruang kepada Provinsi Induk untuk melakukan pengawasan tergantung urgensinya. Namun yang lebih condong melakukan pengawasan adalah Pemerintah Pusat karena semua penyelenggaraan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Mendagri,” kata Musa'ad, Rabu (7/12) (Cenderawasih Pos).

09-10 Desember

Wamena Empowerment atau Forum Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Papua Pegunungan meminta supaya

Penjabat Gubernur di Wilayah itu memprioritaskan OAP dalam perekrutan ASN. “Kami meminta kepada penjabat Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan agar segera melakukan perekrutan ASN dan penetapan Jabatan Eselon I, I, dan III untuk memproteksi OAP,” kata Ketua Umum Wamena Empowerment, Sony Lokobal. Pihaknya meminta ASN yang direkrut berasal dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Tolikara, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang (Cenderawasih Pos).

10 Desember

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad usai peresmian provinsi ke 38 tersebut. “Penjabat gubernur bapak Muhammad Musa’ad kami minta amanah yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa serta kepercayaan pimpinan negara bapa presiden kepada bapak agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluruhnya serta setulus-tulusnya,” katanya (Cenderawasih Pos).

12 Desember

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan, hari HAM sedunia menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM RI untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Disampaikannya, trend kekerasan dan pelanggaran HAM juga berpotensi terjadi di tahun 2023 terlebih ada kebijakan DOB. Dengan adanya 4 DOB saat ini, potensi kekerasan sangat subur jika tidak diperhatikan dan digarap dengan baik. “Budaya orang Papua sesungguhnya adalah dialog untuk mencari solusi. Kita semua harus bersatu padu

membudayakan dialog sebagai upaya penghormatan terhadap nilai-nilai dan prinsip HAM,” tutur Ramandey (Cenderawasih Pos).

14-15 Desember

Ketua MRP, Timotius Murib mengharapkan agar kantor MRP hanya mempunyai satu kantor yaitu di provinsi induk atau di kota Jayapura. “MRP boleh ada di provinsi-provinsi, tetapi kantornya di dalam keputusan itu kami minta supaya berkantor di provinsi induk yaitu di Jayapura,” kata murib kepada wartawan di kantornya, Kamis (6/10/2022) (Koran Jubi Edisi 14-15 Desember).

16-17 Desember

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah berkoordinasi dengan delapan kabupaten untuk menyukseskan program Papua produktif melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di masing-masing daerah. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan kabupaten untuk menyinkronkan skala prioritas ke depan sebagaimana arahan Bappenas bahwa ada tiga poin penting yaitu papua sehat, cerdas, dan produktif,” kata Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo di Wamena, Kamis (15/12/2022) (Koran Jubi Edisi 16-17 Desember).

17 Desember

Setelah menunjuk 10 penjabat eselon II pada 1 Desember 2022, Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kembali menunjuk 9 penjabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pelaksana tugas (Plt). Penyerahan SK dilakukan di Kantor sementara Gubernur Papua Selatan, Jalan Trikora Merauke, Jumat (16/12). Menurut Apolo Safanpo, tugas Penjabat Gubernur hanya ada 4 sesuai amanat peraturan

perundang-undangan. Pertama, membentuk struktur organisasi kelembagaan dan mengisi personel pada kelembagaan yang dibentuk tersebut. Kedua, mempersiapkan infrastruktur pemerintahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah definitif nanti. Ketiga, membentuk DPRD Provinsi dan MRP. Keempat, mempersiapkan pemilihan gubernur definitif. “Karena itu, kita sedang melaksanakan pembentukan kelembagaan dan melakukan penempatan person pada struktur yang sudah kita buat dan juga mengisi pegawai dari 4 unsur,” ujar Safanpo (Cenderawasih Pos).

19 Desember

PT Telkomsel berkomitmen terus memberikan pelayanan telekomunikasi hingga ke pelosok Papua, khususnya di tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi sekaligus membuka keterisolasian. “Kami sudah mempersiapkan distributor, pulsa, kartu perdana, dan produk Telkomsel lainnya, di 3 DOB tersebut,” kata General Manager Consumer Sales Telkomsel Regional Maluku Papua Dedfriady Masta, dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Minggu (18/12) kemarin (Cenderawasih Pos).

23 Desember

- Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menyebutkan, melihat kondisi minimnya ASN yang mendaftar ke tiga DOB maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah pembahasan dalam internal bersama Sekda dan Asisten III Kepegawaian Daerah. “Dari hasil pembahasan tersebut lalu kita mengambil langkah-langkah ke depan,” kata Marthen Kogoya kepada Cenderawasih Pos (Cenderawasih Pos).

- Tahapan pemilu di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua sudah bisa berjalan. Kepastian itu menyusul sudah disahkannya pembentukan sekretariat KPU provinsi di masing-masing DOB yang berlangsung sepanjang awal pekan ini. “Sekretaris Jenderal KPU RI sudah meresmikan Sekretariat KPU Provinsi di 4 DOB,” ujar Komisioner KPU RI, Idham Holik, kemarin (22/12). Dengan demikian, tahapan penyerahan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa dilaksanakan (Cenderawasih Pos).

Kronik Otonomi Khusus Papua dan Majelis Rakyat Papua

05 Januari

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyebutkan bahwa amandemen UU Otsus Papua yang baru secara efektif mengakhiri otonomi politik Papua dengan mengambil alih kekuasaan dari pemerintah provinsi dan memberikannya ke Jakarta (Koran Jubi Edisi 5 – 6 Januari).

07 Januari

113 Organisasi dan para juru kampanye Petisi Rakyat Papua (PRP) meluncurkan dukungan Petisi Rakyat Papua tahap ketiga melalui keterangan persnya di Kota Jayapura, Rabu 5 Januari 2022. Pihak Petisi Rakyat Papua menargetkan sebanyak 2 juta dukungan dari Orang Asli Papua untuk menolak Otonomi Khusus dan menuntut pemerintah memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Sampai Desember 2021, PRP telah berhasil mengumpulkan sebanyak 718.179 pendukung petisi tersebut (Koran Jubi Edisi 7 – 8 Januari).

14 Januari

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan revisi kedua UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial pada pasal 20. Salah satu diantaranya adalah memberikan keluasaan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPR Kabupaten/Kota. Beberapa poin lainnya seperti keberadaan lembaga MRP dan MRPB, keberadaan partai politik, tentang dana Otsus Papua, tentang adanya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, terkait dengan persetujuan pemekaran wilayah atau DOB kini juga bisa juga atas persetujuan pemerintah dan DPR selain MRP dan DPR Papua. Poin yang terakhir adalah adanya peraturan pelaksanaan UU Otsus Papua yang menekankan implementasi UU Otsus Papua (Koran Jubi Edisi 14 – 15 Januari).

18 Januari

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menjelaskan bahwa penyerapan dana Otsus di Papua sudah dibagi sesuai dengan Juknis dari pusat yakni ke kabupaten atau kota masing-masing. Menurut Yohanes, selain biaya kesehatan, biaya pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK bahkan sampai perguruan tinggi juga menggunakan dana Otsus (Cenderawasih Pos).

02-03 Februari

Pengujian UU No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di MK masih menjadi agenda prioritas MRP pada tahun 2022. Hal ini dikatakan oleh Ketua MRP, Timotius Murib pada Selasa (1/2). Selain itu MRP juga menetapkan 15 agenda kerja prioritas dalam Rapat Pleno Penutupan Masa Sidang ke-1 tahun 2022 pada Rabu (26/1) (Koran Jubi, 2-3 Februari).

09-10 Februari

Pihak MRP diminta segera mengajukan permohonan uji formal UU No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di MK. Uji formal ini bertujuan menguji apakah proses penyusunan dan pengesahan UU Otsus Papua yang baru itu memenuhi prosedur dan dirumuskan dengan melibatkan masyarakat Papua atau tidak. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di Sentani, 2 Februari 2022 (Koran Jubi, 9 – 10 Februari).

09 Maret

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, Jhon Gobay menemui massa pendemo tolak DOB di Perumnas III, Waena dalam kondisi hujan. Para demonstran menyerahkan aspirasi yang berisi penolakan DOB, Indonesia gagal menyejahterakan OAP, DOB sebagai kepentingan orang tertentu bukan aspirasi masyarakat, keputusan pemekaran DOB dilakukan sepihak sehingga akan menimbulkan konflik. Ia menjelaskan bahwa para pendemo menyampaikan penolakan DOB dan meminta DPR Papua membuka dialog terbuka dengan mengundang elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, kemudian ditindaklanjuti ke Jakarta. “Saya ingatkan pemerintah pusat, jangan ciptakan konflik di Papua. Kita punya memori soal konflik di Timika yang bicara soal pemekaran. Kami tidak mau masyarakat berbenturan dengan aparat dan menjadi korban, sementara aparat sendiri bukan pihak yang membuat keputusan,” tegas Jhon Gobay pada Selasa, 8 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

19 Maret

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, MRP sebagai lembaga representasi kultur OAP tetap bersikap bahwa pemekaran

DOB di tanah Papua harus ditunda, bukan dibatalkan. Ia menyesalkan para bupati yang pergi ke Jakarta dan meminta pemekaran DOB Papua, padahal mereka tahu bahwa Papua tidak layak dimekarkan. “Penundaan pemekaran DOB maksudnya kita benahi dulu semua regulasi Otsus yang ada saat ini. Kemudian, regulasi lain yang berbenturan dengan Otsus, itu yang kita perbaiki dan semua pihak harus terlibat. Kalau sudah bagus baru kita bicara pemekaran di kemudian hari,” tutur Timotius Murib di Jayapura pada Kamis, 17 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

30 Maret

Ketua MRP, Timotius Murib meminta pemerintah Indonesia dan DPR RI supaya tidak melakukan pemekaran di Provinsi Papua lantaran belum ada kajian akademik yang mengatakan bahwa Papua membutuhkan pemekaran atau pembentukan DOB. Ia menjelaskan bahwa masyarakat akar rumput di beberapa kabupaten menolak revisi undang-undang Otsus dan DOB, maka MRP juga menolak pemekaran. “Saat ini masih berlaku masa moratorium pemekaran daerah. Selain itu, indikator dilakukannya pemekaran provinsi juga belum ada sama sekali, baik dari kajian akademis maupun dampak positif di masyarakat, maka kami MRP menolak pemekaran saat ini,” tutur Timotius Murib pada Selasa, 29 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

21 April

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menerima Ketua MRP, Matius Murib, didampingi oleh Wakil Ketua MRP, Yoel Luis Mulait dan Direktur

Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid di Jakarta pada Selasa, 19 April 2022. “Kami mendukung kebijakan pemerintah tentang moratorium DOB. Kami berharap para petinggi di Jakarta bisa memperhatikan aspirasi OAP,” tutur Timotius Murib. Sementara itu, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah berupaya menyejahterahkan OAP agar terwujud perdamaian. Ia setuju apabila pemekaran DOB dilakukan atas pertimbangan dan persetujuan dengan MRP sambil menunggu keputusan judicial review UU Otsus yang dilayangkan oleh MRP ke Mahkamah Konstitusi (Cenderawasih Pos).

22-23 April

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib dan Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait, serta Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta pada 15 April 2022. Dalam pertemuan itu, MRP meminta pemerintah pusat menunda rencana pemekaran Papua dan pembentukan DOB di Papua. “MRP berharap kebijaksanaan dari Jokowi terkait hal tersebut. Saat ini, MRP meminta pembentukan DOB ditunda sampai ada putusan final dari Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa uji materiil UU Otsus Papua hasil amandemen kedua,” tegas Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait. (Koran Jubi Edisi 22-23 April).

26 April

Presiden RI, Joko Widodo menerima delegasi pimpinan MRP provinsi Papua dan MRP provinsi Papua Barat di Istana Negara, Jakarta 25 April 2022. Pada pertemuan itu, Ketua MRP

provinsi Papua menyampaikan dua hal, yaitu *pertama*, MRP menyesalkan perubahan UU yang tidak melalui usulan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 UU Otsus. Substansinya merugikan hak-hak Orang Asli Papua sehingga MRP mengajukan uji materi ke MK. *Kedua*, MRP menyesalkan pembentukan DOB yang tidak melibatkan MRP sesuai ketentuan pasal 76 UU Otsus yang menyatakan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPR Papua. Menanggapi pernyataan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menerima laporan bahwa proses perubahan kedua UU Otsus telah melibatkan DPR-RI, DPD-RI, DPR Papua dan MRP. Tetapi, kalau ada materi yang masih diuji di MK pihaknya akan menghormatinya. Sedangkan terkait pemekaran, Jokowi mengatakan bahwa pada saat dirinya berkunjung ke daerah, selalu ada tuntutan untuk pemekaran daerah. Pemerintah juga memperhitungkan kondisi fiskal keuangan negara, termasuk potensi APBD daerah. Ia berharap apabila ada hal-hal yang belum baik, bisa berkoordinasi dengan para menteri dan jika tidak puas, dirinya tetap membuka diri (Cenderawasih Pos).

29 April

Anggota Komisi II DPR-RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II terbuka terhadap berbagai masukan berbagai pihak termasuk dari MRP terkait pembahasan RUU provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. “Kami membuka diri dengan seluruh elemen stakeholder dari Papua, termasuk MRP yang beberapa waktu lalu meminta agar ketiga RUU tersebut ditunda pembahasannya sampai ada keputusan MK terkait uji materi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua,” tutur Rifqi di Jakarta pada 28 April 2022 (Cenderawasih Pos).

30 April

Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw mengatakan suara penolak DOB oleh MRP tidak mewakili masyarakat Papua. Ia minta MRP jangan bikin “kabur air” mengenai pemekaran DOB karena masyarakat Papua menghendaki pemekaran DOB. “MRP tidak menyaring informasi, hanya memaksakan kehendaknya dan itu hanya sekelompok orang saja. Jangan hanya sepihak menerima yang lain dan menolak yang lain, makanya ada suara dari Tabi, MRP dibubarkan saja. Selama 20 tahun, MRP tidak melakukan fungsi kontrol, memanggil bupati, walikota, gubernur, untuk menanyakan implementasi pasal-pasal di dalam UU Otsus,” tegas Matius Awoitauw pada Jumat, 29 April 2022 di Sentani (Cenderawasih Pos).

02-03 September

- Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan saat berkunjung ke Papua, Jokowi mestinya menyempatkan diri ke kantor MRP, yang merupakan honai atau rumah kultur Orang Asli Papua (OAP). “Harus ke Honai Orang Asli Papua. Honai (Orang Asli Papua) itu MRP,” kata Timotius Murib dalam siaran persnya kepada Jubi, Kamis (1/09/2022) (Koran Jubi Edisi 02-03 September).
- Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) menolak judicial review yang diajukan lembaga kultur Orang Asli Papua itu, belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Ketua MRP Timotius Murib mengatakan dalam putusannya pada Rabu (31/08/2022), MK menolak Judicial review yang diajukan MRP. Judicial review itu dilakukan berkaitan dengan delapan pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, tentang perubahan kedua UU Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “Jadi ini kelihatannya masih [belum] memberikan kepastian hukum, yang tidak pasti. Kenapa? Mahkamah Konstitusi, anggota sendiri di dalamnya itu masih ada pro dan kontra,” kata Timotius Murib dalam siaran pers yang diterima Jubi pada Kamis (01/09/2022). “Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. [Mahkamah Konstitusi] menolak permohonan pemohon dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Kontitusi, Anwar Usman saat membacakan putusan tersebut (Koran Jubi Edisi 02-03 September).

05-06 Oktober

Wakil menteri dalam negeri John wempi wetipo melantik 3 anggota Majelis rakyat Papua pergantian antar waktu sisa masa jabatan 2017-2022. pelantikan terhadap 3 anggota MRP PAW yang digelar di kantor gubernur Papua, Jumat (30/9/ 2022) Dilakukan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI nomor 821. 29-1509 tanggal 15 Juli 2022 . Pelantikan ini berdasarkan surat MRP nomor: 2166/668/ MRP Tanggal 10 Desember 2021 perihal usulan pengisian atas nama Alm Albertus Moyuend Utusan dari adat diganti oleh Petrus safan, Alm Demas tokoro utusan adat digantikan oleh Gerson yulianus hassor, dan ALM Amandus Anakat utusan agama Katolik diganti Drs Alosius Kembana, sehingga Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan PAW anggota MRP Mengesahkan Petrus Sfan Sebagai pengganti antar waktu MRP sisa masa jabatan tahun 2017-2022 yang terhitung dalam sumpah janji itu. Wempi wetipo dalam sambutannya menyampaikan, meski masa jabatan MRP berakhir pada November 2022, pelantikan

merupakan komitmen Pemerintah Pusat dengan SK yang dikeluarkan oleh Mendagri. dia berharap app agar mereka Barusan dilantik terus menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat daerah dan bangsa dan negara tercinta. “ semoga Bakti saudara-saudari saat ini dan kedepannya menjadi sejarah indah bagi Provinsi Papua yang kita cintai,” ungkapnya. “Majelis rakyat Papua memiliki peran strategis dalam memperjuangkan dan melindungi Orang Asli Papua, maka tugas Majelis rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil Provinsi Papua” katanya. (Koran Jubi Edisi 05-06 Oktober).

07 September

Kendati Presiden Jokowi sudah memberi sinyal terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oknum anggota TNI di Mimika segera diproses dan diusut tuntas namun hal tersebut belumlah cukup. Maka DPRP dan MRP sepakat untuk bersama-sama menghadapi Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Ketua Fraksi Gerindra, Yanni menyampaikan agar persoalan kasus mutilasi di Mimika dikawal secara baik. Iya menyarankan baik DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua menghadap presiden di Jakarta. “Kalau kasus Sambo saja semua heboh mengapa yang lebih sadis begitu tidak bisa dibahas sampai ke pusat. Mengapa yang di Papua kita diam. Kita harus segera berbicara sebelum Oktober dan ada gubernur pemekaran dan semua sibuk,” tegas beatrix, Ketua komisi IV (Cenderawasih Pos).

08 November

Majelis Rakyat Papua menggelar rapat pleno masa sidang ke IV tahun 2022 di Aula MRP Kotaraja, Senin (7/11). “Agendanya

adalah masa reses yang kurang ada tujuh hari, dengan tema menyelamatkan tanah dan manusia Orang Asli Papua (OAP). Ini adalah tema besar MRP selama periode ini,” kata Ketua 1 MRP, Yoel Luiz Mulait usai rapat pleno, Senin (7/11). Ia mengatakan ada 12 keputusan kultural yang akan disosialisasikan oleh masing-masing anggota ketika reses di masing-masing tempat. Keputusan kultural itu di antaranya; larangan jual beli tanah, larangan peredaran minol, larangan untuk pemberian gelar kepala suku atau ondoafi kepada mereka yang bukan pemilik hak ulayat dan lain-lain (Cenderawasih Pos).

10-11 Oktober

Ketua MRP, Timotius murib mempunyai keinginan agar pembentukan MRP di setiap provinsi hasil DOB, hanya memiliki satu kantor yaitu Jayapura sebagai provinsi induk. Hal itu disampaikan Timotius murib sesuai keinginan MRP dan dituangkan juga dalam 12 keputusan MRP, Yang salah satunya meminta kepada pemerintah pusat agar MRP dari 7 wilayah adat Tetap Satu Atap atau satu kantor. “MRP boleh ada di provinsi-provinsi, ya tapi kantornya di dalam keputusan itu kami minta supaya kantor di provinsi induk yaitu di Jayapura,”. kata Murib kepada wartawan di kantornya, Kamis (6/10) (Koran Jubi Edisi 10-11 Oktober).

12-13 Oktober

Majelis Rakyat Papua menggelar pembukaan masa sidang IV dalam rangka melaksanakan seluruh program kerja di triwulan IV melalui Pokja Pokja. Ketua MRP Timotius Murib mengatakan setelah 7 hari melakukan kunjungan kerja melalui reses kepada masyarakat di wilayah Tabi yakni Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan kota Jayapura, MRP melakukan pleno pembukaan

untuk program kerja. Ia menjelaskan dalam waktu dekat MRP juga akan menggelar Hari Budaya Papua pada 30 Oktober 2022, Di mana 19 buku hasil kerja MRP sejak periode pertama hingga ketiga akan dibagikan ke semua kabupaten dan kota di Papua. “Selain itu MRP juga di masa sidang IV ini akan mensosialisasikan 12 keputusan kultural yang telah dibuat kepada masyarakat maupun pemerintah daerah di seluruh Papua,” katanya usai pembukaan pleno masa sidang IV di ruang sidang MRP pada Kamis (6/10/2022) (Koran Jubi Edisi 12-13 Oktober).

17-18 Oktober

Majelis Rakyat Papua masih menunggu regulasi atau mekanisme untuk mengganti Pimpinan dan anggota MRP periode 2017-2022 yang masa jabatannya berakhir pada 27 November 2022. Ketua Majelis rakyat Papua, Timotius murib mengatakan, sebagaimana yang pernah dilakukan saat MRP periode pertama dan kedua, pernah dilakukan saat melakukan perpanjangan masa jabatan Pimpinan dan anggota MRP, untuk melaksanakan tugas seperti biasanya. “MRP anggota akan berakhir pada 27 November 2022, tinggal sebulan lagi aktif untuk kerja. Sementara menunggu pengisian rekrutmen anggota MRP periode berikutnya. Saya pikir pemerintah telah menyediakan rujukan atau dasar hukum untuk melaksanakan penambahan jika belum ada pengisian,” katanya kepada wartawan usai pembukaan pleno masa sidang IV, Kamis (6/10/2022) di ruang sidang MRP. Ia menjelaskan, Setelah masa jabatan 2017-2022 belum ada pengisian hasil rekrutmen anggota baru, maka pemerintah pasti akan memperpanjang masa jabatan yang ada saat ini (Koran Jubi Edisi 17-18 Oktober).

22 November

- Pada tanggal 21 November diperingati sebagai hari Otonomi

Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Semua aktivitas pemerintahan dan lainnya diliburkan. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 003/12605/SET tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama bulan Oktober dan November. Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar hari libur, melainkan harus menjadi permenungan bagi masyarakat Papua. "Sekarang masing-masing berpikir apa yang sudah dibuat untuk Papua dan kita punya kontribusi apa untuk membangun Papua, tidak lagi pada tataran mendebatkan hal-hal yang tidak penting," ucap Musa'ad kepada Cenderawasih (21/11) (Cenderawasih Pos).

- Setiap 21 November diperingati sebagai hari Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Tahun ini sudah memasuki tahun ke 21 sejak Undan-Undang Otsus ditetapkan pada tahun 2001. Pada momen hari Otsus ini, Ribka Haluk menilai bahwa Otsus sudah memberikan dampak yang besar bagi Papua. "Otsus ini kita sudah rasakan, ada Otsus yang berhasil, ada yang masih dalam tahapan perbaikan dan seterusnya," ujar Ribka ketika ditemui di Timika pada Senin (21/11) (Cenderawasih Pos).

03 Desember

Dana Otsus yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Jayapura diharapkan bisa dialokasikan untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi dana Otsus ini diharapkan juga memprioritaskan sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didiknya OAP agar pemanfaatan dana Otsus tepat sasaran. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam penyampaian pendapat komisi gabungan DPRD kota

Jayapura yang disampaikan Yoan A. Wambitman, ST Dalam sidang di DPRD Kota Jayapura, beberapa hari lalu (Cenderawasih Pos).

09-10 Desember

- Anggota MRP Pokja Agama, Toni Wanggai mengharapkan agar 12 keputusan kultural yang sudah disosialisasikan dapat diperkuat dengan peraturan daerah khusus, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut dikatakan Wanggai saat mensosialisasikan 12 keputusan kultural tahun 2021 dan tahun 2022 kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, FKUB Kota dan Kabupaten Jayapura, serta para pemimpin agama di Kota Jayapura yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Senin, (14/11/2022). 12 surat keputusan MRP ini masih sebatas imbauan moral, agar Orang Asli Papua dapat menjaga atau menyelamatkan manusia dan tanah Papua, sehingga Orang Asli Papua bisa diproteksi atau dilindungi dan ada keberpihakan terhadap Orang Asli Papua sebagai pemilik negeri ini (Koran Jubi Edisi 09-10 Desember).
- Majelis Rakyat Papua menggelar sidang rapat pleno dalam rangka pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus atau Raperdasus Provinsi Papua tentang tata cara pemilihan anggota MRP yang baru. Diketahui masa jabatan anggota MRP periode 2017-2022 telah berakhir pada 27 November lalu, sedangkan untuk memperpanjang masa jabatan masih dalam proses di Kemendagri. Ketua MRP, Timotius Murib meminta anggota MRP untuk melihat secara jeli Raperdasus Provinsi Papua tentang pemilihan anggota baru dengan memberikan pertimbangan dan penguatan dalam draf. "Pemberian pertimbangan anggota MRP hari

ini menentukan pemilihan anggota MRP sehingga harus lihat baik apa yang perlu ditambahkan dan dikurangi, agar keberpihakan proteksi terhadap Orang Asli Papua dalam lembaga MRP kuat dan solid,” ucap Murib saat pleno di aula MRP, Selasa (6/12/2022) (Koran Jubi Edisi 09-10 Desember).

15 Desember

Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program USAID Kolaborasi mengharapkan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dapat lebih memberikan keberpihakan terhadap gender yakni perempuan, anak dan kaum rentan. “Melalui Program USAID Kolaborasi, kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus,” kata Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu di Jayapura, Rabu (14/12). “Dari data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat terendah secara nasional,” ujar Caroline (Cenderawasih Pos).

“Dialog Tidak Membunuh Siapa Pun”

— *Alexandro F. Rangga OFM*

Pengantar

Kronik sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa Papua tidaklah damai. Ketidakdamaian ini ditandai oleh beragam persoalan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, roda pemerintahan yang buruk dan koruptif, gesekan antara pihak pro kontra Otsus Jilid II dan Daerah Otonomi Baru (DOB) maupun penyelesaian kasus-kasus HAM yang tidak transparan seperti kasus mutilasi warga oleh aparat di Timika. Hal ini makin diperparah oleh konflik bersenjata yang tak kunjung tuntas antara TPNPB/OPM/KKB dengan TNI/Militer yang menelan korban jiwa dari kedua belah pihak maupun warga sipil.

Berhadapan dengan situasi ini, ada banyak pihak yang berusaha untuk mencari dan menemukan solusi bagi Papua Tanah Damai. Salah satu solusi yang dilakukan ialah menginisiasi kembali dialog damai Jakarta-Papua. Kali ini Komnas HAM RI menjadi inisiatornya. Terlepas dari pro kontra akan inisiatif ini, usaha penyelesaian persoalan Papua yang mengedepankan cara-cara damai dan bermartabat patut diapresiasi.

KASUS PELANGGARAN HAM PAPUA

Yang Ditetapkan Oleh Komnas HAM RI

Kasus Biak Berdarah Juli 1998

Kasus Biak Berdarah diduga dilakukan oleh aparat keamanan saat membubarkan pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai menuntut referendum di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, 6 Juli 1998. Sejumlah korban tewas, luka, dan cacat seumur hidup dalam tragedi berdarah tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

Kasus Wasior Berdarah 2001

Kasus Wasior Berdarah bermula dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan warga sipil di Desa Wondiboi, Distrik Wasior pada 13 Juni 2001. Kepolisian kemudian mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa lainnya. Dikabarkan, pencarian pelaku berujung pada kekerasan terhadap penduduk sipil. Sebanyak empat orang tewas dan 39 orang disiksa. Selama 20 tahun berjalan, kasus ini belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Wamena Berdarah April 2003

Kasus Wamena Berdarah terjadi ketika masyarakat Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Perayaan itu dikejutkan dengan penyisiran kelompok tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat. Buntutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran di 25 kampung. Dikabarkan Komnas HAM 9 orang meninggal dunia, dan 38 luka berat.



Dan masih banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang tak terbilang jumlahnya yang terjadi di Tanah Papua

Kasus Universitas Cenderawasih Jayapura Maret 2006

Tragedi berdarah ini terjadi saat mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi menolak keberadaan PT Freeport di Papua. Aksi itu berujung bentrokan mahasiswa dengan polisi. Komnas HAM mencatat peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun belum ada data pasti berapa orang korban dari pihak mahasiswa. Peristiwa ini juga belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Paniai Berdarah Desember 2014

KontraS mencatat peristiwa penembakan pada warga di Paniai, Papua dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay. Kejadian itu menewaskan empat orang di TKP dan satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan. Kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar pada September 2022.

Dialog Yes, Mediator No

Negara memang mesti menjadi garda terdepan untuk memulai dialog di Papua khususnya dengan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Salah satu tokoh Papua yang juga mantan tahanan politik, Filep Karma mengatakan bahwa pada tahun 2019, Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan mau berdialog dengan pihak pro-kemerdekaan Papua. Pernyataannya ini disampaikan di Istana Bogor sebagai respon terhadap usulan sejumlah anggota DPRD se Papua dan Papua Barat. "Tapi tidak terjadi sampai hari ini," ujar Karma. Kritikan Karma ini makin menguatkan sindiran Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari kepada Presiden Jokowi yang lewat cuitannya di Twitter terkait perang di Ukraina menyerukan, "Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membayakan dunia!" sementara pada saat yang sama Presiden diam saja ketika terjadi konflik bersenjata di Papua yang memakan korban baik dari kedua belah pihak maupun warga sipil. Warinussy mengatakan, "Apakah bisa Presiden menyampaikan juga kepada semua pihak yang sedang mengangkat senjata di Papua untuk menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan rakyat sipil Papua?"

Di tengah persoalan dan konflik Papua yang tak kunjung usai inilah, Komnas HAM RI berinisiatif untuk memulai lagi proses dialog damai Jakarta-Papua. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya telah menginisiasi dialog damai antara pemerintah dan Orang Asli Papua (OAP) termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ahmad mengklaim Presiden Jokowi, Menkopolkam Mahfud MD, hingga TNI-Polri telah setuju untuk melakukan dialog damai tersebut.

Ada pro dan kontra yang muncul terhadap inisiatif ini. Sikap pro ditunjukkan oleh banyak pihak yang menilai dialog damai sebagai cara yang bermartabat, satu-satunya cara menyelesaikan konflik di Papua, dan dapat menyudahi kekerasan berujung korban jiwa dari sipil, militer, maupun TPNPB/OPM/KKB. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua, Frits Ramandey menilai dialog merupakan pendekatan kemanusiaan karena *soft* dan penuh cinta akan perdamaian. Meskipun ada banyak kritik, pihaknya mengingatkan bahwa konflik di Papua hanya bisa diakhiri melalui dialog atau perundingan. Hal senada disampaikan oleh para tokoh agama, tokoh adat maupun pemerintah. Pimpinan dan Perwakilan Gereja-Gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam pertemuan dengan Wakil Presiden, K.H. Maruf Amin di Istana Negara pada 20 April 2022, menyampaikan pemikiran kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan bagi Wapres dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua melalui pendekatan humanis dan non-militer. Sedangkan Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV mendorong pemerintah pusat untuk berani melakukan dialog damai di Tanah Papua. Dialog damai itu penting untuk menyelesaikan segala persoalan yang dialami Orang Asli Papua. Dari pihak pemerintah, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Cahyo Pamungkas menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan secara martabat melalui dialog.

Selain dukungan, tidak sedikit pula mereka yang menolak inisiatif dialog oleh Komnas HAM RI. Komnas HAM dinilai sebagai lembaga negara yang netralitas mediasinya diragukan. Apalagi kapasitas Komnas ialah persoalan HAM bukan isu politik.

Ketua ULMWP, Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari Negara Indonesia. Belum lagi sikap TPNPB yang memang tidak mau berdialog tetapi menuntut hak penentuan nasib sendiri. Panglima Tertinggi TPN-OPM, Demianus Magai Yogi menegaskan pihaknya menolak tegas rencana dialog Jakarta Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI. Ia mengatakan dialog harus dilakukan di luar negeri dengan melibatkan OPM, ULMWP, dan PBB karena masalah mendasar di Papua adalah status politik Papua bukan soal kesejahteraan. “Di balik dialog tim 100 justru membawa Otsus. Kami pikir kalau dialog Jakarta-Papua maka yang dibawa adalah pemekaran. Padahal yang kita inginkan adalah menentukan nasib sendiri. Karena selama Otsus, saudara-saudara kami yang ada di pelosok tidak merasakan pembangunan sama sekali. Kalau ada DOB lagi, maka militer tambah banyak dan ruang hidup OAP semakin dibatasi,” tegasnya. Selain netralitas Komnas HAM diragukan, tempat pelaksanaan dialog juga menjadi isu yang tak kalah pelik. Tempat pelaksanaan dialog diharapkan agar dilakukan di luar negeri dengan melibatkan OPM, ULMWP, dan PBB.

“Dialog Tidak Membunuh Siapa Pun”

Dalam salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Imparsial, yang menghadirkan sejumlah ahli, tokoh masyarakat, dan juru damai terkuak kenyataan bahwa pembangunan bukan jawaban mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Papua. Alat mencapai tujuan itu adalah dialog antar pemangku kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat. Terlepas dari sikap pro dan kontra berkaitan dengan dialog damai Jakarta-

Papua, semua pihak mengakui bahwa dialog adalah cara yang paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik di Papua karena akar masalah konflik di Papua bukan hanya kemiskinan. Ada banyak isu yang menurut para peneliti tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga politik, sosial, hukum, dan budaya. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Prof. Cahyo Pamungkas, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), “Dialog tidak membunuh siapa pun. Konflik hanya dapat diselesaikan melalui jalan dialog”.

Dalam kaitannya dengan itu, pendapat Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, patut menjadi catatan bagi semua pihak yang berjuang bagi Papua Tanah Damai. Irine mengingatkan bahwa banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian. Pembangunan (*development*) bukan perdamaian dan perdamaian bukan pembangunan. *Peacebuilding* (upaya menciptakan perdamaian), kata Irine, adalah sebuah proses yang bertujuan memperbanyak titik temu (*connectors*) dan mengurangi pemecah belah (*dividers*) sehingga pembangunan dapat berlangsung.

Bertolak dari pendapat Irine tersebut titik temu (*connectors*) utama dialog Jakarta Papua ialah pemerintah Indonesia sendiri dengan orang Papua. Pemecah belah (*dividers*) adalah para pihak yang tidak ingin Papua menjadi tanah Damai. Jika titik temu sudah jelas maka yang perlu dipikirkan ialah model dialog maupun mediator dialog sebagaimana disebutkan tadi. Model dialog yang dipikirkan ialah dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti dalam dialog Jakarta-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh NGO asal Finlandia, *Crisis Management Initiative*. Yang terlibat dalam dialog tentunya ialah semua pihak. Model dialog ini dapat dimulai dengan dialog-dialog

kohesi sosial seperti dialog dengan seluruh elemen masyarakat atau dialog kategorial antara pemangku kepentingan.

Penutup

Komnas HAM RI tentunya tidak termasuk *dividers* karena merekalah yang berinisiatif mendorong kembali Dialog Jakarta-Papua. Buah kerja mereka misalnya terlihat dari kesepatakan jeda kemanusiaan yang ditandatangani ULMWP, MRP, dan Komnas HAM di akhir tahun 2022.

Hal ini memberi kita harapan bahwa kompleksnya persoalan di Papua dapat diselesaikan jika kita mau duduk bersama, membicarakan persoalan yang ada, dan menemukan solusinya. Dalam arti inilah, dialog sebagai sarana, apapun model atau metodenya, menjadi cara paling jitu sekaligus bermartabat dalam menyelesaikan konflik demi membangun Papua Tanah Damai.

Kronik Membangun Perdamaian dan Dialog di Papua

02 Februari

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua, Frits Ramandey, mendesak agar pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pendekatan dengan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Menurutnya, pendekatan untuk menyudahi kontak senjata di suatu daerah bukan dilakukan oleh anggota Polisi dan TNI saja tetapi harus bersinergi dengan Pemda. Pendekatan yang *soft* dan kasih damai merupakan pendekatan kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Frits pada Minggu (1/2) di Jayapura (Cenderawasih Pos).



07 Februari

Jaringan Damai Papua (JDP) menilai masalah yang dihadapi di Tanah Papua adalah kebijakan tentang Papua yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat. Yan Warinussy, Juru Bicara JDP mengatakan bahwa menghadapi fakta seperti itu dan situasi saat ini sebaiknya pemerintah membuka penyelenggaraan dialog Papua-Jakarta dengan rakyat Papua. Dialog ini melibatkan semua komponen (Cenderawasih Pos).

04 Maret

Terkait perang di Ukraina, Presiden Jokowi melalui akun twitternya berseru, “Stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membayakan dunia!” Terhadap seruan tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan mengapa cuitan tersebut tidak berlaku pada saat terjadi kontak senjata di Papua? “Apakah bisa Presiden menyampaikan juga kepada semua pihak yang sedang mengangkat senjata di Papua untuk menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan rakyat sipil Papua?” Sementara itu, praktisi hukum, Gustav Kawer mengatakan bahwa dampak perang dapat meningkatkan kekacauan, kemiskinan, dan sakit penyakit. Ia menegaskan, Indonesia gemar berperang dengan rakyatnya sendiri dan terlalu lama yang ada di Papua. “Perang itu telah ada sejak tahun 1961 sampai saat ini, perang itu masih ada. Kekacauan masih terjadi di Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, dan hampir merata di beberapa daerah di Pegunungan, termasuk yang terjadi di Maybrat, Papua Barat,” tuturnya pada Rabu, 2 Maret 2022. Gustav juga mengatakan kalau Indonesia ingin tampil menciptakan perdamaian dunia,

seharusnya tidak mengirim banyak pasukan ke Papua. “Cukup kirim dokter dan tenaga pendidikan di daerah konflik untuk menjawab masalah kesehatan dan pendidikan yang berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan di Papua,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

11 Maret

- Panglima Tertinggi TPN-OPM, Demianus Magai Yogi menegaskan pihaknya menolak tegas rencana dialog Jakarta Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI. Ia mengatakan dialog harus dilakukan di luar negeri dengan melibatkan OPM, ULMWP, dan PBB karena masalah mendasar di Papua adalah status politik Papua bukan soal kesejahteraan. “Di balik dialog tim 100 justru membawa Otsus. Kami pikir kalau dialog Jakarta-Papua maka yang dibawa adalah pemekaran. Padahal yang kita inginkan adalah menentukan nasib sendiri. Karena selama Otsus, saudara-saudara kami yang ada di pelosok tidak merasakan pembangunan sama sekali. Kalau ada DOB lagi, maka militer tambah banyak dan ruang hidup OAP semakin dibatasi,” tegas Demianus Magai Yogi, pada Kamis, 10 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya telah menginisiasi dialog damai antara pemerintah Joko Widodo dan Orang Asli Papua (OAP) termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pernyataan ini dibenarkan oleh Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara. “Betul, kita sudah dapat “ijin” untuk ketemu dan dialog dengan OPM. Baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Beka kepada Jubi, Kamis (10/3). Dalam pernyataannya Ahmad Taufan Damanik mengklaim Presiden Jokowi, Menkopolkam Mahfud

MD hingga TNI-Polri telah setuju untuk melakukan dialog damai tersebut. Lanjut Beka, Komnas HAM RI akan datang ke Papua minggu depan untuk membahas wacana ini dengan berbagai pihak. Wacana dialog damai ini ditanggapi oleh mantan Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma. Mantan tapol ini tidak yakin Komnas HAM RI bisa menjalankan proses dialog damai yang mereka wacanakan ini. Sekalipun Presiden Jokowi dikatakan oleh Komnas HAM RI sudah setuju proses dialog ini dimulai, Karma meragukannya karena Komnas HAM RI selama ini menurutnya tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah HAM di Tanah Papua. “Komnas HAM Indonesia ini selama ini ada dimana? Selama ini kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua hanya dipublikasikan tanpa penyelesaian. Setelah bikin publikasi terus kasih tinggal begitu saja. Baru sekarang mau inisiasi dialog?” tanya mantan Tapol Papua ini. Karma mengatakan tahun 2019 lalu Jokowi sudah pernah mengatakan hal yang sama, mau berdialog dengan pihak pro-kemerdekaan Papua. Pernyataannya ini disampaikan di Istana Bogor. Pernyataannya ini merespon usulan sejumlah anggota DPRD se Papua dan Papua Barat. “Tapi tidak terjadi sampai hari ini,” ujar Karma (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/dialog-damai-papua-ini-respon-kelompok-pro-papua-merdeka/>).

14 Maret

Ketua ULMWP, Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari negara Indonesia. Komnas

HAM RI menargetkan dialog damai antara pemerintah dan warga asli Papua, termasuk dengan ULMWP dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bisa diselenggarakan tahun ini. “Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Namun Taufan mengatakan dialog damai di Papua nantinya akan sedikit berbeda dengan yang pernah dilakukan di Aceh. Dialog damai di Papua rencananya akan dimediasi langsung oleh Komnas HAM. Berbeda dengan dialog antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh NGO asal Finlandia yaitu Crisis Management Initiative. Taufan mengklaim hal itu dipilih lantaran masih banyak orang Papua yang percaya dengan lembaga di dalam negeri sehingga mereka bersedia dimediasi oleh Komnas HAM (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/benny-wenda-komnas-ham-tak-punya-kapasitas-dialog-sudah-terjadi-di-msg-dan-pif/>).

15 Maret

Menyikapi kritik dan penolakan terhadap inisiatif dialog Jakarta-Papua oleh Komnas HAM RI, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya menerima kritik apa pun bentuknya, tetapi perlu diingat bahwa konflik di Papua hanya bisa diakhiri melalui dialog atau perundingan. Komnas HAM mempunyai tanggung jawab memediasi. “Kami akan berkoordinasi dengan Jaringan Damai Papua (JDP), lembaga Gereja, pemerintah dan para pihak lainnya untuk mendorong dialog damai Jakarta-Papua,” tutur Frits Ramandey pada Senin, 14 Maret 2022. Sementara itu, akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan mediator-fasilitator dialog Jakarta-Papua adalah

pihak yang sudah disetujui dan diterima oleh kedua pihak, Jakarta dan Papua. Jakarta menerima mediasi yang diinisiasi Komnas HAM RI, tetapi Papua meminta keterlibatan pihak asing, sebagai mediator. Maka, Komnas HAM dan mediator asing bertemu, mendiskusikan posisi mereka sebagai mediator, kemudian membangun dialog Jakarta-Papua. “Menurut saya, Komnas HAM jangan urus isu politik Papua. Komnas HAM lebih baik urus kasus pelanggaran HAM berat Paniai, jangan alihkan tanggung jawab urus isu dialog Jakarta-Papua,” tutur Marinus Yaung pada Senin, 14 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

17 Maret

Inisiasi dialog damai Papua yang diajukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mulai dilakukan lembaga tersebut dengan melakukan atau menjaring masukan dari berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah maupun forkopimda. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Beka Ulung Hapsara kepada wartawan usai bertemu bupati dan Forkopimda Jayawijaya, Kamis (17/3), di kantor bupati, menyebut pihaknya kini masih menjaring masukan dari berbagai pihak. Mengenai siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam dialog damai Papua nanti, Beka Ulung Hapsara mengaku Komnas HAM belum sampai ke arah itu. “Hari ini saya di Wamena, kami akan ke tempat-tempat lain untuk komunikasi, tentu saja tidak hanya dengan pemerintah kabupaten maupun forkopimda, tetapi dengan masyarakat sipil, tokoh gereja, dan tokoh adat, sehingga nanti akan keluar kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk dialog,” katanya. Menurutnya, hal yang digagas ini bukan dialog elite, tetapi melibatkan semakin banyak aktor. Di mana, target Komnas HAM yang paling utama tahun ini adalah bagaimana menurunkan angka

kekerasan yang sering terjadi di Papua, supaya tidak ada korban jiwa baik masyarakat maupun aparat (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/komnas-ham-ri-belum-tentukan-siapa-saja-yang-berdialog-fokus-turunkan-angka-kekerasan/>).

18 Maret

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara melakukan pertemuan dengan para pihak di Wamena, Jayawijaya untuk mendiskusikan dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Ia menjelaskan bahwa terkait dialog Jakarta-Papua, harus memperhatikan karakteristik masing-masing daerah, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kebijakan pemerintah harus sampai di tingkat masyarakat. “Siapa yang akan ikut dalam dialog, Komnas HAM belum sampai ke sana. Ini baru proses awal. Ini bukan dialog para elit, melainkan melibatkan banyak aktor politik untuk menurunkan intensitas kekerasan yang sering terjadi di Papua, supaya tidak terjadi lagi korban jiwa, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan,” tutur Beka Ulung Hapsara pada Kamis, 17 Maret 2022 di Wamena (Cenderawasih Pos).

22 Maret

Menyikapi rencana dialog damai yang diusung Komnas HAM RI, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengatakan dialog adalah cara mengakhiri pertumpahan darah di Papua karena dialog tidak membunuh siapa pun. Tetapi, dialog itu perlu disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai yaitu Negara dan OPM. “Komnas HAM RI punya niat baik mendorong dialog antara Negara dengan OPM-TPNPB, tetapi kenyataan bahwa Komnas HAM tidak memiliki taring mendorong penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran HAM di Papua. Karena itu, tawaran dialog dalam bentuk apa pun yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah Indonesia pasti OAP dan OPM tolak,” tegas Theo Hese gem pada Senin, 21 Maret 2022. Ia menambahkan bahwa dialog yang digagas oleh Komnas HAM RI hanya wacana publik dan tidak menyentuh substansi permasalahan Papua. Orang Asli Papua tidak bisa ditipu lagi sebab OAP sudah belajar sesuatu yang akan terjadi ke depan (Cenderawasih Pos).

23 Maret

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berupaya menggelar dialog damai untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Ketua Komnas HAM RI, Taufan Damanik mengatakan pihaknya mendorong terjadinya dialog antara pemerintah dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ada di dalam dan luar negeri demi mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di Papua. “Kami melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh di Papua. Ke depan, saya akan sering ke Papua. Kita perlu menjelaskan berkali-kali, dan kami yakin pada waktunya nanti para pihak ini akan memahami dan setuju menyelesaikan masalah Papua dengan negosiasi, bukan dengan senjata. Sebab, menyelesaikan masalah dengan senjata hanya mendapatkan data-data korban jiwa dari warga sipil, TNI-Polri, dan TPNPB,” tutur Taufan Damanik pada Selasa, 22 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

05 April

Ribuan pedemo dari masyarakat Lapago melakukan aksi damai di kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Selasa (5/4), untuk menolak adanya rencana dialog yang digagas Komnas HAM RI tentang segala persoalan HAM di Papua selama ini. Sebelum tiba di kantor DPRD, massa berkumpul di sejumlah titik seperti di

Sinakma, Wouma, Hom-Hom hingga Pikhe. Massa melontarkan aspirasinya sepanjang jalan menuju titik kumpul utama, bahwa mereka menolak dialog yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Setibanya di halaman kantor DPRD Jayawijaya, perwakilan masarakat langsung menyampaikan aspirasi mereka, baik dari perwakilan pemuda, agama, perempuan maupun para tokoh tentang rencana dialog HAM Jakarta-Papua hingga rencana pembentukan DOB maupun Otsus Jilid II.

Kaitanus Ikinia selaku koordinator atau penanggung jawab aksi dalam orasinya menyampaikan, perjuangan rakyat West Papua bukanlah untuk berdialog, karena dialog Jakarta-Papua sudah “mati” sejak 2017 lalu.

“Lalu kenapa sekarang ini muncul lagi rencana atau niat itu, ada apa? Padahal sudah sejak lama dialog ini ditawarkan, tetapi Indonesia acuhkan jadi kalau mau dialog lagi buat apa?” kata Ikinia. Ia juga menyebut aksi itu bertepatan dengan *hearing* publik yang dilakukan pemerintahan parlemen Belanda dengan massa pendukung isu Papua. Menurutnya, rakyat Papua lebih memilih Indonesia membuka akses agar Komisi Tinggi Dewan HAM PBB bisa ke Papua untuk menyelesaikan persoalan HAM selama ini. “Kami ingin Indonesia segera membuka akses bagi Dewan HAM PBB ke Papua, jika aspirasi ini ditanggapi tidak sesuai keinginan rakyat Papua, maka kami akan kembali melakukan aksi serupa lagi dengan cara kami sendiri,” katanya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/ribuan-pedemo-padati-dprd-jayawijaya-tolak-dialog-komnas-ham/>).

06 April

Ribuan warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 5 April 2022 menggelar demonstrasi menolak rencana dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi oleh KOMNAS HAM

RI. Koordinator aksi, Kaitanus Ikinia mengatakan bahwa demonstrasi yang digelar untuk mempertanyakan maksud dan tujuan rencana digelarnya dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI. “Kami masyarakat Papua di La Pago, mempertanyakan tujuan dialog dari Komnas HAM RI dan kami menolaknya! Masyarakat Papua hanya menginginkan dialog yang difasilitasi oleh internasional atau PBB. Itu saja yang kami minta,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pemerintahan Sementara West Papua, Herman Kosay mengatakan bahwa permasalahan Papua sudah masuk ranah internasional sehingga hanya dapat diselesaikan oleh Dewan HAM PBB. “Kami minta Negara membuka akses untuk kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Negara ini adalah Negara hukum, tetapi kenapa terjadi banyak pembunuhan terhadap Orang Asli Papua? Karena itu tidak diperlukan dialog dengan KOMNAS HAM RI, DOB atau Otsus, melainkan memberikan kesempatan kepada Dewan HAM PBB melakukan investigasi pelanggaran HAM,” tegasnya. Sedangkan Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni yang menerima massa memberikan apresiasi kepada massa dan Polres Jayawijaya, yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian aspirasi. “Kantor DPRD adalah rumah bagi masyarakat dan tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan ini akan diteruskan ke Komisi A DPRD Jayawijaya untuk diteruskan ke Komnas HAM RI di Jakarta,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

18 April

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya menggagas dan mendorong berlangsungnya dialog antara pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh Papua termasuk OPM untuk menyelesaikan konflik di Papua. Ia menjelaskan

dialog penting untuk mencari penyelesaian permasalahan Papua agar tidak ada lagi korban jiwa di pihak TNI-Polri, masyarakat sipil, dan OPM. “Kami masih membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk OPM, tokoh agama, dan tokoh adat. Khusus untuk OPM sudah setuju dengan dialog, tapi mereka ajukan beberapa persyaratan dan kami akan diskusikan dengan pemerintah di Jakarta,” tutur Ahmad Taufan Damanik pada Minggu, 17 April 2022 (Cenderawasih Pos).

19 April

Diskusi Imparsial yang mengundang sejumlah ahli, tokoh masyarakat, dan juru damai awal minggu ini mengungkap kenyataan bahwa pembangunan bukan jawaban mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Papua.

Alat mencapai tujuan itu adalah dialog antarpemangku kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam berbagai diskusi mengenai konflik di Papua, kemiskinan kerap jadi sorotan karena diyakini sebagai salah satu akar masalah. Namun problem kemiskinan kemudian dipahami secara sempit sebagai kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan demikian, Pemerintah pun menggelontorkan triliunan rupiah untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti jembatan, jalan, sekolah, rumah sakit, bandara, renovasi pasar, stadion, pos lintas batas negara, dan pelabuhan.

Ragam bangunan itu mengandung asa dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di Papua sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan masyarakat makin sejahtera. Jika misi itu tercapai, tujuan utama menciptakan perdamaian di Tanah Papua pun bakal terwujud. Namun, asumsi itu luput mempertimbangkan akar masalah konflik di Papua bukan hanya kemiskinan. Ada banyak isu yang menurut para peneliti tidak

hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga politik, sosial, hukum, dan budaya. Kompleksitas akar konflik itu perlu diakui bersama sehingga upaya menciptakan perdamaian di Papua tidak lagi mengandalkan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar itu. Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, pada acara diskusi yang digelar oleh Imparsial sebagaimana diakses di Jakarta, Senin (18/4/2022), mengingatkan bahwa banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian.

Pembangunan (*development*) bukan perdamaian dan perdamaian bukan pembangunan. *Peacebuilding* (upaya menciptakan perdamaian), kata Irine, adalah sebuah proses yang bertujuan memperbanyak titik temu (*connectors*) dan mengurangi pemecah belah (*dividers*) sehingga pembangunan dapat berlangsung. Sementara itu, pembangunan adalah proses meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan yang dialami masyarakat.

Pembangunan juga harus dipahami sebagai upaya memperluas akses dan memperbanyak pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat dalam melanjutkan hidup dan menentukan nasibnya sendiri. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (*peacebuilding*) sering beririsan. Namun situasi itu tidak boleh jadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian.

“Harus punya pemahaman soal definisi yang jelas, teori-teori yang jelas, dan rencana perubahan yang jelas (untuk mewujudkan perdamaian di daerah konflik),” kata Irine Santiago, negosiator damai yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun membantu penyelesaian konflik di Filipina (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/persepsi-keliru-pembangunan-untuk-perdamaian-di-papua/>).

23 April

Pimpinan dan Perwakilan Gereja-Gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, K.H. Maruf Amin di istana Negara pada 20 April 2022. Pertemuan ini bertujuan menyerahkan dokumen hasil Konferensi Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 15-17 Februari 2022 di Kota Jayapura. Pada kesempatan itu, para Pimpinan Gereja menyampaikan pemikiran kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan bagi Wapres dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui pendekatan humanis dan non-militer. Pimpinan Gereja yang hadir dalam pertemuan ini adalah Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Papua), Pdt. Shirley F.A. Parinussa (Ketua Umum PGGP Papua Barat) dan John Banua (Ketua DPR Papua-Ketua Panitia Perayaan HPI 167). Sedangkan Wapres didampingi oleh Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker), Staf Khusus Menteri Sosial dan Staf Khusus Menteri UMKM (Cenderawasih Pos).

13 Mei

Ribuan warga di Wamena Kabupaten Jayawijaya menggelar demonstrasi menolak dialog nasional untuk menyelesaikan permasalahan Papua yang sedang digagas oleh Komnas HAM RI. Alasannya pelanggaran HAM di Papua merupakan persoalan internasional. Koordinator lapangan, Dano Tabuni mengatakan selama ini Indonesia selalu menanggapi aspirasi OAP dengan cara-cara kekerasan maka permasalahan HAM di Papua telah menjadi sorotan dunia internasional. “Indonesia harus membuka akses bagi Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM. Kami juga tegaskan bahwa dialog versi

Indonesia tidak akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Papua,” tegas Dano Tabuni di Wamena pada Kamis, 12 Mei 2022. Adapun massa aksi demonstrasi menyampaikan tuntutan yang terpampang pada baliho berukuran besar sebagai berikut:

1. Kami rakyat West Papua menolak dengan tegas dialog versi Indonesia
2. Kami rakyat West Papua mendukung pertemuan pimpinan pemerintahan sementara ULMWP, IPWP, dan Parlemen UE di Brussel
3. Kami rakyat West Papua mendesak kepada pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi Komisi Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua
4. Kami rakyat West Papua siap menyambut Komisi Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua (Cenderawasih Pos).

15 Mei

Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV mendorong pemerintah pusat untuk berani melakukan dialog damai di Tanah Papua. Dialog damai itu penting untuk menyelesaikan segala persoalan yang dialami Orang Asli Papua. Ketua Umum Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV, Mananwir Yan Pieter Yarangga mengatakan pihaknya belum melihat adanya keseriusan maupun keberanian pemerintah pusat untuk melakukan dialog secara terbuka demi menyelesaikan persoalan di Papua. Yarangga mengatakan pemerintah pusat terkesan hanya maju berdialog dengan pihak yang bisa mengikuti kemauan pemerintah pusat. “Di kalangan kami [Dewan Adat Papua] belum melihat ada keberanian pemerintah untuk mendorong segala persoalan di Papua diselesaikan dalam suatu dialog yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, demokratis, [dan]

berdasarkan hukum,” ujar Yarangga di Kota Jayapura, Sabtu (14/5) (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/dewan-adat-papua-menilai-pemerintah-pusat-takut-gelar-dialog-damai-papua/>).

19 Mei

Tokoh Papua, Benny Giay mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak mau berdialog dengan orang Papua. Pemerintah Indonesia malah memilih melakukan pendekatan keamanan dengan mengirim tentara dan polisi ke Tanah Papua. Hal itu disampaikan Benny Giay dalam diskusi publik “Imajinasi Orang Papua Sebagai Bangsa (Melanesia)” yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), pada Kamis (19/05). Giay menegaskan dialog penting demi keselamatan orang Papua. Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan masalah di Papua seperti menyelesaikan masalah yang terjadi di Aceh. Bukan dengan jalan mengirim pasukan keamanan. “Dulu wakil presiden, Jusuf Kalla habis-habisan dialog dengan GAM Aceh dan dimediasi oleh negara yang netral,” ujarnya.

Giay menyatakan bahkan hingga masa Presiden Jokowi yang sudah 13 kali berkunjung ke Papua, tidak ada keseriusan pemerintah untuk berdialog dengan orang Papua. Namun, kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Jokowi malah semakin membuat orang Papua menderita di atas tanahnya sendiri (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/benny-giay-mengapa-indonesia-tidak-mau-berdialog-dengan-orang-papua/>).

21 Mei

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan pelanggaran

HAM dan pelanggaran hukum di Papua. Ia menjelaskan korban di Papua bukan hanya OAP tetapi juga non OAP, warga sipil yang seharusnya dibela dan diselamatkan. “Presiden anggap korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, yang menyebabkan jatuhnya korban masyarakat sipil, TNI-Polri, dan TPNPB-OPM di tanah Papua dipandang tidak penting, karena dianggap seperti sampah sebagaimana diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD,” tegas Theo Hese gem di Wamena pada Jumat, 20 Mei 2022. Theo Hese gem juga mengatakan bahwa untuk mengakhiri kekerasan di tanah Papua, Presiden Joko Widodo dan DPR RI harus mengevaluasi konflik bersenjata dan korban yang sedang berjatuh di tanah Papua termasuk pengiriman pasukan TNI-Polri dan intelejen di tanah Papua (Cenderawasih Pos).

17 Juni

Delegasi Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Ahmad Taufan Damanik dan didampingi Komisioner Beka Ulung Hapsara dan Komisioner Mochamad Choirul Anam bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet di kantor PBB Jenewa, Swiss, Jumat (16/6/2022). Pada pertemuan tersebut kedua lembaga mendiskusikan isu-isu aktual seperti situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia termasuk inisiatif dialog damai Papua yang digagas oleh Komnas HAM RI. Taufan mengatakan dialog damai itu digagas oleh Komnas HAM sebagai upaya pendekatan penyelesaian berbagai masalah HAM di Papua. Ia mengklaim rencana itu disambut baik oleh PBB.

“Michelle Bachelet menyampaikan apresiasi atas langkah Komnas HAM RI,” ujar Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan pers yang diterima Jubi. Pihaknya percaya dialog damai Papua dapat terwujud. Ia berharap semua pihak dapat mendukung usaha itu. Selain itu, menurut Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM RI

menyampaikan berbagai perkembangan mendasar pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk penyelesaian beberapa kasus yang menjadi perhatian publik maupun tantangan yang sedang dihadapi. Termasuk di dalamnya perubahan terkait kemajuan kebijakan Hak Asasi Manusia dan hambatan yang masih terjadi (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/komnas-ham-ri-sampaikan-rencana-dialog-damai-papua-pada-komisioner-ham-pbb/>).

23 Juni

- Delegasi Komnas HAM RI, yang terdiri atas Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Beka Ulung Hapsara, dan Komisioner Mochamad Choirul Anam melakukan diskusi dengan Eamon Gilmore (Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM) dan Christina Kokkinakis (Wakil Direktur untuk Agenda Global dan Hubungan Multilateral Uni Eropa). Mereka membahas dialog damai Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Dinas Luar Negeri Uni Eropa di Brussel, Belgia. “Kami meminta dukungan Komisioner Tinggi HAM PBB maupun Eropa untuk memberikan dukungan untuk proses yang sedang berjalan di Papua. Keduanya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan siap memberikan dukungan misalnya tenaga ahli yang dibutuhkan,” tutur Ahmad Taufan Damanik pada Rabu, 22 Juni 2022. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menjelaskan berbagai kekerasan, pelanggaran HAM, dan gangguan keamanan yang terjadi di Papua, lantaran selama ini penyelesaian permasalahan Papua menggunakan pendekatan keamanan yang hanya mendatangkan masalah baru (Cenderawasih Pos).

- Jaringan Damai Papua atau JDP menyerukan jeda kemanusiaan untuk menghentikan semua konflik bersenjata di Papua, dan memulai proses Dialog Damai Papua. Hal itu dinyatakan Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy melalui layanan pesan Whatsapp, Rabu (22/6). Warinussy menyatakan jeda kemanusiaan perlu dilakukan demi memberi akses bagi aktivitas kemanusiaan demi menolong rakyat Papua yang terjebak situasi konflik bersenjata di Papua. Ia menyatakan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua menimbulkan gelombang pengungsian Orang Asli Papua di atas tanah airnya. Warinussy menyatakan penetapan jeda kemanusiaan akan memastikan Negara tidak menempatkan banyak pasukan militer non organik di Tanah Papua. Ia menyatakan penambahan pasukan dengan mengirimkan pasukan non organik ke Tanah Papua tidak akan efektif dalam konteks penyelesaian masalah Papua. (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/jdp-perlu-jeda-kemanusiaan-untuk-memulai-dialog-damai-papua/>).

04 Juli

Jaringan Damai Papua (JDP) menggelar pemilihan pengurus periode 2022-2025, di Jayapura, pada 2 Juli 2022. Ada pun pengurus JDP 2022-2025, yang terpilih yaitu Koordinator JDP, Septer Manufandu, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Daniel Randongkir, Deputi Papua, Hamim dan Parew Wenda, Deputi Papua Barat, Markus Binur, Deputi Jakarta, Cahyo Pamungkas, Juru Bicara, Christian Warinussy. Juru bicara JDP, Christian Warinussy mengatakan pihaknya terus mengkampanyekan dialog damai untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan Papua. Ia menegaskan JDP akan merangkul kaum muda dalam upaya membangun perdamaian Papua di masa depan.

Selain itu, JDP juga akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tokoh lintas budaya, etnik dan agama guna merawat perdamaian Papua. “Kebijakan pemekaran DOB, pelaksanaan Otsus, konflik bersenjata, dan pemilihan umum 2024 merupakan isu krusial yang mendapat perhatian JDP. Semua isu itu berpotensi menimbulkan konflik, baik antara rakyat dengan pemerintah maupun antar masyarakat,” tegas Warinussy pada Minggu, 3 Juli 2022 di Jayapura (Cenderawasih Pos).

14 Agustus

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Cahyo Pamungkas menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik secara martabat yang berkepanjangan di Tanah Papua ialah hanya melalui dialog bukan melakukan pemekaran provinsi baru. Hal itu disampaikan Cahyo sebagai pembicara dalam diskusi daring *Indonesia Leaders Talk* “Ayo Cintai Papua” yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat (12/8). Walaupun pemerintah pusat melakukan pemekaran dengan dalil demi meningkatkan pembangunan dalam hal ini pelayanan publik yang merata bagi masyarakat Papua, namun menurutnya Sumber Daya Manusia Papua belum siap untuk pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah orang Papua hanya berkisar antara kelas 2 sampai kelas 5 sekolah dasar. “Kalau kita lihat di daerah konflik seperti di Nduga, Intan Jaya itu rata-rata lama sekolah hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Bagaimana kita mau pemekaran sebuah provinsi ketika rata-rata lama sekolah begitu,” ujarnya. Banyaknya pemekaran provinsi di Papua menurutnya, tidak menjamin konflik di Tanah Papua akan berakhir. Konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalan dialog damai antara Jakarta dan Papua. “Dialog tidak membunuh siapa pun. Konflik hanya dapat diselesaikan melalui jalan dialog,”

ujarnya (<https://jubi.id/polhukam/2022/dialog-solusi-penyelesaian-secara-martabat-konflik-papua/>).

16 Agustus

Juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Christian Warinussy mengatakan dalam rangkaian konflik bersenjata rakyat sipil senantiasa menjadi korban sia-sia. Padahal rakyat kecil bukan pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata tersebut. Rakyat orang asli Papua, petugas medis, tenaga guru, pekerja bangunan, dan tukang ojek menjadi korban konflik bersenjata di Papua. “JDP melihat konflik berlangsung sudah cukup lama, 50 tahun turut dipicu oleh praktik jual beli senjata dan amunisi, yang melibatkan oknum anggota TNI, polisi dan rakyat sipil,” tuturnya. Ia mengharapkan agar segera dilaksanakan jeda kemanusiaan sebagai langkah awal bagi dimulainya dialog damai di antara para pihak yang bertikai, termasuk rakyat sipil tanah Papua. “Presiden segera mengambil langkah penting bagi upaya penyelesaian konflik bersenjata di Papua yang diduga keras hanya memberi keuntungan bagi sekelompok kecil manusia yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya pada 15 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

06 Juli

Demi memelihara semangat toleransi dan kedamaian di Papua, pemerintah Kota Jayapura melaksanakan rapat koordinasi pemerintah bersama tokoh agama se-Kota Jayapura. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan komunikasi, konsolidasi, komunikasi dan silaturahmi demi menciptakan sinergi dalam menjaga kerukunan umat beragama dan terciptanya persatuan dan kesatuan. “Kota Jayapura dihuni oleh berbagai suku, agama, ras, budaya yang berbeda-beda sehingga

dibutuhkan kebersamaan dalam membangun Kota Jayapura. Selain itu, kota Jayapura merupakan kota jasa dan perdagangan, maka situasi kamtibmas perlu dijaga supaya perekonomian bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua tokoh agama yang telah memberikan masukan, saran, dan harapan, yang akan menjadi bahan evaluasi kami,” tutur Wali Kota Jayapura, Frans Pekey di kantor Walikota pada Selasa, 5 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

26 September

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Nasional atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM terus mendorong digelar dialog damai di Tanah Papua. Dialog damai dibutuhkan untuk menghentikan peristiwa kekerasan berulang Tanah Papua. Hal itu disampaikan Damanik dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (26/9), usai bertemu dengan sejumlah anggota DPR Papua yang datang untuk membahas penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM RI dan para anggota DPR Papua juga membicarakan kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kabupaten Mappi. Damanik menyatakan dialog damai merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Ia meyakini dialog itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang, terutama masyarakat Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/komnas-ham-ri-terus-mendorong-dialog-damai-papua/>).

30 September

Siska Abugau, Ketua Pokja perempuan MRP meminta DPR Papua dan MRP harus membuat satu peraturan khusus dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik di

Papua. “Tiga lembaga sejauh ini tidak ada keberpihakan terhadap korban perempuan dan anak, padahal daerah kekuasaan di Papua satu aturan khusus untuk perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik dan bagaimana cara penanganan tidak pernah dibuat,” kata Siska (Cenderawasih Pos).

02 November

Juru Bicara JDP, Cristian Yan Warinussy menyatakan JDP berpandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menunjukkan itikad baiknya untuk menyudahi konflik bersenjata di Tanah Papua melalui dialog. Padahal JDP sudah berkali-kali melontarkan jalan damai tersebut. Menurut Warinussy, Presiden mesti menunjuk seorang *contact person* yang dipercaya dan bisa bertemu serta berkomunikasi langsung maupun menghubungkan Presiden dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Presiden juga harus memulai pra dialog dengan pihak-pihak resisten tersebut.

“Presiden bisa memilih dari siapa orang yang dia percaya dan memiliki kontak langsung setiap saat dengan Presiden tanpa perantara. Pada 2016, saya dengan beberapa tokoh, termasuk [mendiang] Pater Neles Tebay Pr, bertemu Presiden Joko Widodo. Presiden menunjuk Pater Neles sebagai tokoh kunci atau *contact person* dialog Jakarta – Papua. Akan tetapi, kemudian Pater Neles sakit dan meninggal. Hingga kini, tidak orang yang ditunjuk Presiden menggantikan posisi mendiang Pater Neles Tebay,” kata Warinussy saat dihubungi Jubi pada Selasa (22/11). Warinussy menyatakan JDP telah bertemu banyak kalangan rakyat sipil Papua. Mereka meminta konflik Papua diselesaikan dengan dialog yang difasilitasi pihak netral seperti Perserikatan Bangsa Bangsa. Demikian juga kalangan TPNPB. Menurut Warinussy, sejak awal dialog penyelesaian konflik Papua akan ada keterlibatan

pihak asing dalam mendorong dimulainya dialog. “Komnas HAM bisa bertindak sebagai pembuka jalan saja, tapi komitmen serius selalu ada pada pemerintah,” ujarnya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/pemerintah-belum-menunjukkan-itikad-baiknya-untuk-menyudahi-konflik-di-tanah-papua-dengan-dialog/>).

14 November

Sebuah kemajuan dalam proses menuju “Dialog Damai” Papua dengan Indonesia disepakati di Jenewa, Swiss oleh ULMWP, Komnas HAM RI, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kesepakatan melaksanakan Jeda Kemanusiaan ini ditandatangani pada tanggal 11 November 2022.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan pencapaian penting dalam proses penjajakan menuju perundingan damai. Pada 11 November 2022 telah ditandatangani sebuah Nota Kesepahaman untuk melaksanakan Jeda Kemanusiaan Bersama di Tanah Papua,” kata Markus Haluk, Direktur Eksekutif ULMWP. Kesepakatan ini dibenarkan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. “Ia, kemarin memang kami menyepakati beberapa poin. ULMWP, Komnas HAM, dan MRP,” jawab Beka Ulung saat dikonfirmasi Jubi. Menurut Markus Haluk, ULMWP adalah wadah politik bangsa Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua secara bermartabat. ULMWP juga tetap menjalankan misi kemanusiaan serta menggalang dukungan diplomasi politik komunitas regional dan internasional serta mendorong untuk membuka ruang demokrasi melalui perundingan damai untuk mencari penyelesaian konflik di West Papua. “Konflik antara bangsa Papua dan Pemerintah Indonesia yang berlangsung selama 59 tahun telah menimbulkan korban. Dalam proses penyelesaian konflik dimaksud Para Pihak antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(KOMNAS HAM RI), Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua serta ULMWP,” ungkap Markus Haluk (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/kesepakatan-jeda-kemanusiaan/>).

16 November

Juru Bicara JDP, Cristian Yan Warinussy menyatakan JDP memandang Nota Kesepahaman antara United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, serta Majelis Rakyat Papua atau MRP adalah langkah maju untuk mendorong jeda kemanusiaan atas konflik Papua. Hal itu akan menjadi langkah awal menuju dialog kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Papua. Hal itu dinyatakan Warinussy saat dihubungi Jubi pada Rabu (16/11). “Jaringan Damai Papua selalu melihat dari sisi positif segenap langkah dan upaya yang ditujukan untuk memulai perdamaian di Tanah Papua,” kata Warinussy.

Warinussy menyatakan kesepakatan jeda kemanusiaan tentu bertujuan untuk segera menghentikan kekerasan yang terjadi dan senantiasa menempatkan rakyat sebagai korban. Oleh sebab itu, JDP melihat Nota Kesepahaman untuk Jeda Kemanusiaan Bersama di Tanah Papua itu sebagai salah satu langkah awal untuk segera mengakhiri kekerasan di atas Tanah Papua (<https://jubi.id/polhukam/2022/jdp-jeda-kemanusiaan-adalah-langkah-awal-menuju-dialog-kemanusiaan-di-papua/>).

24 November

Koordinator *Papuan Observatory for Human Rights* atau POHR, Thomas Syufi menyatakan dialog damai untuk mengakhiri konflik di Papua sulit terwujud jika tanpa keterlibatan lembaga internasional. Syufi menilai dialog damai itu hanya dapat diwujudkan jika ada keterlibatan lembaga Hak Asasi Manusia

internasional yang kredibel dan independen untuk menyelesaikan konflik dan kasus pelanggaran berat HAM di Papua. “Berbagai langkah yang ditempuh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [atau Komnas HAM] RI untuk memfasilitasi dialog Jakarta – Papua [membuat] saya pesimis [upaya itu] akan berjalan mulus alias sukses. Saya lihat [upaya] itu terburu-buru dan cenderung dipaksakan. Kelihatannya ada sebuah *grand design* untuk mengelabui berbagai akar konflik di Papua dengan dialog semu, dialog buru-buru, atau [dialog yang] menjadi panggung semata,” kata Syufi ketika dihubungi Jubi, pada Kamis (24/11). Syufi menilai dialog damai Jakarta – Papua sulit terwujud, karena pihak yang berkonflik saat ini adalah negara Indonesia melalui pemerintah yang sedang berkuasa dengan rakyat Papua yang diwakili oleh organisasi perlawanan yang mendorong isu kemerdekaan Papua. Apalagi, aktor konflik seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak terlibat atau dilibatkan dalam pembicaraan awal menuju dialog Jakarta – Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/sulit-terwujud-dialog-damai-papua-tanpa-keterlibatan-lembaga-internasional/>).

01 Desember

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Komando Daerah Pertahanan Kodap IX Odiyai/Dogiyai pada Kamis (1/12) menggelar upacara peringatan 61 tahun peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di Holandia pada 1 Desember 1961. Dalam upacara peringatan yang berlangsung di Kabupaten Dogiyai itu, TPNPB Odiyai/Dogiyai menolak gagasan dialog damai dan Jeda Kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Papua. Hal itu dinyatakan Komandan TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) IX Odiyai/Dogiyai, Jonathan M Pigai

saat dihubungi Jubi pada Kamis. Pigai menyatakan TPNPB menolak penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Majelis Rakyat Papua yang menyepakati perlunya Jeda Kemanusiaan untuk mengawali Dialog Damai Papua. Pigai menyatakan pihaknya tidak mempercayai Jeda Kemanusiaan yang digagas Komnas HAM, ULMWP, dan MRP itu. "Kami TPNPB OPM membutuhkan intervensi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Kami membutuhkan pengembalian hak kedaulatan bangsa West Papua. Sebagaimana tanggal 1 Desember 1961 yang telah disahkan sebagai hari lahirnya embrio negara Papua Barat," katanya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/peringati-1-desember-tpnpb-odiyai-dogiyai-tolak-gagasan-dialog-damai-dan-jeda-kemanusiaan/>).

- Juru Bicara Jaringan Damai Papua atau JDP, Cristian Yan Warinussy meminta pemerintah segera memulai dialog damai untuk menyelesaikan konflik di Papua. Jika pemerintah mau menyandingkan pembangunan dengan upaya dialog damai yang serius untuk menyelesaikan konflik Papua, langkah itu akan meningkatkan kepercayaan rakyat Papua akan lahirnya keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa tekanan keamanan. Hal itu dinyatakan Warinussy saat dihubungi Jubi pada Kamis (1/12). "JDP mendorong pilihan jalan damai melalui dialog sangat penting untuk terus dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik politik jangka panjang di Tanah Papua saat ini," ujarnya. Warinussy menyatakan Pemerintah Indonesia harus segera membangun komunikasi dengan kelompok resisten seperti TPNPB maupun ULMWP untuk menyepakati dimulainya dialog damai di Papua. Warinussy menyatakan politik adu domba dengan model provokasi,

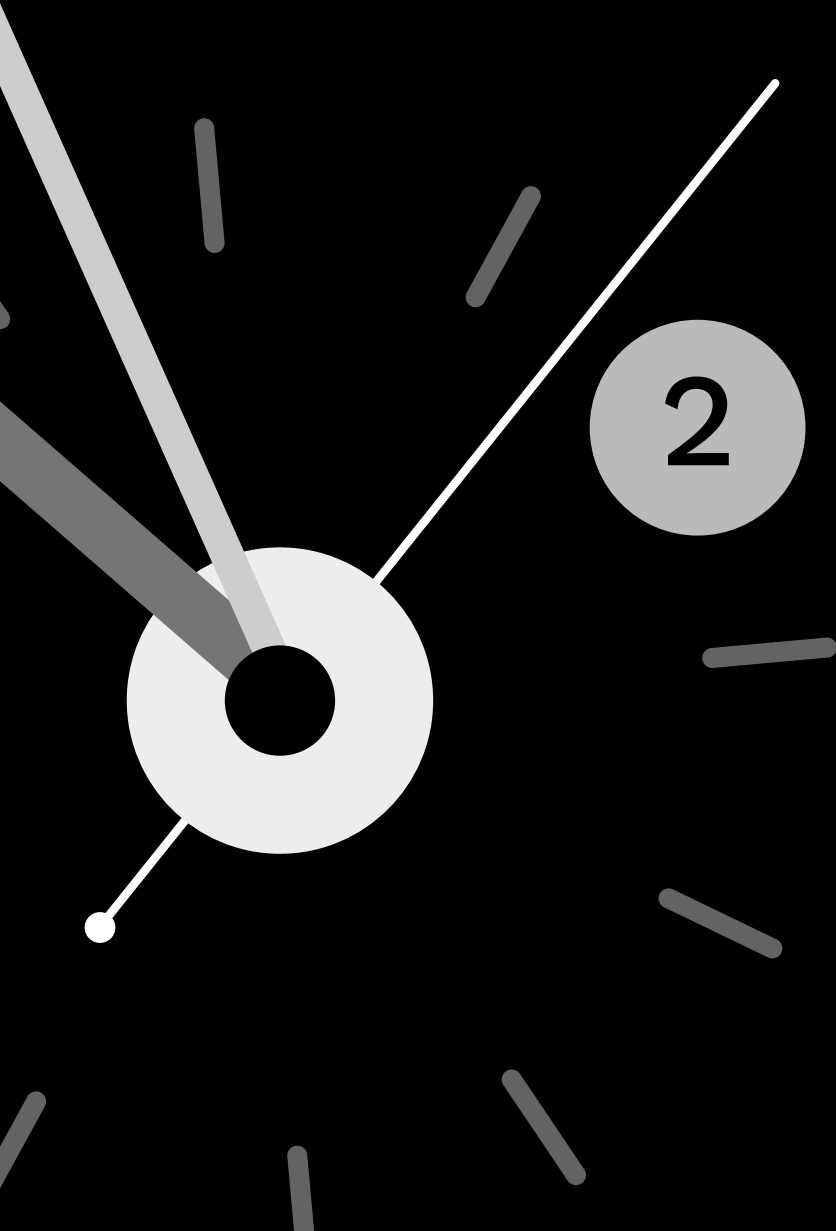
termasuk pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa identitas pelaku pada momentum 1 Desember hanyalah merupakan kerja kontra intelijen yang tidak produktif bagi upaya penyelesaian konflik Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/jdp-meminta-pemerintah-segera-memulai-dialog-damai-papua-2/>).

05 Desember

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Komando Daerah Pertahanan IX Markas Emas Topo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyatakan menolak dukungan *United Liberation Movement For West Papua* dan Majelis Rakyat Papua terhadap wacana Jeda Kemanusiaan dan dialog damai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal itu dinyatakan pimpinan TPNPB Markas Emas Topo, Brigjen Derek Daud Nawipa. Nawipa menyatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog Jakarta - Papua untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. "Kami TPNPB membutuhkan intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Kami tolak dialog [dan] Jeda Kemanusiaan yang [akan] dilakukan oleh Komnas HAM. Kami membutuhkan pengembalian hak kedaulatan bangsa West Papua," kata Nawipa, Senin (5/12). Nawipa mengatakan pada momentum 1 Desember 2023, pihaknya memperingati hari lahirnya embrio negara Papua Barat. Ia menyatakan TPNPB akan mengumumkan perang total dan meminta warga non Papua meninggalkan Tanah Papua (<https://jubi.id/polhukam/2022/tpnpb-markas-emas-topo-menolak-dialog/>).

Bab II

Bidang Pertahanan dan Keamanan



Papua Sedang Tidak Baik-Baik Saja

— *Hipolitus Wangge*

Selama tahun 2022, situasi keamanan Papua¹ belum menunjukkan tren de-eskalasi yang signifikan. Sejumlah aksi kekerasan, penangkapan, kontak tembak, pembunuhan, dan mutilasi masih mewarnai dinamika keamanan di wilayah Papua. Sejumlah hal ini juga diperburuk dengan kondisi kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua yang berdasarkan indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup, terendah di Indonesia. Di tengah sejumlah aksi kekerasan, konflik bersenjata, dan kualitas hidup yang tidak meningkat, pemerintah pusat membentuk empat (DOB) yang diharapkan meredam konflik bersenjata dan meningkatkan pembangunan di seluruh tanah Papua. Pertanyaan sederhana, sejauh mana potret suram dan kebijakan DOB merefleksikan dinamika keamanan di Papua di tahun 2022 dan proyeksi di tahun 2023?

Esai sederhana ini berusaha menjawab pertanyaan diatas dengan argument utama kondisi keamanan di Papua sulit untuk membaik dikarenakan sejumlah peritiswa kekerasan dan konflik

sosial tidak dilihat dalam pandangan kegagalan pemerintah untuk mengelola hubungan pusat dan daerah, khususnya yang memiliki sejarah konflik politik yang begitu lama, dan kebijakan-kebijakan negara di bidang keamanan tidak mengakomodir keberadaan dan kepentingan masyarakat asli Papua. Argument kemudian dijabarkan melalui, pertama, membandingkan konflik dalam negeri di berbagai negara selama tahun 2022, khususnya di Asia Tenggara dengan kondisi Papua di tahun yang sama. Kedua, review kondisi keamanan di Papua tahun 2022 berdasarkan kronologi yang diberikan SKPKC Fransiskan Papua. Ketiga, pengaruh DOB terhadap situasi keamanan di tahun 2022 dan tahun 2023.

Tahun 2022 masih menjadi tahun yang diwarnai kekerasan politik dan berakibat signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat sipil. Data yang dikeluarkan *The Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED), sebuah lembaga non-pemerintah berbasis di Wisconsin, Amerika Serikat dan berfokus pada pengumpulan dan analisa data terkait konflik, serta pemetaan wilayah krisis, menyatakan kekerasan politik secara global di tahun 2022 meningkat 27 persen dibandingkan tahun 2021 dengan perkiraan 1,7 miliar orang terpengaruh dari kekerasan tersebut. Kekerasan politik ini terjadi baik akibat konflik antar negara, seperti di Ukraina Eropa; Azarbaizan dan Armenia Asia tengah, maupun konflik dalam negeri seperti di Yaman, Suriah, Etiopia, Nigeria, Myanmar, Kolumbia, dan Haiti.² Di wilayah Asia Tenggara, konflik berbasis identitas politik masih terjadi di Myanmar, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Myanmar menjadi wilayah dengan intensitas konflik bersenjata tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara umum. Perang sipil

1 Terminologi Papua digunakan untuk merujuk pada bagian barat Pulau New Guinea yang terbagi dalam dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Sejak tahun 2022, Pemerintah Pusat membentuk empat provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

2 Conflict Watchlist 2023, ACLED. <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/>.

yang sudah berlangsung sejak 1940an memasuki babak baru pasca kudeta militer terhadap pemerintah sipil di bawah Aung San Suu Kyi di tahun 2021. Pemerintah Sipil Persatuan Nasional (*National Unity Government*) sebagai “pemerintah bayangan” dan milisi Angkatan Pertahanan Rakyat (*People’s Defence Force*) terus meningkatkan kekuatan baik dengan koalisi Bersama sejumlah etnis minoritas lain dan menjalankan administrasi lokal untuk menjatuhkan pemerintah militer di negara tersebut.³ Sejumlah data dan fakta di atas menunjukkan, pertama, tren konflik dalam negeri yang masih mendominasi tingkat kematian masyarakat sipil di berbagai negara. Kedua, belum efektifnya mekanisme penyelesaian regional dan internasional untuk menurunkan intensitas konflik. Hal ini juga berdampak pada sangat minimnya akses masyarakat sipil yang terdampak konflik untuk mendapatkan intervensi kemanusiaan, khususnya pelayanan kebutuhan dasar dan keadilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, meningkatkan kekerasan politik dalam negeri terhadap etnik minoritas di sejumlah negara diatas menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan nasional untuk mengatur hubungan pusat dan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan kronologi yang dicatat SPKPC, terlihat pola kekerasan di Papua masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Kekerasan yang diakibatkan konflik bersenjata, konflik sosial antar masyarakat dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat keamanan masih mendominasi kasus-kasus kekerasan sejak bulan Januari sampai Desember 2022. Penangkapan dan penganiayaan tujuh anak SD oleh aparat keamanan di Puncak (22 Februari). Kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh aparat

TNI juga terjadi di Mappi pada tanggal 30 Agustus 2022 yang kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran HAM oleh Komnas HAM perwakilan Papua setelah melakukan investigasi pada bulan September 2022. Selain itu walaupun terdapat penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) juga masih cukup signifikan yakni 90 kasus.⁴

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui aparat kepolisian dan militer berusaha mengoptimalkan sejumlah pendekatan di Papua. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kembali memperpanjang strategi penegakan hukum dengan mengganti operasi Newangkawi menjadi operasi Damai Cartenz pada 12 Januari 2022. Perubahan nama tersebut mendapat respon minor dari Komite Nasional Papua Barat yang menyoroti tidak adanya perubahan mendasar dari pergantian nama operasi tersebut selain menutupi kekerasan aparat keamanan di Papua dengan propaganda humanis (17 Januari). Propaganda ini juga ditunjang dengan pendekatan teritorial seperti pembangunan rumah oleh TNI di Nduga. Panglima TNI Andhika Perkasa juga terus mengevaluasi sejumlah pos di wilayah Pegunungan Tengah Papua (3 Februari). Pendekatan komunikasi sosial dan operasi damai pun berbanding lurus dengan jumlah penerjunan sejumlah besar aparat keamanan di Papua. Imparsial mencatat 657 anggota Brimob dikirim ke Papua (Januari-Agustus 2022). Catatan penulis sepanjang tahun 2022 terdapat 9095 personil TNI yang diturunkan di Papua dengan fungsi kekuatan militer (*military power*) dengan karakteristik penanganan konflik, pengamanan perbatasan,

3 Yun Sun. 2023. *The Civil war in Myanmar: No end in sight*, Brookings, 13 Februari. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/13/the-civil-war-in-myanmar-no-end-in-sight/>.

4 Dedy Priatmojo dan Aman Hasibuan. 2022. “Aksi Teror KKB di Papua Turun, Korban TNI-POLRI dan Warga Sipil Bertambah.” *Vivanews.com*, 29 Desember. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1560271-aksi-teror-kkb-di-papua-2022-turun-korban-tni-polri-dan-warga-sipil-bertambah>.

dan pengamanan objek vital nasional masih mendominasi, dibandingkan fungsi kelembagaan militer (*institutionalized military*). Fungsi kedua ini memfokuskan pada penempatan aparat pada sejumlah markas, infrastruktur pertahanan, dan lembaga kemiliteran lainnya. Di Papua sepanjang tahun 2022, penerjunan ribuan pasukan raider yang ditempatkan dalam sejumlah penanganan konflik di wilayah pegunungan juga masih mendominasi komposisi *military power*.

Pihak kelompok masyarakat sipil baik di Papua maupun di luar Papua juga terus menyuarakan evaluasi menyeluruh pendekatan keamanan yang justru kontraproduktif dengan pendekatan kesejahteraan yang terus disampaikan pemerintah pusat, seperti yang disampaikan Mahfud MD (21 Juli 2022) dan wakil presiden Ma'ruf Amin (12 Desember 2022). Imparsial, LBH Papua, ALDP Papua, Lesperssi Jakarta, Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia, KNPB, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti konflik bersenjata berkepanjangan, pengungsian yang tidak mendapat perhatian, impunitas aparat yang masih kuat, HAM, dan solusi damai terhadap konflik bersenjata.

Ada juga beberapa catatan lain di tahun 2022 dan proyeksi di tahun 2023. Terbentuknya sejumlah DOB di tanah Papua belum akan menurunkan bahkan dapat meningkatkan intensitas konflik di Papua. Pernyataan panglima TNI Yudo Margono dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto⁵ untuk membentuk

5 Lihat Adrial Akbar. 2023. "TNI siapkan kodam baru di DOB Papua: Sedang cari lokasi untuk markas." Detik.com, 10 Februari. <https://news.detik.com/berita/d-6561618/tni-siapkan-kodam-baru-di-dob-papua-sedang-cari-lokasi-untuk-markas> dan Kumparannews. 2023. Menhan Prabowo setuju pembangunan kodam di tiap provinsi. 11 Februari. <https://kumparan.com/kumparannews/menhan-prabowo-setujui-pembangunan-kodam-di-tiap-provinsi-1zoW2XS68fH>.

masing-masing Komando daerah militer (Kodam) di tiga provinsi baru berpotensi menimbulkan ketegangan khususnya dengan masyarakat sipil. Dari keempat provinsi, Merauke dan Timika memiliki sarana infrastuktur dasar untuk membangun dua komando teritorial tersebut. Pembangunan ini juga disinyalir untuk mengurangi beban "penumpungan" perwira tinggi dan menengah TNI.⁶ Namun demikian, persoalan transparansi dan akuntabilitas pembangunan dan penempatan personil, dan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa pertimbangan dari rencana pembentukan sejumlah besar komando teritorial dan infrastruktur militer lainnya. Pertama, lokasi sejumlah markas teritorial, baik kodam, korem, kodim, koramil dan pos penjagaan. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik pertanahan antara pihak aparat keamanan dan masyarakat sipil terkait pembebasan lahan untuk pembangunan markas dan wilayah kerja. Di Papua hal ini sering terjadi. Perlu diperhitungan lokasi pembangunan bukan hanya keabsahan penggunaan tanah tetapi jarak markas atau pos dengan pemukiman warga. Idealnya pembangunan fasilitas militer tidak berada di lokasi pemukiman masyarakat. SKPKC Bersama masyarakat adat Wuluwuga Papua di Wamena tercatat pernah mengadvokasi terkait pembangunan infrastutur militer di wilayah tersebut pada tahun 2019.⁷ Kedua, penempatan dan karakteristik senjata dan infrastruktur militer. Ketiga, disiplin aparat keamanan. Keempat, pemahaman aparat keamanan terhadap budaya dan dinamika lokal masyarakat di Papua. Berikutnya, sejauh ini model operasi militer yang dijalankan

6 Evan Laksmana, Journal of Contemporary Asia.

7 SKPKC Fransiskan Papua. *Pengukuhan Panglima Kodam XVII Cenderawasih sebagai Kepala Suku Besar Adat Dicabut, Penyerahan Tanah 90 Hektar Dibatalkan*. 04 Maret 2019.

di Papua adalah operasi militer selain Perang (OMSP) sesuai Undang-Undang TNI No. 34/2004. Beberapa pertimbangan adalah sejumlah objek vital nasional yang berada di Papua, keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai kelompok Separatis, dan lokasi perbatasan paling timur dengan Papua New Guinea. Kepemilikan senjata kelompok TPNPB didapatkan dari perampasan paksa dari pihak aparat, penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal antar negara, seperti Bougainville, Filipina, Thailand, dan Papua New Guinea, dan jual beli ilegal dengan aparat TNI dan Polri. Laporan ALDP Papua selama 10 tahun terakhir (2011-2021) nilai transaksi senjata gelap dan amunisi di Papua mencapai puluhan miliar rupiah.⁸ Hal ini menandakan pasar keamanan (*security market*) di Papua di mana keberadaan instrumen-instrumen kekerasan tidak lagi dimonopoli negara dikarenakan peningkatan penawaran dan permintaan instrumen tersebut selalu muncul di daerah dengan pemerintahan yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan.⁹ Pasar keamanan di Papua juga akan terus memperburuk konflik dan krisis kemanusiaan di daerah tersebut.

Melihat pendekatan yang dilakukan tiga panglima terakhir TNI, belum tampak perubahan signifikan yang mampu meredam konstelasi keamanan di Papua. Panglima Hadi Tjahjanto (2017-2021) menerapkan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan, Panglima Andhika Perkasa (2021-2022) menekankan pendekatan komunikasi sosial, Panglima Yudo Margono (2022-) melanjutkan

8 Fabio Maria Lopes Costa. 2022. "Jaringan dan Sumber Dana Perdagangan Senjata api dan amunisi di Papua terungkap". Kompas.com, 1 Juli 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/01/jaringan-dan-sumber-dana-perdagangan-senjata-api-dan-amunisi-di-papua-terungkap>.

9 Željko Branović, Sven Chojnacki. 2011. "The logic of security markets: Security governance in failed states." Security Dialogue, Vol. 42, No. 6: 554.

pola komunikasi sosial dan pembinaan wilayah. Ketiga panglima TNI sepakat untuk merubah pola penyelesaian konflik dengan mengedepankan strategi persuasif. Namun demikian berdasarkan jumlah dan karakter penempatan ribuan pasukan TNI non-organik, fungsi kekuatan militer masih mendominasi dibandingkan fungsi institusi militer.

Terhentinya Jeda kemanusiaan akibat persoalan komitmen bersama baik dari pihak di Papua maupun pemerintah pusat justru menunjukkan resistensi terhadap inisiatif penyelesaian damai. Tahun 2023, situasi keamanan masih akan diwarnai berbagai kekerasan akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Penyadaraan Philip Merthens di awal tahun 2023 ditambah beberapa kontak tembak semakin memperburuk penyelesaian konflik dan stabilitas keamanan di Papua. Sejauh negara masih menafikan perlunya terobosan perbaikan hubungan pusat dan daerah yang memiliki konflik politik dan minimnya keterlibatan pihak-pihak kunci dalam konflik politik, situasi keamanan di Papua hanya akan diwarnai oleh siklus kekerasan dan instabilitas berkepanjangan.

Kronik Pertahanan dan Keamanan

05 Januari

- Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menghimbau kepada jajarannya untuk melakukan pendekatan keamanan melalui komunikasi sosial. Model pendekatan ini akan mulai diterapkan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Komunikasi sosial merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI dengan tujuan meningkatkan hubungan antara TNI dan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dikatakan Jendral Andika saat memberikan arahan secara virtual, Minggu 2 Januari 2022 (Koran Jubi Edisi 5 – 6 Januari).

- Polisi militer Kodam XVII/Cenderawasih telah menahan dua anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap perempuan di Jayapura (Koran Jubi Edisi 5 -6 Januari 2022).
- Kasus penyerangan terhadap Pos Koramil Kisor di Maybrat akan disidangkan di Makasar, Sulawesi Selatan. Keenam tersangka pelaku telah diterbangkan dari Sorong ke Makasar beberapa hari yang lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong I Putu Sastra Adi Wicaksana menjelaskan bahwa berkas perkara keenam tersangka telah dinyatakan lengkap dan akan disidangkan di Makasar (Koran Jubi Edisi 5 - 6 Januari).

12 Januari

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa ada perubahan nama operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz pada tahun 2022. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa dalam operasi ini pihak kepolisian lebih mengedepankan cara-cara persuasif dan permisif. Ada tiga fungsi yang menjadi fokus Operasi Damai Cartenz adalah fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi hubungan masyarakat. Hal ini dikatakan Brigjen Ahmad pada Senin, 10 Januari 2022 (Koran Jubi Edisi 12 - 13 Januari).

17 Januari

- Juru Bicara KNPB, Ones Suhuniap, menanggapi perubahan nama Operasi Nemangkawi ke Operasi Damai Cartenz. Menurut Ones, perubahan nama Satgas tersebut hanya dalil Indonesia menutup wajah kekerasan militer di Tanah Papua. Operasi yang digalakkan oleh TNI/Polri akan

dianggap legal lalu ditutupi dengan propaganda humanis, damai, dan kesejahteraan melalui dana Otsus (Koran Jubi Edisi 17 - 18 Januari).

- Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa menerima audiens dari aktivis Papua, Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte. Audiensi membahas berbagai hal seperti pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Tanah Papua. Jendral Andika mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Vermonte (Aktivis Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua) menyampaikan bahwa selain melakukan pembangunan, perlu juga ada pendekatan perspektif pemerintahan di tanah Papua. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang kerja Panglima TNI, Jakarta (Koran Jubi Edisi 17 - 18 Januari).

21 Januari

- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar dua operasi di wilayah Papua pada tahun 2022. Kedua operasi tersebut diberi sandi Damai Cartenz dan Rastra Samara Kasih. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan operasi Damai Cartenz akan dilaksanakan di lima wilayah rawan konflik, yakni Kabupaten Puncung Bintang, Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak Ilaga. Sedangkan Operasi Rastra Samara Kasih dilaksanakan di 23 wilayah yang dinilai tak rawan kasus-kasus kekerasan oleh kelompok bersenjata (Koran Jubi Edisi, 21 - 22 Januari).
- Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), Irjen Pol. Mathius Fakiri mengklaim bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 menjadi strategi efektif bagi pihak kepolisian. Operasi

ini lebih mengedepankan pendekatan humanis (Koran Jubi Edisi, 21 – 22 Januari).

24 Januari

Prajurit TNI Satgas Yonif Raider Khusus 114/SM membangun rumah tradisional Honai untuk warga kampung Silan, Distrik Dal, Kabupaten Nduga. Menurut Komdan Pos Grinbun Letda Inf. Zeswanto, honai yang dibuat adalah milik salah satu warga dari Kampung Silan (Koran Jubi Edisi, 24 – 25 Januari).

29 Januari

Sebanyak 5 anggota TNI tewas dan 4 lainnya luka-luka dalam sejumlah insiden baku tembak dengan Kelompok Teroris Bersenjata (KKB) atau OPM di Papua dan Papua Barat, sejak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat pada 18 November 2021 hingga sekarang.

Jenderal Andika Perkasa menyatakan bakal mengevaluasi pendekatan militer yang selama ini digunakan dalam menangani konflik di Papua. Ia ingin Papua mendapatkan perlakuan berbeda dari TNI. Hal ini Andika sampaikan beberapa saat setelah ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo. “Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI,” kata Andika dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 November. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, selepas Andika menjabat dan mengungkapkan rencana perubahan pendekatan penyelesaian konflik di Papua, setidaknya terjadi delapan peristiwa baku tembak hingga penyerangan pos maupun polsek. Pada Sabtu 20 November lalu, seorang prajurit TNI yang bertugas di Suru Suru, Kabupaten Yahukimo, Sertu Ari Baskoro meninggal setelah ditembak KKB pimpinan Tendius Gwijangge. Komandan

Koramil Suru Suru, Kapten Infanteri Arviandi juga dilaporkan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118141105-20-722965/menanti-janji-strategi-panglima-andika-tangani-konflik-bumi-papua/2>).

01 Februari

Pengamat militer Beni Sukadis mengungkapkan penyebab utama masih terus berguguran prajurit TNI di tanah Papua. Salah satunya soal arah operasi keamanan yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Dalam menangani permasalahan di provinsi tersebut pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun, inpres ini tidak diimbangi oleh kemampuan TNI untuk memetakan secara menyeluruh kontur wilayah di Papua yang didominasi oleh hutan dan pegunungan. Akibatnya, secara taktis TNI belum siap menerapkan pendekatan keamanan.

“Ini menunjukkan ketidakefektifan operasi keamanan yang dilakukan TNI dan Polri di Papua hingga kini,” kata Manajer Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) ini saat dihubungi, Selasa, 1 Januari 2022. Di sisi lain, dia melanjutkan, pendekatan keamanan yang telah dilaksanakan TNI maupun Polri juga terbukti tidak efektif. Ini menurutnya akibat dari tujuan operasi dari pemerintah pusat yang masih kabur. Maka pendekatan keamanan dinilainya harus dievaluasi menyeluruh. “Belum menunjukkan hasil karena tujuan operasi yang tidak jelas dari pimpinan politik di Jakarta. Justru menimbulkan korban jiwa di pihak TNI dan tentu saja kehilangan ini sangat disayangkan,” ucap Beni (<https://nasional tempo.co/read/1556115/prajurit-tni-berguguran-di-papua-pengamat-pendekatan-keamanan-harus-dievaluasi>).

02-03 Februari

Panglima Jendral TNI Andika Perkasa mengevaluasi penempatan pos tugas pengamanan objek vital di Papua, salah satunya adalah PT Freeport. Pada kesempatan ini Andika mempertanyakan penembakan yang selalu terjadi di lokasi Pos 60 sampai 64. Hal ini disampaikan Andika melalui kanal youtube di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022 (Koran Jubi, 2-3 Februari).

04-05 Februari

Mayor Jendral TNI Gabriel Lema menerima tugas sebagai Pangdam XVIII/Kasuari dari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam apel penyerahan risalah Pangdam di Lapangan Makodam Kasuari di Manokwari, Papua Barat, Rabu, 2 Februari 2022 (Koran Jubi, 4-5 Februari).

08 Februari

Pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih yang sebelumnya dijabat oleh Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono digantikan oleh Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Serah terima jabatan ini telah dilakukan pada 31 Januari di Mabes TNI AD (Cenderawasih Pos).

09 Februari

Pergantian Pandam XVII/Cenderawasih menarik perhatian dan memunculkan harapan dari beberapa pegiat kemanusiaan dan HAM di Tanah Papua. Direktur Elsham Papua, Pdt. Matheus Adadikam berharap pimpinan yang baru bisa melakukan pendekatan humanis dan tak perlu lagi pengiriman pasukan ke Papua (Cenderawasih Pos).

09-10 Februari

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Dudung

Abdurachman mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan langkah taktis maupun strategis dalam menangani kelompok separatist di Papua. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa (Koran Jubi, 9-10 Februari).

24 Februari

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mempertanyakan dalil pemerintah bahwa pemekaran provinsi di Tanah Papua dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. Siregar menegaskan jika pemerintah ingin menyejahterakan Orang Asli Papua, pemerintah harus berhenti memakai pendekatan keamanan dan pengiriman militer untuk menyelesaikan masalah Papua. Hal itu dinyatakan Latifah Anum Siregar selaku pembicara dalam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #II bertema “Pemekaran Papua Untuk Siapa?” yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada Kamis (24/2). Siregar menyatakan wacana pemekaran provinsi di Tanah Papua muncul pasca gelombang protes atas insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Wacana pemekaran provinsi untuk membentuk lima provinsi baru di Tanah Papua itu dilontarkan para tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo pada 10 September 2019. Lontaran para tokoh yang bertemu Jokowi itu kemudian direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahmud MD. “Mahmud MD mengatakan bahwa untuk mempertimbangkan [kepentingan] strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI, dan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta melihat citra positif Indonesia di mata internasional,” kata Siregar (<https://jubi.id/polhukam/2022/anum-siregar-kalau-ingin-sejahterakan-orang-papua-jangan-pakai-pendekatan-keamanan/>).

02 Maret

Desakan kepada pemerintah untuk menarik pasukan militer dari Kabupaten Puncak, Papua, kembali muncul. Penambahan pasukan militer dari luar Papua yang terjadi sejak eskalasi kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB dinilai tidak menyelesaikan masalah. Salah satu pemuda asal Kabupaten Puncak, Penatan Wanimbo menyatakan eskalasi konflik bersenjata di Puncak membuat banyak warga sipil yang mengungsi. Menurutnya, sejak konflik bersenjata memanas di Puncak pada 2019, masyarakat di Puncak mengungsi ke Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, maupun ke kabupaten tetangga seperti Mimika dan Nabire. Warga sipil mengungsi karena takut menjadi korban salah sasaran. Penatan Wanimbo menilai pengiriman pasukan militer dari luar Papua tidak memiliki dasar dan status hukum yang jelas. Hal itu membuat banyak pihak di Papua mempertanyakan mengapa pemerintah terus menambah pasukan militer di Papua. “Apakah ini operasi militer, atau rencana genosida bagi kami orang Lani di Wilayah Adat Lapago? Karena, [penambahan] aparat keamanan tidak mengikuti prosedur,” kata Wanimbo. Wanimbo mencontohkan insiden aparat keamanan menangkap dan menganiaya tujuh siswa SD untuk mencari pencuri senjata salah satu prajurit TNI di Sinak, Puncak pada 22 Februari 2022. Ia mempertanyakan mengapa aparat keamanan sampai bisa menangkap anak SD (<https://jubi.id/polhukam/2022/pemerintah-didesak-tarik-pasukan-militer-dari-puncak/>).

05 Maret

- Para mahasiswa asal Kabupaten Puncak, Papua, yang tengah berkuliah di Bali menyerukan penghentian operasi militer yang tengah berlangsung di Kabupaten Puncak. Mereka menyatakan konflik bersenjata antara aparat keamanan

dan Tentara Pembebasan Nasional atau TPNPB di Puncak membuat warga sipil di Distrik Kago dan Distrik Sinak merasa tidak aman. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Asal Puncak (IPMAP) Koordinator Wilayah Bali, Dety Tabuni mengatakan operasi militer yang ditandai dengan penambahan pasukan TNI/Polri tengah berlangsung di Puncak. Menurutnya, eskalasi konflik bersenjata di Puncak kembali terjadi pada 19 Februari 2022 dan membuat warga sipil Distrik Kago dan Distrik Sinak mengungsi. Tabuni menjelaskan warga sipil yang mengungsi itu berasal dari tiga wilayah pelayanan gereja di Distrik Kago dan tiga wilayah pelayanan gereja di Distrik Sinak. Ia menyatakan situasi itu menimbulkan krisis kemanusiaan dan menambah kasus kekerasan terhadap warga di Kago dan Sinak. “Pada 22 Februari 2022, aparat keamanan menuduh siswa SD membantu pencurian senjata api aparat. Mereka menuduh tanpa bukti dan menganiaya tujuh anak. Satu diantaranya meninggal dunia yaitu Makilon Tabuni,” kata Tabuni saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Sabtu (5/03) (<https://jubi.id/polhukam/2022/mahasiswa-asal-papua-di-bali-serukan-penghentian-operasi-militer-di-puncak/>).

- Direktur LP3BH Manokwari, Christian Warinusi (05/03) mendesak Jendral TNI Andika Perkasa untuk menarik seluruh pasukan TNI dari Batalyon Raider Khusus 113/Jaya Sakti Aceh yang hendak ditugaskan ke Papua. Menurut Warinusi, pengiriman 400 anggota TNI menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan TNI lebih mendekatkan pola militer menghadapi separatisme di Tanah Papua (<https://suarapapua.com/2022/03/05/panglima-tni-diminta-menarik-kembali-pasukan-raider-khusus-jaya-sakti-dari-papua/>).

11 Maret

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua. “Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain yaitu pendekatan kesejahteraan,” ujar Mahfud ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/03). Mahfud mengatakan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi separatisme di Papua. Mengingat, perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan. Mahfud memprediksi, apabila TNI dan Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat. Namun demikian, kata dia, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi. “Kita tidak melakukan pendekatan seperti itu, tidak memilih yang gampang seperti itu, karena yang gampang seperti itu kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah,” kata dia. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/11/12303641/pemerintah-tak-gunakan-pendekatan-militer-di-papua-ini-penjelasan-mahfud>).

28 Maret

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI) Beni Sukadis menyebut pengiriman pasukan non-organik TNI-Polri tak bisa menyelesaikan permasalahan separatisme di Papua. Hal itu menyusul dengan meningkatnya gangguan keamanan di Papua belakangan ini. “Pengiriman pasukan non-organik ke Papua selama ini ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah separatisme apalagi

mengurangi ancaman seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu penembakan Kabinda dan anggota Brimob,” ujar Beni kepada Kompas.com, Selasa (27/4/2021). Dengan kondisi ini, kata Beni, pemerintah seharusnya bisa mengevaluasi terkait kian masifnya persoalan gangguan keamanan di Papua. Menurutnya, evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh apakah pendekatan militer atau keamanan masih relevan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Ketika evaluasi menyeluruh itu selesai seharusnya diambil langkah-langkah konstruktif dalam melakukan dialog dengan kelompok-kelompok signifikan di Papua yaitu KNPB dan atau TPNPB (OPM),” kata Beni. Ia menambahkan, membicarakan masa depan Papua dalam kerangka negara harus ada keuntungan yang dapat diambil dari kedua belah pihak. Misalnya, gencatan senjata, resolusi konflik, hingga proses rekonsiliasi (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/14282491/pengiriman-pasukan-non-organik-dinilai-tak-selesaikan-isu-separatisme-di>).

15 Mei

Kodam VI Mulawarman melepas 450 prajuritnya dari Satuan Batalyon Infanteri Raider 600/ Modang ke Papua dalam rangka membantu pengamanan. Pelepasan tersebut dipimpin langsung Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumecko pada Sabtu (14/05) di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur (<https://regional.kompas.com/read/2022/05/15/145722278/450-prajurit-tni-dari-kodam-mulawarman-dikirim-ke-papua>).

25 Mei

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa meminta polisi yang dikirim ke Kabupaten Dogiyai tidak bertindak berlebihan dalam melakukan pengamanan. Polisi juga diminta berhati-hati dalam mencari pelaku pembakaran rumah dan kios warga di Dogiyai,

agar tidak salah tangkap atau asal menuduh. “Pengiriman aparat keamanan banyak-banyak di Kabupaten Dogiyai harus [bisa] mengungkap [siapa] pelaku. Jangan main tangkap masyarakat atau menuding masyarakat secara sembarangan. Mereka yang dikirim itu belum memahami antropologi masyarakat setempat,” kata Kadepa saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Rabu (25/05). Kadepa mengatakan, polisi harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Jika polisi gegabah dan main tangkap sembarang, hal itu justru akan menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/polisi-diminta-bertindak-proporsional-dalam-mencari-pelaku-pembakaran-di-dogiyai/>).

26 Mei

Sekretaris Fraksi Bangun Papua DPRP, Alfred Fredy Anouw, meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih XVII Papua agar segera menarik mundur anggotanya yang dikerahkan di Kabupaten Dogiyai menyusul adanya rentetan kebakaran misterius di sana beberapa hari terakhir. Anouw yang juga putra daerah Dogiyai mengatakan, pengiriman pasukan Polri, Brimob, dan TNI itu berlebihan, seolah Dogiyai sedang terjadi peperangan. Padahal di Dogiyai hanya terjadi rentetan kebakaran yang sejauh ini belum diketahui penyebab dan pelaku. Atas pengiriman pasukan itu, dikabarkan masyarakat di daerah Kamuu dan Mapia menjadi takut beraktivitas. Pasalnya, setidaknya di Dogiyai para aparat keamanan langsung melakukan pawai dengan menggunakan truk milik TNI dan Polri. Anouw menilai pengerahan pasukan yang berlebihan di sana hanya menimbulkan gejala berkelanjutan di masyarakat. Pasalnya tidak ada perlawanan militer yang terjadi di sana yang mengharuskan TNI Polri menambah pasukan di sana. “Ini sangat kami sayangkan, pengerahan pasukan ke sana. Buat apa? Di sana tidak ada

masyarakat yang angkat senjata. Kenapa harus ada penambahan pasukan? Cuma kebakaran saja melakukan pengiriman pasukan sangat berlebihan,” kata Alfred Fredy Anouw kepada Jubi, Kamis, (26/5) (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/tak-ada-perang-legislator-papua-kapolda-papua-stop-kirim-pasukan-ke-dogiyai/>).

04 Juni

Hampir 2.500 mortir dari Serbia yang dibeli untuk badan mata-mata Indonesia tahun lalu dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara. Menurut laporan dari kelompok pemantau senjata dan foto yang diberikan pada Reuters, beberapa mortir bahkan digunakan dalam serangan di delapan desa di Papua. Dugaan pengadaan mortir oleh Badan Intelijen Negara (BIN), menurut tiga anggotanya pada Reuters, juga tidak diungkapkan kepada komite pengawasan DPR yang menyetujui anggarannya. Kelompok pemantau yang berbasis di London, Conflict Armament Research (CAR), mengatakan mortir diproduksi pembuat senjata milik negara Serbia Krusik dan kemudian dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara bukannya ditembakkan dari tabung mortir. Dikatakan senjata yang dikirim ke BIN juga termasuk 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang biasanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak. Laporan Reuters menyebut, peluru mortir 81mm digunakan dalam serangan pada bulan Oktober lalu di desa-desa di Papua, yang dilaporkan dikuasai separatis bersenjata. Reuters tidak dapat secara independen mengonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut. Reuters juga tidak dapat menentukan siapa yang mengizinkan pembelian amunisi atau siapa yang menggunakannya di Papua (<https://www.kompas.com/global/read/2022/06/04/180000070/bin-dilaporkan-pakai-mortir-dari-serbia-untuk-papua?page=all>).

06 Juni

Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Untung Budiharto telah memberangkatkan ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari satuan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Papua. 450 prajurit TNI AD yang dikenal dengan julukan Batalyon Kuda Putih itu dilepas dengan upacara pemberangkatan yang digelar pada hari Minggu, 5 Juni 2022 kemarin di Lapangan Sewindu, Tangerang. TNI Angkatan Darat itu berangkat ke Papua dipimpin langsung Komandan Yonif Mekanis 203/AK Mayor Inf Ahmad Zaki. Dalam kesempatan itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh personel Satgas Yonmek 203/AK yang mendapatkan kepercayaan untuk bertugas ke Papua selama satu tahun ke depan. “Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan serta rangkulah, bagunlah komunikasi, dan rebut hati semua lapisan masyarakat Papua,” kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto dalam keterangan resminya, Senin, 6 Juni 2022 (<https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1481933-pangdam-jaya-mayjen-untung-kirim-pasukan-kuda-putih-tni-ke-papua>).

26 Juni

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Yayasan Kurawal sepanjang Januari – Juni 2022, sudah sekitar 3000 prajurit TNI yang diberangkatkan ke Papua. Pada 06 Juni 2022, dalam satu hari, dalam satu hari TNI telah mengirimkan pasukannya sebanyak 900 prajurit ke Papua dalam rangka membantu operasi keamanan (<https://suarapapua.com/2022/06/26/tiga-ribu-anggota-tni-telah-diberangkatkan-ke-papua-antara-januari-juni-2022/>).

19 Juli

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mendorong TNI dan Polri mengubah pendekatan dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua usai tewasnya 10 warga sipil pada Sabtu (16/7/2022). Sukamta berpendapat, TNI dan Polri semestinya tidak bersikap defensif tetapi aktif memburu KKB hingga ke sarangnya. “Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya,” kata Sukamta dalam siaran pers, Selasa (19/07). Anggota Komisi I DPR itu juga mendorong TNI dan Polri melakukan perang opini publik karena menurutnya selama ini ada pembentukan opini bahwa TNI-Polri melanggar HAM di Papua. Menurut Sukamta, informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan transparan supaya publik tahu bahwa aparat bertindak sesuai koridor hukum. “Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” ujar dia (<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/19/15154391/10-warga-sipil-tewas-diserang-kkb-tni-polri-diminta-ubah-pendekatan-di-papua>).

21 Juli

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mahfud mengatakan, pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. “Di sana tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam

menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum,” kata Mahfud dalam media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/07). Ia juga menegaskan, dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua. Mahfud mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua. “Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua,” ujar Mahfud. Mahfud menuturkan, pemerintah juga menggunakan pendekatan kesejahteraan serta operasi teritorial oleh TNI dan Polri sesuai batasan yang diatur oleh undang-undang dalam menangani KKB di Papua (<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18451501/menko-polhukam- tegaskan-tak-ada-operasi-militer-di-papua>).

01 Agustus

Seorang komandan distrik militer dan seorang prajurit TNI AD diduga membantu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri ke Papua Nugini. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, prajurit TNI tersebut merupakan Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN AM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tersebut telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk membantu menghadirkan anak buahnya dalam proses pemeriksaan. “Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapi anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK,” ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (1/8). “Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud,” sambung Ali

(<https://www.cnnindonesia.com nasional/20220801171306-12-828849/dandim-jayawijaya-diduga-bantu-bupati-mamberamo-tengah-kabur>).

03 Agustus

TNI mengusut lebih lanjut kabar dugaan keterlibatan Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib dalam proses pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) ke Papua Nugini. Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring menegaskan TNI memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyelidiki proses pelarian tersangka kasus suap dan gratifikasi KPK tersebut. “Adanya pemberitaan tersebut, tentunya menjadi perhatian kami Korem 172/PWY. TNI siap membantu pihak mana pun yang berwenang dalam mengusut adanya dugaan kasus korupsi,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (3/8). Kendati demikian, ia mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum menemukan dugaan keterlibatan anggota TNI yang membantu kaburnya RHP. Meski begitu, Sembiring mengaku akan membantu Polda Papua untuk mencari keberadaan RHP. Sembiring menyebut Danrem 172/PWY yang akan bertanggung jawab apabila dugaan tersebut benar-benar terbukti (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220803125245-12-829735/tni-usut-dugaan-dandim-jayawijaya-bantu-kabur-bupati-mamberamo-tengah>).

08 Agustus

Akhirnya militer Tentara Nasional Indonesia memberangkatkan satu lagi pasukan penyerang kilat dari Divisi Infanteri I Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) menuju Papua. Prajurit TNI yang diberangkatkan itu

berasal dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 303/Setia Sampai Mati. Pasukan berjuluk Tengkorak Putih itu segera bergerak dari markas mereka di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin siang 8 Agustus 2022. Berdasarkan siaran resmi Penerangan Divif 1 Kostrad dilansir VIVA Militer, pasukan Yonif Raider 303/SSM yang diberangkatkan ke Papua berjumlah 450 personel dengan Komandan Satuan Tugas, Mayor Inf Slamet Faojan. Di Papua nanti, pasukan Yonif Raider 303/SSM akan menjalankan operasi selama satu tahun sebagai Satgas Organik Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih (<https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1507145-mayor-slamet-bawa-pasukan-tengkorak-putih-kostrad-tni-masuk-papua>).

30 Agustus

Temuan Imparsial mengungkapkan sebanyak 3.657 personel non-organik TNI dan Polri dikirim ke Papua pada periode Januari 2022 hingga Agustus 2022. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan, ribuan personel tersebut diberangkatkan ke Papua melalui 13 kali pengiriman. “Estimasi jumlah pasukan yang dikirim kurang lebih 3.657 prajurit TNI-Polri, dengan komposisi 3.000 prajurit TNI dan 657 anggota Brimob Polri,” ujar Hussein saat melaunching monitoring bertajuk “Kekerasan Bersenjata di Papua dan Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil”, Selasa (30/8/2022). Hussein menyebutkan, seluruh pasukan non-organik yang dikirim ke Papua mempunyai kualifikasi tempur (<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/21471151/temuan-imparsial-3657-personel-non-organik-tni-polri-dikirim-ke-papua>, <https://imparsial.org/temuan-imparsial-3-657-personel-non-organik-tni-polri-dikirim-ke-papua-januari-agustus-2022/>).

09 September

Kelompok Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan pendekatan keamanan militeristik dalam menangani permasalahan Papua. Menurut koalisi masyarakat sipil, pemerintah seharusnya menangani kemelut di Papua dengan memberikan solusi terhadap akar masalah dan menghentikan pendekatan militeristik yang berpotensi memicu aksi kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Mendesak Presiden menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Sebab pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah dan justru berakibat pada masifnya berbagai peristiwa pelanggaran HAM,” demikian isi pernyataan pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan seperti dikutip pada Jumat (9/09) (<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/15470001/koalisi-sipil-kembali-desak-jokowi-hentikan-pendekatan-militer-di-papua>).

19 September

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua pada Senin (19/9/2022) mengumumkan hasil investigasi kasus penganiayaan yang dilakukan prajurit Batalyon Infanteri Raider 600/Modang yang menyebabkan seorang warga sipil Kabupaten Mappi meninggal dan seorang warga lainnya terluka berat. Komnas HAM Papua menyatakan penganiayaan terhadap kedua korban berlangsung selama delapan jam berturut-turut. Komnas HAM Papua juga menyatakan ada upaya prajurit TNI untuk memanipulasi korban akan menandatangani pernyataan tidak akan menuntut proses hukum atas penganiayaan itu. Penganiayaan terhadap dua orang warga sipil terjadi di Pos

Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, pada 30 Agustus 2022. Penganiayaan yang diduga dilakukan prajurit Batalion Infantri Raider 600/Modang itu menyebabkan Bruno Amenim Kimko meninggal dunia dan Yohanis Kanggun luka berat. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyatakan investigasi atas kasus penganiayaan di Mappi itu dilakukan tim Komnas HAM Papua di Merauke pada 16-17 September 2022. Pada 16 September 2022, tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemui Komandan Korem 174 Merauke, Brigjen TNI E Reza Pahlevi. Dalam pertemuan itu, Reza menjelaskan keberadaan Yonif Raider 600/Modang yang berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman di Kalimantan Barat dan tengah menjalani penugasan di Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/komnas-ham-papua-penganiayaan-berlangsung-8-jam-belum-ada-yang-ditetapkan-sebagai-tersangka/>).

23 September

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua menyatakan tetap akan memeriksa 10 prajurit Batalion Infantri Raider 600/Modang yang diduga menjemput dan menangkap Bruno Amenim Kimko, warga sipil Mappi yang meninggal setelah dianiaya di Pos Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mappi pada 30 Agustus 2022 lalu. Hal itu dinyatakan Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (23/9). Sebelumnya, tim Komnas HAM Perwakilan Papua gagal memeriksa sejumlah prajurit Batalion Infantri Raider 600/Modang saat melakukan investigasi di Merauke pada 16 – 17 September 2022 karena 10 prajurit itu “mogok bicara”. Ramandey menyatakan kini pihaknya masih menunggu Polisi Militer di Merauke selesai memeriksa para prajurit Batalion Infantri Raider 600/Modang. “Kami akan panggil mereka lagi. Tapi sekarang mereka masih

menjalani pemeriksaan dengan POM,” kata Ramandey (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/komnas-ham-papua-tetap-ingin-periksa-10-prajurit-tni-yang-terlibat-penganiayaan-di-mappi/>).

03 Oktober

Komite Nasional Papua Barat atau KNPB meminta pemerintah Indonesia segera mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan akar konflik di Tanah Papua. Hal itu penting untuk mengakhiri kekerasan yang berulang-ulang terjadi di Papua. Juru Bicara KNPB, Ones Suhuniap menyatakan saat ini Papua mengalami krisis kemanusiaan dan darurat Hak Asasi Manusia yang sangat serius. Menurut Suhuniap, hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia tidak mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat sipil di Papua serta gagal memberikan rasa keadilan kepada korban berbagai kekerasan aparat keamanan di Papua. “Warga sipil, baik orang asli Papua maupun orang non Papua, terus menjadi korban akibat kelalaian pemerintah Indonesia. Kekerasan di Papua tidak pernah berakhir sampai dengan saat ini karena pemerintah Indonesia tidak serius menyelesaikan masalah secara bermartabat,” kata Suhuniap kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Minggu (2/10). Suhuniap menyatakan warga sipil terus menjadi korban konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri yang meluas di sejumlah kabupaten seperti Nduga, Puncak, Intan Jaya, dan Yahukimo di Provinsi Papua, serta Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Suhuniap menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di Papua, termasuk kasus penembakan demonstran penolak pemekaran Papua di Yahukimo, pembunuhan dan mutilasi warga Nduga di Kabupaten Mimika, serta penganiayaan yang menewaskan warga sipil di Mappi. (<https://jubi.id/tanah->

papua/2022/kekerasan-terus-terjadi-knpb-meminta-pemerintah-indonesia-ganti-cara-selesaikan-konflik-papua/)

10 Desember

Badan Pengurus Harian, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia Malang, Surabaya, Se-jawa Timur (BPH-DPC-IPMNI-SJM) Welinus Nirigi meminta kepada Presiden Joko Widodo segera mengintruksikan panglima untuk tarik militer organik maupun non organik dari Kabupaten Nduga. “Sebab imbas dari pengiriman militer ke Tanah Papua membuat rakyat Papua di Nduga, Maybrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Papua, Puncak Jaya dan Intan Jaya mengungsi. Daerah-daerah ini menjadi sasaran dari tahun ke tahun sebab pemerintah terus menerus mengirimkan militer ke tanah Papua,” katanya kepada Jubi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (10/12). Nirigi mengatakan, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan Provinsi segera bertanggung jawab dalam rangka perlindungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sedang terancam hidupnya oleh kekerasan militer Indonesia (TNI-POLRI) (<https://jubi.id/polhukam/2022/presiden-jokowi-diminta-tarik-militer-dari-tanah-papua/>).

12 Desember

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap kali melakukan kekerasan di Papua. Ma'ruf mengatakan, langkah tegas itu diperlukan meski pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani dinamika yang terjadi di Papua. “Karena banyaknya, masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah

yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi (KKB),” kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12). Dia menambahkan, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua. Kendati demikian, ia menegaskan, konflik antara KKB dan aparat dan warga hanya terjadi di beberapa daerah tertentu di Papua. Ia mengklaim sejumlah daerah di Papua tergolong aman, terbukti ketika ia mengunjungi beberapa daerah di Papua yakni Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak. “Jadi walaupun ada itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja, tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” kata Ma'ruf (<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/20/13314181/wapres-minta-panglima-yudo-lebih-tegas-terhadap-kkb-di-papua>).

14 Desember

Dalam refleksi tentang HAM akhir tahun yang dilaksanakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) di Jayapura, (10/12), Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan, fakta menunjukkan bahwa selama tahun 2022 pendekatan militeristik juga terjadi dalam ruang kebebasan berekspresi baik itu di ruang publik, ruang diskusi, ruang asrama, dan ruang dunia maya dengan dalil mengartikan Surat Pemberitahuan berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 yang diartikan menjadi ‘izin’ bagi aktivitas kebebasan berekspresi di ruang publik (<https://suarapapua.com/2022/12/14/refleksi-hari-ham-tahun-2022/>).

19 Desember

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keinginan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono untuk lebih humanis dalam menangani konflik di Papua merupakan pendekatan yang baik. Namun, Presiden

Jokowi mengingatkan agar TNI harus tegas karena gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi terus-menerus. “Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022). “Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas),” katanya melanjutkan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan agar TNI selalu bersinergi dengan Polri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan. Sebab, tahun-tahun mendatang Indonesia masih menghadapi kondisi ketidakpastian global (<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/14502131/yudo-margono-ingin-pendekatan-humanis-di-papua-jokowi-it-baik-tapi-harus>).

Potret Runyam Konflik Bersenjata di Papua

— *Frits Ramandey dan SKPKC FP*

Pengantar

Papua adalah daerah rawan konflik. Akan tetapi seringkali konflik di Papua dilihat tanpa memahami konteksnya secara historis, sosio-kultural dan antropologis. Akibatnya muncul stereotip tanpa memahami mengapa orang Papua berjuang untuk menegaskan hak-haknya atas tanah ulayat, Sumber Daya Alam, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal inilah yang menyebabkan konflik terus-menerus terjadi di Papua bahkan meruncing pada konflik bersenjata.

Kronik yang ditulis oleh SKPKC Fransiskan Papua menunjukkan beragam konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2022. Kami akan melengkapi kronik tersebut dengan beragam kasus yang ditangani oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan analisis dampak konflik bersenjata bagi masyarakat dalam perspektif HAM.

Peran Aktif Komnas HAM RI Perwakilan Papua

Di tengah situasi konflik bersenjata sebagaimana terekam dalam kronik konflik bersenjata, Komnas HAM RI Perwakilan Papua pun terlibat dalam usaha penanganan konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan.

Pertama, peristiwa penyiksaan pada 22 Februari 2022 yang menyebabkan Makilon Tabuni meninggal dunia setelah dianiaya aparat. Komnas menerima pengaduan dari keluarga korban dengan nomor kasus 756/PK-HAM/V/2022. Selanjutnya, Komnas melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 2-4 Maret 2022 dan mendapatkan temuan bahwa oknum Anggota TNI Batalion 521 Brigif Kodam Brawijaya lalai hingga menyebabkan satu puncak senjata hilang pada 22 Februari 2022. Hal tersebut menyebabkan dilakukannya penyisiran hingga akhirnya 7 anak diduga diintrogerasi dan dianiaya hingga satu orang meninggal dunia atas nama Makilon Tabuni. Komnas lalu menyurati Panglima TNI pada 7 April 2022 yang salah satunya meminta Panglima TNI agar mengambil langkah tegas terhadap prajurit yang bertugas di Batalion 521 Brigif Kodam Brawijaya.

Kedua, pada peristiwa kekerasan demonstrasi penolakan DOB pada 15 Maret 2022 di Yahukimo, Komnas mendapatkan aduan langsung dari Himpunan Alumni Sejava Bali dan Sumatera (HA-JABASU) Yahukimo dan telah tercatat pada nomor kasus 836/PK-HAM/VI/2022. Komnas lalu melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 16 Maret 2022-18 Maret 2022 dengan meminta keterangan sejumlah anggota kepolisian yang diduga terlibat, melakukan rekonstruksi, meminta keterangan Wakapolres Yahukimo, meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas korban luka-luka dan meninggal dunia, serta menyampaikan hasil rekonstruksi sekaligus rekomendasi kepada Kapolda Papua yang salah satu pointnya meminta anggota yang diduga terlibat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Komnas juga telah mengirim surat terkait permintaan informasi dan keterangan terkait upaya penegakan hukum, sebagai langkah monitoring dan evaluasi, kepada Kabid Propam Polda Papua pada 1 Februari 2023.

Ketiga, peristiwa pembunuhan sejumlah warga sipil di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Dalam peristiwa ini sebanyak 10 orang warga sipil dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya menderita luka-luka pada 16 Juli 2022. Komnas telah melakukan penanganan berdasarkan mekanisme pemantauan proaktif dan telah tercatat pada nomor kasus 1811/PK-HAM/X/2022 serta telah mengirimkan surat terkait permintaan klarifikasi kepada Kapolda Papua pada 10 Oktober 2022.

Keempat, peristiwa penembakan yang menewaskan 1 orang dan menyebabkan 2 orang lainnya luka-luka di Kantor Bupati Paniai pada tanggal 5 Juli 2022 oleh terduga pelaku Pemda Paniai, TNI dari Kodim Persiapan Paniai, dan Polres Paniai. Komnas mendapat aduan secara langsung dari Sdr. Yabet Lukas Degei pada 7 Juli 2022 dan telah tercatat pada nomor kasus 1801/PK-HAM/X/2022.

Kelima, peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Satgas Kopassus kepada 3 anak dibawah umur pada Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul 06.00 WIT di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua yang menyebabkan 1 anak kritis dan 2 lainnya luka-luka. Hal tersebut dipicu oleh hilangnya burung di Pos Kopassus, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Komnas mendapat aduan secara langsung maupun pengaduan proaktif dan telah tercatat pada nomor kasus 1933/PK-HAM/X/2022. Komnas pun telah menindaklanjuti dengan melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 28 Oktober 2022 – 5 November 2022 serta mengeluarkan rekomendasi melalui konferensi pers pada 8 November 2022 dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permintaan keterangan kepada Pangdam/XVII Cenderawasih pada 31 Oktober 2022.

Keenam, peristiwa penyiksaan pada 28 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022 di Kampung Bade, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua oleh anggota Satgas Yonif 600/Modang. Hal tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia atas nama Bruno Amenim Komko dan 5 orang lainnya luka-luka atas nama Yohannes Kanggun, Pius Yogosa, Korbrianus, Lodefigus Yikamhai, dan Xaverius Yame. Komnas telah melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 16 – 18 September 2022 dan telah mengumumkan hasil temuan, mengeluarkan rekomendasi, sekaligus melakukan konferensi pers pada 19 September 2022.

Ketujuh, peristiwa mutilasi terhadap 4 orang warga Nduga di Kabupaten Timika pada 22 Agustus 2022 yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI. Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Komnas telah melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 2-4 September 2022, lalu diperkuat pada 12-16 September 2022. Komnas juga telah mengeluarkan rekomendasi serta telah mengawasi proses jalannya persidangan terutama terhadap para terdakwa yang diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Kedelapan, peristiwa penembakan terhadap 14 Pekerja Proyek yang menyebabkan 4 warga sipil meninggal di Kampung Majnik, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada 29 September 2022 yang diduga dilakukan oleh TPNPB Fraksi Sebby Sambon. Komnas telah melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 5 Oktober 2022 – 7 Oktober 2022. Selanjutnya, Komnas telah mengumumkan hasil temuan dan mengeluarkan rekomendasi melalui pemberitaan di berbagai media massa.

Kesembilan, terjadi peristiwa penembakan terhadap 9 orang warga sipil oleh aparat keamanan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka pada tanggal 14 Desember 2022 di Kelurahan Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi

Papua Selatan. Komnas telah menerima pengaduan atas peristiwa tersebut dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua dan telah tercatat pada nomor kasus 56/PK-HAM/1/2023. Komnas pun telah menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat No.016/TL Aduan 3.5.6/1/2023 kepada Kapolres Mappi perihal permintaan keterangan terkait kematian Sdr. Moses Nakas Erro dan penembakan terhadap Sdr. Rixon YA. A. Pasim.

Dampak Konflik Bersenjata dalam Perspektif HAM

Dalam perspektif HAM, pada level internasional, ada hukum yang mengatur para pihak yang sedang berkonflik secara khusus pada saat konflik bersenjata. Hukum yang dimaksud ialah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional. Kedua instrumen ini mengatur sekaligus mengajak para pihak yang berkonflik agar ketika konflik atau perang tidak berbuat sesuka hati. Prinsip-prinsip HAM yang tertuang di dalam Hukum Humaniter Internasional seringkali ditiadakan oleh para pihak yang berkonflik atau berperang, dalam konteks Papua oleh aparat militer maupun oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau yang sering juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM).

Kedua pihak yang dimaksud berperang untuk mengejar tujuannya masing-masing. Kedua pihak ini saling menuding dan membenarkan dirinya. Sayangnya kedua pihak tidak mematuhi kedua instrumen tersebut. Korban nyawa warga atau penduduk sipil tak terelakkan. Warga sipil harus mengungsi dari kampung halamannya. Objek-objek sipil yang semestinya dilindungi dan dilarang untuk dihancurkan seperti sekolah, puskesmas, diduduki oleh aparat militer, dibakar oleh TPNPB, dan dirusakkan oleh kelompok tak dikenal. Perkampungan atau perumahan warga yang diduga menjadi bagian dari salah satu kelompok dihancurkan.

Hal-hal tersebut mempunyai dampak yang luas. *Pertama*, masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik menjadi takut, merasa terancam, bahkan trauma karena banyak masyarakat sipil tidak berdosa yang menjadi korban, misalnya peristiwa penembakan di Kab. Teluk Bintuni maupun di Nduga. *Kedua*, akibat rasa takut tersebut banyak masyarakat yang mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka, misalnya di Maybrat atau Kiwirok. *Ketiga*, hilangnya hak atas rasa aman yang berujung hilangnya hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak-hak lainnya. Akibat konflik, pelayanan publik terhenti, aktivitas perekonomian terganggu, dan para korban pun butuh pemulihan agar dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Peristiwa penyiksaan terhadap 3 anak di Kabupaten Keerom menjadi contoh betapa para korban tidak dapat segera kembali ke sekolah karena harus menjalani pemulihan di rumah sakit. *Keempat*, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, baik karena kelalaian maupun karena abai dalam memberikan pelayanan penegakan hukum secara optimal. *Kelima*, jumlah korban anak-anak yang menjadi eksekusi dari berbagai peristiwa konflik bersenjata di Tanah Papua naik drastis. Misalnya terkait penyiksaan anak oleh anggota TNI di Kabupaten Puncak maupun di Kabupaten Keerom. *Keenam*, citra Tanah Papua sebagai daerah konflik makin tertanam di benak masyarakat mengingat masifnya pemberitaan di media-media terkait konflik bersenjata di Tanah Papua.

Penutup

Sampai kapankah konflik bersenjata di Papua akan berakhir? Mencermati situasi konflik bersenjata di Papua, beberapa pihak menyerukan agar kedua pihak yang berkonflik menyudahi konflik dan bersedia duduk bersama untuk mencari

solusi agar tidak ada lagi korban yang berjatuhannya khususnya warga sipil. Theo Hesegeg, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua misalnya, menyerukan agar pihak TPNPB maupun TNI tidak melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki senjata api. Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen dan keamanan, menyebutkan tentang pentingnya pendekatan kemanusiaan, melalui pengembangan ekonomi, budaya, sosial, dan pendekatan lain non senjata. Riyanta juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun *state actor*. Pendapat Riyanta diperkuat oleh Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin. Menurutnya, perlu dirumuskan suatu keputusan politik negara yang diinisiasi oleh pemerintah yang komprehensif dan menjadi pedoman strategis penanganan konflik di Papua.

Kronik Konflik Bersenjata dan Pengungsian Internal

05 Januari

Sebanyak 10 warga Distrik Surusuru (Perbatasan Yahukimo dan Asmat) dikabarkan meninggal di lokasi pengungsian. Sekitar 3000-an warga Surusuru dari enam kampung masih mengungsi di hutan. Ini akibat dari penyerangan terhadap satuan BKO Aparat teritorial Koramil Persiapan Surusuru pada 20 November 2021 yang lalu (<https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/05/01/2022/10-warga-suru-suru-dilaporkan-meninggal-di-hutan/>).

07 Januari

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey menjelaskan bahwa di Papua terus terjadi rentetan

kekerasan dan konflik bersenjata. Hal ini mengorbankan warga sipil. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komnas HAM perwakilan Papua, ada 23 kelompok sipil bersenjata dengan empat panglima atau pemimpinnya. Sementara Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Anum Siregar, berharap ruang-ruang publik tidak digunakan oleh TNI dan TPNPB sebagai arena perang (Cenderawasih Pos).

10 Januari

Selama kurun waktu Januari – November 2021, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melindungi 15 orang saksi dari enam kasus penyiksaan. Dari 15 orang tersebut, 4 diantaranya berstatus pelapor, 4 saksi korban dan 7 saksi atau keluarga. Korban atau saksi ini berasal dari wilayah kejadian di Purwakarta, Kota Balikpapan, Kota Makasar, dan Kabupaten Intan Jaya, Papua. Penyiksaan yang dialami korban bermacam-macam seperti dipukul dengan tangan dan benda tumpul, ditendang, disulut dengan rokok hingga ditembak. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Manager Nasution di Jakarta, Jumat 7 Januari 2022 (Koran Jubi Edisi 10 – 11 Januari).

14 Januari

Setelah adanya kesepakatan perdamaian atas konflik warga di Kabupaten Jayawijaya, pihak DPRD di Kabupaten Jayawijaya, Nduga, dan Lani Jaya bersepakat agar warga Nduga yang saat ini mengungsi di Kabupaten Jayawijaya akan dipulangkan ke kampung asalnya. Terkait dengan hal ini, Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha mengembalikan warga Nduga yang mengungsi tetapi dengan syarat pasukan TNI/Polri non organik harus segera ditarik dari Nduga (Koran Jubi Edisi 14 – 15 Januari).

19 Januari

Terjadi baku tembak di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua antara kelompok bersenjata pimpinan Lamek Alipki Taplo dan aparat gabungan TNI/Polri pada Senin, 17 Januari 2022. Seorang anggota Brimob, Bharatu Bachtiar terkena tembakan di bagian punggung dan dievakuasi ke Jayapura. Kepala Kepolisian Resort Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito menyatakan, pasca baku tembak situasi di Distrik Kiwirok sudah kondusif dengan penambahan pasukan Operasi Damai Cartenz (Koran Jubi Edisi 19–20 Januari, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220118/16/1490460/kronologi-kontak-senjata-aparat-vs-kkb-di-kiwirok-anggota-brimob-tertembak>).

21 Januari

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap lima personel TNI di Kawasan Kampung Fankario dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Kamis, 20 Januari 2022. Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyampaikan bahwa serangan itu dilakukan oleh TPNPB Kodap IV Sorong Raya kepada anggota TNI yang tengah memperbaiki jembatan dan satu diantaranya tewas tertembak (Koran Jubi Edisi 21 – 22 Januari).
- Panglima Kodam XVII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengutuk keras pelaku penyerangan terhadap lima prajurit TNI saat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Keluarga besar Kodam XVII/Kasuari berduka atas meninggalnya

Sersan Miskel Rumbiak dalam serangan tersebut (Koran Jubi Edisi 21 – 22 Januari & Cenderawasih Pos).

24 Januari

Konflik bersenjata terjadi lagi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Penembakan terjadi oleh KKB terhadap seorang anggota polisi, Bharada Rizky. Korban ditembak saat melakukan penjemputan di sekitar Bandara Kiwirok, Sabtu (22/1). Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, penembakan ini dilakukan oleh KKB pimpinan Lamek Taplo terhadap seorang anggota Polri Satgas Damai Cartenz (Cenderawasih Pos, <https://nasional.tempo.co/read/1552706/anggota-brimob-tertembak-dalam-baku-tembak-dengan-kkb-di-kiwirok>).

25 Januari

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, pola kekerasan yang selalu terjadi di Pegunungan Bintang tidak berbeda dengan kekerasan yang dilakukan di Nduga dan Intan Jaya. Frits menyampaikan sebaiknya pihak aparat keamanan melakukan pendekatan lebih soft. Dalam perspektif Komnas HAM, kekerasan tidak boleh direspon dengan kekerasan, pendekatan harus diubah dengan pendekatan yang melibatkan multi pihak. (Cenderawasih Pos).

26 Januari

Menurut Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, sudah cukup lama TNI-Polri dan TPNPB berkonflik. Pemerintah sempat menjanjikan bahwa akan melaksanakan dialog tetapi belum terlaksana karena selalu terjadi konflik bersenjata. Penambahan pasukan militer yang terus terjadi

di Tanah Papua tidak akan menyelesaikan masalah konflik di Papua. Harus ada jeda kemanusiaan antara Militer dan TPNPB. Hal ini disampaikan pada Selasa (25/1) (Cenderawasih Pos).

28 Januari

Pada Kamis, 27 Januari 2022, terjadi baku tembak antara TPNPB dan TNI di Ilaga, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya Papua. Aksi baku tembak ini menelan 3 korban jiwa anggota TNI. Kejadian ini ditanggapi oleh Sekretaris Komisi 1 DPR Papua, Feryana Wakerwa. Menurut Wakerwa, kejadian ini selain menelan korban nyawa juga akan mengganggu situasi kehidupan warga sipil. Biasanya setelah penembakan, pihak militer melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Hal ini membuat warga sipil terus trauma seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kedua anggota TNI yang tertembak mati adalah Serda Rizal Maulana Arifin dan Pratu Tuppal Halomoan Baresa yang merupakan anggota Satgas Pamantas Mobile Yonif R 408/SBH (Koran Jubi Edisi 28 – 29 Januari 2022, Cenderawasih Pos, dan <https://nasional.tempo.co/read/1554616/kronologi-baku-tembak-TPNPB-dengan-tni-di-distrik-gome-papua>).

31 Januari

Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa menyampaikan, pasca penembakan di Gome, Papua, pihaknya akan melakukan evaluasi. Andika juga menegaskan bahwa tidak ada lagi penambahan pasukan ke Papua tetapi pengejaran terhadap pelaku terus diupayakan (Cenderawasih Pos).

07-08 Februari

Aksi baku tembak kembali terjadi antara TNI dan TPNPB pada 5 Februari 2022 di Sugapa, Intan Jaya. Penembakan ini menyebabkan satu prajurit TNI, Prada Giyade Ramdani Fattah

terkena luka tembakan saat menjaga Pos di Titigi, Distrik Sugapa (Koran Jubi, 7-8 Februari, <https://papua.tribunnews.com/2022/02/05/kena-tembakan-kkb-di-pangkal-paha-saat-baku-tembak-di-intan-jaya-prada-giyade-dievakuasi-ke-mimika>).

08 Februari

Tim Gabungan Polres Mimika dan Satgas Operasi Damai Cartenz telah membekuk ET alias Enos sebagai buronan dari kelompok separatistis teroris yang selama ini terlibat dalam rangkaian kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapolres Mimika, AKBP IGG Era Adhinata, Senin, mengatakan, Enos dibekuk di salah satu lokasi di Jalan Budi Utomo, Timika, Sabtu (5/2). Bersamaan dengan Enos, polisi juga menangkap enam orang lainnya (Cenderawasih Pos, <https://www.antaranews.com/berita/2688121/polisi-bekuk-et-pentolan-kst-intan-jaya-di-timika>).

21 Februari

Konflik bersenjata di Ilaga, Puncak Jaya masih tetap berlanjut. Pada Sabtu, (19/2), di sekitar Tugu Kampung Kago, Distrik Ilaga terjadi penembakan yang dilakukan oleh TPNPB atau KKB. Korban penembakan adalah seorang karyawan PT Martha Tunggal Teknik, Glen Sumampo. Korban mengalami luka tembak di bagian rusuk (Cenderawasih Pos, <https://www.liputan6.com/news/read/4891956/korban-penembakan-kkb-di-puncak-papua-terluka-di-rusuk-kiri?medium=Headline>).

22 Februari

- Kontak senjata yang terjadi pada Minggu, (20/2) di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak antara TNI Polri dan kelompok TPNPB menyebabkan salah satu anggota TPNPB, Kasar Kulua meninggal dunia (Cenderawasih Pos).

- Terkait konflik senjata antara TNI Polri dan TPNPB yang seringkali di Papua, ditanggapi oleh Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikbo. Menurut Dorman, bukan warga Puncak, dalam hal ini TPNPB yang salah, tetapi yang salah adalah pengiriman terus-menerus pasukan non organik ke Papua (Cenderawasih Papua, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/20/13231861/pasca-kontak-senjata-kkb-dan-tni-polri-di-bandara-ilaga-papua-maskapai>).

04 Maret

- Penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Kampung Jenggereng, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak Papua pada hari Rabu, 2 Maret 2022. Delapan orang tewas dalam pembantaian itu, yakni tiga orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yaitu Billy Garibaldi, Renal Tegasye Tentua dan Bona Simanulang, seorang warga lokal yang berperan sebagai pemandu, Bebi Tabuni dan empat karyawan kontraktor yaitu Jamaluddin, Syahril Nurdiansyah, Ibo dan Eko Septiansyah. Penembakan itu terjadi di kamp PT PTT. Hanya satu orang yang selamat yaitu Nelson Sarira karena pada saat kejadian ia tidak berada di kamp tersebut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok TPNPB pada Rabu, 2 Maret 2022 di Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel, Beoga, tetapi baru diketahui pada Kamis, 3 Maret 2022. Ia menjelaskan proses evakuasi belum dapat dilakukan karena terkendala cuaca (Cenderawasih Pos, <https://nasional.tempo.co/read/1566933/organisasi-papua-merdeka-akui-tembak-8-karyawan-rekanan-telkomsel-hingga-tewas>).

- Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga diserang oleh kelompok TPNPB pada hari Kamis, 3 Maret 2022. “Sekitar pukul 12.45 WIT kemarin, anggota Satgas Kodim Yonif R 408/SBH diserang dan ditembak oleh TPNPB. Dalam kejadian ini, satu prajurit atas nama Pratu Herianto terkena tembakan di bagian leher bawah telinga, tetapi kondisinya sadar dan stabil,” tutur Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga (Cenderawasih Pos, <https://www.antaranews.com/berita/2737805/ksb-serang-patroli-pos-koramil-dambet-seorang-prajurit-terluka>).

05 Maret

Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan delapan jenazah korban pembunuhan di Beoga pada 2 Maret 2022 belum berhasil dievakuasi karena alasan cuaca. “Rencana evakuasi akan dilakukan hari ini jika cuaca di Puncak membaik. Kalau cuaca baik dievakuasi ke Mimika, tetapi kalau tidak ke Sugapa atau Beoga, tergantung cuaca karena TKP berada pada ketinggian 4000 mdpl,” tuturnya pada Jumat, 1 Maret 2022. Sementara itu, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegeg mengatakan kejadian pembunuhan terhadap warga sipil di Beoga merupakan kejahatan kriminal sekaligus kejahatan kemanusiaan, karena setiap orang memiliki hak hidup, kebebasan, hak bekerja dan hak tinggal di mana saja. “Kita tidak bisa memandang bahwa mereka orang non Papua lantas ditembak atau dibunuh. Itu salah besar! Orang non Papua maupun orang Papua punya hak hidup yang sama, mau hidup di mana saja bisa. Kalau mau berjuang murni ajak TNI-Polri yang punya senjata untuk perang, tentukan jadwal dan tempatnya. Jangan jadikan warga

sipil sebagai korban,” tegas Theo Hesegeg pada Jumat, 4 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

08 Maret

Setelah menunggu selama 5 hari, delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang menjadi korban penembakan TPNPB di Beoga, pada 2 Maret 2022, berhasil dievakuasi ke Timika pada Senin, 7 Maret 2022. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan bahwa pihaknya melibatkan 9 personel Operasi Damai Cartenz dan anggota TNI untuk mengevakuasi para korban dengan menggunakan 4 helikopter. Para korban dievakuasi ke Sugapa, Intan Jaya, kemudian ke Timika untuk dilakukan autopsi. “Kami bersyukur proses evakuasi delapan jenazah berjalan lancar tanpa gangguan dan cuaca juga bagus. Hasil visum jenazah akan dijelaskan oleh tim medis dan untuk keberangkatan jenazah masih menunggu hasil visum,” tutur Kaops Damai Cartenz, Kombes Pol Muhammad Firman pada Senin, 7 Maret 2022 (Cenderawasih Pos, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/115422278/8-jenazah-korban-serangan-kkb-di-beoga-berhasil-dievakuasi-ke-timika>).

11 Maret

TPNPB pimpinan Goliath Tabuni dan Lekagak Telenggen, melalui juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan bahwa bertanggung jawab terhadap pembunuhan 8 orang karyawan PT Palapa Timur Telematika di Beoga, pada 2 Maret 2022. Salah satu korban adalah Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari Puncak Jaya, Bebi Tabuni. “Kami telah menerima laporan resmi dari Ilaga bahwa Bebi Tabuni yang dibunuh di Beoga bersama dengan orang imigran Indonesia adalah agen informan TNI-Polri yang selalu memberikan informasi keberadaan pasukan TPNPB. Bebi

Tabuni merupakan penunjuk jalan buat TNI-Polri. Ini pelajaran bagi OAP lain yang suka menjadi agen TNI-Polri demi sesuap nasi,” tutur Sebby Sambom dalam rilisnya pada Kamis, 10 Maret 2022 (Cenderawasih Pos, <https://nasional.tempo.co/read/1566933/organisasi-papua-merdeka-akui-tembak-8-karyawan-rekanan-telkomsel-hingga-tewas>).

26 Maret

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi, pihaknya tidak menemukan keterlibatan tujuh anak di bawah umur yang dituduh terlibat dalam pencurian senjata di Pos PT Modern, Bandara Tapulu, Sinak, Kabupaten Puncak pada 22 Februari 2022, pukul 23.35 WIT. Ketujuh anak itu mengalami penyiksaan sejak tanggal 23-24 Februari 2022 hingga menyebabkan salah satunya, Makilon Tabuni (14 tahun, murid SD Inpres Sinak) meninggal dunia karena mengalami penyiksaan. Enam anak lainnya yang disiksa oleh anggota TNI Pos PT Modern yaitu Deson Murib (SD kelas 5), Aibon Kulua (SD kelas 4), Aton Murib, Disoliman Kulua, Weiten Murib, dan Elton Murib. “Dari keterangan para korban pada tim Komnas HAM, mereka tidak mengetahui kejadian dari pencurian senjata itu. Tetapi, anggota TNI Pos PT Modern melakukan penyiksaan terhadap anak-anak secara ilegal melampaui kewenangan,” tutur Frits Ramandey pada Jumat, 25 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

28-29 Maret

Pasukan TPNPB melakukan penyerangan ke pos Satgas Mupe TNI AL di Kuari Bawah, di Kampung Traslala, Kenyam di Nduga pada Sabtu, 26 Maret 2022. Kejadian ini menyebabkan anggota marinir gugur yaitu Letnan Dua Marinir dan Moh Iqbal,

Pratu Marinir Wilson dan Anderson Here serta delapan orang lainnya mengalami luka-luka (Koran Jubi Edisi 28-29 Maret, <https://nasional.tempo.co/read/1575281/pakai-sniper-dan-granat-TPNPB-akui-serang-markas-tentara-di-nduga>).

31 Maret

Kepala Satuan Tugas Humas Ops Damai Cartenz 2022, Kombes Pol. Ahmad Mustfofa Kamal mengatakan bahwa pihaknya telah melumpuhkan dua orang anggota TPNPB di Kelurahan Siriwini, Nabire atas nama Toni Tabuni (24) dan Kais Tabuni (25). Toni Tabuni merupakan pimpinan TPNPB di kampung Ndeotadi, Distrik Baya Biru, Paniai. “Saat dilakukan penangkapan, terjadi perlawanan oleh Toni Tabuni akhirnya personil Satgas Gukum Ops Cartenz melakukan tindakan tegas (menembak) sehingga Toni Tabuni meninggal dunia, sedangkan Kais Tabuni masih diamankan di Polres Nabire,” tuturnya pada 29 Maret 2022 (Cenderawasih Pos, <https://www.nabire.net/satgas-gakkum-ops-damai-cartenz-tembak-2-anggota-opm-di-kalibobo-nabire-1-tewas/>).

01 April

- TPNPB pimpinan Undius Kogoya dan Aibon Kogoya membakar satu unit gedung Sekolah Satu Atap YPPGI - SMP Negeri 2 Hitadipa, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu, 30 Maret 2022, pukul 17.50 WIT. Informasi yang dihimpun menyebutkan TPNPB membakar gedung sekolah tersebut lantaran tidak ada proses belajar mengajar dan sekolah tersebut digunakan sebagai pos pasukan militer TNI-Polri. Selain membakar gedung sekolah, pelaku juga menganiaya salah seorang guru. “Selain membakar gedung sekolah, mereka juga menganiaya salah satu guru di situ.

Mungkin saja guru itu mau mencegah atau menghalau, tetapi malah dianiaya. Kami masih dalam apakah saat itu, guru tersebut menegur atau bagaimana kejadiannya,” tutur Kabid Humas Polda Papua (Cenderawasih Pos, <https://nasional.tempo.co/read/1576873/polisi-sebut-TPNPB-bakar-sekolah-aniaya-guru-hingga-tembak-anggota-tni>, <https://tirto.id/kelompok-bersenjata-bakar-dua-sekolah-di-hitadipaintan-jaya-gqtd>).

- Pasangan suami istri, Sertu Eka Adriyanto Hasugian, Babinsa kampung Meagama, Ramil 1702-05/Kurulu, ditembak di dada tembus punggung dan istrinya, Sri Lestari Indra Putri (ASN Bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo) dibacok di leher di rumahnya di kampung Elelim, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, pada Kamis, 31 Maret 2022, pukul 05.30 WIT. Sedangkan salah satu anak mereka, Elvano Putra Faeyza (2,5 tahun) mengalami luka pada jari telunjuk dan jari tengah putus. Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Arif Budi Situmeang mengatakan korban kena tembakan di dada, sedangkan istrinya kena luka bacokan. “Anggota kami adalah Babinsa sehingga tidak membawa senjata. Penembakan itu terjadi di rumah korban dan diperkirakan dilakukan oleh tiga orang yang tidak dikenal. Sekarang, kita upayakan jenazah kedua korban dibawa ke Wamena untuk selanjutnya disemayamkan di Makodim 1702/Jayawijaya dan akan diterbangkan ke kampung halaman di Sidoarjo, Jawa Timur,” tutur Situmeang pada Kamis, 31 Maret 2022 (Cenderawasih Pos, <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/01/04/2022/babinsa-dan-istrinya-dihabisi-otk/>).

04 April

Menyikapi penembakan dan pembacokan yang menimpa

Sertu Eka Adriyanto Hasugian (Babinsa kampung Meagama, Ramil 1702-05/Kurulu), dan istrinya, Sri Lestari Indra Putri (ASN Bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo), Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan kriminal yang sangat sadis. “Salah satu yang mereka bunuh itu tenaga medis, mestinya masyarakat tahu bahwa dia tenaga medis yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berdampak buruk terhadap pelayanan pemenuhan hak atas kesehatan kepada masyarakat di Yalimo. Tenaga medis dan guru dalam situasi perang sekalipun, mereka mendapat perlindungan. Mereka itu pekerja kemanusiaan. Mereka tak pantas disentuh dengan kekerasan,” tutur Frits Ramandey di Jayapura pada Minggu, 3 April 2022. (Cenderawasih Pos).

05 April

Satu anggota TPNPB atas nama Aliteu Kogoya, yang berasal dari kampung Nipuralome, tewas ditembak oleh tim Gakum Satgas Damai Cartenz di dekat Tugu Ilaga pada Minggu, 3 April 2022, pukul 16.12 WIT. Dari tangan korban Aliteu Kogoya ditemukan satu pistol kaliber 45. “Tim Gakkum Satgas Damai Cartenz sedang melakukan pemetaan dan kebetulan bertemu dengan tersangka sehingga terjadi baku tembak dan tim berhasil melumpuhkan yang bersangkutan. Aliteu bagian dari pasukan TPNPB pimpinan Numbuk Telenggen,” tutur Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Rumadhani di Jayapura pada Senin, 4 April 2022 (Cenderawasih Pos).

08 April

Kekerasan kembali terjadi di Ilaga, kabupaten Puncak pada 6 April 2022. Terjadi pembakaran terhadap 15 rumah warga. Kepala

Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan bahwa pihaknya langsung ke TKP ketika mendapat laporan. Akan tetapi dalam perjalanan dihadang dengan tembakan dari kelompok bersenjata sehingga terjadi baku tembak. “Personel gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang berasal dari kelompok Kalenak Murib. Mereka lari menyeberang di kali di belakang PT Unggul menuju kampung Mundidok,” tutur Kamal (Cenderawasih Pos).

09 April

Di Nduga, seorang pelajar SMA bernama Parinus Lokbere, usia 16 tahun tewas tertembak pada Rabu, 6 April 2022, pukul 20.30 WIT. Kapolres Nduga, AKBP I Komang Budhiarta mengatakan bahwa pihaknya sulit mengidentifikasi pelakunya karena kejadiannya malam hari dan tiba-tiba terdengar tembakan dari arah perbukitan. Korban telah dimakamkan pada Kamis, 7 April 2022 di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga. “Pada saat korban dan dua saudaranya dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengambil *handphonenya* yang dicas di salah satu kios, ketika tiba di daerah Nogolait, terdengar tembakan dari arah perbukitan, yang mengenai korban sehingga jatuh dan tewas,” tuturnya. Sementara itu Bupati Nduga, Wentius Nimjangge mengutuk pelaku penembakan terhadap Parinus Lokbere. “Manusia adalah gambaran Allah, yang diciptakan dengan tangan-Nya, siapa yang menghilangkan nyawanya dia tidak akan diampuni Allah. Silakan TNI-Polri dan TPNPB berperang di tempat lain, bukan di Distrik Kenyam,” tegas Bupati Wentius Nimjangge, pada Jumat, 8 April 2022 (Cenderawasih Pos).

11 April

Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nimjangge mengutuk keras tewasnya Patunus Lokbere. Ia minta agar aparat keamanan

tidak menembak masyarakat sipil. Saat menghadiri pemakaman almarhum Patunus Lokbere, ia menerima masukan dari masyarakat agar di Nduga cukup ada Koramil saja, jangan lagi datangkan pasukan dari luar. “Sebagai pemimpin Nduga, saya merasa kehilangan generasi Nduga yang tak berdosa. Masalah ini, saya lalui dengan air mata. Jangan lagi ada tembak-menembak di daerah saya. Jangan buat takut masyarakat. Kalau mau saling tembak di hutan sana,” tegasnya (Cenderawasih Pos).

13 April

Penembakan terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek kembali terjadi di kampung Lumbuk, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak pada 12 April 2022, pukul 10.00 WIT. Kedua korban tersebut, Soleno Lolo meninggal dunia, sedangkan Sauku Paewa dalam kondisi kritis dan telah dibawa ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. “Kedua korban sudah berada di RSUD Mulia. Korban kritis dalam perawatan tim medis. Korban meninggal dunia masih tunggu koordinasi dengan keluarga, apakah dimakamkan di Puncak Jaya atau dibawa pulang ke kampung halaman,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal pada Selasa, 12 April 2022 (Cenderawasih Pos).

19 April

Lima orang warga masyarakat yang diduga sebagai anggota TPNPB melakukan penyerangan ke kantor Polsek Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat pada Minggu, 17 April 2022, pukul 20.00 WIT. Kapolres Inanwatan, Ipda Yanuar mengatakan bahwa pada awalnya kelima warga datang dalam kondisi mabuk, membawa parang, dan membuat keributan di kampung Mate, Distrik Inanwatan. Kemudian ada warga yang

datang melapor ke Polsek agar ditindaklanjuti. Karena tidak terima, kelima warga tersebut langsung menuju ke Polsek Inanwatan dan melakukan penyerangan. “Kami sudah identifikasi tiga orang berinisial JP, IN, dan DB. Mereka pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora, kelompok separatist Papua merdeka di wilayah Distrik Inanwatan,” tutur Ipda Yanuar pada Minggu, 17 April 2022 (Cenderawasih Pos).

21-22 April

Aparat TNI menembak salah seorang warga bernama Franky Nauw, 50 tahun pada dini hari, 17 April 2022 di Pos Rayon Militer Persiapan Mare di kampung Suswa, Distrik Mare, kabupaten Maybrat. “Sempat terdengar empat kali tembakan, diduga tembakan peringatan. Setelah itu, moncong senjata diarahkan ke kaki Pak Franky. Kemudian, dia ditembak,” tutur salah seorang saksi. Komandan Distrik Militer Maybrat, Letkol Hary Ismail mengatakan bahwa tindakan anggotanya sesuai prosedur. Ia mengklaim bahwa Franky Nauw datang dalam kondisi mabuk dan membawa alat tajam. Sementara itu, anggota DPRD Maybrat, Yonas Yewen mengatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap Franky Nauw terjadi di kampung Suswa bukan di Nafasi. “Korban Franky Nauw adalah masyarakat sipil. Dia seorang anggota Baperkam kampung Nafasi, Distrik Mare,” tutur Yonas Yewen (Koran Jubi Edisi 21-22 April).

23 April

Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faisal mengatakan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap anggota polisi di kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, kabupaten Nduga. “Saat anggota sedang melakukan mapping, mereka diserang kelompok kriminal bersenjata di Kenyam dan diduga kelompok Egianus Kogoya,” tutur Kombes Pol Faisal (Cenderawasih Pos).

25 April

Baku tembak antara TNI dan TPNPB kembali terjadi di Kenyam, Kabupaten Nduga pada 22 April 2022. Peristiwa baku tembak ini menyebabkan gugurnya seorang TNI Angkatan Laut, Pratu Mar Dwi Miftahul dan melukai seorang prajurit lainnya, Mayor Mar Lilik Cahyanto. Juru bicara TPNPB, Sebbi Sambon mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah Kenyam, Nogolaid, Yosema hingga Batas Batu agar tidak bepergian. “Pihak Egianus dan pasukannya sudah mengepung Kenyam dan akan dijadikan medan perang sehingga warga sipil harus menjauh,” tutur Sebbi Sambon. Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih, Herman Taryaman menjelaskan bahwa kontak tembak itu terjadi pada saat prajurit melakukan patroli. “Ada kontak tembak pada hari Jumat, 22 April 2022 dan satu prajurit gugur. Jenazah langsung dievakuasi menggunakan heli ke Timika,” tutur Herman (Cenderawasih Pos).

26 April

Penembakan kembali terjadi di Ilaga, kabupaten Puncak pada Senin, 25 April 2022. Korbannya adalah tukang ojek atas nama Samsu Sattu, 46 tahun. Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faisal mengatakan motifnya bisa balas dendam karena pada tanggal 23 April 2022 pihaknya telah menembak mati dua orang kelompok bersenjata. “Mereka ingin balas dendam, setelah dua rekan mereka kami tindak pekan kemarin dan meninggal,” tandasnya (Cenderawasih Pos).

12 Mei

Seorang warga sipil, yang berprofesi sebagai sopir truk bernama Nober Palintin (31 tahun) dilaporkan hilang di Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak pada Rabu, 11 Mei 2022.

Ia hilang setelah terdengar rentetan tembakan di kali Ilame, tempat ia mengambil material pasir. “Ada penembakan terhadap seorang sopir truk, di sekitar kali Ilame, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Saat itu korban pergi ambil material pasir di kali Ilame. Pukul 10.30 terdengar tembakan sebanyak dua kali, beberapa menit kemudian terdengar rentetan tembakan sebanyak lima kali. Personal gabungan TNI-Polri menuju TKP, tetapi tidak menemukan sopir, hanya ada truk yang dibawa korban,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam rilisnya pada Rabu, 11 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

13 Mei

Sopir truk bernama Nober Palintin (31 tahun) yang dilaporkan hilang di kali Ilame, kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak pada Rabu, 11 Mei 2022, akhirnya ditemukan oleh kepala suku dan masyarakat yang mencarinya pada Kamis, 12 Mei 2022 di kali Wilipur, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat luka tembak. “Jenazah Nober Palintin ditemukan setelah pihak kepolisian dibantu kepala suku dan masyarakat setempat melakukan pencarian di sekitar kali Wilipur, Distrik Ilaga,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal (Cenderawasih Pos).

14 Mei

Kelompok TPNPB kembali melakukan penembakan pesawat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan bahwa TPNPB melakukan tembakan sebanyak empat kali ke arah pos runway 25 Satgas Lanud Kopasgat BKO Kodam XVII Cenderawasih di Bandara Aminggaru. “KKB pimpinan

Tinus Murib melakukan penembakan dari arah Bukit Teletabis, Kampung Eromaga, Distrik Omukia Kabupaten Puncak dengan perkiraan jarak sekitar 600 meter ke pos runway 25. Akibatnya, pesawat Asian One, nomor penerbangan PK-LTG yang membawa kargo dari Timika yang hendak landing di Bandara Aminggaru, Ilaga, pada pukul 09.34 WIT, terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin Timika,” kata Kombes Ahmad Musthofa Kamal pada Jumat, 13 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

30 Mei

Aksi pembakaran kembali terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 22 Mei 2022. Akibat peristiwa tersebut, 17 bangunan rumah los tempat berjualan hangus terbakar, termasuk 1 sekretariat KNPB dan 1 unit rumah milik guru SD YPPK. Selain itu, kendaraan bermotor pun ikut terbakar. “Hasil investigasi Komnas HAM bahwa aksi pembakaran itu telah disiapkan sebelumnya. Kami menemukan beberapa jerigen masih berbau bensin. Selain itu, masih terdapat bekas atap rumah yang digunting, yang kemudian massa masuk dan melakukan pembakaran,” tutur Frits Ramandey (Cenderawasih Pos).

31 Mei

Markas Komando TPNPB, melalui juru bicaranya Sebby Sambom mengatakan dua anggota pasukan TPNPB atas nama Aminggau Labene dan Laris Murib gugur ditembak oleh pasukan TNI-Polri pada Jumat, 27 Mei 2022, pukul 17.00 WIT di Jalan Towenggi, Ilaga, Kabupaten Puncak. “Mereka ditembak pada saat acara bakar batu. Kami sangat berduka karena kehilangan dua sosok pejuang bangsa Papua,” tegas Sebby Sambom dalam rilisnya pada Senin, 30 Mei 2022. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan

kontak tembak antara TNI-Polri dan TPNPBBP terjadi di sekitar lapangan Trikora, Ilaga pada Jumat, 27 Mei 2022. “Kontak tembak terjadi Ketika Satgas Ops Damai Cartenz 2022 melakukan patroli pengamanan di sekitar lapangan Trikora. Saat itu ada acara bakar batu. Kemudian, terjadi baku tembak yang menewaskan dua orang,” tutur Kombes Ahmad Mustohfa Kamal pada Senin, 30 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

03 Juni

Pimpinan TPNPB Puncak, Kenelak Murib kembali menebar ancaman pembunuhan terhadap Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, wakil bupati, pimpinan OPD dan ASN yang bekerja di Kabupaten Puncak. Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan bahwa akibat ancaman teror tersebut, pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat di Puncak tidak berjalan efektif. Secara khusus, tahun 2020-2022 ini, ancaman pembunuhan itu terjadi berulang kali sehingga ASN ketakutan dan meninggalkan tempat tugas sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lumpuh. “Kelenak Murib sebagai pimpinan TPNPB siapkan tenaga dokter, paramedis dan guru untuk melayani masyarakat Puncak. Dia punya orang yang akan mengajar di SD, SMP, SMA/SMK. Kelenak Murib juga yang akan siapkan dokter dan paramedis untuk layani masyarakat di Puskesmas/Pustu,” tegas Bupati Willem Wandik pada Kamis, 2 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

28 Juni

Seorang warga sipil bernama Enal (32 tahun), asal Sulawesi Selatan, yang berprofesi sebagai pedagang di Waghete, Deiyai tewas ditembak orang tidak dikenal di Gedung Olahraga (GOR) Deiyai pada Minggu, 26 Juni 2022, pukul 21.34 WIT. Kejadian

berlangsung ketika korban sedang bermain badminton dan ditembak dari arah pintu masuk GOR. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan pelaku berjumlah tiga orang dan menggunakan senjata laras panjang. “Masyarakat yang lihat kejadian langsung lapor ke Mapolres Deiyai. Anggota langsung ke TKP untuk memastikan kejadian penembakan itu. Menurut pengakuan saksi yang lihat, pelakunya tiga orang menggunakan senjata laras panjang,” tuturnya di Jayapura pada Senin, 27 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

30 Juni

Terjadi kontak senjata antara pasukan Satgas Kodim Yonif PR 431/SSP Pos Kiwirok dan TPNPB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Alepki Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu, 29 Juni 2022, pukul 15.30 WIT. Kejadian itu menyebabkan Prada Beryl Kholif Rohman meninggal dunia. “Korban gugur tertembak di paha dan kehabisan darah. Sampai saat ini, di TKP masih berlangsung kontak senjata,” jelas Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Kav Herman Taryaman dalam rilisnya pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

02 Juli

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) merilis perdagangan senjata selama sepuluh tahun terakhir di Papua (2011-2011) di aula P3W GKI Padang Bulan, Kota Jayapura, pada 1 Juli 2022. Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar mengatakan bahwa pelaku perdagangan senjata api dan amunisi lebih dari satu orang, memiliki jaringan transaksi yang beragam dan terjadi di banyak tempat di Papua. “Jalur transaksi senjata api dan amunisi di Papua sangat beragam yakni darat, laut, dan udara serta terjadi di banyak tempat. Kontak tembak, penyerangan atau

penyergapan terhadap aparat TNI-Polri sering terjadi di banyak tempat dengan durasi waktu yang lama. Proses hukum hanya (bagi) pelaku yang di lapangan, (sementara) penyedia utama senjata api dan pemberi dana tidak diproses,” tegas Anum Siregar. Dalam laporan penelitian itu disebutkan bahwa sumber dana pembelian senjata berasal dari dana desa, hasil tambang, dan dana yang beredar pada saat pesta demokrasi. Lokasi transaksi jual beli senjata api dan amunisi terjadi di Sorong, Manokwari, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Timika, Jayapura, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Merauke. Jaringan yang terlibat adalah TNI, Polri dengan masyarakat sipil, Polri dengan TPNPB dan TPNPB dengan TPNPB.

Ada pun data perdagangan senjata api di tanah Papua tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Harga	Jenis Senjata
1	Pelaku perdagangan senjata api dan amunisi			
	Masyarakat sipil	31 orang		
	Anggota TNI	14 orang		
	Anggota Polri	6 orang		
	Anggota TPNPB	4 orang		
	Anggota KNPB	3 orang		
2	Jumlah senjata	52 pucuk		
3	Jumlah amunisi	9.608 butir		
4	Jenis senjata TPNPB			AK-47 dan AK-74, senapan mesin PKM Rusia, Steyr AUG, M-16 Amerika, M4, pistol glock, clot US Army dan senjata laras panjang lainnya
5	Harga pistol		15 juta-100 juta	
6	Harga M-16 dan M-4		90 juta-330 juta	
7	Harga peluru		150-250 ribu per butir	

(Cenderawasih Pos).

12 Juli

Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Herman Taryaman mengatakan dua prajurit TNI yang terlibat jual-beli senjata dan amunisi telah ditahan di Pomdam. Kedua prajurit tersebut adalah Kopda BI dan Koptu TJ. Keduanya diketahui terlibat dalam transaksi amunisi dengan seorang ASN yang ditangkap di Elelim,

Yalimo pada 29 Juni 2022. “Bukti awal menguatkan keterlibatan Kopda BI dan Koptu TJ. Kini mereka berdua masih ditahan di Pomdam. Masih didalami guna memastikan keakuratan data, misalnya berapa berapa butir peluru yang dijual dan lain-lain,” tuturnya di Jayapura pada Senin, 11 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

17 Juli

Pasukan TPNPB di Kabupaten Nduga yang dipimpin Egianus Kogoya melakukan penyerangan terhadap kelompok warga sipil di kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada Sabtu, 16 Juli 2022, pukul 09.40 WIT. Kejadian tersebut menewaskan 10 orang dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Ada pun para korban pada kejadian tersebut adalah 1) Yulianus Watu (23 tahun, NTT); 2) Hubertus Goti (41 tahun, NTT); 3) Daeng Meranu/Maramil (41 tahun, Selayar-Sulsel); 4) Taufan Amir (42 tahun, Selayar-Sulsel); 5) Johan (26 tahun, NTT); 6) Alex (45 tahun, Kei); 7) Yuda Hurusinga (Sumatera Utara); 8) Sirajudin (27 tahun, Selayar-Sulsel); 9) Mahmud Ismaun (53 tahun, Palu-Sulteng); 10) Elias Serbaye (54 tahun, Pendeta dari Distrik Pija Wosak-Nduga). Dua orang yang mengalami luka-luka yaitu, 1) Sudarmin (Sulsel) dan 2) Has John (41 tahun, Sulsel). Kabid Humas Polda Papua, Ahmad Musthofa Kamal mengatakan bahwa penembakan terhadap warga sipil di Nduga dilakukan oleh TPNPB di kampung Nogolait pada hari Sabtu, 16 Juli 2022. “Ada 10 orang warga sipil ditembak mati oleh kelompok TPNPB. Dua orang lainnya mengalami luka-luka,” tutur Kemal di Jayapura, pada Sabtu, 16 Juli 2022. Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge menyampaikan dukacita mendalam seraya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di Nduga. “Saya atas nama pemerintah Kabupaten Nduga menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas pengorbanan 10 orang ini, harganya

sangat mahal,” tuturnya di RSUD Mimika pada Minggu, 17 Juli 2022. Sedangkan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi di Nduga merupakan tindakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan karena mereka melakukan pembunuhan secara massal, polanya direncanakan, dan menggunakan senjata dan alat tajam. “Saya tidak yakin mereka adalah TPNPB, karena TPNPB tidak punya agenda pembunuhan massal seperti ini. Saya harap Negara hadir dan melakukan tindakan terukur, memulihkan situasi keamanan di Nduga, dan melakukan evakuasi terhadap jasad korban,” tegas Frits di Jayapura pada Minggu, 17 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

21 Juli

- Seorang warga sipil atas nama Azis Haryadi yang bekerja di pertambangan ilegal, di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang dibunuh oleh kelompok TPNPB yang dipimpin oleh Elkius Kobak dengan eksekutornya adalah Bocor Sobolim pada Selasa, 19 Juli 2022. “Kami akan kirim tim ke Boven Digoel untuk mengevakuasi jenazah korban, memastikan kejadian ini dan bertemu dengan para saksi di TKP. Sementara ini, kami mendapat informasi lokasi kejadian di perkampungan yang ada tambang liar. Kami belum tahu pelaku dari kelompok mana,” tutur Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito pada Rabu, 20 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

Anggota polisi dari Polres Nduga, Satgas Damai Cartenz, dan TNI, dipimpin oleh Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Paranewen berhasil mengevakuasi satu orang korban penembakan TPNPB di tanjakan Adu Mama 2, Distrik Kenyam, Nduga pada

Rabu, 20 Juli 2022, pukul 02.00 WIT atas nama Roy Manampiring (42 tahun). Dengan penemuan dan evakuasi ini, maka jumlah korban meninggal dalam penyerangan pada 16 Juli 2022 berjumlah 11 orang. “Menurut informasi dari masyarakat bahwa korban pada saat itu berjalan kaki dari Batas Batu ke Kenyam dengan beberapa masyarakat OAP, pada saat bertemu dengan TPNPB, beberapa masyarakat langsung melarikan diri ke hutan dan berpisah dengan korban sehingga korban ditembak dan tewas. Korban bekerja sebagai operator *cain saw*. Saat ini jenazah korban disemayamkan di Puskesmas Kenyam dan akan diberangkatkan ke Mimika hari ini,” tutur Kabid Humas Polda Papua, Ahmad Musthofa Kamal pada Rabu, 20 Juli 2022 (Cenderawasih Pos). 22 Juli

Menyikapi aksi pembunuhan dan penembakan yang dilakukan oleh TPNPB di Nduga dan Pegunungan Bintang, akademisi Uncen, Marianus Yaung mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB merupakan ungkapan frustrasi dari diplomasi Papua Merdeka yang gagal. OPM dan ULMWP mengalami jalan buntu sehingga TPNPB kesal dan melampiaskan kepada masyarakat sipil. “Karena frustrasi terhadap kegagalan diplomasi OPM dan ULMWP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egianus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil, baik Papua maupun non-Papua,” tegas Marianus Yaung pada Rabu, 20 Juli 2022. Sementara itu, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa TPNPB adalah musuh rakyat dan pemerintah akan bertindak tegas kepada kelompok yang mengarah kepada disintegrasi. “Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri TPNPB. Musuh kita bukan rakyat Papua, tapi TPNPB yang ada di Papua,” tutur Mahfud MD secara daring bersama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) pada Kamis, 21 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

23 Juli

Menyikapi penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil di Nduga, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy menyatakan prihatin sekaligus mengecam aksi brutal yang menelan korban masyarakat sipil. Ia menjelaskan, konflik akhir-akhir ini bukan lagi antara kombatan dengan TNI-Polri, melainkan warga sipil. Padahal, di dalam piagam PBB warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran perang. Warga sipil harus dilindungi bukan dijadikan sasaran perang. “Mengorbankan rakyat sipil dengan cara apa pun tidak dibenarkan di dunia ini, karena rakyat sipil tidak bersenjata, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan,” tegas Warinussy di Jayapura, Kamis, 21 Juli 2022. Sementara itu, Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengungkapkan rasa prihatinnya atas pembunuhan terhadap warga sipil di Nduga. Ia berharap dialog bisa menjadi solusi menyelesaikan konflik di Papua. “Masyarakat sipil harus dilindungi, apa pun profesinya, usia, gender, dan etnis. Konflik bersenjata tidak boleh melibatkan masyarakat sipil. Pemerintah harus membuka ruang dialog supaya aksi kekerasan dapat dihentikan,” tutur Latifah Anum Siregar (Cenderawasih Pos).

26 Juli

Menyikapi penembakan yang dilakukan oleh TPNPB di Nduga, pada 16 Juli 2022 yang menelan korban meninggal 11 orang dan 2 orang terluka, Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM mengatakan klaim TPNPB bahwa orang yang mereka bunuh adalah intel, padahal kenyataannya orang sipil yang bekerja di daerah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan pembunuhan ini merupakan kekejaman yang keterlaluhan, karena di antara para korban ada seorang Pendeta

dan seorang Uztad. “Jika punya urusan politik, bicaralah dan berunding, tidak dengan membunuh orang secara keji. Jangan jadikan orang sipil dan tokoh agama sebagai korban dengan alasan dicurigai sebagai intel. Kami pikir kelompok TPNPB hanya mencari alasan atas segala kejahatan mereka. Kita tidak terima itu,” tegas Uskup Leo di Jayapura pada Senin, 25 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

02-03 September

Oknum TNI kembali menganiaya dan menyebabkan satu warga OAP meninggal di Kabupaten Mappi. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh seorang warga Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Papua Selatan, Bruno Amenim Kimko (29) tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuh yang diduga akibat penyiksaan. Beredar informasi tewasnya Bruno melibatkan prajurit TNI Pos Bade Satgas Yonif Raider 600/Modang (Koran Jubi Edisi 02-03 September).

08 September

- Penyelidikan dilakukan oleh Datasemen Polisi Militer XVII/3 Merauke atas kasus penganiayaan hingga meninggal dunia Bruno Amenim Kimko (29), warga Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Papua Selatan oleh anggota TNI. “Tadi malam saya koordinasi itu dan juga dengan kasi Intel Korem, tapi sampai sekarang belum mendapatkan informasi karena mereka masih melakukan pemeriksaan lanjutan,” jelas Kapenrem Mayor Inf. Laharuni (Cenderawasih Pos).
- Juru Bicara JPD, Yan Ch. Warinussy meminta perhatian Presiden Joko Widodo bagi penyelesaian hukum terhadap dua kasus yang melibatkan anggota TNI di Nduga dan

Mappi. “JPD mengingatkan presiden bahwa tindakan oknum anggota TNI Angkatan Darat ini merupakan akibat dari negara masih terus mengedepankan pendekatan keamanan dan atau pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik sosial politik selama lebih dari 50 tahun di tanah Papua,” katanya. Menurut Yan, kedua kasus tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM (Cenderawasih Pos).

14 September

Kelompok Kriminal Bersenjata Ngalum Kupel Pimpinan Nason Mimin melakukan penyerangan terhadap para pekerja yang sedang melakukan pembangunan jalan dan jembatan di Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (12/9) sekitar pukul 12.00 WIT. “Pembakaran alat berat milik PT. DHR yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Distrik Oksibil - Distrik Kiwirok diduga dilakukan oleh KKB Ngalum Kupel Pimpinan Nason Mimin,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal (Cenderawasih Pos).

20 September

Ketersediaan senjata dan amunisi yang selama ini digunakan oleh kelompok TPNPB dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua mendapat pengakuan menarik dari Sekjen TPNPB, Anthon Nego Obed Tabuni. Pemilik NRP0177106 ini mengakui bahwa selama ini TPNPB memperoleh senjata dengan cara merampas atau membeli. “Itu ada yang kami beli. Harganya tidak murah tapi bisa kami beli. Dananya dari

masyarakat kumpul-kumpul sedikit demi sedikit kemudian kami beli senjatanya,” beber Anton melalui ponselnya (18/9) (Cenderawasih Pos).

28 September

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hese gem, mengirim surat terbuka kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Selasa (27/9). Theo Hese gem meminta Mahfud MD memperhatikan beberapa hal yang sedang terjadi di Papua belakangan ini. “Mahfud MD telah ketahui bahwa masyarakat OAP dan warga non Papua sebagai warga masyarakat sipil sedang mengalami korban krisis kemanusiaan di tanah Papua, yang berdampak dari konflik bersenjata,” katanya (Cenderawasih Pos).

30 September

Siska Abugau, Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), meminta tiga lembaga yang ada di Provinsi Papua yaitu DPR Papua, DPRP 14 kursi, dan MRP supaya membuat satu peraturan khusus perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik di Papua. “Tiga lembaga sejauh ini tidak ada keberpihakan terhadap korban perempuan dan anak ... dan bagaimana cara penanganan tidak pernah dibuat,” kata Siska (Cenderawasih Pos).

10-11 Oktober

TPNPB Kodap XIII Nipouda Paniai, Brigadir Jenderal Matius Gobai menyatakan pihaknya merampas sepucuk senjata api dari sopir truk yang melintas di Jalan Trans Nabire-Illaga pada Jumat (7/10). 8 orang sempat ditangkap TPNPB namun kemudian dilepaskan dan dilaporkan telah sampai di Enarotali, Ibu Kota

Kabupaten Paniai pada hari itu juga. “Kami bertanggung jawab atas perampasan senjata insiden tersebut. Kami akan terus-menerus lanjutkan perang revolusi sampai merebut kedaulatan. Kami ingatkan kepada NKRI, lebih khusus buat Pemerintah Kabupaten Paniai bahwa kami menolak segala bentuk program pembangunan baik itu infrastruktur jalan, jaringan, dan program lainnya. Itu adalah agenda BIN untuk menghancurkan pergerakan revolusi TPNPB,” kata Gobai. Sementara itu Kepolisian Daerah Papua memastikan tidak ada perampasan senjata api dalam insiden penghadangan yang dilakukan TPNPB terhadap 8 warga sipil dan 1 anggota TNI di Kampung Baguwo, Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai tersebut. “Saya ditelepon Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kepolisian Resor Paniai). Khususnya, 365 [Atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan] dengan [sejumlah] kerugian material. Tapi tidak ada senjata yang hilang, hanya barang-barang korban yang diambil,” kata Faisal pada Sabtu, (8/10) (Koran Jubi Edisi 10-11 Oktober).

14-15 Oktober

Komandan Batalyon Infanteri 600/Modang, Kolonel Inf. Hanif Arridho menyebut pusat pemukiman warga di Distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, kini tidak berpenghuni. Masyarakat setempat dikabarkan telah mengungsi pasca eskalasi konflik bersenjata antara pasukan TNI dan TPNPB di Distrik Suru-Suru. “Anggota Batalyon Infanteri 600/Modang dikagetkan dengan tak berpenghuninya Distrik Suru-Suru. Terakhir aksi teror terjadi pada November 2021,” kata Hanif Arridho di Jayapura, Rabu (12/10). “Kemarin kami bisa mendarat di sana dan di sana kami kaget karena apa yang disampaikan media dan kepala daerah ternyata benar, tak ada satu orang pun warga di sana,” ujarnya.

Pada 3 Februari 2022, anggota Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua, Sarah Ita Wahla menjelaskan bahwa sudut pandang yang berbeda terkait eskalasi konflik bersenjata di Suru-Suru. Menurutnya, konflik bersenjata di Kabupaten Yahukimo adalah hal baru, karena dahulu tidak ada aktivitas TPNPB di sana. TPNPB justru baru hadir di Yahukimo setelah aparat TNI/polri di sana bertambah banyak dan perdagangan senjata api marak di sana. Dia menyatakan dahulu Orang Asli Papua di Yahukimo hidup dengan aman dan damai. Akan tetapi, jumlah anggota TNI dan Polri di Yahukimo semakin bertambah dan hal itu justru membuat warga merasa tidak aman. “Yang menciptakan label orang Papua itu teroris, OPM, separatist itu justru TNI/polri,” jelasnya (Koran Jubi Edisi 14-15 Oktober).

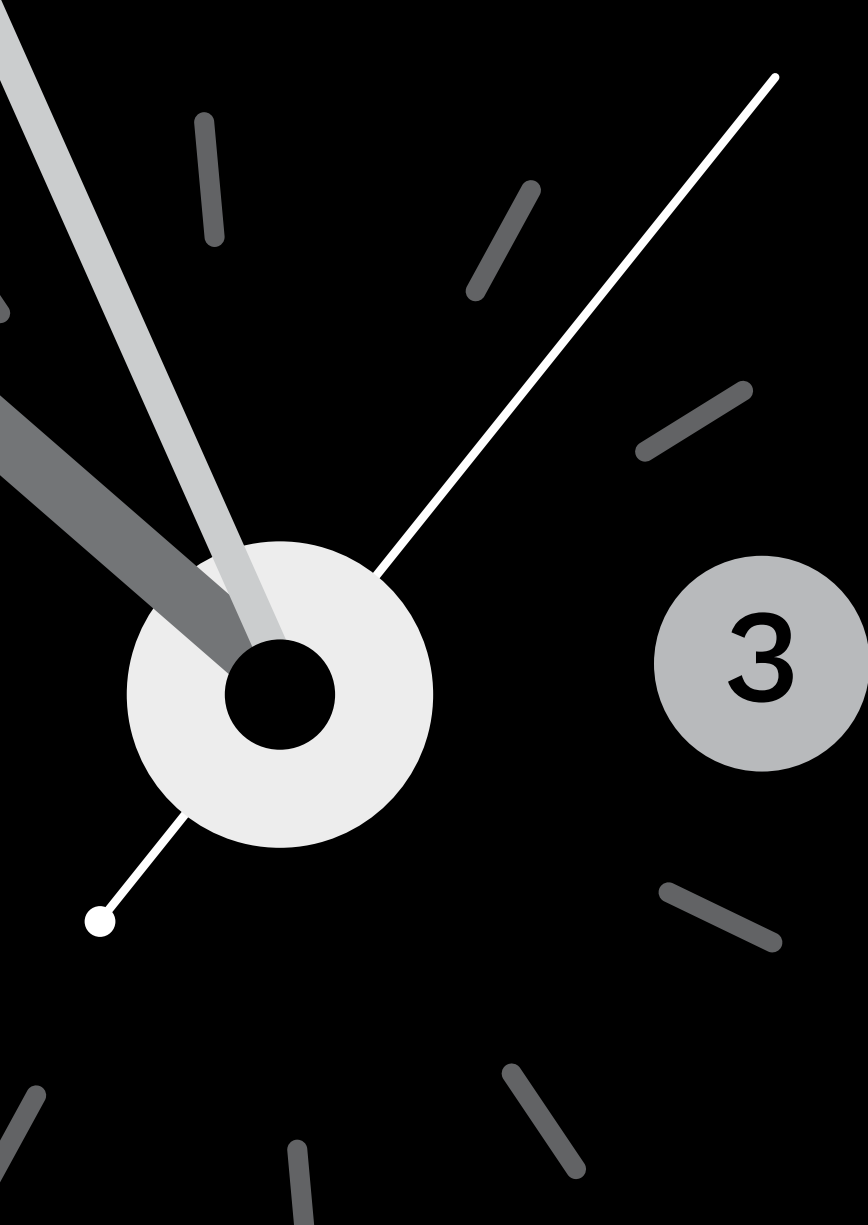
05 November

- Danrem 172/PWY, Brigjen JO Sembiring terlihat geram karena adanya penerbangan komersial yang melayani kampung Kukhil Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang. Sembiring geram karena kampung tersebut dihuni oleh Kelompok Papua Merdeka pimpinan Lamek Tapol dan anggotanya. Sejak pecah konflik di Kiwirok pada September 2021 lalu tidak ada lagi penerbangan komersial yang masuk dan ketika TNI/Polri meminta pesawat komersial masuk, pihak maskapai enggan melayani karena alasan keamanan (Cenderawasih Pos).
- Seorang anggota TNI bernama Eka Johan Kaise ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. “Yah benar, ada kejadian itu (pembunuhan),” terang Dandim Victorianus Tethool. Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom menyampaikan bahwa menurut laporan yang diterima kasus ini dilakukan oleh TPNPB Kodam XVI Yahukimo di

bawah pimpinan Ekius Kobak atau sering dikenal dengan sebutan Kopi Tua. “Pelakunya kami, di mana pun saya bertemu TNI-Polri maka di situ akan ada baku tembak,” kata Kopi Tua (Cenderawasih Pos).

Bab III

*Bidang
Sipil dan
Politik*





Penyelesaian HAM Papua Masih Sebatas Kebijakan Politik

— Helmi

Penyelesaian masalah HAM Papua sudah sejak lama dibicarakan bahkan silih berganti presiden tapi upaya penyelesaiannya belum menunjukkan keseriusan dari Pemerintah. Di sisi lain, fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. Dampaknya, “*distrust*/ketidakpercayaan” sebagai problem utama di Papua makin kuat. Kepercayaan publik, khususnya korban terhadap itikad baik pemerintah sangat rendah. Publik Papua (korban) cenderung curiga pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah HAM di Papua. Bagi warga (korban), langkah pemerintah lebih didominasi “kepentingan Jakarta” ketimbang kepentingan warga Papua atau korban itu sendiri.

Proses Hukum Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai, 08 Desember 2014

Kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai, 08 Desember 2014, ditetapkan menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat Papua dari sekian ribu kasus yang terjadi. Sejak tahun 2014 – 2022 (8 tahun), korban, warga Papua dan pegiat HAM Papua, terus mendesak agar para pelakunya diadili

di Pengadilan HAM. Desakan ini berbuah manis dan ditanggapi oleh negara dengan menghadirkan pelaku pada persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

Proses peradilan di Makassar dipantau oleh korban dan koalisi HAM di Tanah dan luar Papua. Niat baik negara ini tidak dibarengi dengan tindakan nyata untuk keadilan bagi korban dan Papua. Seolah segala usaha untuk mendapatkan selama 8 tahun ini berakhir dengan penghinaan terhadap hukum dan korban serta masyarakat di Papua. Sebelum sidang perdana digelar, banyak pihak (pegiat HAM), korban dan keluarga korban serta masyarakat di Tanah Papua, sudah menebak dan mengetahui bagaimana proses dan akhirnya. Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, memberi catatan kepada majelis hakim pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 agar mampu menyelami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua. Khususnya para korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014. “Menurut pandangan hukum, saya sebagai advokat dan pembela HAM, hak ini hendaknya menjadi catatan penting bagi JPU yang akan membacakan surat dakwaan serta para hakim, khususnya Hakim Ad Hoc untuk menyikapi secara proporsional pandangan hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Papua, utamanya korban dan keluarganya di Paniai, Papua.”¹⁰

Ketika korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Paniai mengetahui bahwa hanya satu pelaku yang ditetapkan dalam kasus tersebut, mereka sudah tidak percaya pada proses persidangan tersebut. Mereka menolak hadir dalam proses persidangan tersebut. “Penetapan satu tersangka dalam kasus ini juga dianggap pihak korban dan keluarga korban sebagai upaya negara melindungi para pelaku yang sebenarnya terlibat dalam

tragedi berdarah pada 2014 lalu itu. “Kalau satu orang [tersangka] itu tidak memenuhi syarat itu bukan keadilan, itu penghinaan keluarga korban dan juga kami orang Papua. kalau nantinya dalam proses persidangan ada korban atau keluarga korban yang hadir, itu merupakan “rekayasa oleh aparat atau negara.”

Pernyataan keluarga korban ini juga dibenarkan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua, salah satu lembaga di Tanah Papua yang selama ini fokus pada pendampingan persoalan HAM di Tanah Papua. Aliansi Demokrasi untuk Papua menyebut ada permainan dalam proses persidangan. Ketika awal mulai persidangan, sudah dinilai banyak kejanggalan. “Jadi jika itu misalnya pelakunya Danramil maka Dandim dan Danrem ke atas juga kena karena tidak bisa pelakunya satu orang dalam kasus pelanggaran HAM berat.”¹¹

Kesan dan dugaan awal maupun selama proses tersebut terbukti ketika Hakim Ketua, Sutisna Sawati, Kamis, 08 Desember 2022, di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar, mengetuk palu sidang yang menyatakan pelaku tunggal Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu, tidak bersalah dan bebas. Keadilan yang dinantikan selama kurun waktu 8 tahun (2014-2022) sirna. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Paniai 2014 menilai vonis bebas tersebut menunjukkan buruknya kinerja penegakan hukum untuk penuntasan pelanggaran HAM berat. “Putusan ini sebagai bukti negara tak berkutik terhadap para penjahat HAM di Indonesia.”¹²

10 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 13 September 2022.

11 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 12 November 2022.

12 Bdk. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-koalisi-atas-vonis-bebas-kasus-paniai-lt63969f590584a>

Usaha Non Yudisial dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi. Badan Pembina Hukum Kemenkum dan HAM mengutip data Hasil Riset dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) yang berjudul “*Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010 – Maret 2022)*” menyebutkan dari 2010 sampai dengan 2022 terdapat konflik kekerasan sebanyak 204 kasus yang melibatkan orang asli dan bukan asli, aparat keamanan, dan KKB. Jumlah korban yang terhitung mencapai 1.869 jiwa, dan 356 di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan temuan dari Komnas HAM Perwakilan Papua, adanya pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh anggota TNI pada kasus kematian seorang anak berinisial MT, di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada 22 Februari 2022. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM mengetahui ada tujuh anak yang mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh personel Batalyon 521 yang tengah bertugas di daerah tersebut.¹³ Belum lagi di akhir tahun 2022, pada 14 Desember 2022, terjadi penembakan terhadap 9 warga sipil di Kota Kepi, Kabupaten Mappi oleh Kopassus dan Kepolisian.¹⁴

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Nomor 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial. Niat baik dari presiden ini tetap *dicurigai* sebagai usaha negara Indonesia menghilangkan proses yudisial dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketika negara

terus mendorong penyelesaian kasus HAM secara non yudisial berarti menimbulkan kesan bahwa ‘ada korban’, tapi tidak ada pelaku yang diadili di pengadilan melalui pengadilan HAM. Benarlah ungkapan yang seringkali disampaikan oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat bahwa nyawa orang Papua tidak berharga di mata negara Indonesia. Di tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengutus Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarkri ke Papua untuk bertemu dengan korban pelanggaran HAM. “Penyelesaian non yudisial ini berbeda dengan penyelesaian secara yudisial, kalau yudisial terfokus kepada pelaku, saksi dan sebagainya. Sedangkan (non yudisial) kami hanya menyentuh korban jadi yang harus dilakukan adalah validasi, verifikasi korban, dan menjaring apa aspirasi dari korban.”¹⁵

Selain itu banyak pihak mendorong dan mendesak agar Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Papua. Sepanjang pemberlakuan UU No.21 tahun 2001 – sebelum ada perubahan sekarang – para pengambil kebijakan menutup hati dan mata akan perintah yang tertuang di dalam Pasal 45 UU No. 21 tahun 2001, agar pemerintah membentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Di Tahun 2022, diskursus pembentukan KKR ini terus mencuat dan didorong. Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV mendorong pembentukan KKR di Tanah Papua. Ketua Tim Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Universitas Cenderawasih, Melkias Hetharia menyatakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan solusi yang tepat guna menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Direktur Perkumpulan Advokat Hak

13 Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/164519578/komnas-ham-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-kasus-prajurit-tni-yang-tewaskan?page=all>

14 Bdk. Laporan Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua.

15 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 08 November 2022.

Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf R Kawer menyatakan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau RUU KKR harus meninjau semua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua atau MRP, Yoel Mulait meminta pemerintah pusat segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Di hadapan desakan banyak pihak tersebut, pemerintah 'lebih suka dan senang' mengikuti kemauan politiknya. Pemerintah pusat Indonesia di Jakarta lebih memilih dan sibuk mengubah UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus demi kepentingan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).

Hingga hari ini KKR belum terbentuk meski menurut Pasal 46 ayat (3) menyebutkan susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan, pelaksanaan tugas, dan pembiayaan KKR diatur dalam keputusan presiden setelah mendapatkan usulan dari gubernur. Keputusan presiden itu yang sampai sekarang tak kunjung keluar padahal Pasal 75 memberi batas waktu peraturan pelaksanaan UU Otsus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Memang, ada kekosongan hukum setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 24/2004 tentang KKR melalui putusan 006/PUU-IV/2006 pada 4 Desember 2006. Akan tetapi, dalam putusan MK menyebutkan banyak cara yang dapat ditempuh untuk membentuk KKR, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

Di sisi lain, Pembentukan Pengadilan HAM di Papua sesuai perintah Pasal 45 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 yang telah diubah

menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Namun, sampai saat ini Pengadilan HAM di Papua tidak bisa didirikan karena UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan Pengadilan HAM pada tahap awal hanya ada di empat kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Dengan demikian, sepanjang ada kemauan politik dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, Pengadilan HAM Papua maupun KKR Papua pasti bisa dibentuk. Sayangnya, pembicaraan atau diskursus terkait penyelesaian HAM Papua sejauh ini hanya dimaknai sebagai bentuk kebijakan politik hukum yang cenderung menutup ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Padahal, substansi kebijakan di Tanah Papua ialah memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan dan juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sejauh ini belum menemukan titik terang. Atas dasar itu, pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Papua menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa memberikan harapan baru dalam penyelesaian kasus HAM di Papua.

Kronik Penyelesaian Kasus-Kasus HAM Papua

10 Januari

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan rasa aman bagi setiap warganya, termasuk Orang Asli Papua. Jika ada aspirasi masyarakat, mahasiswa dan berbagai komponen dari wilayah berkonflik yang disampaikan melalui MRP maka itu menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari solusinya (Koran Jubi Edisi 12 – 13 Januari).

19 Januari

Pada Selasa, 18 Januari 2022, sekitar pukul 07.45 WIB, Fatia Maulidiyanti (Koordinator Kontras) dan Haris Azhar (Direktur Lokataru) didatangi oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya di kediamannya. Pihak kepolisian hendak menjemput paksa Fatia dan Haris. Menurut anggota Tim Advokasi Bersihkan Indonesia, Rivanlee Anandar, Fatia dan Haris menolak untuk dibawa oleh pihak kepolisian tanpa didampingi kuasa hukumnya dan mereka memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya (Koran Jubi Edisi, 19 – 20 Januari).

31 Januari

Sejumlah LSM/NGO yang dimotori oleh Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua terus mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua sebagai media merekonsiliasi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Upaya ini dibahas di dalam diskusi dengan tema “Membangun Strategi Bersama Dalam Mendorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua Berdasarkan Nilai-Nilai Tradisi Orang Papua”. Diskusi ini dilaksanakan di Jayapura, Selasa, 25 Januari 2022 (Koran Jubi Edisi 31 Januari – 01 Februari).

9-10 Februari

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni se-Kota Studi Jayapura meminta Pemkab Intan Jaya melibatkan perwakilan pengungsi dan korban pelanggaran HAM dalam audiensi dengan DPR RI di Jakarta pada Rabu (9/2). Menurut Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni se-Kota Jayapura, Yanuarius Weya, alangkah baiknya pertemuan itu melibatkan korban pengungsi dan pelanggaran HAM agar mereka dapat menyampaikan atau bersaksi tentang peristiwa yang mereka alami (Koran Jubi, 9-10 Februari).

15 Februari

Akhir-akhir ini isu kedatangan Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB ke Indonesia, Papua banyak diperbincangkan. Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa akan memantau setiap informasi dan isu yang berkembang di Papua. Secara terpisah Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan bahwa kedatangan Komisioner Tinggi HAM PBB bukanlah hal baru bagi negara-negara anggota PBB (Cenderawasih Pos).

05 April

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan bahwa Kejaksaan Agung melibatkan Kejaksaan Tinggi Papua dalam perkara kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai, 8 Desember 2014 silam. Ia menjelaskan ada beberapa jaksa yang dilibatkan dalam memeriksa beberapa masyarakat, pihak terkait di Nabire, Paniai, dan Mimika. Hasil pemeriksaan itu dibawa ke Kejaksaan Agung, disimpulkan dan diekspos, sampai penetapan satu orang tersangka atas nama Isak Sattu. “Kejagung melibatkan Kejati Papua dalam kasus Paniai berdarah. Ada beberapa jaksa yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan. Kami sudah lakukan selama ini, tetapi kami tidak ekspos karena semua dilaporkan ke Kejaksaan Agung,” tutur Nikolaus Kondomo pada Senin, 4 April 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai, 8 Desember 2014, dengan terdakwa Isak Sattu segera disidangkan setelah penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka barang bukti kasus tersebut. “Penyidik telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jampidsus. Tahap II dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, akan penyidik akan Menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkasnya ke pengadilan HAM pada pengadilan Negeri Makassar,” kata Kapuspen Kejagung RI, Ketut Sumedana pada Selasa, 24 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

16 Juni

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara pelanggaran HAM Berat Paniai, 14 Desember 2014 ke Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus di Makassar. “Hari ini, Rabu, 15 Juni 2022, penuntut umum sedang melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Isak Sattu ke Pengadilan HAM di Pengadilan Kelas 1A Khusus Makassar,” tutur Ketut Sumedana. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran HAM Berat itu terjadi lantaran tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara hukum dan secara fakta berada di bawah kekuasaan dan pengendalian terdakwa Isak Sattu (Cenderawasih Pos).

10 September

Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua yang tergabung dalam paHAM Papua, LBH Papua, ALDP, Elshan Papua, PBH Cenderawasih, LBH Kyadayun Biak, LBH kaki Abu Sorong menilai penembakan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil Nduga di Mimika pada 22 Agustus selalu menunjukkan realitas negara berkontribusi terhadap

meningkatnya kekerasan militer (Pelanggaran HAM) Di Bumi Cenderawasih, sekaligus cermin negara gagal dalam memastikan perlindungan terhadap hak hidup rakyat Papua. “Kami koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM di Papua menilai kasus penembakan dan mutilasi 4 warga sipil Nduga di Mimika merupakan realitas negara berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan militer dan pelanggaran HAM di Papua sekaligus cermin negara gagal dalam memastikan perlindungan terhadap hak hidup rakyat Papua sebagaimana diatur dalam deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Kovenan sipol, Kovenan Ekosob, UUD 1945 dan UU HAM nomor 39 tahun 1999,” tegas Gustav mewakili Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua (Cenderawasih Pos).

13 September

- Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, memberi catatan kepada majelis hakim pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 agar mampu menyelami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua. Khususnya para korban dan keluarga korban kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014 yang menurut rencana akan segera disidangkan perkaranya di Makassar. “Menurut pandangan Hukum saya sebagai advokat dan pembela HAM, hak ini hendaknya menjadi catatan penting bagi JPU yang akan membacakan surat dakwaan serta para hakim, Khususnya Hakim ad hoc untuk menyikapi secara proporsional pandangan hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Papua, utamanya korban dan keluarganya di Paniai, Papua,” ujarnya. LP3BH Manokwari akan ikut mengawal segenap proses peradilan kasus dugaan

pelanggaran HAM di pengadilan HAM/negeri Makassar kelas 1 ini (Cenderawasih Pos).

- Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem menegaskan, harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) tidak bisa diukur dengan nilai uang. Nilai dan martabat kemanusiaan tidak sama dengan uang sebagai alat atau benda mati yang sama sekali tidak ada nilainya di mata Tuhan Allah. “Uang hanya menjadi alat tukar menukar kebutuhan ekonomi selama manusia berada di dunia ini, sehingga uang tidak dapat menyelesaikan masalah,” tutur Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/9). “Karena bayar uang dianggap hal yang biasa bagi aparat di tanah Papua. Gampang saja menghilangkan nyawa OAP, sedangkan keluarga tidak sadar bahwa tawaran nilai uang tidak sama harkat dan martabat manusia, apalagi dengan tawaran yang sangat murahan. Akhirnya juga tawaran murahan tersebut pihak keluarga pun menerima tawaran yang dimaksud dan istilah yang sedang bertumbuh di kubu TNI, membayar uang habis perkara dan itu dianggap hal yang biasa,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

14 September

Tim DVI Polda Papua berhasil mengidentifikasi 4 korban penembakan dan mutilasi yang melibatkan 6 orang anggota TNI di Timika. Hasil identifikasi diumumkan oleh Kepala Bidang Dokes Polda Papua, Kombes Pol. Dr. Nariyana didampingi Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra serta manajemen RSUD Mimika, Selasa (13/09) serta disaksikan puluhan keluarga korban yang mendatangi RSUD Mimika. Perwakilan keluarga mempertanyakan hasil forensik dan visum. Namun Dr. Nariyana

menjelaskan tim hanya mengidentifikasi dan periksa kondisi jenazah seperti apa. Hasilnya diserahkan ke penyidik. Kalau keluarga ingin tahu bisa ditanyakan langsung atau melalui pengacara kepada penyidik,” katanya. Sementara keluarga belum siap menerima potongan tubuh korban termasuk juga kesiapan secara adat. “Belum ada kesiapan segi adat dan tempat titik bentuk kremasi seperti apa kami belum sepakat,” kata Abtoro (Cenderawasih Pos).

16 September

Kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika yang melibatkan 6 oknum TNI diminta segera dilakukan proses hukum. Permintaan sekaligus kecaman terhadap aksi keji ini disampaikan oleh tokoh-tokoh Gereja di Provinsi Papua. Dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah 1 Papua, Pdt. Petrus Bonyadone meminta peradilan hukum terhadap para pelaku dilakukan terbuka. “Aparat yang melakukan mutilasi itu harus ditindak tegas, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya dan terbuka supaya masyarakat tahu dan menjadi pembelajaran masyarakat dan aparat,” tegas Pdt. Petrus. Senada dengan Pdt. Petrus, Pdt. Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGI) di Kabupaten Jayapura, turut mengecam aksi keji yang dilakukan oleh oknum aparat. Pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera diproses hukum secara adil. Sebagai tokoh Gereja kami sampaikan belasungkawa yang mendalam atas para korban yang telah dimutilasi dan kami harap proses dengan seadil-adilnya bisa dilakukan terhadap para pelaku,” tegasnya (Cenderawasih Pos).

17 September

Aliansi Pimpinan Dewan Cabang (DPC) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/ Mahasiswi Nduga (IPMN) Jayapura, kembali melakukan aksi demonstrasi di Lingkaran Abe, Jumat ((16/09) kemarin. IPMN meminta kepada Panglima TNI dan penegak hukum agar oknum TNI pelaku mutilasi di Timika, dihukum mati. Tak puas berdemo di Lingkaran Abe, massa langsung menuju ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan difasilitasi Polresta menuju DPRP. “Katanya DPRD melayani rakyat tapi sekarang di mana? Tolong sampaikan atau saya akan pimpin massa duduki kantor ini,” kata Lepania, salah satu perwakilan IPMN (Cenderawasih Pos).

20 September

Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Nduga yang berkuliah di Wamena mendatangi kantor DPRD Jayawijaya guna meminta para anggota legislatif menyampaikan aspirasinya yang meminta agar para pelaku kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi di Kabupaten Mimika agar diproses di Mimika bukan di Makassar. “Proses hukum kepada mereka harus transparan dan di depan masyarakat agar kami masyarakat merasakan ada keadilan untuk kami. Oleh karena itu para pelaku harus dibawa kembali ke Timika. Ini masalah kemanusiaan,” ungkap penanggung jawab aksi, Inggipilik Kogoya, Senin (19/09) (Cenderawasih Pos).

21 September

- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Jayapura mendesak agar enam prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka pembunuhan dan mutilasi di Mimika diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal itu dinyatakan Ketua

PMKRI Jayapura, Thalia Ohoitumur kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Rabu (21/09). Pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Keempat korban itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini. Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih telah menetapkan enam prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo sebagai tersangka yaitu Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R. Sementara penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menetapkan empat warga sipil sebagai tersangka kasus yang sama yaitu APL alias Jeck, DU, R, dan RMH yang hingga saat ini masih menjadi buronan. Ohoitumur mendukung tuntutan agar para tersangka pembunuhan dan mutilasi itu diadili melalui peradilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika. “Jadi harus dibawa ke peradilan umum. Supaya kasus ini terbuka untuk keluarga dan juga masyarakat umum,” kata Ohoitumur. Ohoitumur menyatakan PMKRI Jayapura menilai pembunuhan dan mutilasi itu tindakan yang keji dan tak manusiawi. Ia mengecam keenam prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus itu karena seharusnya mereka bertugas menjaga negara dan melindungi warga sipil. “Kami PMKRI Cabang Jayapura mengecam tindakan aparat TNI yang melakukan tindakan mutilasi terhadap empat warga Nduga di Kabupaten Mimika,” ujarnya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/pmkri-minta-6-prajurit-tni-tersangka-mutilasi-diadili-di-pn-kota-timika/>).

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mendorong penyidikan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga

Nduga di Kabupaten Mimika menerapkan *Scientific Crime Investigation*. Penerapan *Scientific Crime Investigation* dibutuhkan untuk menyingkap semua komunikasi yang dilakukan para tersangka melalui gawai atau telepon genggam. Hal itu dinyatakan Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa (20/09). Dalam keterangan pers itu, Komnas HAM RI mengumumkan hasil pemantauan dan penyelidikan awal yang dilakukan tim Komnas HAM RI pada 2- 4 September 2022 dan 12 - 16 September 2022. Menurut Choirul, ada sejumlah gawai atau telepon genggam para tersangka yang belum tuntas diteliti penyidik. Selain itu, ada indikasi bahwa para tersangka telah menghapus sejumlah percakapan digital mereka. “[Kami] mendorong dilakukan *Scientific Crime Investigation* untuk melacak jejak digital [para tersangka],” kata Choirul Anam (<https://jubi.id/polhukam/2022/komnas-ham-minta-penyidikan-kasus-mutilasi-mimika-terapkan-scientific-crime-investigation/>).

- Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Helmi yang juga menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika menyatakan Polisi Militer di Mimika pada Selasa (20/9/2022) telah memeriksa sejumlah kerabat korban. Menurutnya, ada empat orang kerabat korban yang diperiksa pada Selasa. “Mereka yang diperiksa yaitu Gelpius Tini yang merupakan kakak kandung korban Atis Tini, Latus Nirigi selaku paman korban Lemaniol, Juli Gwijangge selaku wakil keluarga korban Irian Nirigi, dan Aptoro selaku wakil keluarga korban Arnold Lokbere,” kata Helmi melalui layanan pesan WhatsApp kepada Jubi, Rabu (21/09). Helmi menyatakan pihaknya turut mendampingi keempat kerabat

korban pembunuhan dan mutilasi selama pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer. “Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 11.30 WP sampai dengan pukul 17.16 WP,” kata Helmi (<https://jubi.id/polhukam/2022/keluarga-korban-mutilasi-mimika-diperiksa-polisi-militer/>).

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI atau Komnas HAM mendorong enam oknum personel TNI yang diduga membunuh dan memutilasi empat orang warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua agar dipecat serta dijatuhi hukuman berat. “Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa (20/09). Ia menegaskan bahwa Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Komnas HAM mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan kesaksian dan mendorong adanya pengadilan koneksi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Mimika secara adil dan transparan. “Ini demi tegaknya hak atas keadilan korban dan jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali,” tegas dia. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R 20/IJK/3. Hal ini terkait bisnis anggota, kepemilikan senjata rakitan dan catatan beberapa kasus sebelumnya terkait jual beli amunisi dan senjata (<https://jubi.id/polhukam/2022/komnas-ham-dorong-oknum-tni-pelaku-mutilasi-warga-di-mimika-dipecat/>, Cenderawasih Pos).

22 September

Pengadilan Negeri Makassar menggelar sidang perdana

kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Rabu (21/9). Sidang tersebut menghadirkan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Isak Sattu adalah anggota TNI yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai perwira penghubung Komando Distrik Militer 1205/ Paniai. “Persidangan ini sekedar *gimmick*, belajar dari pengalaman sidang terdahulu yang berujung dengan tanda penghukuman terhadap para pelaku,” tegas Usman HAMid yang turut melakukan pemantauan jalannya persidangan di Pengadilan Makassar. Secara terpisah, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Pendeta Matius Adadikam menyampaikan, dalam kasus ini walaupun sidang sedang bergulir namun negara terkesan tidak serius mengurusnya (Cenderawasih Pos).

24 September

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang universal dan ada beberapa hak yang telah disepakati oleh masyarakat internasional dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Bahkan dalam keadaan darurat atau perang. “Orang yang menyamakan kasus pelanggaran HAM dengan politik ideologi adalah orang yang sesat pikir memaHAMi HAM. Jadi ketika mereka menggabungkan itu adalah sesat pikir dan ketika diikuti maka kita akan masuk dalam gerbang yang sesat pikir tersebut karena jelas turunan dari hak politik itu diatur dalam Konvenan Internasional tentang Sistem Politik pada pasal 1 dan memiliki undang-undang di Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Cipta Sementara terkait dengan Hak Asasi Manusia yaitu berkaitan dengan kebijakan yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia tentang pengadilan HAM dan mengatur tentang pelanggaran HAM kejahatan kemanusiaan dan juga genosida,” kata Immanuel Gobai, Direktur LBH Papua. Penjelasan

Gobai menunjukkan bahwa kedua undang-undang ini berbeda sehingga tidak bisa disamakan dalam melihat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Cenderawasih Pos).

26 September

Anggota DPR Papua, John NR Gobai meminta Panglima TNI mengintervensi penyelesaian kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika serta kasus penganiayaan 6 warga sipil di Kabupaten Mappi. Gobai menyatakan intervensi Panglima TNI dibutuhkan untuk memastikan para prajurit TNI yang terlibat kedua kasus itu segera diadili melalui peradilan umum di Papua dan dipecat. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar se usai pertemuan antara DPR Papua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Jakarta, Senin (26/09). Dalam pertemuan itu, para anggota DPR Papua dan komisioner Komnas HAM RI membahas kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika serta kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kabupaten Mappi. Gobai menyatakan pembunuhan dan mutilasi empat warga di Mimika serta penganiayaan berujung satu warga meninggal dunia di Kabupaten Mappi itu merupakan penghinaan terhadap ciptaan Tuhan. “Itu pola-pola [kekerasan] yang tidak bagus,” ujar Gobai (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/panglima-tni-diminta-mengintervensi-penyelesaian-kasus-mutilasi-mimika-dan-penganiayaan-mappi/>).

27 September

Ketua Badan Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Nduga atau HiPMN di Sulawesi, Paksa Gwijange mendesak polisi untuk terus mencari bagian tubuh empat korban pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di

Mimika yang masih hilang. Desakan itu disampaikan Gwijangge pada saat pernyataan sikap bersama mahasiswa asal Nduga di Gorontalo pada Senin (26/09). Gwijangge menyatakan hingga kini masih ada bagian tubuh empat korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika. Kendati keluarga korban telah memperabukan bagian jenazah para korban, Gwijangge tetap berharap polisi terus mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. “Kami mahasiswa mendesak agar polisi segera mencari tubuh jenazah korban pembunuhan dan mutilasi atas nama Irian Nirigi, Arnold Lokbere, Lemaniol Nirigi, Atis Tini, dan [segera] diserahkan kepada pihak keluarga korban,” kata Gwijangge saat dihubungi Jubi pada Selasa. Gwijange menegaskan aparat keamanan di Papua harus menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Orang Asli Papua. “Kami tegaskan kepada Negara Indonesia agar kasus [pembunuhan dan mutilasi] itu tidak terulang. Kasus itu [harus menjadi] kasus yang terakhir kali terjadi di Tanah Papua. Kami minta TNI stop membunuh masyarakat sipil secara biadab,” kata Gwijangge (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/mahasiswa-nduga-di-sulawesi-mendesak-polisi-terus-cari-bagian-tubuh-korban-mutilasi-mimika/>).

29 September

- Front Mahasiswa Papua peduli korban kekerasan yang berujung pada mutilasi di Timika, pada Kamis (29/9/2022) di Jakarta kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban negara untuk menegakkan keadilan di atas tanah Papua di DPR RI Senayan, Jakarta. “Aksi kedua kali ini melihat bahwa proses hukum tidak berjalan secara terbuka, seakan ditutupi oleh para pihak sehingga kami mendesak para pihak untuk turut mengawasi, dan Jokowi harus bertanggung jawab karena pemerintah

yang melakukan pendekatan militer di West Papua dan pengiriman militer secara berlebihan tanpa persetujuan DPR RI, dampaknya warga sipil di Papua terus jadi korban,” kata koordinator aksi, Rudy Kogoya kepada Jubi melalui keterangan tertulisnya. Menurut dia, kasus mutilasi merupakan kasus yang muncul di publik. Padahal masih banyak kasus HAM lain yang terus terjadi terhadap OAP (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/aksi-di-dpr-ri-atas-kasus-mutilasi-front-mahasiswa-papua-jokowi-bertanggungjawab/>).

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI terus menelusuri berbagai kasus yang serupa dengan kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Penelusuran itu dilakukan untuk mencari kesamaan *modus operandi* berbagai kasus lain itu dengan *modus operandi* kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika. Hal itu dinyatakan komisioner Komnas HAM RI, Mohammad Choirul Anam di Kota Jayapura, Kamis (29/9/2022). Penelusuran itu dilakukan karena Komnas HAM RI menduga pembunuhan dan mutilasi di Mimika itu bukanlah kejahatan pertama para pelaku. “Kalau kami melihat pola atas kejadian itu, indikasinya kuat ini bukan yang pertama kali. Tinggal tunggu saja, kami akan ungkap ke publik,” kata Anam. Ia menyatakan keberadaan Komnas HAM di Papua bukan hanya untuk menggali fakta dan mengawal kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika ataupun kasus penganiayaan yang menewaskan warga sipil di Mappi. Anam menyatakan Komnas HAM Papua terus mendalami berbagai kasus kekerasan lain yang terjadi di Papua. Akan tetapi, ia meminta publik bersabar dan memberi kesempatan

bagi tim Komnas HAM RI bekerja. “Kami masih dalam, kami harapkan awak media bersabar, sebab kami pasti akan menyampaikannya ke publik,” tegasnya lagi (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/komnas-ham-mencari-keterkaitan-kasus-mutilasi-di-mimika-dengan-kasus-pembunuhan-lainnya/>).

- Menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang mutilasi yang terjadi di Timika terhadap 4 masyarakat Nduga dan juga penganiayaan yang ujung kepada meninggalnya 1 orang dan juga 1 orang yang mengalami penyiksaan di Mappi oleh oknum anggota TNI tim DPR Papua menemui Kepala BAIS TNI Letjen Rudianto. “Kami meminta agar kasus ini diproses secara terbuka dan pelakunya diberikan hukuman seberat-beratnya agar dapat menjadi efek Jera meminta agar pengadilannya dibuat terbuka dan bila perlu dipertimbangkan untuk membuat pengadilan koneksitas,” ucap ketua tim DPR Papua, John NR Gobai Kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan elektroniknya. Pertemuan dalam rangka penyerahan aspirasi rakyat itu terjadi di Jakarta, Rabu (28/9) (Cenderawasih Pos).

04 Oktober

- Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendorong enam prajurit Brigade Infantri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika diadili melalui peradilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge kepada mahasiswa asal Nduga yang berunjuk rasa di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (4/10/2022). “DPR Papua secara tegas meminta dan akan mendorong

agar proses hukum melalui mekanisme peradilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika,” kata Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya DPR Papua tersebut (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/dpr-papua-dorong-kasus-mutilasi-mimika-diadili-melalui-peradilan-koneksitas-di-pn-kota-timika/>).

- Puluhan mahasiswa asal Nduga di Kota Jayapura yang ingin menyampaikan aspirasi kepada DPR Papua terkait kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika dihadap polisi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Selasa (4/10/2022). Mereka akhirnya batal ke Kantor DPR Papua dan membacakan aspirasinya di Lingkaran Abepura. Puluhan mahasiswa Nduga dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) berorasi di beberapa lokasi di Kota Jayapura yakni Perumnas 3 Waena, Expo Waena, dan Kampus Uncen Abepura. Dalam tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Komando Daerah Militer XVII/ Cenderawasih, Kepala Kepolisian Daerah Papua, dan Kepala Kepolisian Resor Mimika, mahasiswa mendesak agar enam prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka pembunuhan dan mutilasi di Mimika segera diadili. Para mahasiswa juga meminta keenam prajurit TNI itu diadili melalui peradilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika dan menolak kasus itu diadili di peradilan militer. Mahasiswa menyatakan pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka meminta para tersangka kasus itu dituntut dengan pidana hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mahasiswa meminta agar Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI segera menetapkan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika sebagai kasus pelanggaran HAM berat. “Kami keluarga korban meminta agar organ tubuh korban yang belum ditemukan segera dicari hingga ketemu,” kata penanggung jawab aksi itu, Warnus Tabuni saat membacakan tuntutan tersebut (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/diadang-polisi-mahasiswa-nduga-bacakan-tuntutan-soal-mutilasi-mimika-di-lingkar-abepura/>).

05-06 Oktober

Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar pada senin (3/10) melanjutkan sidang perkara pelanggaran HAM Berat Paniai Berdarah. Tiga Polisi dihadirkan sebagai saksi perkara penembakan yang menewaskan empat orang siswa di Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai, pada 8 Desember 2014 lalu. Berdasarkan kesaksian mantan Kepala Kepolisian Sektor Paniai Timur, Petrus Gawe Boro tentang kronologis tragedi paniai berdarah sempat memicu perdebatan di antara jaksa dan penasehat hukum. Dalam perkara tersebut, Mayor (purn) Isak Sattu menjadi terdakwa tunggal yang diperiksa dan diadili Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sutisna Sawati bersama Hakim Anggota Abdul Rahman. Siti Nool Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahman Dewi. Isak Sattu didakwa dengan dua delik kejahatan terhadap kemanusiaan yang diancam hukuman terberat pidana mati, dan hukuman tahanan pidana 10 tahun penjara (Koran Jubi Edisi 05-06 Oktober).

07 Oktober

Wakil Ketua Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge menyatakan pihaknya ingin bertemu Jaksa

Agung Muda Pidana Militer dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk membicarakan proses hukum kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. DPR Papua memastikan enam prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus itu disidang dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal itu dinyatakan Gwijangge saat dihubungi Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Jumat (07/10). Gwijangge menyatakan DPR Papua juga ingin bertemu dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk membicarakan penerapan mekanisme peradilan koneksitas untuk mengadili enam prajurit Brigade Infantri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi itu di Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika. Gwijangge menyatakan Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua akan berupaya menemui para pejabat tinggi tersebut mulai pekan depan. “Kami akan mulai fokus Senin dan Selasa untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait tersebut,” kata Gwijangge (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/soal-mutilasi-mimika-dpr-papua-ingin-temui-jampidmil-dan-menkopolkam/>).

07-08 Oktober

Sidang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Paniai berdarah di Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar pada Senin (3/10/2022) mengungkapkan bahwa amunisi polisi juga berkurang pasca tragedi Paniai berdarah yang menewaskan 4 orang siswa di Enarotali pada 8 Desember 2014 itu. Akan tetapi, Tidak diketahui secara rinci berapa banyak amunisi polisi yang terpakai dalam peristiwa Paniai berdarah. Menurut Petrus, Polsek Paniai Timur memiliki 9 pucuk senjata, dengan 140 butir peluru. ia mengakui jumlah peluru berkurang ketika dihitung pasca peristiwa Paniai

berdarah, namun ia tidak merinci secara detail jumlah peluru yang berkurang. “Setelah kejadian, saya hanya menyampaikan laporan secara lisan saja. tidak ada tertulis,” kata Petrus (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

Tim gabungan Satuan Tugas Damai Cartenz dan Kepolisian Resor Mimika pada Sabtu (8/10) telah menangkap Roy alias RMH, salah satu tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. Sebelum tertangkap di kawasan Nawaripi, Timika, Roy alias RMH sempat menjadi buronan selama sekitar 1 bulan. “RMH ditangkap tim gabungan hari ini sekitar pukul 15.00 WIT. Dia sementara sedang jalani pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani di Kota Jayapura, Sabtu (8/10). (<https://jubi.id/polhukam/2022/dpo-kasus-mutilasi-di-mimika-akhirnya-tertangkap/>).

12 Oktober

Kepala Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Kolonel Yunus Ginting mengatakan hingga Rabu (12/10/2022) pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. Menurut Ginting, perkara itu masih ditangani Polisi Militer Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. Hal itu disampaikan Ginting saat bertemu dengan keluarga keempat korban pembunuhan dan mutilasi itu di Kota Jayapura. “Kami belum menerima berkas perkara pembunuhan dan mutilasi warga Nduga di Mimika. Berkasnya belum samapi di Oditurat Militer,” kata Ginting (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/oditurat-militer-di-jayapura-belum-terima-berkas-perkara-mutilasi-mimika/>).

12-13 Oktober

Kepolisian resor Mimika terus mendalami isi pengakuan salah satu tersangka pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Roy alias RMH dalam video yang viral di media sosial. Akan tetapi, polisi belum bisa menyimpulkan benar tidaknya klaim RHM tentang dugaan para prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi itu sebelumnya sudah pernah melakukan pembunuhan lain. “Terus mendalami pengakuannya RMH Yang sempat viral semasa persembunyian. [vidio itu] Menjelaskan perilaku oknum TNI melakukan pembunuhan dan mutilasi lebih dari satu kali,” kata Kepala Kepolisian Resor Mimika, AKBP 1 Gede Putra saat dihubungi melalui panggilan telepon pada senin (10/10) (Koran Jubi Edisi 12-13 Oktober).

14 Oktober

Keluarga korban pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika kembali meminta para pelaku pembunuhan dan mutilasi itu dipidana dengan hukuman mati. Permintaan itu disampaikan perwakilan keluarga korban mutilasi Mimika saat menemui Kepala Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Kolonel Yunus Ginting dan Komnas HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura pada Rabu (12/10). Salah satu keluarga korban mutilasi Mimika, Pale Gwijangge mengatakan keluarga besar empat korban mutilasi sudah menyepakati bahwa pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu hukuman mati. Keluarga korban juga menginginkan para prajurit TNI yang terlibat kasus itu dipecat. “Sejak awal, pihak keluarga sudah mengatakan bahwa kasus itu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Dunia internasional juga sudah menyoroti tentang pembunuhan dan mutilasi itu. Proses hukum harus bisa memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban yang merasa kehilangan anak, bapak, cucu mereka,” katanya

(<https://jubi.id/tanah-papua/2022/keluarga-korban-mutilasi-minta-pelaku-dihukum-mati/>).

16 Oktober

Para imam projo dari empat keuskupan di Tanah Papua (Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari Sorong, Keuskupan Timika, dan Keuskupan Agats), menandatangani sebuah pernyataan tentang menuntut pengadilan bagi berbagai kasus kekerasan, termasuk kasus mutilasi di Timika. Penandatanganan pernyataan ini setelah para imam menyelesaikan pertemuan pastoral di Agats, pada 04-09 Oktober 2022 (<https://suarapapua.com/2022/10/16/para-imam-desak-penyelesaian-berbagai-kasus-kekerasan-di-papua/>).

17-18 Oktober

- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emmanuel Gobay menyatakan pihaknya akan bersurat dan melakukan audiensi dengan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. “Kami akan bersurat serta audiensi dengan ketua pengadilan tinggi serta Kanwil Kemenkumham Papua dan pihak-pihak lain yang bisa dimintai bantuannya untuk mendesak Mahkamah Agung mengambil alih agar kasus mutilasi di Mimika diadili Pengadilan Negeri Kota Timika,” kata Gobay di kota Jayapura, Jumat (14/10/2022) (Koran Jubi).
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar melanjutkan sidang perkara pelanggaran HAM Berat Paniai Berdarah pada Rabu (12/10). Letda Gatot Subroto Riyanto sebagai salah satu dari 7 saksi yang diperiksa menyatakan, penggunaan senjata di markas Komando Rayon Militer atau Koramil Paniai Timur adalah inisiatif sendiri dan bukan didasarkan perintah terdakwa Mayor Isak Sattu. Dalam perkara Paniai Berdarah

itu, Mayor Isak Sattu menjadi terdakwa tunggal yang diperiksa dan akan diadili majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua, Sutisna Sawati bersama hakim anggota Abdul Rahman, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahman Dewi. Isak Sattu didakwa dengan 2 delik kejahatan terhadap kemanusiaan yang diancam hukuman terberat pidana mati dan hukuman tahanan pidana 10 tahun penjara. Dalam kesaksiannya, Letda Gatot Subroto Riyanto menyatakan, penggunaan senjata oleh para personil Koramil Paniai Timur itu dipicu kepanikan ketika massa melempari markas Koramil Paniai Timur dengan batu. Menurut Gatot, usai apel pagi, Isak Sattu selaku perwira penghubung meminta pasukan bersiap menuju Madi, untuk mengikuti pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Paniai. Akan tetapi, sekitar pukul 08.00 WP, sudah ada ratusan orang berkumpul di Lapangan Karel Gobai dan melakukan Tarian *Waita* (tarian yang dilakukan dengan berlari berkeliling bersama-sama, membentuk pusaran manusia yang berputar cepat). “Jadi kami tak sempat ke Madi,” kata Gatot yang saat tragedi Paniai Berdarah terjadi masih berpangkat Serda. Gatot bersaksi, secara tiba-tiba ada beberapa orang memasuki halaman Koramil dengan membawa senjata tajam seperti parang dan kapak. “Kami memintanya untuk keluar halaman,” kata Gatot. Tiba-tiba, beberapa orang memulai melemparkan batu ke arah markas Koramil Paniai Timur. Darwis sebagai Bintara Tata Urusan dalam Koramil Paniai Timur mencoba melakukan negosiasi dengan massa, Tapi tak menemukan hasil. Massa semakin nekat. Seketika beberapa anggota Koramil Paniai Timur, mengambil senjata. Gatot pun mengambil senjata jenis SS1 dan M16. Gatot mengakui, saat itu ia tak lagi memperhatikan

perintah terdakwa Isak Sattu selaku atasannya. Gatot hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh prajurit TNI lainnya. Senapan SS1 yang dibawanya ia arahkan ke langit lalu menembakkan tembakan peringatan. Massa tetap melakukan pelemparan. Gatot mengingat ia menembak sebanyak 3 atau 4 kali sampai akhirnya pelan-pelan massa mulai mundur. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian mulai memasuki Lapangan Karel Gobay membuat massa mundur (Koran Jubi Edisi 17-18 Oktober).

- Pengadilan HAM Makassar pada Rabu (12/10) melanjutkan sidang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Paniai Berdarah. Tim jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi terkait tragedi penembakan massa dalam peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014. Dalam sidang itu, Komandan Kompi Batalyon Infanteri Raider 753/ Arga Wira Tama, Mayor Inf. Prasenta Immanuel mengaku tidak tahu ada prajurit TNI yang menganiaya sejumlah anak di pondok Natal Gunung Merah pada 7 Desember 2014. Padahal penganiayaan pada 7 Desember 2014 itulah yang memicu protes warga pada 8 Desember 2014 yang berujung tragedi Paniai Berdarah hingga menewaskan Alfi Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo, dan Simon Degei. Menurut Prasenta, pada 8 Desember 2014, ia meminjam mobil Toyota Rush milik warga dan bersama 5 prajurit TNI lainnya pergi dari Enarotali menuju Madi untuk menghadiri rapat dengan pemerintah Kabupaten Paniai. Di tanjakan utama perlintasan itu, 100-an orang telah memasang Jalan di Gunung Merah. Prasenta bersama 5 anggota TNI lainnya akhirnya terjebak di sana. suara warga terdengar meminta mobil yang dikemudikan Serda Dodi Carlo Takapaha itu kembali ke Enarotali. Upaya Prasenta meminta izin agar

rombongan TNI itu diizinkan melintas tidak ditanggapi massa. menurut Prasenta, jumlah warga yang menutup Jalan di Gunung merah itu sekitar 100 orang sementara titik massa yang lain terus merapat ke arah mereka dan kemudian ada yang merusak mobil yang mereka tumpangi. Keadaan menjadi kalut dan rombongan itu mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, kemudian berlari menuruni jalan ke sisi jalan menuju Madi. Saat berlari, ia dan anak buahnya mendengar suara tembakan lain. "Kami dengar suara tembakan lain sekitar 400 meter dari arah bukit," kata Prasenta (Koran Jubi Edisi 17-18 Oktober).

19-20 Oktober

Pengadilan HAM Makassar pada Rabu (12/10) melanjutkan sidang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Paniai Berdarah. Tim Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tujuh orang saksi terkait tragedi penembakan massa. Serda Dodi Carlo Takapaha, yang juga menjadi saksi membenarkan bahwa ia menyetir mobil Toyota Rush yang mengantar mereka menuju Madi. Menurut Dodi, setelah mereka melakukan apel pagi di pos Satuan Tugas Pengamanan Daerah di Enarotali, mereka memulai perjalanan menuju Madi. Dalam perjalanan Dodi dikagetkan dan ia menghentikan kendaraannya. "Kami tidak tahu sejak awal. Nanti di atas tanjakan baru kaget dengan massa. Ada sekitar 200 orang," kata Dodi. Menurutny, semua prajurit yang ada dalam mobil itu membawa senjata lengkap sesuai dengan protokol mereka. "Kami terdesak karena massa mengepung kami. Mereka merusak mobil, makanya kami lakukan tembakan peringatan," kata Dodi (Koran Jubi Edisi 19-20 Oktober).

24 Oktober

Kuasa hukum korban pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Mimika, Gustaf R Kawer menyatakan berkas perkara enam prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo telah dilimpahkan ke Makassar dan Jayapura. Meskipun demikian, Kawer menegaskan bahwa keluarga keempat korban tetap meminta keenam prajurit TNI itu diadili melalui pengadilan koneksitas yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal itu disampaikan Gustaf R Kawer kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsAap pada Senin (24/10/2022). "Kami baru terima laporan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Polisi Militer di Mimika sudah melimpahkan [berkas perkara] pelaku berpangkat Mayor kepada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. [Berkas perkara] mereka yang berpangkat kapten dan dibawahnya dilimpahkan ke Oditurat Militer IV-20 Jayapura," kata Kawer. Kawer menjelaskan pada 12 Oktober 2022 lalu keluarga korban telah menemui Oditurat Militer IV-20 Jayapura, dan menanyakan berkas perkara para anggota TNI yang menjadi tersangka pembunuh dan mutilasi di Mimika. "Keluarga minta sidang koneksitas digelar [di Pengadilan Negeri Kota Timika] agar [ada] keadilan bagi keluarga, dan keluarga dapat menyaksikan proses persidangan," kata Kawer (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/kasus-dilimpahkan-ke-makassar-dan-jayapura-keluarga-korban-mutilasi-tetap-meminta-pengadilan-koneksitas-di-pn-kota-timika/>).

28 Oktober

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM RI akan menyurati Panglima TNI terkait kasus pembunuhan dan mutilasi enam warga Nduga di Mimika. Komnas HAM akan mengingatkan Panglima TNI untuk memastikan enam prajurit

TNI AD yang menjadi tersangka kasus itu diadili pengadilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal itu disampaikan Damanik melalui layanan pesan WhatsApp kepada Jubi pada Kamis (27/10) malam. Saat mengumumkan hasil investigasi kasus pembunuhan dan mutilasi itu pada 20 September 2022, Komnas HAM RI merekomendasikan agar enam prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka kasus itu diperiksa dan diadili melalui pengadilan koneksitas di Pengadilan Negeri Timika. Akan tetapi, Polisi Militer Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih melimpahkan berkas perkara tersangka berpangkat Mayor kepada Oditurat Militer Tinggi IV di Makassar, Sulawesi Selatan, dan melimpahkan berkas perkara lima tersangka lainnya kepada Oditurat Militer IV-20 Jayapura (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/komnas-ham-ri-akan-surati-panglima-tni-terkait-kasus-mutilasi-mimika/>).

08 November

Komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua kembali diseriusi. Ini ditunjukkan dengan diutusnya penyelesaian pelanggaran HAM, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarkri ke Papua. Meski sebelumnya ada tim-tim serupa yang ke Papua namun pada jadwal Senin (7/11) Kiki dan tim menyambangi Kodam XVII Cenderawasih. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav. Herman Taryaman menyampaikan bahwapangdamsiapmendukungkerjatiminiuntukmenyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Papua. Dan Salah Mustafa mengatakan bahwa Presiden (Joko Widodo) melalui tim ini ingin melakukan upaya-upaya Non Yudisial dengan melakukan investigasi khususnya para korban. Jadi yang ditangani oleh tim tersebut adalah korban-korban yang terdampak oleh peristiwa pelanggaran HAM. "Penyelesaian Non

Yudisial ini berbeda dengan penyelesaian secara yudisial, kalau yudisial terfokus kepada pelaku, saksi dan sebagainya. Sedangkan (Non Yudisial) kami hanya menyentuh korban jadi yang harus dilakukan adalah validasi, verifikasi korban, dan menjaring apa aspirasi dari korban,” jelas Kiki. Tujuan akhir dari penyelesaian ini, menurut Keppres nomor 17 adalah merekomendasikan tentang pemulihan korban yang bisa dilakukan melalui rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan bantuan lain sesuai yang dibutuhkan di lapangan (Cenderawasih Pos).

10 November

Tim KOMNAS HAM pusat mulai mencari korban Pelanggaran HAM Berat tahun 2003 yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dilakukan sesuai dengan Keppres nomor 17 tahun 2022 untuk provinsi Papua khususnya di Jayawijaya dan untuk Wasior Kabupaten Teluk Bintuni guna mendapatkan Program pemulihan. “Jadi hanya korban pelanggaran HAM Berat Tahun 2003 saja, hanya itu yang kami cari dan tidak yang lain-lain, mandat kami hanya untuk korban pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun itu dalam kasus pembongkaran gudang senjata di Kodim 1702/Jayawijaya,” ungkap Kiki Syahnarki. Artinya semua pihak jangan berharap untuk tim Komnas HAM menyelesaikan pelanggaran HAM itu secara menyeluruh yaitu membuka ruang dialog pelaku, korban, dan saksi secara yudisial. Tim ini hanya fokus pada aspek Non Yudisial yaitu hanya mencari pihak korban kemudian diberikan bayaran sesuai permintaan ganti rugi pelanggaran HAM (Cenderawasih Pos).

12 November

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) menyebut ada permainan dalam proses persidangan maka Majelis Hakim harus

jeli dalam melihat kasus tersebut. “Jadi jika itu misalnya pelakunya Danramil maka Dandim dan Danrem ke atas juga kena karena tidak bisa pelakunya satu orang dalam kasus pelanggaran HAM berat,” kata Latifah Anum, Direktur ALDP kepada wartawan. “Untuk itu kita berharap kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim dapat melihat hal ini, tidak hanya menjadikan satu orang saja sebagai pelaku dalam peristiwa kasus pelanggaran HAM berat di Paniai,” sambungnya (Cenderawasih Pos).

14 November

Korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Wamena 4 April menolak dialog dengan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Korban Pelanggaran HAM Berat Wamena, Linus Hiluka menyebut tim penyelesaian HAM berat tersebut datang menawarkan korban dan keluarga korban terima kompensasi rehabilitasi nama baik Negara. “Keluarga dan keluarga korban menolak kompensasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan pihak korban meminta Presiden membuka meja Perundingan perspektif HAM yang diminta dan dimediasi oleh pihak ketiga dalam hal ini Komisi HAM PBB,” kata Linus Heluka ketika memberikan keterangan kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (12/11) (Cenderawasih Pos).

17 November

Persoalan HAM di Papua hingga kini sepertinya tak berujung. Setiap tahun selalu ada saja ada insiden dan laporan terkait kekerasan bersenjata yang dilakukan oknum aparat keamanan. Sekalipun telah disuarakan dengan berbagai cara bahkan presiden ganti presiden, persoalan HAM masih menjadi catatan kelam bagi masyarakat yang menjadi korban.

Peliknya persoalan HAM di Papua juga menarik perhatian Negara luar bahkan pada 8 November lalu sempat disuarakan langsung dalam forum *side event* di Genewa Swiss. Penyampaian di Swiss disampaikan oleh Ketua MRP, Timotius Murib, yang saat itu mengantikan Beny Giay yang berhalangan sakit. Dalam kesempatan *side event* itu Murib menyampaikan situasi HAM dan problem pembangunan di Papua. Ia menyampaikan informasi tentang pelanggaran HAM masa lalu berupa marginalisasi sampai pelanggaran HAM masa kini berupa pembunuhan dengan mutilasi hingga pengungsian akibat konflik bersenjata. Selain itu kurangnya keterlibatan orang Papua dalam revisi kedua UU Otsus dan pemekaran Provinsi. “Itu harapan kami semua, semoga ada perubahan dalam pelanggaran HAM,” imbu Timotius selaku MRP sebagai Lembaga Representasi Kultural Orang Asli Papua yang diamanatkan oleh UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang memiliki wewenang untuk menyelamatkan Orang Asli Papua (Cenderawasih Pos).

18 November

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027 menemui Menteri bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD untuk membahas penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat. “Pertemuan membahas beberapa persoalan, salah satunya peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sugiro di Jakarta, Kamis (17/11). Terkait isu HAM di Papua, Komnas HAM akan mempelajari lebih lanjut berbagai inisiatif yang telah dilakukan anggota Komnas HAM periode 2017-2022, termasuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai langkah dalam menyusun berbagai upaya menghentikan eskalasi kekerasan di Papua. Sementara itu, Menkopolhukam

Mahfud MD mengatakan, akan memfasilitasi pertemuan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, termasuk mendukung upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial. Mahfud juga berharap Komnas HAM lebih berani dan tegas dalam menjalankan mandatnya (Cenderawasih Pos).

26 November

Jelang sidang putusan Pengadilan HAM Kasus Paniai 2012 yang akan digelar di PN Makassar pada 5 Desember mendatang, koalisi LSM HAM dan Solidaritas meminta Majelis Hukum untuk memberikan putusan maksimal terhadap terdakwa serta menggunakan hukum yang progresif dalam hal memutuskan adanya pihak lain yang seharusnya diminta ikut bertanggungjawab. “Dengan kategori, komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan dan pelaku pembiaran, mempertimbangkan asas kepastian hukum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terdapat di masyarakat secara khusus memberikan keadilan korban dan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku lainnya yang belum dimintai pertanggungjawaban,” ujar Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar pada Konferensi Pers di Kantor ALDP, Padang Bulan, Jumat, (25/11) (Cenderawasih Pos).

29 November

- Anggota Panitia Khusus Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Empat Warga Nduga di Mimika, Namantus Gwijangge menyatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi dengan Panglima TNI di Jakarta. Audiensi itu akan dilakukan untuk meminta enam prajurit TNI AD yang menjadi tersangka kasus pembunuhan

dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika. “Beberapa hari yang lalu [kami] baru dari Jakarta [dan memasukkan surat permohonan untuk] bertemu Panglima TNI. Tujuan kami bertemu [Panglima TNI] untuk menyampaikan aspirasi dari keluarga korban pembunuhan dan mutilasi [Mimika], agar kasus pembunuhan dan mutilasi ini agar dapat disidangkan di pengadilan koneksitas [di Pengadilan Negeri Kota Timika], bukan di pengadilan militer,” kata Gwijangge kepada Jubi melalui panggilan telepon pada Selasa (29/11) (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/lagi-dpr-papua-dan-keluarga-korban-mutilasi-minta-6-prajurit-tni-diadili-di-timika/>).

- Perwakilan keluarga korban kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Aptoro Lokmbre berharap Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk memastikan enam prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi itu diadili melalui pengadilan koneksitas di Pengadilan Negeri Kota Timika. Lokmbre menyatakan keluarga korban menolak keenam prajurit TNI itu diadili di pengadilan militer. Menurutnya, penerapan mekanisme pengadilan koneksitas untuk mengadili enam prajurit TNI di Pengadilan Negeri Kota Timika adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika. “Kami keluarga korban meminta, sebelum Panglima TNI diganti dalam waktu dekat ini, ada keputusan dari beliau untuk memberikan rasa keadilan kepada kami. Saya percaya Pak Andika Perkasa punya pengetahuan hukum yang baik. Beliau akan memberikan keadilan kepada keluarga korban,” katanya ([https://jubi](https://jubi.id/polhukam/2022/sebelum-turun-jabatan-jenderal-andika-perkasa-diminta-pastikan-6-prajurit-tni-tersangka-mutilasi-diadili-di-pn-timika/)

id/polhukam/2022/sebelum-turun-jabatan-jenderal-andika-perkasa-diminta-pastikan-6-prajurit-tni-tersangka-mutilasi-diadili-di-pn-timika/).

06 Desember

Penyidik Satuan Reskrim Polres Mimika menyerahkan berkas 4 tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika pada, Senin (05/12) kemarin. “Berkasnya sudah lengkap, sekarang kami serahkan para tersangka dan barang bukti. Selanjutnya menunggu arahan lanjut dari Kasi Pidun selaku ketua tim Jaksa Penuntut Umum nanti,” ujar Iptu Sugarda (Cenderawasih Pos).

09 Desember

Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu divonis bebas dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis (8/12). Mantan perwira penghubung tersebut merupakan terdakwa tunggal dalam kasus pelanggaran HAM berat Pania pada 2014 silam. “Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua,” kata Hakim Ketua Sutisna Sawati dalam persidangan tersebut.

Koalisi LSM untuk Kasus Paniai Berdarah Latifah Anum Siregar menyatakan, sejak awal pihaknya termasuk masyarakat Papua sudah meragukan proses ini. “Pelaku peristiwa pelanggaran HAM itu berlapis-lapis, ada pemilik kebijakan, pemilik komando, pelaku di lapangan, dan pelaku pembiaran setidaknya ada empat lapis,” kata Anum usai mengikuti proses persidangan di Makassar. Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay mengaku prihatin karena ini akan menjadi preseden

buruk terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Papua. “Kita mendengarkan semua keputusan yang memang sangat mengecewakan semua. Sejak terjadinya kasus Paniai kami juga mengalami banyak kendala di lapangan yang memang sengaja dirancang oleh kelompok tertentu untuk mengelabui dan juga untuk menutup kasus Paniai,” kata Gobay, Kamis (8/12) (Cenderawasih Pos).

09-10 Desember

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hak Asasi Manusia (HAM) menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan perwira penghubung pada Kodim Paniai, Purnawirawan Isak Sattu yang merupakan terdakwa tunggal dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada 7-8 Desember 2014. “mengadili, satu, menyatakan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana didakwakan dalam kedakwaan kesatu dan kedua,” kata Hakim Ketua Pengadilan HAM, Sutisna Sawati saat membacakan vonis di PN Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/12/2022). Kedua, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Ketiga, memberikan hak-hak terdakwa, pemulihan nama baik dan pengembalian harkat serta martabatnya. Keempat, menetapkan barang bukti yang ada tidak berlaku lagi. Kelima, membebaskan biaya perkara pada Negara. Majelis juga menyampaikan baik terhadap terdakwa maupun penuntut umum punya hak menerima atau tidak menerima maka dapat melakukan upaya banding, kasasi, atau pikir-pikir. Sidang tersebut berlangsung selama 3 jam, dalam hal ini majelis hakim membacakan putusan setebal 100 halaman dengan pertimbangan-pertimbangan secara bergiliran (Koran Jubi Edisi 09-10 Desember).

- Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pembangunan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Cristian Yan Warinussy mendesak negara melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi di Tanah Papua untuk mendirikan Pengadilan HAM di Jayapura, Provinsi Papua. Hal itu dinyatakan Warinussy kepada jubi pada Kamis (8/12). Desakan pembentukan pengadilan HAM itu disampaikan Warinussy menjelang peringatan 74 tahun hari HAM internasional pada 10 Desember 2022. Ia mendesak pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi di tanah Papua mendirikan pengadilan HAM di PN Jayapura. Warinussy mengatakan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdapat amanat untuk mendirikan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau (KKR) di tanah Papua. Warinussy menyatakan pendirian dua lembaga akan menjadi tolak ukur keseriusan negara dalam menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua (Koran Jubi Edisi 09-10 Desember).

12 Desember

- Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, “Apa yang telah kita saksikan hari ini adalah parodi keadilan. Putusan ini merupakan tamparan bagi korban dan keluarga korban penembakan di Paniai, bahkan bagi korban pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia yang bertahun-tahun menuntut keadilan,” katanya kepada Cenderawasih Pos melalui pesan elektroniknya, Sabtu (10/11) (Cenderawasih Pos).
- Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyatakan

kasus kekerasan terhadap anak-anak yang diduga dilakukan prajurit TNI di Papua bertambah sepanjang 2022. Hal itu menjadi preseden buruk dan berpotensi mengganggu upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Ramandey menyatakan, Komnas HAM Papua mencatat ada tiga kasus kekerasan terhadap anak-anak di Papua yang terjadi pada 2022 dan diduga dilakukan oleh prajurit TNI. Akibatnya kekerasan itu setidaknya ada 11 korban yakni sebanyak 9 anak-anak mengalami luka-luka dan dua anak meninggal dunia. “Itu kekerasan langsung. Bukan karena akibat [atau dampak peristiwa biasa], tapi kekerasan langsung [yang dilakukan] kepada anak-anak,” kata Ramandey kepada wartawan di Kota Jayapura pada Sabtu (10/12) (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/keterlibatan-prajurit-tni-dalam-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-papua-bertambah/>).

- Menyikapi kasus mutilasi 4 warga sipil Nduga di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu, keluarga korban di Wamena bersama mahasiswa Nduga dan aktivis pemerhati HAM Papua yang ada di Wamena, meminta kepada hakim pengadilan militer Dok 5 Jayapura agar memindahkan sidang ke Pengadilan Negeri (PN) Timika. Hal tersebut disampaikan salah satu perwakilan keluarga korban di Wamena, Bheny Murip. “Sidang yang dilakukan di peradilan militer itu [diharapkan] dilakukan di peradilan negeri di Timika,” katanya, di Wamena pada Senin (12/12). Pihak keluarga korban juga mendesak Dewan HAM PBB, Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih XVII, Kapolres dan Dandim Mimika agar segera membentuk tim investigasi independen

guna mengungkap motif dan fakta kejahatan terhadap kemanusiaan pada kasus tembak mati dan mutilasi empat keluarga mereka tersebut (<https://jubi.id/polhukam/2022/keluarga-korban-mutilasi-4-warga-nduga-minta-sidang-pengadilan-militer-dipindahkan-ke-pn-timika/>).

- Kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika mulai disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Kota Jayapura, Senin (12/12). Dalam sidang Senin, sejumlah lima prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kelima prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo (IJK) yang bersama-sama menjadi terdakwa dalam perkara nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 itu adalah Kapten Inf Dominggus Kainama (Pasi PAM Ops Brigif R 20/IJK/3), Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Rizky Oktaf Muliawan, Pratu Robertus Putra Clinsman, dan Praka Pargo Rumbouw. Perkara itu diperiksa dan akan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto bersama Hakim Anggota Letkol Laut Chk Slamet Widodo dan Letkol Chk Arie Fitriansyah. Dalam pembacaan dakwaannya, Oditur Militer, Kolonel Chk Yunus Ginting membeberkan kronologis pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban pembunuhan dan mutilasi itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini. Dakwaan Oditur membeberkan rangkaian peristiwa dalam pembunuhan dan mutilasi

itu, sejak perencanaan para pelaku, transaksi jual beli senjata, hingga pembunuhan terhadap keempat korban yang diikuti dengan mutilasi keempat jenazah korban. Kelima prajurit TNI AD itu didakwa dengan dakwaan primair pembunuhan berencana secara bersama-sama (Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP) dan dakwaan subsidair pembunuhan secara bersama-sama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan Oditur juga menyebut sejumlah delik lain yang didakwakan. “Ada delapan pasal yang di-juncto-kan, karena ada terkait dengan pengambilan uang, pembakaran, dan mutilasi,” kata Yunus Ginting (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/sidang-mutilasi-mimika-5-prajurit-tni-didakwa-dengan-pasal-pembunuhan-berencana/>).

14 Desember

Sejumlah mahasiswa dari Ikatan Pemuda Mahasiswa Nduga Indonesia atau IPMNI Kota Studi Jayapura pada Rabu (14/12) menggelar aksi diam di depan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Kota Jayapura. Mereka meminta para prajurit TNI yang menjadi terdakwa pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika dijatuhi vonis pidana mati. Aksi diam di depan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Rabu itu merupakan aksi kedua para mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nduga. Sebelumnya, pada sidang pembacaan dakwaan bagi lima prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang berlangsung pada Senin (12/12), mereka juga menggelar aksi diam dengan tuntutan yang serupa. Dalam aksi diam itu, para mahasiswa membentangkan poster foto bagian tubuh korban, serta membentangkan spanduk besar bertuliskan tuntutan hukuman mati bagi kesepuluh orang yang menjadi

tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi Mimika. Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Nduga Indonesia atau IPMNI Kota Studi Jayapura, Warnus Tabuni menyatakan pihaknya akan menggelar aksi diam itu pada setiap persidangan kelima terdakwa (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/gelar-aksi-diam-di-pengadilan-militer-mahasiswa-nduga-minta-terdakwa-mutilasi-mimika-dihukum-mati/>).

14-15 Desember

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Frits Ramandey menyatakan putusan bebas pengadilan HAM Makassar bagi terdakwa kasus Paniai Berdarah, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya Papua. Hal itu dinyatakan Ramandey di Kota Jayapura, Sabtu (10/12/2022). “Komnas HAM RI perwakilan Papua menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas putusan pengadilan HAM berat Makassar yang membebaskan pelaku,” katanya (Koran Jubi Edisi 14-15 Desember).

24 Desember

Salah satu dari lima prajurit Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika, Kapten Inf Dominggus Kainama meninggal dunia di Kota Jayapura pada Sabtu (24/12). Ia diduga meninggal karena serangan jantung. Informasi itu dikonfirmasi Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Kav. Herman Taryaman. “Benar satu tersangka telah meninggal dunia tadi siang di Rumah Sakit Dian Harapan Waena pukul 12.10 WIT,” kata Herman Taryaman di Kota Jayapura, Sabtu. Kapten Inf

Dominggus Kainama adalah Perwira Seksi Pengamanan Ops Brigif R 20/IJK/3 yang tengah menjalani persidangan dalam perkara pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/1-terdakwa-kasus-mutilasi-4-warga-nduga-di-mimika-meninggal-dunia/>).

Laporan Khusus Penembakan Warga Sipil di Kabupaten Mappi

Pada 14 Desember 2022, berdasarkan temuan Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua pada 14 Desember 2022 telah terjadi penembakan terhadap 9 warga sipil di Kepi, Kabupaten Mappi, Papua oleh pihak kepolisian dan Kopasus. Enam (6) dari 9 warga sipil ini adalah pelajar. Salah satu korbannya meninggal dunia pada 17 Desember 2022 di Rumah Sakit Mappi. Kasus ini masih didampingi oleh Tim Koalisi (Laporan Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua).

Pada 23 Desember 2022, Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua menyatakan sedikitnya ada sembilan warga Mappi yang terluka akibat penembakan yang diduga dilakukan aparat keamanan di Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022. Hal itu menjadi bagian dari temuan investigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang diumumkan pada Jumat (23/12). Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Helmi menyatakan dari sembilan warga yang tertembak itu, seorang diantaranya telah meninggal dunia pada 17 Desember 2022. Warga yang meninggal itu adalah Moses Nakas Erro, yang mengalami luka tembak di paha kanan atas bagian dalam, mulai dari pangkal paha hingga lutut. Helmi menyatakan delapan warga lain yang

mengalami luka tembak pada 14 Desember 2022 adalah Sabinus Sokmi Sedap (24), Otniel Qah Samogoi (25), Wilhemus Jeji Samogi (18), Fredirandus Boy (16), Basilius Bape Yebo (24), Rexon Ya A Pasim (18), Kaspar Khani Yebo (15), dan Kaspar Khani Yebo (24). “Delapan orang ini menjalani rawat jalan. Mereka masih shock dan trauma. Mereka tidak mau inap di rumah sakit karena selalu didatangi polisi,” ujarnya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/koalisi-penegak-hukum-dan-ham-9-warga-terluka-dalam-penembakan-di-mappi/>).

Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua pada Jumat (23/12/2022) juga mengumumkan hasil investigasi terkait penembakan sejumlah warga sipil di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022. Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat meleraikan bentrokan antar warga. Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Helmi SH menyatakan tim koalisi melakukan investigasi sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022. Hasil investigasi tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua itu menyimpulkan tidak ada bentrokan antar warga yang terjadi sebelum aparat keamanan menembak sejumlah warga sipil pada 14 Desember 2022. Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang meleraikan bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/koalisi-penegak-hukum-dan-ham-bantah-ada-bentrok-antar-warga-sebelum-penembakan-warga-di-mappi/>). Pada 24 Desember 2022, Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi

Manusia atau HAM Papua menyatakan, dari sembilan warga yang menjadi korban penembakan yang dilakukan aparat keamanan di Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022 lalu, enam orang di antaranya masih berstatus pelajar. Keenam korban itu masih menjalani rawat jalan karena luka tembak yang mereka alami. Hal itu menjadi bagian dari hasil investigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua atas insiden penembakan warga sipil di Kabupaten Mappi yang diumumkan di Kota Jayapura pada Jumat (23/12/2022). Investigasi itu dilakukan Koalisi sejak 17 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022. Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Helmi menyatakan ada enam korban penembakan 14 Desember 2022 yang masih berstatus pelajar SD, SMP, dan SMA. Keenam korban itu adalah Kaspar Khani Yebo (siswa SD Inpres Kabe), Wilhemus Jeji Samogi (siswa SMP Negeri 1 Menyamur), Fredirandus Boy (siswa SMP YPPK Yohanis Paulus 1 Kepi), Sabinus Sokmi Sedap (siswa SMA Negeri 1 Obaa), Rexon Ya A Pasim (siswa SMA Negeri 1 Obaa), dan Yohanis T Sedap (siswa SMK Negeri 2 Obaa) (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/koalisi-penegak-hukum-dan-ham-6-korban-penembakan-di-mappi-adalah-pelajar/>).

TKP 3

Sekitar Jam 18.00, di Jalan Pasar Baru Kapi

Warga mendengarkan bunyi tembakan sebanyak dua kali dari arah Pos Kopassus.

Kepala Kampung Kabe, mendatangi kelompok warga yang masih berada di Jalan Pasar Baru Kapi dan meminta mereka agar membubarkan diri.

Kepala Kampung Kabe memberikan sejumlah uang kepada kelompok warga tersebut untuk membeli kopi, kue dan gula pasir agar mereka makan di rumah seorang guru di simpang Jalan Bambu.

Kronologis Penembakan di Kabupaten Mappi 14 Desember 2022

TEMUAN KOALISI HUKUM DAN HAM PAPUA

9 KORBAN PENEMBAKAN

8 orang luka berat

1 orang Meninggal Dunia

6 Korban

Diantaranya Pelajar

3 Pelajar SMA/SMK

2 Pelajar SMP

1 Pelajar Sekolah Dasar

KABUPATEN MAPPI
Distrik Obaa

TKP 3

Sekitar Jam 18.00, di Jalan Irian Kapi/Km 2, Depan Kantor KPA (Pos Kopassus)

Sebelum tiba di rumah guru tersebut, tepatnya di ujung SMK Negeri Obaa atau depan Kantor KPA Mappi (yang digunakan sebagai Pos Kopassus) terdengar bunyi tembakan ke udara sebanyak dua kali.

Kelompok warga ini merasa "diprovokasi" oleh bunyi tembakan tersebut. Mereka marah dan melempari pagar sang Kantor KPA (Pos Kopassus).

TKP 4

Sekitar Jam 18.00, Jalan Irian Mappi, Depan Gerbang SMK Negeri 1 Obaa, Mappi

Dalam keadaan gelap, kelompok warga melihat sinar laser lalu lampu mobil polisi disorotkan ke arah kelompok warga.

Kemudian terdengar bunyi tembakan yang diarahkan kepada kelompok warga tersebut.

Akibatnya 9 orang dari kelompok warga tersebut terkena tembakan. Korban tembakan dilarikan ke Puskesmas dan diujuk ke Rumah Sakit Mappi di Km 6.

TKP 1 & 2

Jam 18.00 Wt, di dekat simpang Jalan Emata ke Kaman

Dua orang (Martinus dan Melkior) diparangi oleh 5 orang pemuda dalam kondisi mabuk. Martinus yang kena parang, Melkior melarikan diri.

Polisi datang ke TKP dan menemui hanya 1 orang saja dari kelompok pelaku dan mengamankan ke mobil patroli polisi.

Sekitar 40-50 orang dari Distrik Menyamur meminta agar polisi melepaskan pelaku yang ditahan tersebut. Karena pelaku tidak dibebaskan massa kecewa dan merusak mobil patroli tersebut.

Kelompok warga tersebut kemudian kembali.

Terpasung di Rumah Sendiri

— Petrus Pit Supardi

terpasung di istana emas

rintihan dan jeritan mengundang bedil

lalu membisu untuk selamanya

Pengantar

Sepanjang tahun 2022, Orang Asli Papua tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Demonstrasi penyampaian aspirasi penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua tidak mendapatkan izin dari aparat kepolisian. Alhasil, aspirasi tersebut tidak sampai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), melainkan hanya sampai di jalan-jalan, di bawah pengawasan aparat militer Indonesia.

Dalih pihak kepolisian bahwa aksi demonstrasi tidak mendapat izin menjadi senjata pamungkas untuk membungkam aspirasi Orang Asli Papua. Bahkan Orang Asli Papua tidak diizinkan menyampaikan aspirasinya ke rumah wakilnya di DPRP. Suara Orang Asli Papua benar-benar terpasung di dalam rumahnya sendiri.

Potret pembungkaman suara rakyat Papua selama tahun 2022 memperlihatkan dengan jelas disposisi batin pemerintah Indonesia terhadap Papua. Di hadapan Indonesia, Papua sudah final di dalam rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Indonesia mengklaim bahwa Papua adalah bagian integral Indonesia. Tetapi, kalau Papua adalah bagian dari Indonesia, mengapa pemerintah Indonesia tidak pernah mau mendengarkan suara Orang Asli Papua? Di mana letak kesetaraan dan keadilan bagi Orang Asli Papua di dalam rumah NKRI? Sebab, fakta menunjukkan bahwa ketika Orang Asli Papua menyampaikan aspirasinya, mereka dibubarkan secara paksa, ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara.

Pengalaman pembungkaman kebebasan berekspresi selama tahun 2022 mengundang kita untuk menelaah dan merefleksikan Papua dalam dua aspek penting yaitu 1) mendengarkan suara Papua dan pentingnya ruang dialog; 2) mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi Orang Asli Papua.

Mendengarkan Orang Asli Papua dan Membuka Ruang Dialog

Pemerintah Indonesia mengklaim tanggal 1 Mei 1963 sebagai hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI.¹⁶ Kemudian, pada tahun 1969, Indonesia melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dan menyatakan bahwa Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia.¹⁷ Sudah 60 tahun, Papua tinggal di dalam rumah NKRI, tetapi, selama itu pula, pemerintah Indonesia tidak mau mendengarkan suara Orang Asli Papua. Pemerintah Indonesia juga tidak mau membuka ruang dialog dengan Orang Asli Papua.

Sepanjang tahun 2022, kita melihat, mendengar, dan menyaksikan sikap pemerintah pusat di Jakarta yang memaksakan pemekaran DOB di tanah Papua. Dalam waktu sekejap lahir empat provinsi baru di tanah Papua, yaitu provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Segenap elemen

Orang Asli Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) telah melakukan demonstrasi berulang kali untuk menolak dengan tegas pembentukan DOB tersebut, tetapi pemerintah pusat di Jakarta menutup telinga.

Kita melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak mau mendengarkan suara Orang Asli Papua. Demikian pula ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan Papua pun tidak tersedia. Situasi ini membangkitkan pertanyaan, “apakah Papua: Manusia, budaya, dan alamnya adalah bagian dari Indonesia atau hanya sekedar retorika dan narasi Indonesia untuk menguasai Sumber Daya Alam Papua?” Identitas Orang Asli Papua di dalam rumah NKRI tampak kabur. Suara Orang Asli Papua tidak mendapatkan tempat di hati pemerintah Indonesia. Demikian halnya, permasalahan-permasalahan Papua tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. Karena itu, Orang Asli Papua selalu mempertanyakan keabsahannya tinggal bersama Indonesia di dalam rumah NKRI.

Sepanjang tahun 2022, demonstrasi yang digelar di berbagai wilayah di tanah Papua dan Jakarta mendapatkan pengamanan ketat dan berlebihan dari aparat keamanan Indonesia. Kita melihat pada setiap aksi demonstrasi yang dilakukan untuk pembebasan tahanan politik Papua, penolakan pemekaran DOB di tanah Papua, dan penolakan dialog Jakarta-Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI serta intelijen. Dalih tidak ada izin untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta alasan demi keamanan dan ketertiban umum melegitimasi aparat keamanan Indonesia menurunkan pasukan bersenjata dan peralatan perang untuk menghadapi Orang Asli Papua yang menyampaikan aspirasinya.

Sikap tertutup pemerintah Indonesia, yang tidak memberikan ruang demokrasi terhadap Orang Asli Papua seringkali berujung pada jatuhnya korban nyawa dan harta

16 Bdk. John RG Djopari. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Grasindo, 1993, hal. 37-38.

17 Bdk. *Ibid*, hal. 71-76.

benda. Kita bisa melihat peristiwa demonstrasi penolakan DOB di Yahukimo pada Selasa, 15 Maret 2022 yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka-luka. Sikap represif aparat keamanan memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui dan tidak menerima eksistensi Orang Asli Papua di dalam rumah NKRI.

Sejarah Papua selama 60 tahun tinggal di dalam rumah NKRI adalah sejarah penderitaan. Kenangan akan penderitaan (*Memoria Passionis*) itu telah membangkitkan kesadaran kolektif Orang Asli Papua untuk memperjuangkan pembebasannya. Karena itu, kalau pemerintah Indonesia selalu dan tetap mempertahankan sikap otoriter, represif, dan tertutup terhadap aspirasi Orang Asli Papua, maka gejolak dan perlawanan akan selalu berkobar.

Situasi Papua yang tidak kondusif selama tahun 2022, memberi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan suara Orang Asli Papua dan membuka ruang-ruang pertemuan dan dialog. Pemerintah Indonesia perlu membuka diri terhadap aspirasi Orang Asli Papua. Setiap kebijakan untuk Papua perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat Papua, bukan sebaliknya dipaksakan seperti yang diperlihatkan dalam pemekaran DOB di tanah Papua.

Kita belajar bahwa pendekatan keamanan melalui kehadiran militer dan intelijen berlebihan dan pembangunan infrastruktur di tanah Papua selama ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan gejolak Papua di dalam rumah NKRI. Sikap represif aparat keamanan tidak pernah memadamkan api demonstrasi menuntut hak-hak dasar Orang Asli Papua. Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, bandara, jalan, perkantoran, pasar dan lain-lain tidak membuat Orang Asli Papua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan Papua, pemerintah Indonesia harus mengubah pendekatannya

terhadap Papua dengan pertama-tama mau membuka diri untuk mendengarkan suara dan kehendak rakyat Papua.

Apa sebenarnya yang Orang Asli Papua kehendaki dari pemerintah Indonesia? Apakah pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan hidup atau sesuatu yang lebih fundamental yang menyangkut martabat harga diri Orang Asli Papua? Pada titik ini, ruang-ruang dialog perlu terbuka lebar dan para pihak, pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua perlu duduk bicara di meja dialog.

Selama 60 tahun, pemerintah Indonesia membungkam suara Orang Asli Papua. Ruang kebebasan berekspresi bagi Orang Asli Papua tertutup rapat. Berbagai kebijakan untuk tanah Papua hanya berdasarkan kemauan pemerintah pusat di Jakarta. Kita belajar bahwa berbagai kebijakan tanpa melibatkan Orang Asli Papua itu telah gagal. Pemerintah Indonesia tidak mampu memadamkan api tuntutan keadilan dan kesetaraan bagi Papua. Apabila pemerintah Indonesia masih menghendaki Papua tinggal di dalam rumah NKRI, maka ruang-ruang dialog dan pertemuan perlu dibuka lebar-lebar.

Pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan lebih luas kepada Orang Asli Papua untuk mengekspresikan hidupnya secara bebas, tanpa tekanan di atas tanah Papua. Cara-cara lama dengan pendekatan keamanan dan militer harus diubah dengan cara-cara yang lebih manusiawi: saling berbicara dan saling mendengarkan antara Indonesia dan Papua. Keduanya adalah setara.

Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan bagi Orang Papua

Keadilan dan kesetaraan berkaitan langsung dengan hakikat pribadi manusia. Martabat pribadi manusia tidak dapat direduksi oleh siapa pun dan dengan cara apa pun. Sebab, martabat manusia bernilai mulia karena secitra dengan Sang Pencipta (bdk Kejadian

1:26-28). Demikian halnya, Santo Fransiskus Asisi berkata, “Sebab, seperti apa nilai seseorang di hadapan Allah, begitulah nilai orang itu dan tidak lebih” (Petuah XIX, 2).¹⁸ Karena itu, sebagai pribadi manusia, yang memiliki rumpun ras melanesia dengan kebudayaannya unik, Orang Asli Papua berhak menuntut keadilan dan kesetaraan di dalam rumah NKRI.

Apa keadilan dan kesetaraan yang dikehendaki rakyat Papua? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa salah satu poin penting permasalahan Papua adalah sejarah integrasi dan identitas Papua.¹⁹ Orang Papua menuntut agar sejarah bangsanya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia. Selain itu, perlakuan pemerintah Indonesia terhadap Orang Asli Papua harus setara sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia.

Orang Asli Papua tinggal di dalam rumah NKRI, tetapi mengalami pembunuhan terus-menerus oleh aparat keamanan Indonesia. Suatu kenyataan yang tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Pada titik ini, kita melihat bahwa tidak ada kesetaraan kemanusiaan bagi Orang Asli Papua dengan orang suku bangsa lain yang mendiami rumah NKRI. Bagi Indonesia, Papua hanya sebatas sumber daya alam, bukan manusia Orang Asli Papua. Karena itu, pemerintah Indonesia selalu menutup diri terhadap suara Orang Asli Papua yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Perilaku rasial dan diskriminatif tampak jelas dalam penangkapan terhadap Viktor Yeimo dan proses persidangannya tersendat karena berbagai alasan. Selain itu, betapa sulit Viktor Yeimo mendapatkan keadilan untuk berobat dan mendapatkan ruang tahanan yang layak sesuai kondisi kesehatannya. Selama

tahun 2022, kita menyaksikan bahwa pada saat rakyat Papua hendak melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, aparat keamanan, polisi dan tentara dengan kekuatan penuh memblokir tempat-tempat yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi. Di kota Jayapura, kita dapat menyaksikan aparat keamanan dengan perlengkapan perang berjaga di Ekspo, Waena, Perumnas 3 Waena, Gapura Uncen Abepura dan Lingkaran Abepura. Kita melihat bahwa Orang Asli Papua diidentikkan dengan kekerasan dan kerusuhan sehingga harus dijaga ketat dengan peralatan perang.

Kita harus mengakui dengan jujur bahwa selama tinggal di dalam rumah NKRI, Papua tidak pernah mendapatkan keadilan dan kesetaraan sebagai warga negara Indonesia. Manusia Orang Asli Papua masih dilihat sebagai masyarakat terbelakang, berwatak keras, kanibal, dan sederet penilaian negatif lainnya sehingga pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan keamanan dan militer. Pendekatan humanis, dialog, dan budaya selalu dikesampingkan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap akan mengganggu keabsahan Indonesia di tanah Papua.

Mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi orang Papua adalah sebuah keniscayaan. Tanpa keadilan dan kesetaraan, Papua tidak akan pernah aman dan damai. Pemerintah Indonesia harus mengakui eksistensi Orang Asli Papua dengan adat dan budayanya di atas tanah Papua. Tanpa pengakuan, maka ketidakpercayaan Orang Asli Papua terhadap pemerintah Indonesia akan berlanjut dan situasi keamanan dan kedamaian akan selalu jauh dari harapan kita bersama.

Pada akhirnya, penerimaan dan penghormatan terhadap manusia Orang Asli Papua adalah sebuah keharusan. Pemerintah Indonesia dan setiap orang yang tinggal dan hidup di atas tanah

18 Leo Laba Ladjar. *Karya-Karya Fransiskus dari Asisi*, terj. SEKAFI, 2001, halaman 216-217

19 Muridan S. Widjodo. *Papua Road Map*. Obor, 2009, halaman 8-10.

Papua harus menerima dan menghormati Orang Asli Papua dengan segala identitas diri, adat, budaya, dan pilihan politiknya. Tidak boleh lagi ada sikap diskriminatif, rasial, represif dan lain sejenisnya terhadap Orang Asli Papua. Kita wajib menerima dan menghormati Orang Asli Papua di dalam rumahnya, rumah Papua, tanpa pamrih dan tanpa syarat apa pun.

Penutup

Kita telah melewati tahun 2022. Kita mencatat rupa-rupa kejadian yang menyayat hati. Kita merasa sakit dan perih. Itulah fakta dan kenyataan hidup kita di tanah Papua selama tahun 2022. Kita bertanya, kapan *Memoria Passionis* Papua akan berakhir? Tidak ada seorang pun tahu waktu pemulihan dan perdamaian Papua. Meskipun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan menyebarkan warta perdamaian di seluruh tanah Papua.

Harapan bahwa pemerintah Indonesia mendengarkan suara Orang Asli Papua dan membuka ruang dialog masih sebatas impian, belum terwujud. Demikian halnya, upaya penegakkan keadilan dan kesetaraan bagi Orang Asli Papua menemui jalan buntu. Atas nama keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat, sepanjang tahun 2022 pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan militer dalam menghadapi berbagai aspirasi Orang Asli Papua.

Menyimak realitas pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di tanah Papua selama tahun 2022, kita bertanya, kapan pemerintah Indonesia akan memberikan kebebasan kepada Orang Asli Papua untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum? Kapan Orang Asli Papua akan mendapatkan keadilan dan kesetaraan di dalam rumah NKRI? Kapan pemerintah Indonesia akan mendengarkan suara Orang Asli Papua? Kapan pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua duduk di meja dialog untuk membahas permasalahan Papua dan menyepakati penyelesaiannya?

Di sini, di tanah Papua, kita berjuang agar martabat dan kemanusiaan Orang Asli Papua mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari para penguasa Indonesia. Orang Asli Papua juga mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya di muka umum. Pada akhirnya, kita berharap keadilan dan kesetaraan sungguh-sungguh bersemi dan bertumbuh di dalam hidup Orang Asli Papua di atas tanahnya, tanah Papua.

Kronik Kebebasan Berekspresi

21 Februari

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Jayapura menyatakan bahwa salah satu kemunduran demokrasi dan lemahnya hukum Negara Indonesia adalah terjadi pembungkaman ruang demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan, mahasiswa, dan semua lapisan masyarakat. BEM Uncen juga berharap bahwa 8 tahanan yang ditangkap waktu membawakan bendera Bintang Kejora ke GOR Cenderawasih Jayapura dibebaskan dan hak untuk mendapatkan kesehatan diperhatikan secara baik dan benar oleh pihak berwajib (Cenderawasih Pos).

23 Februari

Penyidik Reserse Kriminal Polres Merauke meminta keterangan kepada sejumlah anggota ULMWP Merauke terkait rapat yang digelar tanpa izin dari kepolisian di sekitar Kelurahan Kelapa Lima Merauke, Sabtu (19/2). Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji. Menurut Untung, memang ada yang ditahan. Mereka ditahan karena pelaksanaan kegiatan itu tanpa izin (Cenderawasih Pos).

07 Maret

Solidaritas Rakyat Nabire yang terdiri dari para pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Nabire, berdemo di tempat pertemuan terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah, di halaman Hotel Mahavira Nabire, pada Senin (07/3). Pertemuan tatap muka ini, antara Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia, Ahmad Dolli Kurnia yang dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Dogiyai Hengky Makai, Bupati Deiyai Ateng Edowai, Bupati Paniai Meki Nawipa, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, beserta ketua dan anggota DPRD dari Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Solidaritas ini secara spontan melakukan aksi ketika para bupati dan anggota DPRD meninggalkan tempat pertemuan dengan membentangkan dua spanduk yang bertuliskan ‘Tolak Otsus Jilid II’ dan ‘Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan Papua’. “Dengan tegas kami menolak kedatangan Ketua Komisi II DPR RI di Nabire dalam rangka mencari dukungan dari elite politik untuk meloloskan pemekaran Provinsi Papua Tengah,” kata koordinator aksi, Mikael Kudiai kepada Jubi usai aksi. Pihaknya juga menolak dengan tegas pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pemekaran Provinsi lainnya di Papua (<https://jubi.id/berita-papua/2022/solidaritas-rakyat-nabire-berdemo-di-tempat-pertemuan-dob-papua-tengah/>).

08 Maret

Koordinator lapangan aksi “Solidaritas Mahasiswa Bersama Rakyat Papua Tolak DOB Pemekaran”, Alfa Hisage mengumumkan nama mahasiswa yang terluka saat polisi membubarkan aksi mereka di Kota Jayapura pada Selasa (08/3). Hisage menyatakan salah satu mahasiswa yang terluka itu adalah Petrus Tebai yang rusuk kirinya dipukul oleh aparat menggunakan laras senjata api. Petrus Tebai juga terkena beberapa peluru karet dan terkena

gas air mata. Selain itu ada Alex Tagi yang bibirnya sobek karena dipukul dengan pentungan karet. “Egenius Tebay dipukul karet mati dan [terkena] sepakan sepatu lars di bagian belakang. Kemudian Natan Pigai dipukul dan terkena sepakan sepatu lars di bagian betis dan paha. Yustinus Goo dan Yulianus Goo sama-sama dipukul menggunakan karet mati di tangan kanan,” kata Hisage. Massa juga sempat dipukul polisi saat dihalau mundur ke Kampus Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih. “Kiri Keroman dipukul bagian muka, bibir pecah. Wialo Silak mendapatkan pukulan bagian badan,” ujar Hisage (<https://jubi.id/polhukam/2022/ini-korban-luka-dan-kronologi-pembubaran-aksi-tolak-pemekaran/>, <https://jubi.id/polhukam/2022/aksi-mahasiswa-tolak-dob-di-papua-dihalau-dan-dibubarkan-polisi/>).

12 Maret

Enam orang disebutkan terluka saat bentrok dengan aparat kepolisian di Jakarta, Jumat (11/3). Bentrok ini terjadi saat mahasiswa Papua berada di Jalan Veteran III di dekat kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka hendak menuju kantor Kemendagri untuk melakukan protes atas rencana pemekaran Papua. “Ada enam orang yang terluka karena tendangan atau pukulan polisi,” kata Mike Himan, pengacara asal Papua di Jakarta. Enam orang itu adalah Lince (ditendang oleh aparat keamanan di dada dan pingsan), Bob (luka gores di kaki dan ditendang di ulu hati), Samuel Purwaro (ditendang dan ditarik oleh kepolisian ke dalam mobil tahanan. Mengalami luka di mata kanan), Deris Murib (kena pukulan polisi di bagian dahi dan mengalami benjolan. Dia juga ditendang di bagian belakang oleh aparat), Deten (dipukul menggunakan helm polisi di bagian kepala) dan Gudel (ditendang). Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan empat

polisi terluka dalam bentrokan tersebut. Salah seorang yang terluka adalah Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Ferikson Tampubolon. Hengki menyebut aksi yang dilakukan mahasiswa itu tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Ketika diarahkan petugas untuk pindah ke lokasi lain, massa juga tidak mau. “Ketentuan dalam nomor 9 UU 98 bahwa terhadap objek vital nasional itu adalah 500 meter, dan pagar luar istana itu adalah 100 meter. Apa yang terjadi? Mereka menempel di gedung belakang Istana,” kata Hengki. Namun Mike Himan membantah pernyataan polisi. “Ada surat pemberitahuan aksi H-3 sudah diantar ke Polda bagian INTELKAM,” jelas Mike Himan (<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/6-pendemo-dan-4-polisi-terluka-dalam-bentrok-demo-tolak-dob-papua/>).

15 Maret

Satu orang disebutkan meninggal dunia dan empat lainnya terluka dalam aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh warga Yahukimo di Dekai, Selasa (15/3). Lima orang ini tertembak oleh aparat Kepolisian Resort Yahukimo dan Brigade Mobil (Brimob) saat aksi demonstrasi berlangsung. Aksi demonstrasi awalnya berjalan dengan damai dari pagi hari hingga jam 12.00. Masa aksi berkumpul di empat titik kumpul sejak jam 07.40 lalu berjalan kaki menuju lokasi demo di sekitar Ruko Cenderawasih jam 09.00 sampai 09.40. Orasi para pendemo mulai dilakukan pada pukul 10.00. Saat orasi berlangsung koordinator pendemo berkoordinasi melalui telepon dengan anggota DPRD Yahukimo untuk datang menemui pendemo sekaligus menerima aspirasi yang dibawa pendemo. Selanjutnya beberapa orang dari massa aksi berinisiatif menemui anggota DPRD Yahukimo untuk maksud yang sama. Namun anggota DPRD Yahukimo tidak bersedia mendatangi pendemo. Anggota DPRD meminta para

pendemo yang datang ke Kantor DPRD untuk menyerahkan aspirasi mereka. Massa aksi tetap bertahan di lokasi aksi demonstrasi dan melanjutkan orasi dengan penjagaan aparat kepolisian dan anggota TNI. Jam 12.10 terjadilah bentrokan dengan aparat keamanan. Menurut Tinus yang ikut dalam aksi tersebut, bentrokan terjadi setelah ada anggota polisi yang melewati batas tali komando pendemo untuk memotret pendemo. Massa aksi yang tidak terima beradu argumen dengan polisi tersebut. Saat masih terjadi adu argumen, tiba-tiba ada orang dari massa aksi yang melemparkan batu kepada polisi. Polisi kemudian membalas lemparan batu itu dengan tembakan senjata dan gas air mata. Massa aksi bubar setelah ada tembakan itu. Bunyi tembakan berhenti sekitar jam 13.00 (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/satu-meninggal-dunia-empat-terluka-tembak-dalam-aksi-tolak-dob-di-yahukimo/>).

01 April

- Meski dihadap aparat polisi dan tentara Indonesia, aspirasi demonstran secara lisan dan tertulis berhasil diserahkan kepada pimpinan DPR Papua, Jumat (1/4). Para wakil rakyat Papua itu diharapkan meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Massa aksi yang dihadap di tiga lokasi, Expo, Perumnas 3, dan Lingkaran Abepura menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) dan mencabut perpanjangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2021-2041. Kordinator Aksi di Expo, Venus Hilder Kabak menyatakan tindakan yang aparat keamanan dalam menangani massa aksi sebagai bentuk pembungkaman suara rakyat. Venus menyayangkan sikap pihak kepolisian yang menghalangi massa untuk menyampaikan aspirasi langsung di

Kantor DPR Papua (DPRP). Menurutnya, demonstrasi hari ini adalah murni untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. “Hari ini kita lihat di lapangan ada pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa dan rakyat Papua,” katanya kepada Jubi, Jumat (1/4). Koordinator Aksi Expo, Dewo Wenda mengatakan agar pihak DPR Papua segera menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Pihaknya akan memobilisasi massa jika dalam satu atau dua minggu tidak ada kejelasan dari pihak DPR Papua. “DPR Papua segera buka ruang musyawarah besar-besar, biar semua elemen masyarakat adat, pemuda, mahasiswa maupun organisasi gerakan dilibatkan sama-sama dan putuskan,” katanya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/aspirasi-tolak-pemekaran-kepada-dprp/>).

- Massa demonstran yang menuntut penolakan rencana pemekaran DOB dan mencabut kembali UU Otonomi Khusus 2021-2041 di Papua, pada 1 April 2022 di Jayapura, kembali dihadang pasukan gabungan polisi dan tentara Indonesia. Sebanyak 1000 personel gabungan diturunkan untuk menghadang massa demonstran di sejumlah titik di Kota Jayapura. Massa yang dihadang tersebar di Jl Buper-Expo [Waena], Kampus Universitas Cenderawasih Baru [Uncen atas], Uncen bawah, fsn Lingkaran Abepura [depan Polsek Abepura]. Massa akan berjalan kaki dari Expo menuju ke Abepura untuk bersama massa dari titik kumpul lain. Menurut rencana, dari Abepura massa akan bergerak menuju kantor DPR Papua di Jayapura Kota dan menyampaikan aspirasi mereka yang berisi dua tuntutan tersebut. Namun, massa yang sudah mulai berkumpul sejak Pkl 09.00 dihadang kendaraan taktis seperti satu mobil

water canon, satu mobil pengurai massa [Raisa], senjata pelontar gas air mata serta puluhan anggota polisi dengan peralatan penunjang seperti tameng dan pentungan (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/rakyat-papua-demo-tolak-dob-polisi-kerahkan-1000-personel-hadang-massa/>).

05 April

Ribuan pedemo dari masyarakat Lapago melakukan aksi damai di kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Selasa (5/4), untuk menolak adanya rencana dialog yang digagas Komnas HAM RI tentang segala persoalan HAM di Papua selama ini. Kaitanus Ikinia selaku koordinator atau penanggung jawab aksi dalam orasinya menyampaikan, perjuangan rakyat West Papua bukanlah untuk berdialog karena dialog Jakarta-Papua sudah “mati” sejak 2017 lalu. “Lalu kenapa sekarang ini muncul lagi rencana atau niat itu, ada apa? Padahal sudah sejak lama dialog ini ditawarkan, tetapi Indonesia acuhkan jadi kalau mau dialog lagi buat apa?” kata Ikinia. Ia juga menyebut aksi itu bertepatan dengan hearing publik yang dilakukan pemerintahan parlemen Belanda yang juga membicarakan tentang isu Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/ribuan-pedemo-padati-dprd-jayawijaya-tolak-dialog-komnas-ham/>).

06 April

Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera atau KOMPASS menolak rencana pemerintah pusat melakukan pemekaran di Papua dan Papua Barat. Ketua Umum KOMPASS, Karpus Bagubau mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan pemekaran di Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan pembentukan DOB bukanlah aspirasi yang datang dari masyarakat akar rumput Papua. “Kami

melihat apa yang hari ini terjadi di Tanah Papua. Pemerintah pusat dan elit politik lokal Papua menginginkan pembentukan Daerah Otonom Baru,” kata Bagubau dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima Jubi, Rabu (6/4). Bagubau mengatakan berbagai protes di Papua maupun di luar Papua menandakan bahwa masyarakat Papua memang tidak menginginkan pembentukan DOB di Papua. Rencana pembentukan DOB hanya merupakan keinginan pemerintah pusat dan segelintir elit politik lokal Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/kompass-tolak-rencana-pemekaran-papua-dan-papua-barat/>).

08 April

Penyidik Polda Papua telah merampungkan berkas delapan mahasiswa yang melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora di halaman Gedung Olah Raga (GOR) Cenderawasih Jayapura pada 1 Desember 2021 silam. Kedelapan mahasiswa itu adalah Melvin Yobe, MF, Zode Hilapok, DT, MS, LK, YE, dan AF. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, “Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas kedelapan terdakwa sudah lengkap (P-21), dengan nomor: B-24/R.I.4/Eku 1/03/2022 tanggal 24 Maret 2022,” tuturnya di Jayapura, pada Kamis, 7 April 2022. Kedelapan tersangka kasus makar itu dijerat dengan pasal 106 KUHP jo pasal 110 ayat (1), dan KUHP jo pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup (Cenderawasih Pos).

20 April

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, melalui koordinator litigasi, yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan Jaksa Penuntut Umum wajib memenuhi hak atas kesehatan mahasiswa pengibar Bintang Kejora di GOR Jayapura sesuai perintah Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Pada saat pelimpahan berkas tahap kedua, kuasa hukum telah sampaikan kepada Jaksa dari delapan mahasiswa kliennya itu, dua orang mahasiswa atas nama Malvin Yobe dan Zode Hilapok dalam keadaan sakit, sehingga Jaksa dapat memenuhi hak atas kesehatan keduanya sesuai perintah UU,” tegas Emanuel Gobay di Jayapura pada Selasa, 19 April 2022 (Cenderawasih Pos).

25 April

Masyarakat dari berbagai elemen di Biak Numfor menggelar demonstrasi penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kantor DPRD Biak, Senin (25/4). Biak yang termasuk dalam wilayah adat Saireri diwacanakan menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Papua Utara. “Kita ada 27 elemen yang turun berdemo. Ada dari Forum Peduli Kawasan Biak, LSM KAMPAK, TAPAK Indonesia, BEM STKIP Biak, Lembaga Masyarakat Adat, Dewan Adat Papua Biak, pemuda adat, pemuda gereja hingga mama-mama Papua dan lainnya,” kata koordinator aksi, Maikel Awom kepada Jubi melalui panggilan telepon. Awom mengatakan pembentukan DOB yang saat ini di dorong oleh bupati tanpa koordinasi dan dukungan dari masyarakat. Menurut masyarakat, rencana pemekaran itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok elit tanpa melibatkan masyarakat akar rumput (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/masyarakat-biak-numfor-demo-tolak-dob-minta-bupati-fokus-pada-visi-misinya-saja/>).

10 Mei

Pihak kepolisian membubarkan paksa massa aksi di

Expo menggunakan tembakan gas air mata dan water canon. Massa aksi atas nama Petisi Rakyat Papua (PRP) menyuarakan penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) dan Otsus. “Kalian dikasih waktu 10 menit untuk membubarkan diri. Ade-ade lebih baik kembali pulang ke asrama. Aksi kalian hari tidak ada izin,” kata Kapolsek AKP Frengky Rumbiak kepada massa. Massa yang tergabung dalam PRP itu kocar-kacir akibat terkena semprotan water canon dan gas air mata. Masa berkumpul di Expo sejak pukul 8 pagi. Dari awal pihak kepolisian tidak memberikan izin dan mengancam akan membubarkan massa aksi. Walaupun pun demikian massa tetap menyampaikan aspirasi penolakan terhadap DOB dan Otsus. “Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua menolak DOB dan Otsus,” ujar salah satu perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi. Akan tetapi pada pukul 10 pagi akhirnya massa dibubarkan oleh pihak kepolisian secara paksa. Sejauh pantauan, tidak ada massa yang terluka mau pun ditangkap. Pasca aksi ini, aktivitas masyarakat di Expo kembali normal, begitu pula di kota Jayapura, Entrop, Kotaraja, dan Abe (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/di-expo-polisi-bubarkan-paksa-massa-aksi-tolak-dob-otsus/>).

11 Mei

- Rakyat Paniai yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) kembali menggelar aksi unjuk rasa di lapangan sepak bola Karel Gobai Enarotali, Rabu (11/5). Rencana awal untuk melakukan *long march* ke Kantor DPRD dan Bupati dibatalkan karena tidak mendapat izin dari Polres Paniai. Penanggung jawab aksi, Agus Mote mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan aksi tersebut guna menolak rencana pembentukan DOB dan pencabutan pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II di Papua. Mote

menegaskan, rakyat Papua dengan sadar menolak Otsus dan DOB di Papua, karena Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan politik bagi Papua. Berdasarkan UU Otsus, maka Jakarta mudah memproses pembentukan Provinsi Papua Barat serta memperluas kota/kabupaten, distrik, dan seterusnya. Menurutny, dampak konkret dari hal itu adalah makin meluasnya markas TNI dan Polri di wilayah-wilayah. “Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua, perampasan lahan, intimidasi dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia meraup keuntungan dari pajak eksploitasi Sumber Daya Alam dan manusia di Papua. [juga] Untuk memperluas eksploitasi sumber daya PT Aneka Tambang yang memaksa mengeksploitasi Sumber Daya Alam di Blok Wabu, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan sebagainya,” kata Agus Mote di hadapan ratusan rakyat Paniai, ketua dan anggota DPRD, serta aparat keamanan di lapangan sepak bola Karel Gobai Enarotali (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/tolak-pembentukan-dob-rakyat-paniai-demonstrasi-lagi/>).

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yahukimo menerima massa aksi yang menyampaikan aspirasi damai untuk menolak Otsus Jilid II dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Selasa (10/5). Dalam orasinya, para pedemo menyampaikan bahwa DOB dan Otsus jilid II merupakan agenda elit politik Papua yang diboncengi elit politik Jakarta. Aksi damai ini juga didukung oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo yang juga didukung oleh ribuan

rakyat Yahukimo dari 12 Suku yakni Yali, Hubla, Kimyal, Meek, Una Ukam, Ngalik, Korowai, Kopkaka, Intamaya, dan 4 sub suku yakni Yalimek, Hubngal, Hubyal, dan Yalkim serta sejumlah suku dari luar Yahukimo. Nifal Enggalim, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari KNPB Wilayah Yahukimo menyampaikan, mereka menuntut pemerintah mencabut Otsus Jilid II dan dengan tegas menolak Daerah Otonomi Baru, baik itu Kabupaten maupun Provinsi di wilayah Papua. “Tujuan demo hari ini untuk sampaikan isi hati rakyat Yahukimo. Pemerintah Pusat atau daerah jangan mengatasnamakan rakyat Yahukimo, itu stop minta pemekaran baru. Rakyat Yahukimo tidak pernah ke Jakarta dan ketemu DPR RI dan Presiden RI meminta Otsus dan DOB. Hari dibuktikan ribuan rakyat kita demo cabut Otsus Jilid II dan DOB,” kata Enggalim kepada Jubi di Dekai. Menurut Enggalim, Indonesia menetapkan secara sepihak DOB. “Tujuan kami ke sini menolak Otsus dan meminta hak demokrasi dan kami orang Papua juga ingin bebas (merdeka) seperti Indonesia juga bebas dari penjajahan atau kolonialisme. Kami minta DPRD Yahukimo menyampaikan aspirasi kami sampai ke Pusat (pemerintah Indonesia),” kata Enggalim (<https://jubi.id/headline/2022/ratusan-massa-kepung-kantor-dprd-yahukimo-mirin-aspirasi-penolakan-otsus-dan-dob-kami-terima/>).

03 Juni

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengatakan, hingga Jumat (3/6) malam, terdapat sedikitnya 20 orang luka-luka akibat kekerasan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat. “Di Sorong ada 10 yang luka-luka. Di Jayapura

ada 10 yang luka-luka,” kata Ketua LBH Papua, Emanuel Gobay kepada *kompas.com*, Jumat malam. Data ini didapat melalui pemantauan dan pendampingan yang dilakukan LBH Papua. Aksi ini diikuti lebih dari 2.000 orang, terdiri dari mahasiswa dan Orang Asli Papua (OAP) yang turun ke jalan. “Luka itu akibat pendekatan represif pihak keamanan terhadap massa aksi saat pembubaran aksi,” ia menambahkan. Sementara itu, polisi juga disebut sempat menahan beberapa orang dalam menangani aksi unjuk rasa ini. “Di Nabire ada 23 orang yang ditahan dan sorenya dikeluarkan, sedangkan di Jayapura ada 2 orang yang ditangkap dan sudah dikeluarkan,” jelas Emanuel. Namun, seperti diberitakan sebelumnya, kepolisian setempat menampik adanya korban. Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Victor Makbon mengatakan, aksi menyampaikan aspirasi penolakan rencana pembentukan DOB dibubarkan secara paksa karena tidak mengantongi izin (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/23515361/lbh-papua-sedikitnya-20-orang-terluka-dalam-demo-tolak-dob>).

- Pihak kepolisian membubarkan demonstrasi penolakan pemekaran yang digelar Petisi Rakyat Papua di Kota Jayapura pada Jumat (03/6). Setidaknya 2000 personil gabungan diterjunkan untuk membubarkan demonstrasi penolakan pemekaran. Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Victor Mackbon mengatakan kepolisian membubarkan massa demonstran karena akan mengganggu ketertiban umum. Pihaknya tidak pernah membatasi demonstrasi sehingga sudah mencoba memfasilitasi massa demonstran untuk diantar ke kantor DPR Papua sehingga aspirasi disampaikan lebih beretika dan bermartabat. “Sebagai Kapolresta akan kami fasilitasi dan kami lakukan itu. Padahal

kami sudah bilang kami akan fasilitasi ada lima mobil kami siapkan untuk mediasi dan antar ke DPR Papua. Tapi pagi-pagi mereka sudah menutup jalan,” kata Mackbon kepada wartawan di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura. Mackbon menyatakan aspirasi demonstrasi penolakan pemekaran yang dilaksanakan kelompok yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua bukanlah aspirasi murni masyarakat tetapi telah ditunggangi kelompok KNPB yang meminta referendum. Sehingga pihaknya berupaya melakukan pencegahan agar nantinya mereka tidak mengganggu lingkungan sekitar. “Ini bagian dari pencegahan. Kami kan himbau tidak ada yang melakukan demonstrasi tapi ada kelompok yang tidak paham apa yang polisi himbau. Mereka mengganggu ketertiban umum dan hak asasi orang lain,” ujarnya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/ini-alasan-polisi-bubarkan-aksi-prp-tolak-dob-otsus/>).

- Koordinator Umum Lapangan Petisi Rakyat Papua (PRP), Gerson Pigai mengatakan bahwa pihak kepolisian menangkap Koordinator Aksi Lapangan, Mikelda Petege dan Amiron Edowai di sekitar Gapura Uncen. Penangkapan dilakukan usai polisi membubarkan paksa aksi massa di depan kampus Uncen dan Kampus USTJ. “Kami mendapatkan informasi dari lapangan, mereka ditangkap usai polisi membubarkan aksi di dua titik yang sempat terjadi pemukulan,” katanya kepada Jubi saat ditemui di tempat aksi di Abepura, Jumat (03/6). Pigai mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi penangkapan dari pengunjung rasa yang saat itu bersama sama melakukan unjuk rasa di Kampus Uncen Abepura. “Setelah melacak informasi, barulah kami mengetahui, koordinator lapangan di titik Uncen Mikelda Petege ditangkap dan ditahan di Polres Jayapura,”

katanya. Koordinator Litigasi Koalisi Pengacara Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay membenarkan adanya penangkapan terhadap mahasiswa atas nama Mikelda Petege dan Edowai. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Abepura. Kapolsek sudah berkoordinasi dengan Polsek-Polsek tetangga dan Polres Kota Jayapura, terkait keberadaan dua mahasiswa yang ditangkap oleh aparat keamanan,” katanya (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/aksi-prp-tolak-dob-otsus-dua-mahasiswa-ditangkap-polisi/>).

- Petisi Rakyat Papua (PRP) menilai pihak kepolisian tidak memiliki alasan yang jelas untuk membubarkan aksi demonstrasi penolakan pemekaran dan Otsus Papua pada Jumat (03/6). Juru Bicara Petisi Rakyat Papua, Jefry Wenda mengatakan bahwa pihaknya sudah memenuhi semua persyaratan sesuai prosedur yang dimintai kepolisian. Namuntetapsaja, semua aksi demonstrasi di Expo, Perumnas 2 Waena, dan Uncen bawah dibubarkan pihak kepolisian. “Jadi di lapangan teman-teman bergerak jam enam pagi tapi dihadang dan dibubarkan,” kata Wenda kepada Jubi melalui sambungan telepon. Wenda mempertanyakan alasan pihak kepolisian membubarkan aksi mereka tanpa alasan yang jelas. Sebab aksi demonstrasi dilakukan secara damai akan tetapi polisi melakukan pemukulan terhadap massa demonstran penolakan pemekaran. “Masa aksi yang melakukan *long march* dari Perumnas 3 Waena dihadang dan dipukul. Korbannya itu saudara Yabet Tegei. Alasan polisi tidak jelas untuk melakukan pembubaran aksi kami hari ini,” katanya. Wenda menyatakan tetap akan mengumpulkan massa untuk melakukan *long march* dan menyerahkan aspirasi ke kantor DPR Papua. Salah satu koordinator aksi, Venus Kabak menyatakan masa aksi demonstrasi di

Perumnas 3 Waena membubarkan diri karena tidak mau ada korban. Ia melihat pihak kepolisian akan bersikap represif sehingga mengarahkan masa untuk berkumpul di Asrama Paniai (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/prp-polisi-tidak-punya-alasan-jelas-bubarkan-aksi-tolak-pemekaran/>).

29 Juni

Terkait rencana pengumuman pengesahan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Juni 2022, Polres Jayawijaya telah menyiapkan ratusan personel keamanan gabungan untuk mengamankan agenda tersebut. Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safe'i A.B mengatakan bahwa secara khusus wilayah Jayawijaya mendapat penebalan pasukan dari satuan Brimob Mabes Polri sebanyak 300 personel. "Dari Polres sendiri selama ini kita melakukan kesiapan setiap kali ada aksi, menyiapkan kurang lebih 187 personel. Lalu dari TNI kita minta 1 SSK," kata kapolres usai apel gelar pasukan, Rabu (29/6), di depan Tugu Salib Wamena. Ia juga menyebutkan bahwa secara umum pemerintah daerah telah memberikan instruksi kepada setiap jajarannya di tingkat distrik dan kampung untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kapolres mengaku sejauh ini situasi jelang pengumuman pengesahan DOB masih kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya karena polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. "Semoga terkendali sampai seterusnya karena ini kebijakan pusat di mana di tingkatan provinsi pun telah memberikan dukungan politiknya terkait DOB ini sehingga harapannya masyarakat harus mendengar pimpinan yang ada," katanya (<https://jubi.id/kabupaten-jayawijaya/2022/ratusan-personel-keamanan-siap-amankan-rencana-pengumuman-dob-di-jayawijaya/>).

25 Juli

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan bahwa persidangan bagi kliennya, Viktor Yeimo belum ada titik terang sampai saat ini. Selain itu, ruang tahanan bagi Viktor belum ada perbaikan sehingga pihaknya meminta agar Viktor dapat dijadikan tahanan kota. "Kami sudah siapkan tempat penahanan klien kami yaitu di kantor Klasis KINGMI di Kota Jayapura. Ruangan di situ cukup bagus bagi terdakwa yang saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatannya. Kami akan menyetujui sidang lanjutan kalau ruang tahanan untuk Viktor diperbaiki karena berpengaruh pada kesehatannya," tegas Emanuel Gobay pada Minggu, 24 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

26 Juli

Menanggapi pertanyaan kuasa hukum Viktor Yeimo terkait kelanjutan persidangan dan agar Viktor Yeimo dijadikan tahanan kota, Kepala Pengadilan Kelas 1 A Jayapura, Edy Soeprayitno S. Putra mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dokter yang merawat Victor Yeimo. Sedangkan terkait permintaan agar Viktor Yeimo menjadi tahanan kota, ia menjelaskan bahwa saat ini penahanan Viktor sudah sesuai KUHP tinggal bagaimana pihak Lapas melaksanakan rekomendasi dari rumah sakit berkaitan dengan ruangan tahanan terdakwa yang saat ini sedang sakit. "Penahanan Viktor Yeimo sudah melalui musyawarah antara ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim. Jadi keputusan awal itu tidak bisa diubah. Saat ini, kita perlu memikirkan Kesehatan terdakwa, sedangkan terkait penahanan semuanya jelas mempertimbangkan sisi positifnya dan pihak Lapas harus perbaiki ruangan tahanan untuk Viktor Yeimo," tegas Edy di Jayapura pada Senin, 25 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

29 Juli

Puluhan mahasiswa yang menggelar demonstrasi penolakan pemekaran di depan gerbang kampus Uncen Jayapura pada Jumat (29/7) akhirnya bubar. Mereka membubarkan diri lantaran pihak kepolisian tidak memberikan izin massa berpawai ke kantor DPRD Papua. Demonstrasi para mahasiswa itu merupakan bagian dari demonstrasi menolak pemekaran Papua yang dimobilisasi oleh Petisi Rakyat Papua. Para mahasiswa itu membawa spanduk dengan tulisan “Cabut Otsus, Tolak DOB, dan Gelar Referendum”.

Para demonstran itu juga membawa berbagai poster, yang antara lain bertuliskan “DOB surga bagi Jakarta (tapi) neraka bagi Papua, maka berikan hak politik yang menjamin kehidupan manusia Papua”. Sebelum turun ke gerbang Uncen Waena, massa sempat berorasi di depan jalan masuk kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas 3, Waena. Massa aksi menilai pemekaran tidak akan memberikan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua. Sekitar pukul 10.30, massa demonstrasi mulai bergerak turun dari kampus menuju gerbang Uncen Waena sambil berorasi. Mereka juga mengajak teman-teman di fakultas lain untuk berunjuk rasa. “Bagi mahasiswa yang benar-benar paham dengan kondisi masyarakat Papua mari kawan-kawan bergabung. Karena rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru bukan untuk menyejahterakan Orang Asli Papua tetapi membunuh Orang Asli Papua,” kata salah seorang orator, Muru Wonda. Massa kemudian bergerak ke gerbang Universitas Cenderawasih dan berorasi. Sementara polisi berjaga di depan gerbang Uncen Waena. Polisi menempatkan sejumlah kendaraan di jalan menuju kampus Uncen sekitar 10 kendaraan baik truk, *watercanon*, kendaraan taktis, dan kendaraan lain (<https://jubi.id/tanah-papua/2022/polisi-tidak-izinkan-pawai-massa-demonstrasi-tolak-pemekaran-di-kampus-uncen-bubar/>).

16 Agustus

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan bahwa dalam rangka memperingati New York Agreement, 15 Agustus 2022, Kunume Numbay menggelar mimbar bebas di Jalan Lembah Bahari Dok 5 Atas, tetapi kegiatan tersebut dibubarkan oleh polisi. “Lima orang ditangkap oleh polisi yaitu Jimmy Boroway, Regina Wenda, Brus Sangkek, Roy Haluk, dan Mina Tabuni. Mereka dibawa ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan,” tutur Emanuel Gobay. (Cenderawasih Pos).

Korupsi dan Kemiskinan di Papua

— Yuliana Langowuyo

Berkaca kepada catatan kronologi sepanjang tahun 2022, dapat terlihat bahwa kasus-kasus korupsi pun mewarnai kompleksitas permasalahan di Papua. Terkesan, korupsi hanyalah masalah kecil di Papua dibandingkan dengan masalah kemanusiaan lainnya seperti konflik bersenjata, militerisasi, maupun investasi. Pemberitaan media pada tahun 2022 juga banyak mengangkat soal pro kontra otonomi khusus jilid dua dan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Perhatian publik di Papua menjadi lebih serius ketika muncul kasus korupsi Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi dan penetapannya diwarnai demonstrasi massa dan pemalangan fasilitas umum di Kobakma pada Sabtu, 9 Juli 2022. Kasus kedua yang menarik perhatian publik lebih luas adalah kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi sejak 5 September 2022 dalam dugaan kasus gratifikasi. Lukas disebut menerima uang 1 miliar lewat transferan dari seorang pengusaha pada tahun 2020.

Pasca penetapan tersangka, hal menarik untuk diikuti adalah gerakan massa yang membela pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Muncul pertanyaan, apakah korupsi tidak dianggap berbahaya? Apakah masyarakat mempunyai



pengetahuan yang cukup tentang apa dampak korupsi? Bagaimana kita bisa membiarkan begitu saja korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tatkalamerekalah yang bertanggungjawab memastikan bahwa rakyat mendapatkan hak-haknya dengan baik?

Negara berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negaranya. Pejabat publik adalah wujud nyata negara yang harus hadir dan menerjemahkan kewajiban negara dalam kebijakan-kebijakan publik untuk memastikan rakyat sejahtera. Apakah situasi ini bisa terwujud jika pejabat negara memiliki mental korup? Apalagi masih banyak fakta layanan pendidikan dan kesehatan yang buruk di Papua, angka buta aksara yang tinggi, kasus kematian ibu anak, kematian karena penyakit endemik, gizi buruk, campak, dan banyak contoh kasus pengabaian hak-hak dasar masyarakat. Di sisi lain Provinsi Papua tidak kekurangan uang dengan adanya kebijakan otonomi khusus.

Fakta-fakta tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dapat dilihat sebagai dampak dari korupsi. Korupsi melunturkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga publik, pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Korupsi berujung pada tidak terpenuhi dan terlindungnya Hak Asasi Manusia. Korupsi melahirkan kemiskinan, penyakit sosial, dan dampak buruk lainnya. Korupsi menyebabkan pejabat negara melayani kepentingan “pemberi mahar”, dengan siapa, kelompok mana transaksi itu terjadi.

Dalam kotbah yang disampaikan pada tahun 2013, Paus Fransiskus mengecam korupsi sebagai kejahatan yang patut dihukum. Pelaku korupsi dikecam dan orang tua yang menghidupi anak dan keluarga dengan uang korupsi kehilangan martabat manusiawinya dan menghidupi anak mereka dengan roti najis. Kejahatan korupsi sepertinya terjadi di mana-mana

dan mereka yang korup sebenarnya hanya mengulang apa yang biasa dilakukan. Ya, memang benar itulah kenyataannya, tetapi kejahatan korupsi hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang dan karena itu jumlahnya tidak banyak, tetapi dampak buruk perbuatan mereka menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama dalam masyarakat. “Orang-orang malang ini (baca: koruptor) kehilangan martabatnya karena mencuri, sesungguhnya tidak mendapatkan uang, tetapi kehilangan martabat”. Korupsi adalah “dosa tangan”, kata Paus, artinya dosa yang terjadi karena menggenggam kekuasaan berada pada posisi serta wewenang menentukan (Bdk. Homili Paus Fransiskus, 11 November 2013). Oleh karena itu, Peter. C. Aman OFM, menegaskan bahwa korupsi mesti dicanangkan sebagai musuh nomor satu gereja, karena bertentangan dengan perintah Injil. Kita semestinya memiliki tekad yang teguh untuk memberantas korupsi, dengan berlaku jujur, tidak menyelewengkan kekuasaan demi kepentingan diri, keluarga, atau kelompok dan berani menolak ajakan untuk melakukan korupsi.²⁰

Semua agama dan keyakinan, dalam ajarannya pasti menolak dan melawan korupsi. Ajaran, nilai-nilai hidup baik, masih ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana mendaratkan nilai-nilai anti korupsi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini adalah misi yang perlu dikerjakan secara serius oleh semua pihak baik institusi agama, adat, maupun kelompok masyarakat sipil yang meyakini bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, melahirkan penindasan, dan situasi hidup yang tidak adil bagi kaum kecil, miskin, dan menderita. Meskipun kita semua tahu dan menyadari banyak dan kompleksnya permasalahan di Papua, tetapi kita tidak bisa menyepelekan masalah korupsi yang

20 <https://flores.co/2017/05/11/gereja-dan-pemberantasan-korupsi/>

terjadi dalam semua tingkatan pemerintahannya kita. Mulai dari aparat kampung, instansi-instansi pemerintahan, hingga tingkat eksekutif dan legislatif. Gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan bersama dengan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang perlu kekuatan massa untuk melawannya dengan strategi advokasi yang tepat.

Bertolak dari kenyataan di atas, kami hendak merekomendasikan beberapa hal:

1. Mendukung dan mendorong lembaga negara yang bertanggungjawab pada isu korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, hendaknya bekerja dengan profesional dan memperlakukan penegakan hukum di Papua secara adil dan sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. KPK hendaknya bekerja secara independen dan transparan pada proses hukum, karena publik mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
2. Mendorong lembaga-lembaga agama untuk menjadikan korupsi sebagai masalah moral yang sangat serius yang berdampak pada rusaknya kehidupan umat manusia. Mendorong semangat anti korupsi dalam hidup umat beragama dan solidaritas lintas iman untuk memerangi korupsi.
3. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadikan gerakan anti korupsi sebagai pelajaran yang penting untuk dipelajari di sekolah dan dihidupi oleh anak-anak di bangku sekolah. Membagikan nilai-nilai hidup baik, termasuk nilai anti korupsi.
4. Mendorong lembaga-lembaga masyarakat sipil yang ahli pada bidang korupsi, untuk melakukan kampanye publik kepada masyarakat sipil dengan materi-materi dampak korupsi pada Hak Asasi Manusia.

Kronik Korupsi

05 Januari

Sepanjang tahun 2021, Pihak Polres Jayawijaya telah menangani dua kasus dugaan korupsi yaitu penyalahgunaan dana kampung di dua desa di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safei, informasi penyalahgunaan dana kampung itu diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat (Koran Jubi Edisi 5 – 6 Januari).

17 Januari

Pihak Kejaksaan Tinggi Papua mengklaim telah menyelamatkan dana sekitar 17,4 miliar dari penanganan kasus korupsi pada tahun 2021. Penyelamatan dana Negara yang terbesar adalah dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya sekitar 9,8 miliar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo (Koran Jubi Edisi 17 – 18 Januari).

19 Januari

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat dan kontraktor Kabupaten Pegunungan Arfak, Selasa 18 Januari 2022. Sebanyak 20 orang menjalani pemeriksaan. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh KPK pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, KPK menetapkan Sukiman dan Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, Natan Pasomba sebagai tersangka (Koran Jubi Edisi 19 – 20 Januari).

16 April

Kepolisian Resort Waropen resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi pembangunan asrama putra Waropen di kota Jayapura. Dana yang dikorupsi itu berasal

dari anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 sebesar, Rp 5.575.000.000, dengan realisasi 100%, tetapi realisasi pembangunan 0%. Ketiga orang tersangka tersebut adalah kontraktor pelaksana berinisial SS; pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berinisial ML dan SSR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Ketiga pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami terus mengembangkan kasusnya. Menurut perhitungan dari BPKP Perwakilan Papua jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.873.535.369, yang mana telah dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar, Rp 1.769.100.000,” tegas Kapolres Waropen, AKBP Naharuddin pada Rabu, 12 April 2022 (Cenderawasih Pos).

25 April

- Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Radot Parulian mengatakan bahwa sidang kasus korupsi mantan Sekda Mappi, dr. Ricky Bolang di Pengadilan Tipikor Jayapura memasuki pemeriksaan saksi ahli. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. “Untuk sidang mantan Sekda Mappi, saat ini memasuki pemeriksaan saksi ahli,” tutur Radot Parulian di Merauke pada Jumat, 22 April 2022. (Cenderawasih Pos).
- Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Arnes Tomasila mengatakan bahwa berkas dan tersangka kasus korupsi dana kampung Pugima, Distrik Walelagama, Dangkius Molama telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura. “Kami sudah limpahkan tersangka korupsi Dana Kampung Pugima tahun 2018-2019 kepada Pengadilan Tipikor Jayapura pada 31 Maret 2022. Kami tinggal menunggu waktu persidangan dari majelis hakim

Tipikor di Jayapura,” tutur Arnes Tomasila di Wamena pada Sabtu, 23 April 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, Sugiyanto mengatakan sidang kasus terdakwa mantan Sekda Mappi, dr. Ricky Bolang masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jayapura. Ia menjelaskan kerugian negara akibat korupsi dana Bansos tahun 2014, yang dianggarkan di Setda Mappi ini sebesar Rp 10 miliar. “Saat ini sudah ada 3 orang saksi ahli dimintai keterangan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Pemeriksaan saksi ahli setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian, akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa,” tutur Sugiyanto pada Selasa, 24 Mei 2022 di Merauke (Cenderawasih Pos).

18 Juni

- Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jayapura menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan Trimuris-Kasanoweja sepanjang 3,5 km dengan nilai kontrak 5.715.562.500 pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2019 yang dikerjakan oleh CV. IPP berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor X Print 01/R.1.10/Fd.1/06/2013 tanggal 13 Juni 2022. “Perkiraan penyidik kerugian sekitar 3,5 miliar dari nilai kontrak proyek 5,7 miliar. Uang diambil, tetapi pekerjaan jalan tidak dilaksanakan,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, L. Alexander Sinuraya di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, pada Jumat, 17 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).
- Polda Papua sedang mengusut kasus korupsi di DPR Paniai

yang melibatkan 25 anggota DPRD, 3 staf dan Sekwan DPRD Kabupaten Paniai. Direktur Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Fernando Sanches Napitulu mengatakan bahwa kasus korupsi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai kerugian negara sebesar 59 miliar. “Kasus bermula dari tahun 2018. Ada dana APBD yang dibagi-bagikan, tanpa melaksanakan kegiatan dan ada 14 orang sudah jadi tersangka, dengan rincian 13 mantan anggota DPRD dan 1 orang Sekwan DPRD Paniai,” tutur Kombes Fernando Sanches Napitulu pada Jumat, 17 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Juni

Terkait dugaan proyek fiktif pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik Saluran Kabel Bawah Tanah Menengah (SKBTM) di Pegunungan Bintang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2017-2018, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat penyidikan dengan Sprindik No: Print-02/R.1/FD.1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022. Ia menjelaskan anggaran kegiatan pengadaan pemasangan kabel bawah tanah senilai 40 miliar diduga fiktif. “Ada tujuh saksi yang kami periksa, ternyata pekerjaan ini tidak diselesaikan dan speknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu, ada audit dari BPK dan Inspektorat yang menyebutkan bahwa pekerjaan ini fiktif. Kami melakukan *crosscek* dan ternyata betul, makanya kami tingkatkan ke penyidikan untuk menetapkan pelakunya,” tutur Nikolaus Kondomo pada Kamis, 23 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Juli

Massa pendukung Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak menggelar demonstrasi di halaman Mapolres Mamberamo Tengah, pada Sabtu, 9 Juli 2022 menuntut jawaban atas penetapan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi. Selain menyampaikan orasi, massa juga melakukan pemalangan terhadap kantor pemerintah, ruas jalan, dan pasar. Akibat demonstrasi tersebut, warga Nusantara yang berada di Kobakma memilih meninggalkan Kobakma dan pergi ke Wamena. Koordinator lapangan forum peduli RHP, Hengky D. Jikwa mengatakan pihaknya melakukan orasi di halaman Mapolres dan melakukan pemalangan lantaran pernyataan massa pada 13 Juni 2022 belum direspon sampai saat ini. “Massa melakukan pemalangan di sejumlah objek penting yang ada di Ibu kota kabupaten ini, karena pernyataan kami belum dijawab. Seluruh ASN Nusantara di Mamberamo Tengah kami pulangkan. Tidak boleh ada aktivitas dulu,” tegas Hengky D. Jikwa. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kemal mengatakan bahwa kondisi kamtibmas di Mamberamo Tengah relatif aman. Ia menjelaskan demonstrasi dilakukan di halaman Mapolres Mamberamo Tengah. “Penyampaian aspirasi dilakukan secara bergantian yang intinya menolak keputusan KPK RI atas penetapan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi,” tegas Kemal (Cenderawasih Pos).

12 Juli

Penetapan tersangka kasus korupsi dan gratifikasi kepada Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak memicu massa melakukan demonstrasi dan pemalangan fasilitas umum di Kobakma pada Sabtu, 9 Juli 2022. Menyikapi situasi tersebut Kapolda Papua, Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya telah

mengirim satu kompi Brimob ke Kobakma, dan akan menyusul lagi dua kompi Brimob untuk pengamanan di Kobakma. “Kami akan mengirim tim khusus untuk menyelidiki aksi pemalangan fasilitas publik di Kobakma. Pemalangan fasilitas umum itu tidak dibenarkan, karena mengganggu keamanan. Selain itu, kami dari pejabat utama Polda juga akan ke sana untuk melakukan evaluasi situasi di Kobakma,” tegas Matius Fakhiri di Jayapura, pada Senin, 11 Juli 2022. Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, “Tidak boleh mengancam. Silakan saja masyarakat melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas, tetapi mereka harus tertib hukum, dan menghindari perbuatan anarkis, apa lagi sampai mau menyerang warga lainnya” (Cenderawasih Pos).

14 Juli

Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak melalui rilis resminya pada Rabu, 13 Juli 2022 meminta seluruh ASN, pedagang, dan tukang yang telah keluar dari Mamberamo Tengah untuk segera kembali dan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. “Sebagai Bupati, saya berharap terlebih khusus kepada ASN, para pimpinan OPD yang sudah terlanjur ada di luar, diharapkan pada hari Sabtu dan Minggu sudah bisa kembali ke ibu kota kabupaten Mamberamo Tengah sehingga tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” tutur Ricky Ham Pagawak. Ia menjelaskan berdirinya Kabupaten Mamberamo Tengah direkomendasikan dan diperjuangkan oleh Gereja, termasuk dirinya menjadi Bupati karena mendapat mandat dari Gereja. Maka, isu tindakan brutal, merugikan orang lain, apa lagi menghilangkan nyawa orang lain adalah tidak benar karena Mamberamo Tengah merupakan tempat Injil (Cenderawasih Pos).

19 Juli

- Salah satu tokoh agama di Papua, Pdt. Catto Y. Mauri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus di Papua. Ia menegaskan bahwa KPK tidak boleh melakukan pembunuhan karakter terhadap figur-figur pemimpin Papua. Sebelumnya, pada 14 Juli 2022, tokoh agama di Papua telah melakukan pertemuan dengan Ketua KPK RI, Firli Bahuri. “Kami minta KPK tidak melakukan kriminalisasi menjelang Pilkada, termasuk tidak melakukan politisasi terhadap pemimpin Papua yang mengkritisi program pemerintah pusat. KPK harus tetap berada di jalur pemberantasan korupsi,” tegas Pdt. Catto Y. Mauri di Jayapura pada Senin, 17 Juli 2022. Ia menambahkan bahwa penetapan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus gratifikasi dan korupsi oleh KPK sangat aneh karena hanya berselang dua hari setelah Ricky Ham Pagawak menerima aspirasi masyarakat terkait penolakan DOB di Provinsi Papua (Cenderawasih Pos).
- Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Doren Wakerkwa membuka kegiatan pelatihan calon Penyuluh Anti Korupsi (Pelopor) Provinsi Papua, pada Senin, 18 Juli 2022 di Jayapura. Gubernur Enembe dalam sambutannya mengatakan, korupsi merupakan momok yang menakutkan dan membahayakan pembangunan serta menurunkan tingkat kebahagiaan di suatu negara. “Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa kerja sendiri. KPK melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Melalui

kegiatan ini kita harapkan lahirnya penyuluh masyarakat anti korupsi yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat, dan kemampuan untuk menyampaikan nilai anti korupsi, meyakinkan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan kelompok sasaran untuk berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegas Gubernur Enembe yang dibacakan oleh Doren Wakerkwa (Cenderawasih Pos).

08 September

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak main-main menumpas korupsi di Papua. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ditangkap di Jayapura pada Rabu (7/9). Bupati Omaleng ditangkap di Swissbell Hotel Jayapura sekitar pukul 11.30 WIT. Omaleng sempat menolak saat akan ditangkap bahkan sempat beradu argumen sekitar setengah jam hingga akhirnya ia pun turut untuk dibawa ke Mako Brimob. Penyidik KPK meminta Bupati Omaleng diminta keterangan seputar pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Timika (Cenderawasih Pos).

13 September

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan ini dilakukan sejak 5 September 2022 lalu dalam dugaan kasus gratifikasi. Namun informasi soal status tersangka ini baru diketahui Gubernur pada 8 September 2022. Lukas disebut menerima uang 1 miliar lewat transferan dari seorang pengusaha pada tahun 2020. Dari transferan inilah Gubernur dianggap melakukan gratifikasi. Koordinator kuasa hukum Gubernur Papua mempertanyakan dasar penetapan status tersangka tersebut. “Penetapan tersangka yang dilakukan

penyidik KPK terhadap Gubernur Papua prematur. Kenapa demikian? Karena Gubernur Lukas Enembe sama sekali belum didengar keterangannya sehingga ini bertentangan dengan KUHAP, dimana untuk menetapkan seorang tersangka syaratnya harus ada alat bukti dan harus didengar keterangannya,” kata Stefanus kepada wartawan usai menyerahkan berkas kondisi Lukas Enembe yang sedang sakit kepada penyidik KPK di Mako Brimob, Senin (12/9) (Cenderawasih Pos).

15 September

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Solota Sukses Membangun (SSM), Marthen Toding (MT) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah Papua. MT bersama Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR), Simon Pampang (SP) Dan direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang (JPP) merupakan tersangka pemberi suap kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dalam kasus tersebut. “Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka MT selama 2 hari pertama terhitung 14 September sampai dengan 3 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Kavling C 1,” kata wakil ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/9). Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu menahan tersangka SP dan JPP sejak 8 September sampai dengan 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur (Cenderawasih Pos).

21 September

Rencana Koalisi Rakyat Papua (KRP) untuk melakukan aksi demo pembelaan terhadap Gubernur Lukas Enembe dari status

tersangka yang disematkan oleh KPK dibuktikan. Sekitar 1000 orang berkumpul di Taman Imbi Jayapura untuk menyampaikan sikap mereka. Di hadapan sejumlah anggota DPR Papua yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD, Dr. Yunus Wonda Otniel Beda selaku koordinator KRP membacakan lima poin pernyataan sikap. Dari 5 poin ini tersirat ada ancaman yang ditujukan kepada KPK apabila tidak segera mencabut status tersangka Gubernur Lukas Enembe. “Kami ingatkan bahwa penetapan tersangka ini bisa melahirkan implikasi buruk atau konflik horizontal di tengah masyarakat Papua yang saat ini hidup dalam keadaan damai dan harmonis,” beber Otniel (Cenderawasih Pos).

23 September

Melihat kondisi Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sedang dalam kondisi sakit dan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK, maka Dr. A.G. Socrates Yoman, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) mengaku melayangkan surat terbuka ke Presiden RI Joko Widodo. “Doa saya, surat terbuka yang singkat ini mengetuk hati nurani Bapak Ir Joko Widodo Presiden dan Bapak Ma’ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia,” katanya (Cenderawasih Pos).

24 September

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama ikut menyoroti kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK jangan jadi alat mendelegitimasi kepala daerah dengan kewenangannya, lakukan asas praduga tidak bersalah agar jangan akhirnya yang dirugikan rakyat, seperti apa yang terjadi di Papua sekarang ini,” Kata Harris melalui rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (23/9) (Cenderawasih Pos).

27 September

- Gubernur Papua, Lukas Enembe belum dapat memenuhi panggilan kedua dari KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Rp 1 M. “Beliau (Gubernur) masih istirahat di rumah Koya,” kata Juru Bicara Gubernur Papua M. Rifai Darus melalui pesan WhatsAppnya kepada Cenderawasih Pos, Senin 9/26/9) (Cenderawasih Pos).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memastikan kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hal ini setelah pihak pengacara Lukas Enembe beralasan bahwa kliennya tersebut sedang sakit. “Kami sudah memerintahkan agar koordinasi dengan IDI untuk menarik Pak Lukas mungkin di Jayapura. Apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri, nggak ada dokter di Indonesia misalnya yang mampu untuk mengobati sakit yang bersangkutan,” ungkap wakil ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (26/ 9) (Cenderawasih Pos).
- Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus menyebutkan hingga kini penyidik KPK masih dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan Gubernur Lukas Enembe, melalui kuasa hukumnya. “Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah tegas menyampaikan bahwa beliau akan menghadapi kasus ini dan tidak akan kabur ataupun hilang. Bapak Lukas Enembe konsisten untuk memilih terus kooperatif dengan catatan negara juga memperhatikan kondisi kesehatan beliau dalam rangka mempertahankan hak hidupnya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi,” tegas M. Rifai. Rifai menyampaikan bahwa Lukas Enembe dan tim hukumnya serta seluruh

jajaran menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia dengan tetap memperhatikan budaya, karakteristik serta kehendak dari masyarakat Papua dalam menghadapi masalah ini (Cenderawasih Pos).

28 September

Pada 19 Januari 2022 lalu, tim penyidik KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap puluhan orang sebagai saksi diantaranya merupakan pejabat Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak. Berdasarkan data sebelumnya, pada Oktober 2018 tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan daerah dan kontraktor asal Kabupaten Pegunungan Arfak. Setelah setahun itu, pada Juni 2019 KPK RI menetapkan pejabat Kepala Dinas PU Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba bersama anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014/2019 Sukiman sebagai tersangka (Cenderawasih Pos).

29 September

Melalui sambungan telepon seluler Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berkomunikasi dengan direktur penyidik KPK, Asep Guntur, Rabu (28/9). Percakapan tersebut disaksikan langsung oleh ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya. “Dalam pertemuan antara gubernur dan Komnas HAM RI, di mana Gubernur menyampaikan situasi yang dihadapinya selama ini dari tekanan politik di hadapan Komnas HAM, Gubernur juga menyampaikan tidak bisa terlalu banyak duduk,” kata kuasa hukum gubernur, Dr. Stevanus Roy Rening, Rabu (28/9) malam (Cenderawasih Pos).

30 September

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di rumah pribadinya di Koya, Rabu (28/9) malam. Ketua Komnas HAM juga mengaku dalam kunjungannya ke rumah Gubernur Papua sempat bertemu dengan warga yang sudah berlari hari-hari berada di rumah Lukas Enembe. Namun Komnas HAM sendiri tidak akan masuk ke dalam ranah hukum sehingga proses hukum yang sedang dijalankan KPK sepenuhnya menjadi wewenang KPK. “Kami mengajak semua pihak termasuk Lukas Enembe dan keluarganya untuk menghormati proses hukum dan apa yang disampaikan delegasi masyarakat Papua sudah kami sampaikan kepada Mahfud MD,” ungkapnya (Cenderawasih Pos).

05-06 Oktober

Sebanyak 32 tokoh gereja dari berbagai denominasi gereja di Tanah Papua mengunjungi Gubernur Papua, Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Kota Jayapura, Selasa (04/10/2022). Perwakilan denominasi gereja-gereja itu berkunjung dengan tujuan melihat kondisi Gubernur Enembe dan memberikan dukungan moral kepada Enembe yang sedang menghadapi tuduhan gratifikasi hingga korupsi. “Saya masih belum bisa bicara dengan jelas dan jalan normal. Kalau berdiri juga masih sakit dan tidak bisa lama,” kata Gubernur Enembe setelah mengucapkan terimakasih kepada para pemimpin dan tokoh gereja. Gubernur Enembe lalu menerangkan tentang tuduhan gratifikasi hingga korupsi. Enembe menegaskan bahwa yang ia hadapi saat ini sudah berlangsung sejak tahun 2017. Dimana ia sempat dijebak Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, hendak dicelakai hingga dibuntuti ke mana-mana. Hendak berobat pun ia sempat dihalang-halangi. “Pernah sekali

saya mau berobat, nama saya hilang dari manifes penerbangan,” pungkask Enembe. Para pemimpin gereja bersimpati terhadap kondisi yang dialami Enembe. Mereka sepakat bahwa Enembe mestinya menjalani perawatan hingga pulih dan setelah itu baru dia melanjutkan proses hukum atas tuduhan gratifikasi hingga korupsi (Koran Jubi Edisi 05-06 Oktober).

07-08 Oktober

Kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, Roy Stephanus Rening menilai KPK terlalu memaksakan proses hukum dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi atau suap senilai Rp1 Miliar yang disangkakan kepada Lukas Enembe. Hal itu dinyatakan Rening di kota Jayapura(5/10/2022). “Jadi penetapan tersangka Pak Lukas ini berkaitan dengan dana transfer Rp 1 miliar, sekarang KPK mengembangkan ke pramugari itu perkara apa? Apakah itu sudah lari ke perkara yang lain? atau KPK sudah mengigau?” kata Rening. “KPK seharusnya fokus kepada pembuktian tentang gratifikasi. Kalau KPK memeriksa pramugari ini terkait delik korupsi yang mana?” ujarnya. Sebanayak 40 pengacara akan mengawal kasus yang dialami Gubernur Papua, Lukas Enembe. Itu dilakukan untuk mengawal tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi (Koran Jubi Edisi 07-08 Oktober).

10-11 Oktober

Dewan Adat Papua versi Wamena mengukuhkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua, Sabtu (9/10) di kediaman pribadi Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Ketua Dewan Adat Papua versi Wamena, Dominikus Sorabut mengatakan, hal ini merupakan proses organisatoris

DAP yang telah menggelar pleno resmi ke-11 di Jayapura, serta pandangan seluruh pimpinan 7 wilayah adat di Papua. “Kami tidak disogok Oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil Nurani untuk Ibu Pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua,” kata Dominikus Sorabut. Pengukuhan tersebut dilakukan dalam mekanisme pleno dewan adat Papua yang telah diputuskan dan mengikat, Secara alam dan Tuhan juga merestui itu. “Kami tidak datang sendirian dimana proses itu kami sudah lakukan secara adat hingga memberikan mahkota sebagai pemimpin besar Papua,” katanya. (Koran Jubi Edisi 10-11 Oktober).

04 November

- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Jayapura, Rabu (2/11) dalam rangka proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Gubernur Lukas Enembe. Tim KPK berjumlah 15 orang. Kuasa Hukum Gubernur, Roy Rening menyampaikan, selama KPK belum memberikan keterangan pers yang terbuka, pihaknya tidak mau menanggapi. Pasalnya, sampai kini belum ada pemberitahuan resmi dari tim KPK akan tujuan kedatangan mereka. Selain itu belum ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak Kapolda dalam kasus ini. “Kami sampai hari ini belum mendapat surat resmi dari KPK sehubungan dengan kehadiran mereka dalam kaitan pemeriksaan Gubernur Papua. Harusnya Kuasa Hukum dan pihak keluarga mendapatkan surat resmi soal kedatangan mereka agar tidak ada spekulasi,” pungkasnya (Cenderawasih Pos).
- Akhirnya KPK berhasil mendarat di Papua dan menyambangi kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe di Koya Tengah

Distrik Muara Tami, Kamis (3/11). Yang KPK lakukan adalah penegakan hukum, meminta keterangan baik sebagai saksi maupun tersangka dan dikatakan semua proses tersebut lancar, tidak ada hambatan apapun. “Beliau (Lukas Enembe) kooperatif,” terang Ketua KPK. “Lalu kami mau sampaikan bahwa ini adalah proses hukum dan tak ada proses lain selain hukum yang terjadi di KPK. Tak ada politisasi, tak ada opini dan tak ada kriminalisasi,” tegasnya (Cenderawasih Pos).

05 November

Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang/jasa lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah, Papua ke penuntut umum agar dapat segera disidangkan. “Hari ini telah selesai dilaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka SP dan awan-kawan dari tim penyelidik kepada tim jaksa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta. Tahap II tersebut dilakukan karena berkas penyelidik untuk tiga tersangka, yaitu SP, JPP, dan MT dinyatakan lengkap oleh tim jaksa,” lanjutnya (Cenderawasih Pos).

11 November

Tim penyelidik KPK telah melakukan pengeledahan pada dua lokasi di wilayah Jakarta, Rabu (9/11). Pengeledahan itu terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. “Tim penyelidik KPK dalam perkara dengan tersangka LE (Lukas Enembe), telah selesai melakukan pengeledahan di dua lokasi berbeda di Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/11). Pengeledahan ini dilakukan di kediaman rumah

Lukas Enembe dan sebuah apartemen. “Ditemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang cash dalam bentuk rupiah, dan juga emas batangan,” ucap Ali Fikri. Akibatnya Tim Penyelidik pun melakukan pemblokiran ATM milik Gubernur dan keluarganya. Namun tidak lanjutnya berupa penangkapan LE belum terlaksana (Cenderawasih Pos).

15 November

Kehadiran tim KPK di Tanah Papua yang telah memeriksa dan terus mengusut dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan harapan besar kepada generasi muda Papua. “Kalau dengan kasusnya pak Lukas Enembe ini (KPK) berhasil, jelas, pemuda juga kan nanti merasakan positifnya dari kerja KPK selama ini di Tanah Papua yaitu Papua Tanah Korupsi,” harap Jhon Mokay, Humas Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARAPEN) Papua (Cenderawasih Pos).

19 November

Tim Hukum dan Advokat Gubernur Papua melayangkan surat klarifikasi ke KPK pasca pemanggilan dua anggotanya, Stevanus Roy Rening dan Aloisius Renwarin oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah oleh Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023. “Untuk pemanggilan yang telah dijadwalkan kami menolak untuk memberikan keterangan sebelum ada ketetapan dari organisasi Profesi dalam hal ini PERADI Rumah Bersama Advokat tentang perlu tidaknya pihaknya memberikan keterangan sebagai saksi. Kami juga mempertanyakan pemanggilan mereka berdua sebagai saksi dalam kasus hukum Gubernur Papua yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Hal tersebut

tertera secara tegas dalam Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003,” ucap Roy (Cenderawasih Pos).

23 November

Tim Hukum dan Advokat Gubernur Papua memastikan akan datang menghadiri pemeriksaan di Gedung KPK. Sebelumnya KPK mengancam untuk menjemput paksa pengacara Lukas Enembe. “Kami akan hadir dalam panggilan pemeriksaan selanjutnya di Gedung KPK. Sebagai warga Negara yang baik dan advokat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kami akan datang, sebagai bukti ketaatan dan penghormatan kami atas hukum,” kata Roy dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (22/11) (Cenderawasih Pos).

25 November

Kejari Jayapura menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan ruas jalan Trimuris-Kasonaweja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya atas tersangka JJH dan YSM bertempat di Lapas IA Abepura. “Setelah dilaksanakan proses penelitian berkas perkara atas nama tersangka JJH dan YSM oleh jaksa peneliti selanjutnya berkas perkara telah dinyatakan lengkap syarat formil dan materil sehingga dikeluarkan pemberitahuan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum kepada penyidik maka selanjutnya dilakukan penyerahan tahap dua yakni tersangka dan barang bukti,” ungkap Kajari Jayapura Alex Sinuraya melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (23/11) (Cenderawasih Pos).

29 November

Royal Healthcare Heart, Strok & Canker Center, Rumah

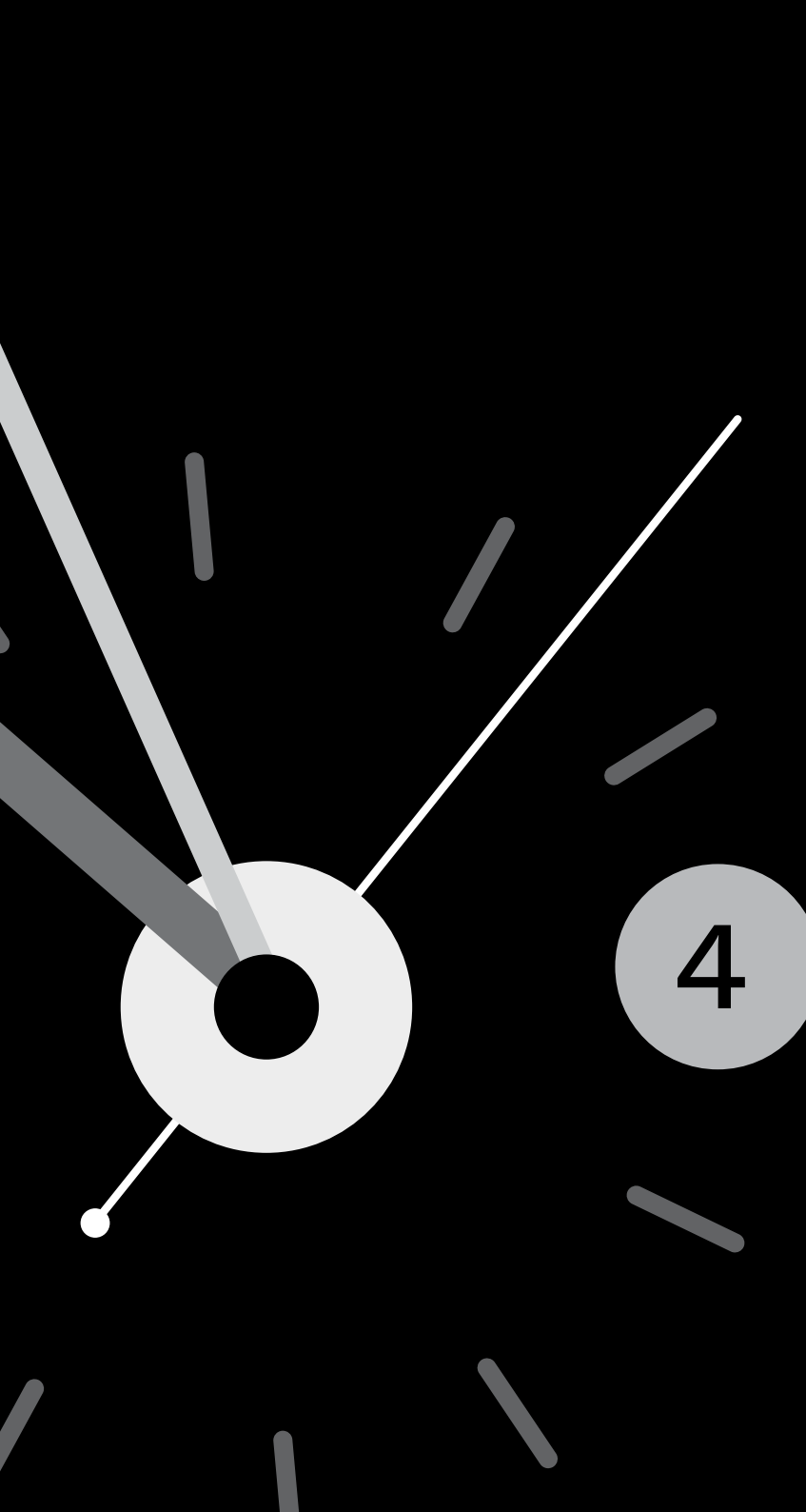
Sakit Singapura yang selama ini menangani perawatan kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, memberi kabar ke keluarga dan dokter pribadi Lukas Enembe agar Gubernur Papua segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mount Elixabeth Singapura. “Berdasarkan surat dari RHHSCC, tertanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Patrick Ang, Ahli Jantung, menjelaskan perlu ada tindakan evakuasi terhadap Lukas Enembe ke rumah sakit Singapura,” ucap Roy sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11) (Cenderawasih Pos).

14 Desember

Komisi Pemberantasan Korupsi menginformasikan dua saksi yang tidak menghadiri panggilan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Kedua saksi itu masing-masing Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsjad Rasjid dan Juliani Arinardi selaku pegawai marketing PT Kapuk Naga Indah atau anak perusahaan Agung Sedayu Group. “Kedua saksi tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan pemanggilan ulang,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikiri di Jakarta, Rabu (14/12/2022) (Cenderawasih Pos).

Bab IV

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

A stylized clock face is positioned on the left side of the page. It features a white circular center with a black dot in the middle. Several lines radiate from this center, some ending in small white dots. A large, light gray circle containing the number '4' is located to the right of the clock face. The background is black, and the right side of the page features a large, black silhouette of a human head in profile, facing right.

4

Yang Klasik Belum Tuntas, Muncul Masalah Baru

— Bernadus B. Koten

Pendidikan menjadi salah satu barometer untuk menilai kemajuan dan kesejahteraan di suatu wilayah atau daerah. Pendidikan (pendidikan formal) dapat maju dan berkembang jika menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab para pihak, baik itu pemberi layanan yaitu pemerintah, dinas pendidikan, atau yayasan/swasta maupun penerima layanan yakni masyarakat, orang tua, dan peserta didiknya. Pendidikan itu sendiri juga adalah bagian dari kebutuhan dasar setiap pribadi, lebih khusus penerima layanan. Membaca dan mengamati kisah-kisah seputar pendidikan formal di Provinsi Papua, kita dapat menggambarkannya sebagai berikut.

a. Masalah klasik

Persoalan tidak adanya tenaga guru dan partisipasi warga untuk memajukan pendidikan di wilayahnya adalah kisah yang tak pernah berakhir. Hampir selalu kita jumpai di beberapa daerah kekurangan dan ketidakhadiran tenaga pendidik (guru) setiap tahunnya. Kabupaten Merauke hampir selalu menjadi langganan kisah ini. Persoalan kekurangan dan ketidakdisiplinan tenaga guru selalu berulang di setiap tahunnya. Kepala Distrik Tabonji, Yohanes Kapura, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke untuk tidak menggelar ujian sekolah di SD Yeraha yang

terletak di Distrik Tabonji.

“Selama saya menjadi Kepala Distrik Tabonji, sekolah ini lumpuh total. Tidak ada proses belajar mengajar di sekolah ini sampai sekarang. Bagaimana ujian sekolah atau ujian nasional digelar? Kalau tetap dilaksanakan ujian, kita membodohi masyarakat.”²¹

Kondisi di Kabupaten Merauke juga terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya. Salah satu tokoh masyarakat dan juga pemerhati pendidikan di Mamberamo Raya, Pdt. Yulianus Wab, menyampaikan bahwa beberapa sekolah di kampung terpencil tutup karena tidak ada guru atau tenaga pengajar. Kondisi semakin parah karena 31 sekolah (29 SD dan 2 SMP) tidak menyelenggarakan ujian akhir bagi siswanya.²² Kondisi guru tidak berada di tempat tugas juga terjadi Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo. Anak-anak tidak mendapatkan hak atas pendidikan karena sebagian guru yang bertugas di sana memilih menghabiskan waktunya di kota. Peran guru akhirnya dilengkapi oleh salah satu komunitas pemuda gereja Kingmi di wilayah tersebut.²³

b. Masalah Baru

Konflik Bersenjata

Di beberapa wilayah di Provinsi Papua (sebelum dimekarkan) terjadi konflik bersenjata hingga saat ini. Situasi ini turut menyumbangkan macetnya proses pendidikan formal di sekolah-sekolah di daerah konflik. Sebut saja di Kabupaten Pegunungan Bintang, banyak siswa dari tingkatan SD-SMA tidak menempuh pendidikan secara baik dan benar. Mereka harus mengungsi ke sekolah-sekolah lainnya demi keselamatan

21 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 08 April 2022.

22 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 23 April 2022.

23 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 10 Februari 2022.

dan masa depan mereka. Di sisi lainnya, tempat sekolah mereka dipakai sebagai markas oleh para pihak yang berkonflik. Misalnya di Kabupaten Yahukimo, pasukan Brimob menempati Gedung Sekolah milik SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo. Dengan demikian proses atau kegiatan belajar mengajar tidak berjalan di tempat itu.²⁴ Selain pendudukan gedung sekolah, di daerah lainnya, gedung sekolah dibakar. Pada 30 Maret 2022, TPN PB (KKB) membakar gedung sekolah SD dan SMP di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.²⁵ Para guru pun terpaksa keluar dari daerah konflik tersebut untuk mencari keselamatan. Walaupun demikian demi pendidikan generasi muda Papua, segala usaha terus dilakukan. Proses belajar mengajar di SD YPPK Bilogai, Intan Jaya, yang sudah lama absen akhirnya dibuka.²⁶ Selain itu kekerasan terhadap anak usia sekolah pun terjadi. Misalnya saja berdasarkan temuan Komnas HAM Perwakilan Papua, pada 22 Februari 2022 terjadi kekerasan terhadap 7 anak di Sinak, Kabupaten Puncak, salah satu korbannya meninggal dunia.²⁷ Kejadian yang sama juga terjadi di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, pada 27 Oktober 2022. Tiga anak dianiaya oleh anggota TNI.²⁸

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, sebanyak 377 siswa SMA tidak lulus ujian pada tahun 2022. Ketidaklulusan ini disebabkan

24 Bdk. Koran Jubi Edisi, 24 – 25 Januari 2022.

25 Bdk. <https://www.republika.id/posts/26558/kkb-papua-bakar-sekolah-dan-aniaya-guru>

26 Bdk. <https://arsip.jubi.id/lama-libur-karena-konflik-bersenjata-di-intan-jaya-sd-yppk-bilogai-dibuka/>

27 Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/164519578/komnas-ham-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-kasus-prajurit-tni-yang-tewaskan?page=all>

28 Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/31/211758678/oknum-tni-diduga-aniaya-3-anak-di-keerom-komnas-ham-kondisi-korban-luka?page=all>

oleh para siswa tidak mengikuti ujian khususnya mereka yang tinggal di daerah konflik.²⁹

Gugatan Tanah Sekolah

Persoalan lainnya adalah gugatan pemilik hak ulayat dimana gedung sekolah dibangun. Proses belajar di SMA Gabungan Kota Jayapura dan SMP Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, diganggu oleh warga pemilik hak ulayat. Pemilik hak ulayat melakukan pemalangan terhadap sekolah tersebut.³⁰

Pemanfaatan Dana Otsus untuk Pendidikan

Dalam konteks ini, generasi muda Papua cukup terbantu untuk menempuh pendidikannya. Berbeda dengan daerah atau wilayah lainnya di luar Papua. Hak penuh karena Otsus, dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan (pemerintah) untuk menggunakan dana Otsus pendidikan. Walaupun demikian, pemanfaatan dana ini tidak berjalan dengan baik dan benar. Hal ini terbukti dengan keluhan dari generasi muda Papua yang menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri. Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua Dalam dan Luar Negeri menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu, 26 Januari 2022. Mereka meminta agar KPK melakukan pemeriksaan penggunaan dana Otsus yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua.³¹ Dua bulan berselang, tepatnya pada Maret 2022, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen menjelaskan bahwa pemerintah terus komitmen untuk memberikan beasiswa

29 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 07 Mei 2022.

30 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 03 September dan 04 November 2022.

31 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 28 Januari 2022.

dari dana Otsus bagi putra-putri asli Papua dalam menempuh pendidikan. Di kesempatan lainnya, pada April 2022, Aryoko menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran biaya studi dan biaya hidup bagi mahasiswa penerima beasiswa dikarenakan pemerintah pusat belum mentransfer dana Otsus tahap pertama. Hal ini terjadi lantaran revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan terbitnya PP 106 dan 107.³²

Kesempatan yang telah diberikan ‘mungkin’ tidak dimanfaatkan secara baik dan benar oleh generasi muda Papua. Berdasarkan data yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, sebanyak 142 mahasiswa Papua yang berkuliah di luar negeri dipulangkan karena telah melampaui batas studi yang diberikan.

Pola Hidup Peserta Didik dan Pengawasan Orang Tua/Wali

Di tahun 2022, generasi muda Papua usia sekolah terjerumus dalam dunia Narkoba. Walaupun temuan kasusnya tidak terlalu banyak tetapi beberapa sampel yang terjadi di beberapa daerah bisa dijadikan rujukan. Di Kabupaten Merauke, seorang siswa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena sebagai pelaku pengedar Narkoba jenis ganja.³³ Di Kabupaten Jayawijaya, pihak Polres Jayawijaya mengamankan tiga anak usia sekolah karena kedapatan menjual Narkoba jenis ganja pada anak-anak usia sekolah lainnya.³⁴ Perilaku ini juga terjadi di Kota Oksibil, Pegunungan Bintang. Menurut kesaksian Direktur YPPK Pegunungan Bintang, Pastor Imanuel Jems Kosay Pr, cukup banyak terdapat anak-anak usia sekolah (SMP, SMA) yang terjerumus dalam narkoba.

Pengawasan atau peran aktif orang tua/wali sangat membantu proses perkembangan pendidikan anaknya. Menjadi perspektif yang keliru dari orang tua bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab guru di sekolah. Para orang tua bukan hanya saja mencari nafkah (biaya sekolah) tetapi harus meluangkan waktu yang cukup untuk mendampingi anak-anaknya ketika berada di rumah.

“Di sini, saya menemukan dari 10 orang tua, hanya sekitar 3 atau 4 orang tua yang perhatikan pendidikan anak-anaknya. Selebihnya membiarkannya atau mengabaikannya. Padahal waktu anak sangat banyak di rumah.”³⁵

Dinamika pendidikan formal di Provinsi Papua di tahun 2022 ini tidak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kekurangan tenaga pendidik, tenaga pendidik (guru) dan peserta pendidik (siswa/mahasiswa) yang ‘asal-asalan’ (tidak disiplin), partisipasi warga (peran orang tua/wali), kontrol atau pengawasan yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah (dinas pendidikan) dan konflik bersenjata, masih tetap menjadi penghambat proses pendidikan formal di Provinsi Papua.

Saat ini Provinsi Papua sudah dimekarkan menjadi tiga yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu alasan pemekaran adalah mendekatkan pelayanan dari pemerintah. Kita berharap, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas untuk membangun pendidikan yang lebih baik bagi generasi Papua yang cerdas dan berdaya saing.

32 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 11 April 2022.

33 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 09 Februari 2022.

34 Bdk. <https://radarjember.jawapos.com/nasional/23/10/2022/polres-jayawijaya-tangkap-tiga-anak-sma-terkait-kepemilikan-ganja/>

35 Hasil wawancara dengan Direktur YPPK Pegunungan Bintang, P. Imanuel Jems Kosay, Pr, April 2022.

Kronik Pendidikan

10 Januari

Sekitar 100 mahasiswa exodus memadati Aula Asrama Ninmin, Abepura Kota Jayapura pada Kamis 6 Januari 2022. Mereka berdiskusi dan meminta kepada gubernur dan DPR Papua serta MRP, bertanggung jawab penuh atas kelanjutan pendidikan mereka pasca kasus rasisme. Mahasiswa ini dari berbagai kota studi di Indonesia. Mereka pulang ke Papua karena mengikuti anjuran MRP dalam maklumat No. 05/MRP/2019 yang menyatakan apabila tidak merasa aman di kota studi maka mahasiswa Papua dapat kembali dan melanjutkan studi di Papua (Koran Jubi Edisi 10 – 11 Januari).

17 Januari

Pemerintah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2016 mengontrak tenaga guru dari luar Jayapura untuk memenuhi tenaga pengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Jayapura. Program ini ditanggapi oleh PGRI Kabupaten Jayapura. Pihak PGRI Jayapura menilai, kehadiran guru kontrak dari luar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan secara umum di Kabupaten Jayapura. Menurut Sekretaris PGRI Kabupaten Jayapura, Silwanus Runabari, kebutuhan guru di kampung-kampung bukan guru bidang studi melainkan guru kelas. Dengan mengontrak guru dari luar maka secara otomatis anak asli Papua tidak mendapatkan porsi di daerah tersebut (Koran Jubi Edisi 17 – 18 Januari).

24 Januari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua meminta pasukan Brimob yang menempati tiga bangunan sekolah di Kabupaten

Yahukimo meninggalkan bangunan sekolah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam keterangan persnya, Jumat, 21 Januari 2022. Menurut data yang diperoleh pihak LBH Papua, pasukan Brimob tersebut telah menempati bangunan sekolah tersebut sejak 3 Oktober 2021. Gedung sekolah yang ditempati Brimob adalah Gedung Sekolah milik SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo. Pada Kamis, 20 Januari 2022, siswa SMA gabungan dari ketiga sekolah tersebut melakukan protes dengan menggelar demo turun jalan di Kota Dekai (Koran Jubi Edisi, 24 – 25 Januari).

28 Januari

Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua Dalam dan Luar Negeri menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu (26/1). Dalam orasinya mereka meminta agar KPK melakukan pemeriksaan penggunaan dana Otsus yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua. Beberapa mahasiswa yang kuliah di luar negeri seperti di Filipina diabaikan dan diterlantarkan sejak tahun 2015 (Cenderawasih Pos).

31 Januari

Mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat mendapatkan respon dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong program beasiswa mahasiswa Papua ke Amerika Serikat. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga berharap kepada pemerintah daerah Papua untuk terlibat aktif dalam rencana tersebut (Koran Jubi Edisi 31 Januari – 01 Februari).

04 Februari

Persekolahan di SMP Negeri 1 Sentani pada awal tahun 2022 dipindahkan ke sekolah yang lainnya karena persoalan hak ulayat antara pemilik ulayat dengan Pemkab Jayapura. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan persoalan SMPN 1 Sentani saat ini ditangani dengan serius oleh Pemkab Jayapura melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura (Cenderawasih Pos).

09 Februari

Satuan Narkoba Polres Merauke menangkap seorang siswa di salah satu SMK Merauke karena mengedarkan Narkoba jenis ganja. Pelaku tersebut berinisial YS (17 thn) (Cenderawasih Pos).

10 Februari

Hampir dua tahun, anak-anak di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Hal ini disebabkan karena sebagian guru yang bertugas di sana memilih menghabiskan waktunya di kota. Komunitas pemuda gereja yang berada di tempat itu berinisiatif mengajarkan anak-anak di Gereja Kingmi Jemaat Kristus Pelepas Huewi, Distrik Tangma. Menurut Ketua Pendiir Komunitas Yayasan Hano Wene, Neas Wanimbo, anak-anak akhirnya memilih belajar di rumah sendiri atau di gereja karena tidak ada guru di sekolah mereka (Cenderawasih Pos).

14 Februari

Pemerintahan Kabupaten Yahukimo akan membenahi pendidikan dengan membangun sekolah unggulan yang berpola asrama di 51 distrik di Kabupaten Yahukimo. Untuk rencana ini, setiap tahunnya akan dibangun 13 sekolah di beberapa wilayah di Yahukimo. Hal ini disampaikan oleh Bupati Yahukimo Esau Miram, Minggu (13/2) (Cenderawasih Pos).

17 Februari

Rektor Uncen Jayapura Apolo Safanpo, di ruang kerjanya, Selasa (15/2), mengatakan dengan jumlah peminat pendaftar di Uncen Jayapura yang tinggi mencapai 12.000 sementara daya tampung tidak memadai, Apolo berharap perlu adanya pembangunan universitas negeri lainnya di beberapa titik sentral di wilayah Meepago dan Saireri (Cenderawasih Pos).

01 Maret

- Bupati Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meresmikan asrama mahasiswa Yahukimo di Condet, Jakarta pada 25 Februari 2022. Pada kesempatan peresmian itu, Bupati Didimus mengatakan bahwa setiap mahasiswa yang tinggal di asrama ini harus menjadikan asrama sebagai rumah doa dan belajar agar prestasi dan indeks pembangunan manusia di Yahukimo dapat meningkat. Demikian halnya, Gubernur Lukas Enembe minta kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali mengabdikan serta memberi kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Yahukimo. Seperti Bupati Didimus, Enembe juga minta agar asrama yang baru diresmikan itu menjadi rumah doa dan belajar bagi para mahasiswa. "Ini adalah rumah kalian, rumah doa dan rumah belajar. Saya bersyukur Tuhan membawa Ones Pahabol menyiapkan tempat ini dan membawa Didimus membangun dan menyiapkan asrama ini untuk anak-anak generasi penerus kita di masa yang akan datang," tegas Enembe. Sedangkan Kepala Dinas Perumahan, Jan Christian Wanimbo mengatakan asrama mahasiswa Kabupaten Yahukimo di Condet, Jakarta ini memiliki luas bangunan 403,46 meter persegi,

dibangun dengan model minimalis dua lantai dan terdiri atas 11 kamar, masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 mahasiswa, sehingga dapat menampung 22 mahasiswa. Asrama tersebut telah dilengkapi dengan meubeler dan wifi, fasilitas dapur dan dua kendaraan motor roda dua (Cenderawasih Pos).

- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran dari dana Otsus untuk merekrut guru kontrak dari anak-anak asli Jayawijaya. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Thony M Mayor mengatakan, pemerintah menghendaki informasi perekrutan guru kontrak ini diumumkan lewat media massa sehingga anak-anak asli Jayawijaya, yang berlatar belakang sarjana pendidikan dapat mendaftar. Ia menegaskan bahwa para guru kontrak yang akan direkrut adalah sarjana pendidikan, yang tinggal di kampung atau distrik. “Kalau kita rekrut dari kampung, maka guru tersebut akan mengajar di kampungnya itu. Kita tidak kasih dia mengajar di kampung lain atau distrik lain. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi guru meninggalkan kampung, seperti banyak guru saat ini yang meninggalkan tempat tugasnya dengan alasan tidak ada rumah guru dan lain-lain,” tegas Sekda, Thony M Mayor pada Sabtu, 26 Februari 2022 (Cenderawasih Pos).

02 Maret

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengatakan bahwa sejak tahun 2009 pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memberikan beasiswa bagi putra-putri Papua. Hal itu terlihat jelas melalui program seribu doktor. “Sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, almarhum Klemen Tinal

program beasiswa tidak hanya mencakup sekolah unggulan yang ada di kota-kota besar saja, tetapi sudah lebih merata ke semua kabupaten/kota di Provinsi Papua. Anak-anak Papua yang memiliki prestasi dapat mengenyam Pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri. Semua anak Papua memiliki kesempatan yang sama. Bahkan bukan saja untuk mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi juga menyebar sampai pendidikan perwira Polisi dan Polisi umum. Kita membiayainya dengan beasiswa Otsus,” tuturnya pada Rabu, 2 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

07 Maret

Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC mengatakan pendidikan merupakan sebuah keutamaan, karena melaluinya karakter seseorang terbangun. Ia mengajak para imam di Keuskupan Agung Merauke agar fokus memperhatikan pendidikan. Sebab, hanya melalui pendidikan akan terjadi perubahan menjadi lebih baik. “Kalau kita mau ada imam-imam, maka kita perbanyak sekolah imam yaitu seminari. Saya pikir lima tahun ke depan akan ada banyak anak-anak Papua yang mengikuti pendidikan di seminari, tidak jadi Pastor tidak apa-apa yang penting mereka mengenyam pendidikan di seminari yang bermutu dan berbobot,” tutur Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC di Merauke, pada Sabtu, 5 Maret 2022 pada saat menahbiskan 4 imam baru di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Merauke (Cenderawasih Pos).

12 Maret

Rencana pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Ottow dan Geissler Papua di Biak mendapat dukungan penuh dari Bupati Biak Numfok, Herry Ario Naap. Ia mengatakan Biak memiliki posisi strategis dalam pembukaan Fakultas Kedokteran karena fasilitas

rumah sakit dan penunjang lainnya sudah memadai. “Untuk fakultas kedokteran, kami siap mendukung, ini penting karena kita di Papua belum memiliki fakultas kedokteran yang statusnya swasta. Saya melihat Biak cukup strategis untuk pembukaan fakultas kedokteran,” tegas Herry Ario Naap pada Jumat, 11 Maret 2022. Sebelumnya, Koordinator LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel S. Mofu mengatakan dirinya siap memberikan izin dan mendukung penuh apabila ada perguruan tinggi yang hendak membuka fakultas kedokteran di Biak (Cenderawasih Pos).

19 Maret

Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan dirinya telah meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya untuk memasukan pembelajaran bahasa daerah Balim dalam kurikulum SD dan SMP. Hal ini harus dilakukan karena banyak pemuda tidak tahu lagi bahasa daerah. Karena itu, pemerintah mencoba menghidupkan bahasa daerah agar generasi ke depan tetap mengetahui bahasa daerahnya. “Saya sudah minta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya agar tahun ajaran baru mulai memberikan pembelajaran bahasa daerah yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah,” tutur Jhon Richard Banua pada Jumat, 18 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Maret

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Bambang Budiandoyo mengatakan untuk menindaklanjuti arahan Bupati terkait dimasukkannya Bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan guru-guru yang berkompeten, sehingga tahun ajaran 2022/2023 bahasa daerah dapat masuk ke dalam satuan pendidikan. “Tentang siapa yang akan mengajar Bahasa daerah kita akan pertemuan dengan

guru-guru yang berkompeten, terutama para guru anak asli Jayawijaya. Selain itu, ada 150 guru OAP Jayawijaya yang dalam tahap finalisasi perekrutan bisa mendukung kurikulum muatan lokal Bahasa daerah,” tutur Bambang Budiandoyo pada Kamis, 24 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

08 April

Kepala Distrik Tabonji, kabupaten Merauke, Yohanes Kapura meminta Dinas Pendidikan kabupaten Merauke tidak menggelar ujian sekolah di SD Yeraha, distrik Tabonji. “Selama saya menjadi kepala distrik Tabonji, sekolah ini lumpuh total. Tidak ada proses belajar mengajar di sekolah ini sampai sekarang. Bagaimana ujian sekolah atau ujian nasional digelar? Kalau tetap dilaksanakan ujian, kita membodohi masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa bukan saja SD Yeraha yang tidak ada aktivitas belajar mengajar, melainkan juga SD Koncobando, SD Yerimoro, SD Yomuka, SD Bamol, SD Tabonji. “Beberapa kali dalam Musrembang, masalah ini saya sampaikan ke Dinas Pendidikan, bahwa guru di dalam kota sangat banyak, kalau bisa ada pemerataan, karena di kampung hanya kepala sekolah saja,” tegasnya (Cenderawasih Pos).

11 April

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran biaya studi dan biaya hidup bagi mahasiswa penerima beasiswa dikarenakan pemerintah pusat belum mentransfer dana Otsus tahap pertama. Hal ini terjadi lantaran revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021, dan terbitnya PP 106 dan 107. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi

dengan Kementerian Polhukam, Kementerian Keuangan, Dirjen Otda dan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Presiden. “Dalam rapat dengan Wapres, beliau sudah memerintahkan segera dilakukan pencairan dana Otsus karena ada persoalan, salah satunya terkait beasiswa,” tuturnya pada Sabtu, 9 April 2022. Aryoko juga menjelaskan bahwa saat ini mahasiswa Papua yang tersebar di 14 Negara belum menerima pembayaran beasiswa, sedangkan mahasiswa yang telah menerima beasiswa sebanyak 2.800 orang, termasuk mahasiswa yang kuliah di 12 perguruan tinggi di Papua. Dana itu berasal dari dana cadangan pemerintah Provinsi Papua (Cenderawasih Pos).

- *Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera mendistribusikan Kartu Biak Pintar (KBP) kepada 7.500 siswa di Kabupaten Biak Numfor. Jumlah tersebut terdiri atas TK/PAUD sebanyak 1.500 anak; SD sebanyak 2.500 anak; SMP 2.000 murid dan SMA 1.500 siswa. Ia menjelaskan bahwa para penerima KBP adalah anak-anak sekolah yang orang tuanya tidak mampu. “Kartu Biak Pintar akan diluncurkan dalam waktu dekat. Kita siapkan anak-anak berkualitas sejak usia dini sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Kartu Biak Pintar bidang Pendidikan ini akan dilakukan berkelanjutan. Khusus untuk perguruan tinggi masih dalam pertimbangan, apakah hanya mahasiswa yang kuliah di Biak, masih dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tuturnya (Cenderawasih Pos).*
- Revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 berdampak pada dunia pendidikan secara khusus bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua yang sedang berkuliah di luar negeri harus dipulangkan ke

Papua lantaran tidak ada biaya lagi. Menyikapi hal tersebut, pengacara Papua, Thomas Ch Syufi menegaskan bahwa pihaknya akan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jika Presiden Jokowi tidak menggubris aspirasi mahasiswa Papua di luar negeri, maka saya dan beberapa pengacara akan melayangkan gugatan terhadap Surat Pemberhentian Bantuan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri ke PTUN,” tegasnya. Ia menuntut agar pejabat yang mengeluarkan surat pemberhentian pemberian beasiswa itu harus segera mencabutnya sehingga mahasiswa Papua yang berkuliah di luar negeri dapat menyelesaikan perkuliahannya. Thomas juga mengatakan semestinya, sebelum pemberhentian pemberian beasiswa itu, pemerintah harus berdialog dengan mahasiswa. “Pemerintah harus berdialog dan bertanya langsung ke para mahasiswa di lokasi kuliah mereka, mengapa tidak tepat waktu menyelesaikan studinya? Mungkin karena kendala-kendala surat sponsor dari pemerintah Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Provinsi Papua,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

12 April

Para orang tua yang anak-anaknya sedang menempuh kuliah di luar negeri dengan biaya beasiswa Pemerintah Provinsi Papua mendatangi kantor Gubernur Dok II, di Jalan Soa Siu, Distrik Jayapura Utara, pada Senin, 11 April 2022 untuk mempertanyakan biaya kuliah yang tidak dikirim oleh Pemda Provinsi Papua. Keterlambatan pengiriman beasiswa tersebut menyebabkan beberapa mahasiswa dikeluarkan dari penginapan mereka. Karena itu, perlu ada kebijakan khusus agar

beasiswa segera dikirim sehingga anak-anak dapat meneruskan perkuliahan mereka sampai selesai. “Ada beberapa anak sudah keluar dari penginapan mereka karena belum bayar biaya penginapan. Mereka menumpang dengan teman mereka. Kami minta pemerintah pusat segera cairkan dana Otsus supaya pemerintah provinsi Papua bisa transfer beasiswa dan biaya hidup anak-anak kami,” tegas Martinus Kendom, perwakilan orang tua mahasiswa yang berasal dari Asmat pada Senin, 11 April 2022. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengatakan semua kegiatan yang dibiayai melalui dana Otsus belum bisa terlaksana karena pemerintah pusat belum transfer dana Otsus. “Ada 355 mahasiswa aktif yang belum kami bayar dana beasiswanya dan biaya hidupnya sejak Januari 2022 sampai saat ini, karena dana Otsus dari pemerintah pusat belum cair,” tutur Aryoko AF Rumaropen, di Jayapura pada Senin, 11 April 2022 (Cenderawasih Pos).

13 April

Pemerintah Provinsi Papua mencatat sebanyak 443 anak Papua lulus dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri sejak pemberian beasiswa kepada mahasiswa Papua mulai tahun 2014-2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswa yang berkuliah di luar negeri. Pemulangan tersebut dilakukan karena para mahasiswa telah melampaui batas waktu studi di atas enam tahun, bahkan ada yang telah diberi kesempatan sembilan sampai sepuluh tahun. Ada pun data rekap mahasiswa Papua yang akan dipulangkan tersebut sebagai berikut:

No	Negara	D-III	S-1	S-2	S-3	Lisensi
1.	Amerika Serikat	9	56	8		7
2.	Australia	1	6	6	1	
3.	Kanada	3				
4.	Selandia Baru	20	16	2		2
5	Filipina		2			3
Jumlah Per Jenjang Kuliah		33	80	16	1	12

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah melakukan evaluasi terhadap mahasiswa Papua penerima beasiswa yang berkuliah di luar negeri. Dari hasil evaluasi, ada mahasiswa yang harus dipulangkan karena telah melewati batas waktu kuliah, ada pula yang melakukan perbuatan kriminal. “Untuk pendidikan punya jangka waktu beasiswa S1, S2, S3, masing-masing memiliki durasi waktu. Itu sudah diatur dalam keputusan penerima beasiswa dan perjanjian setiap mahasiswa ketika proses awal penerimaan beasiswa. Jika waktunya sudah selesai, tidak mungkin pemerintah beri jaminan untuk menyekolahkan lagi. Sebab, ada tata Kelola keuangan yang harus dipatuhi,” tutur Aryoko AF Rumaropen (Cenderawasih Pos).

14 April

Sampai saat ini, pemerintah provinsi Papua belum membayar beasiswa bagi 355 mahasiswa yang kuliah di lima Negara. Hal ini terjadi lantaran dana Otsus belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Asisten II Setda, Muhammad Musaad mengatakan, “Kita target, 31 Maret sudah bayar ke pihak Universitas, tetapi uang kita harapkan untuk menyelesaikan pembayaran itu, yang bersumber dari dana Otsus belum ditransfer

oleh Kemenkeu,” tuturnya di Jayapura, pada 12 April 2022. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menyurat kepada Universitas dan mendesak Kemenkeu agar segera mencairkan dana Otsus. Musaad juga menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan para orang tua dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi ini (Cenderawasih Pos).

23 April

Pemerhati Pendidikan sekaligus tokoh agama di kabupaten Mamberamo Raya, Pdt. Yulianus Wab mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tidak terlaksananya ujian akhir bagi siswa kelas VI SD dan kelas IX SMP yang terjadi di 31 sekolah di kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2022 ini. Ia mengatakan bahwa hal itu terjadi lantaran data siswa tidak terdaftar di data Dapodik. “Masalahnya karena operator Dapodik dari Dinas Pendidikan Mamberamo Raya tidak memasukkan data peserta didik dan ketentuan lainnya sehingga anak didik terkena dampaknya,” tuturnya di Sentani pada 22 April 2022. Ia menambahkan bahwa beberapa sekolah di kampung terpencil tutup karena tidak ada guru. Hal itu terjadi, karena Dinas Pendidikan tidak membayar gaji dan hak-hak para guru. Untuk diketahui bahwa 31 sekolah yang tidak menyelenggarakan ujian akhir sekolah terdiri atas 29 SD dan 2 SMP, yaitu di Distrik Mamberamo Hulu: SD 1 Distrik Mamberamo Hulu, SD Negeri Fuau, SD Papasena 1, SD Kwa, SD Advent Baso 2, SD Taheda, SD Douw. Distrik Waropen Atas: SD Nadofwai. Distrik Roufaer: SD Taiyai, SD SD Swaki, SD Tarure. Distrik Sawai: SD SD Mesiri. Distrik Banuki: SD SD Kerema, SD Opahe USA, SD Watiaro. Distrik Mamberamo Hilir: SD Biraramase, SD Bagusa, SD Swaseso. Distrik Mamberamo Tengah: SD Fona, SD Marilefalen, SD Murumarei, SD Namunaweja, SD Babija, SD Soromaja Gunung. Distrik Timur Tengah: SD Badyadi,

SD Fokli, SD Kustera, SD Noyadi, SD Obogwi dan SD TOwao. Sedangkan 2 SMP yang tidak menyelenggarakan ujian akhir yaitu SMP Advent Baso 2 dan SMP Satu Atap Baitanisa (Cenderawasih Pos).

25 April

- Menyikapi tidak berjalannya proses belajar mengajar di SD Negeri Yeraha, distrik Tabonji, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Merauke, Stefanus Kapasiang mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bupati Merauke dan telah dilakukan langkah-langkah sesuai petunjuk Bupati. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah sekolah bisa melaksanakan ujian atau tidak. “Jadi, setelah kami turun langsung melihat ke lapangan baru kita bisa putuskan, apakah bisa dilaksanakan ujian atau tidak,” tuturnya di Merauke pada 25 April 2022 (Cenderawasih Pos).
- Proses belajar mengajar di SD Negeri Inpres Pantai Enggros, kota Jayapura tidak berjalan efektif karena fasilitas sekolah selalu hilang dicuri. “Kami juga bingung karena sekolah ini setiap tahun ada saja barang-barang yang dicuri. Dulu laptop, komputer, printer dan kini pintu-pintu ruangan juga dicuri,” tutur Mina salah seorang guru SD Negeri Inpres Pantai Enggros pada 25 April 2022. Ia menjelaskan permasalahan pencurian ini telah disampaikan ke pihak terkait, termasuk DPRD kota Jayapura, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan sehingga sekolah tetap berjalan tanpa ada pintu, jendela, bangku dan kursi serta fasilitas lainnya (Cenderawasih Pos).

26 April

Pemerintah Kabupaten Lany Jaya melalui Dinas Pendidikan telah merekrut 500 orang guru orang asli Lany Jaya untuk mengajar di kampung-kampung. Guna melihat kinerja para guru tersebut, maka Dinas Pendidikan menggelar rapat evaluasi kinerja guru kontrak orang asli Lany Jaya (OAL) tahun 2022 yang dilaksanakan di Distrik Tiom, pada Senin, 25 April 2022. Kepala Dinas Pendidikan Lany Jaya, Tan Wanimbo mengatakan, kehadiran guru kontrak OAL sangat membantu pelayanan Pendidikan bagi sekolah-sekolah yang ada di Lany Jaya, karena kondisi geografis yang sangat sulit. Guru OAL adalah anak asli Lany Jaya sehingga sudah terbiasa dengan medan yang sulit. “Setiap guru kontrak OAL harus memberikan lima pernyataan. Pertama, membuat pernyataan aktif melaksanakan tugas. Kedua, apabila dua minggu tidak melaksanakan tugas siap diberhentikan tidak dengan hormat. Ketiga, tidak ada permintaan tugas. Keempat, tidak melakukan provokasi dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan sekolah. Kelima, Dinas Pendidikan Lany Jaya dan guru OAL membuat pernyataan tugas dan kalau melanggar, maka siap diberhentikan,” tegas Tan Wanimbo di Tiom pada Senin, 25 April 2022 (Cenderawasih Pos).

27 April

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengatakan sebanyak 13 orang dari 142 mahasiswa Papua di luar negeri yang beasiswanya diberhentikan telah pulang ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, empat orang sedang melanjutkan kuliah, tetapi tidak boleh masuk lagi dalam SK penerima beasiswa, karena akan menimbulkan persoalan di pemeriksaan. Ia juga menjelaskan Universitas Kristen Satya Wacana siap

menerima para mahasiswa itu, tetapi persoalannya mereka mau melanjutkan kuliah atau tidak. “Kita tidak boleh pulangkan mereka, kemudian tidak menyekolahkan, itu salah. Kita perlu atur sekolah selanjutnya. Kita akan bicarakan bersama dengan Pak Sekda,” tutur Aryoko AF Rumaropen di Jayapura pada Selasa, 26 April 2022. Sementara itu, pembayaran beasiswa bagi 355 mahasiswa yang sedang studi di Jepang, Kanada, Selandia Baru, Australia dan Amerika telah dilakukan menggunakan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua karena dana Otsus belum cair. “Proses pembayaran sudah dimulai sejak Jumat, 22 April, Senin, 25 April, Selasa, 26 April dan Rabu, 27 April 2022. Semoga minggu ini, pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri bisa selesai,” jelas Aryoko AF Rumaropen (Cenderawasih Pos).

29 April

Bupati Kabupaten Jayawijaya, John Richard Banua meminta kepada 150 guru kontrak anak asli Jayawijaya yang baru saja direkrut oleh Dinas Pendidikan, agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dalam mengajar dan mendidik anak-anak di kampung-kampung. Ia menegaskan para guru kontrak tidak sekedar mengajar dan mendapatkan gaji, melainkan untuk mendidik anak-anak dan adik-adik mereka di kampung-kampung. “Kita akan tempatkan sesuai tempat tinggal para guru itu. Mereka harus aktif di sana karena yang mereka layani adalah anak-anak dan adik-adik mereka sendiri. Kalau guru tidak mau aktif mengajar dan mendidik, berarti guru itu tidak mau anak-anak dan adik-adiknya menjadi pintar. Dan, bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya, maka gajinya akan ditahan dan kontrak tidak akan diperpanjang,” tegas Bupati Banua pada Kamis, 28 April 2022 di Wamena (Cenderawasih Pos).

07 Mei

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Protasius Loby mengatakan, pada tahun ajaran 2021/2022, sebanyak 20.888 siswa SMA/SMK terdaftar sebagai peserta ujian nasional. Dari jumlah tersebut yang lulus sebanyak 20.511, sedangkan 377 siswa tidak lulus ujian. Ia menjelaskan bahwa siswa yang tidak lulus ujian karena tidak mengikuti ujian, apa lagi mereka yang tinggal di daerah konflik. “Jumlah SMA sebanyak 245 sekolah dengan tiga program studi yakni IPA 10.569 siswa; IPS 9.876 siswa; Bahasa 443 siswa. Untuk SMA Luar Biasa sebanyak 8 sekolah dengan total peserta 32 siswa,” jelas Protasius Loby di Jayapura, pada Kamis, 5 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Mei

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Stephanus Kapasiang mengatakan, saat ini di Merauke terdapat 215 SD, dari jumlah tersebut, sebanyak 212 melaporkan sedang melaksanakan ujian sejak 9 Mei 2022. “Tiga sekolah tidak lakukan ujian. Saya belum dapat laporan resmi, tetapi salah satunya SD Negeri Yeraha karena sekolah tersebut selama tiga tahun tidak beroperasi. Kami akan ke Kimaam untuk mengecek sekolah-sekolah yang selama ini dilaporkan tidak beroperasi,” tutur Stephanus Kapasiang di Merauke, pada Selasa, 10 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

14 Mei

- Ketua Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) Uncen, Oscar O. Wambrau mengatakan penerimaan calon mahasiswa baru Uncen tahun 2022 akan mengutamakan OAP sebanyak 80% dan non-OAP 20%.

“Kebijakan pimpinan Uncen supaya setiap tahun menerima 80% calon mahasiswa OAP dari lima wilayah adat di Provinsi Papua dan non-Papua 20%. Kami jaga ini di semua tes dan jalur yang paling banyak menerima calon mahasiswa OAP adalah jalur mandiri,” tutur Oscar O. Wambrau di kampus Uncen, Waena pada Jumat, 13 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

- Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua mencanangkan pendidikan bahasa daerah, yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran pada tingkat PUAD, TK, SD, dan SMP mulai tahun 2023. Ia menjelaskan pengadaan buku panduan pelajaran bahasa daerah sudah ada di Dinas Pendidikan. Demikian halnya, tenaga guru kontrak yang diangkat bisa mengajar bahasa daerah. “Pendidikan bahasa daerah ini mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Untuk buku, tidak ada penulis khusus buku bahasa daerah ini, tetapi melalui koordinasi dengan tokoh-tokoh yang peduli pada pendidikan dan pelestarian bahasa daerah, sehingga tidak punah seperti daerah lain,” tutur Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua di Wamena pada Jumat, 13 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

18 Mei

Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo mengatakan, dana bantuan dari Freeport sebesar 42 miliar rupiah akan digunakan untuk pembangunan 18 ruang kuliah, auditorium, dan juga perkantoran di kampus Abepura. Ia menjelaskan pembangunan ruang perkuliahan ini untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang selama ini kekurangan ruangan perkuliahan. “Sekarang sudah masuk tahap pemerataan tanah,” tutur Apolo Safanpo pada Selasa, 17 Mei 2022. Sementara

itu, Presiden Direktur PT Freeport, Tony Wenas mengatakan bahwa gedung yang akan dibangun itu seluas 2.765 meter persegi, didesain tiga lantai dan dibangun dengan konsep gedung hijau. Ada 18 ruang kelas dan auditorium untuk mendukung proses belajar mengajar di Uncen (Cenderawasih Pos).

20 Mei

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Y Mokay mengatakan, guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru dan murid sama-sama merdeka dalam belajar, bebas berinovasi, bebas belajar dengan mandiri dan kreatif. “Guru penggerak juga harus berdampak ke sekolah lain, berbagi praktek. Selain itu, guru-guru penggerak ini menjadi modal bagi pengangkatan kepala sekolah ke depan. Dengan demikian melalui sekolah dan guru penggerak ini, kita tidak lagi melakukan seleksi terhadap calon kepala sekolah,” tutur Ted Y Mokay di Sentani pada Kamis, 19 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Politekes Kemenkes Jayapura pada tahun 2022/2023 akan menerima 1.000 calon mahasiswa baru. Wakil Direktur III, Ester Rumaseb mengatakan pada tahun ini terdapat tiga jalur pendaftaran yang dibuka yaitu PMDP, SIMAMA, dan SIMAMI. PMDP khusus untuk mereka yang memiliki prestasi melalui nilai rapor dan seni, olah raga serta minat tinggi. Kemudian, jalur SIMAMA yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru berbasis uji tulis serentak Poltekes se-Indonesia. “Poltekes Kemenkes Jayapura prioritaskan OAP, sebanyak 80% OAP supaya selesai pendidikan mereka kembali bekerja di kampung mereka masing-masing

melayani kesehatan masyarakat. Kalau bukan OAP setelah tamat dari Poltekes tidak mau tugas di pedalaman,” tutur Ester Rumaseb di Jayapura pada Selasa, 24 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

27 Mei

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Ridwan Rumasukun melantik 106 Kepala Sekolah di Provinsi Papua secara virtual pada Rabu, 25 Mei 2022. Dalam sambutannya, Enembe menekankan bahwa salah satu indikator kinerja utama adalah indeks pendidikan, yang menjadi salah satu faktor penting dalam perhitungan IPM. Karena itu, diperlukan kerja keras Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. “Kepala sekolah tidak dibenani tugas pembelajaran, walaupun dalam keadaan tertentu dapat melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan guru, pada sekolah yang kekurangan guru. Hal tersebut juga dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pemimpin dan mengelola sekolah dalam usaha meningkatkan mutu Pendidikan,” tegas Gubernur Enembe yang dibacakan oleh Sekda, Ridwan Rumasukun (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Tokoh masyarakat kampung Fuau, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya, Yulianus Wau Abaruda mengatakan sebanyak 28 murid SD Negeri Fuao, Distrik Mamberamo Hulu tidak lulus SD lantaran permasalahan data pokok pendidikan (Dapodik) yang tidak disinkronkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, padahal data siswa telah dikirim pada 1 Maret 2022. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2021 sebanyak 13 anak tidak bisa mengikuti ujian dan terulang lagi pada tahun 2022 sebanyak 15 anak yang tidak bisa mengikuti ujian. “Apa yang dialami anak-

anak ini adalah upaya ‘membunuh’ masa depan mereka. Maka, kami minta anggota DPR Papua Dapil Mamberamo Raya supaya bisa melihat permasalahan pendidikan di Mamberamo Raya ini,” tegas Yulianus Wau Abaruda pada Sabtu, 4 Juni 2022. Sementara itu, operator Dapodik Dinas Pendidikan Mamberamo Raya, Nikson mengatakan bahwa urusan Dapodik menjadi tanggung jawab satuan pendidikan (sekolah). Permasalahan terjadi karena kepala sekolah yang lama tidak pernah memasukkan data siswa. “Tahun 2020 dan 2021 tidak ada data masuk. Tahun 2022, setelah pergantian kepala sekolah, baru ada data masuk dan dalam proses,” tutur Nikson (Cenderawasih Pos).

10 Juni

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menegaskan agar yayasan pendidikan yang ada di Kabupaten Merauke membangun koordinasi dengan pemerintah di dalam seluruh aktivitas pembelajarannya, terutama dalam pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah. Ia juga berharap yayasan pendidikan dapat mengembangkan kemandirian dalam pengelolaan pendidikan, baik dari aspek ekonomi, kualitas, dan personalia. “Saya minta yayasan pendidikan berkoordinasi dengan pemerintah, karena pemerintah selama ini memfasilitasi bangunan dan guru ASN juga ada di sekolah yayasan. Kalau kepala sekolah dari yayasan, guru ASN tidak bisa tanda tangan kenaikan pangkat dan gaji berkala guru ASN,” tutur Romanus Mbaraka pada saat membuka Raker YPPK Keuskupan Agung Merauke pada Kamis, 9 Juni 2022. Sementara itu, Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC mengatakan Raker YPPK untuk melakukan evaluasi dan revisi perjalanan yayasan dan sekolah-sekolah dalam lingkup YPPK. “Kita melihat kembali dan koreksi serta memandang ke depan yang akan kita lakukan. Kita pertahankan yang bagus di

masa lalu dan yang tidak baik diubah sehingga sekolah-sekolah dapat bertumbuh,” tutur Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC (Cenderawasih Pos).

16 Juni

- Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Pendidikan agar tidak lagi mengeluarkan nota dinas untuk memindahkan guru. Ia mengatakan perpindahan guru dengan nota dinas telah berdampak pada adanya temuan pengelolaan dana BOS di sekolah. “Di depan semua orang ini, yang saya masih pertahankan di Dinas Pendidikan, jangan ulangi lagi kelakuan kemarin. Ada temuan pengelolaan dana BOS. Tidak ada lagi guru pindah dengan nota dinas. Itu catatan keras saya. Anda yang saya masih pertahankan di situ, anda jangan ulangi kesalahan,” tegas Romanus Mbaraka pada saat melantik 300 pejabat eselon IV di lingkup Pemkab Merauke, pada Selasa, 14 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).
- Kepada Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD) Provinsi Papua, Manius Wenda melantik kepala SMA/SMK di wilayah Lapago, Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo dan Tolikara pada Rabu, 15 Juni 2022 di Wamena. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin untuk menggerakkan semua yang ada di sekolah, baik segi finansial, sumber daya manusia dan semua yang ada di dalam sekolah. “Kalau kepala sekolahnya tidak kreatif dan inovatif, ini sangat susah. Guru sebagus apa pun ditempatkan, tapi kalau dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak kreatif, tetap akan susah. Kita membutuhkan kepala sekolah yang punya semangat

kreatif untuk membangun sekolah,” tutur Manius Wenda di Wamena pada Rabu, 15 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

17 Juni

Rapat kerja daerah (Rakerda) Provinsi Papua, yang dihadiri Gubernur Lukas Enembe dan Bupati/Walikota se-tanah Papua berlangsung pada Rabu, 15 Juni 2022. Pada pembahasan Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB) tersebut, pemerintah Provinsi Papua mengalihkan aset, tenaga guru dan pengelolaan pelayanan pendidikan tingkat SMA dan SMK dari Pemprov Papua ke Pemda 28 kabupaten/kota. “Kewenangan pengelolaan SMA/SMK secara resmi sudah kita kembalikan menjadi kewenangan kabupaten/kota,” tutur Muh. Musa’ad pada Rabu, 15 Juni 2022. Gubernur Lukas Enembe sangat kecewa dengan kebijakan pengalihan SMA/SMK ke kabupaten/kota. “SMA/SMK dikembalikan ke kabupaten/kota. Kita setengah mati dulu urus pengalihan aset dan segala macam. Dua tahun itu kita urus lalu pengalihan ke provinsi. Tapi, sekarang dikembalikan lagi ke kabupaten/kota. Aduh sakit!” tegas Lukas Enembe pada Rabu, 15 Juni 2022, pada saat membuka kegiatan Rakerda Provinsi Papua bersama Bupati/Walikota se Tanah Papua di Jayapura. Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD) Provinsi Papua, Manius Wenda mengatakan bahwa pihaknya siap menyerahkan 365 SMA/SMK ke kabupaten/kota sesuai PP 106 terbit, sehingga aset sekolah dari provinsi bisa diserahkan ke daerah masing-masing. “Kami eksekutor, melaksanakan perintah UU. Jadi, kalau disuruh menyerahkan aset ke kabupaten/kota, itu kami lakukan dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 yang dikeluarkan. Kami harap Pemda tetap menjaga kualitas dan hak-hak siswa dan guru,” tutur Manius Wenda pada Kamis, 16 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

24 Juni

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Yulianus Kuayo meresmikan SMKN 12 Kesehatan yang pertama di Merauke pada Kamis, 23 Juni 2022 dengan pembukaan selubung papan nama. Ia menjelaskan pihaknya melakukan revitalisasi SMK dan jurusan supaya para lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa bekerja setelah pendidikan. “Kita bangun SMK banyak, tetapi kalau tidak disesuaikan dengan sumber daya yang ada, maka sama dengan menciptakan pengangguran. Karena itu, saya minta Kepsek SMKN 12 Kesehatan supaya bikin peta jalan pengembangan sekolah ini,” tutur Yulianus Kuayo pada Kamis, 12 Juni 2022 di Merauke (Cenderawasih Pos).

30 Juni

Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw menggelar pertemuan dengan para guru honor dan kontrak di lapangan apel kantor Bupati Jayapura pada Rabu, 29 Juni 2022. Ia mengatakan, guru honor memiliki sumbangan besar untuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jayapura, karena mau bekerja di daerah pedalaman yang sulit. Saat ini, anak-anak di pedalaman bisa belajar, mereka ceria kembali dan penuh optimis menatap masa depan. “Waktu awal saya jadi Bupati, kita kekurangan sekitar 500 lebih guru, sehingga kita ambil kebijakan mengangkat guru honor. Kita membutuhkan guru untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan di tanah Papua. Karena itu, guru juga harus memiliki inovasi dan terobosan untuk memajukan pendidikan di wilayah Kabupaten Jayapura,” tutur Matius Awoitauw (Cenderawasih Pos).

02 Juli

Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Kota/Kabupaten Jayapura mulai melakukan pembangunan kantor yang

berlokasi di kompleks SMA YPPK Teruna Dharma, Kotaraja. Direktur YPPK Kota/Kabupaten Jayapura, Silvester Loby mengatakan, pembangunan kantor YPPK berlokasi di Kotaraja agar dapat menjangkau wilayah Sentani dan Jayapura sehingga pelayanan dapat merata. Ia menambahkan bahwa Gedung YPPK terdiri atas dua lantai dan akan selesai pada bulan Maret 2023. “Biaya pembangunan 80-90% berasal dari sumbangan orang tua siswa dan ada dukungan dari Airlangga dan BRI. Kami mengharapkan perhatian dari pemerintah dan donatur yang mau membantu,” tutur Loby pada 1 Juli 2022 pada saat peletakan batu pertama (Cenderawasih Pos).

09 Juli

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura sedang mempersiapkan diri meningkatkan statusnya menjadi Universitas. Pelaksana Tugas Direktur Poltekes, Ester Rumaseb menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum mendapatkan surat ijin dari Dikti untuk meningkatkan status Poltekes Jayapura menjadi Universitas. “Kami telah melakukan persiapan menuju peningkatan status Poltekes Jayapura menjadi Universitas, tetapi sampai saat ini masih menunggu persetujuan izin dari Dikti karena ini berhubungan dengan Pendidikan. Proses ini sudah kami mulai sejak tahun 2020, oleh Direktur sebelumnya, dengan mempersiapkan naskah akademik peningkatan status dari Poltekes menjadi Universitas,” tutur Ester Rumaseb di Jayapura pada Jumat, 8 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

12 Juli

Proses belajar mengajar di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Merauke, khususnya di wilayah pedalaman, yang dihuni oleh penduduk orang asli Marind belum berjalan maksimal. Hal itu terbukti melalui tidak terselenggaranya ujian

akhir di tujuh sekolah dasar pada tahun 2022 ini lantaran tidak beroperasi sebagaimana mestinya. “Kami sedang melakukan pembenahan. Kami pastikan di tahun ajaran baru nanti, semua sekolah harus beroperasi. Apabila para guru tidak melaksanakan tugas, maka akan mendapatkan sanksi tegas. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan pengawas sekolah, karena mereka yang ada di lapangan,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Stephanus Kapasiang di Merauke, Senin, 11 Juli 2022. Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Hengky Kirwelak mengatakan sekolah yang tidak mengikuti ujian akhir tahun 2022 adalah SD yang ada di kampung-kampung lokal. “Kebanyakan di kampung lokal, seperti kampung Kaiza, Sabon, dan beberapa lainnya. Di sekolah itu ada guru, tetapi guru tidak melaksanakan tugas mengajar di sana sehingga sekolah tutup. Maka, tugas kami sekarang melakukan sinkronisasi guru melalui BKD, Dinas Keuangan, dan Dapodik, tetapi belum sinkron karena banyak guru pakai nota dinas,” tutur Hengky Kirwelak (Cenderawasih Pos).

20 Juli

- Tokoh pendidikan Papua, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, James Modouw menyoroti pengembalian SMA/SMK ke kabupaten/kota. Ia mengatakan pengembalian SMA/SMK ke kabupaten/kota akan mengulang kegagalan pengelolaan pendidikan di masa lalu. “Sejak Otsus dimulai, semua pengelolaan pendidikan diserahkan ke kabupaten/kota, provinsi hanya mengurus pendidikan tinggi. Kabupaten/kota mendapatkan beban kerja yang sangat tinggi sehingga pengelolaan pendidikan dasar dilakukan seadanya saja. Hasilnya, seperti yang kita dapatkan selama ini, banyak anak gagap dalam membaca

dan matematika,” tutur James Modouw pada Selasa, 19 Juli 2022. Sebelumnya, pada tahun 2006, sudah ada Perdasi Pendidikan Papua, Nomor 5 Tahun 2006, yang mengatur pendidikan dasar PAUD, SD, SMP diurus oleh kabupaten/kota, sedangkan SMA/SMK diurus oleh pemerintah Provinsi. Sejak tahun 2015, SMA/SMK dipindahkan pengelolaannya ke Provinsi dan Perguruan Tinggi ke pemerintah pusat, tetapi dengan peraturan baru, saat ini SMA/SMK kembali ke kabupaten/kota (Cenderawasih Pos).

- Guna menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, maka Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menyelenggarakan sosialisasi dan rapat koordinasi kesiapan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang diselenggarakan di Jayapura, pada 19 Juli 2022. Saat membuka kegiatan, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Adrian Howai mengatakan bahwa di Papua ada 789 sekolah yang sudah terdaftar dan siap menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran 2022/2023. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan diterapkan di semua jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Kami sebagai instansi perpanjangan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di provinsi atau kabupaten/kota wajib memastikan kesiapan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” tutur Howai di Jayapura pada Selasa, 19 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

05 Agustus

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan akan mengalokasikan dana pendidikan bagi anak-anak OAP di kota Jayapura yang selama ini kesulitan saat masuk sekolah, karena

kesulitan membayar uang pembangunan di sekolah swasta. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura agar memasukan dana pendidikan bagi OAP dalam APBD induk tahun 2023. “Tahun 2023, kami akan anggarkan dana Otsus bidang Pendidikan untuk pembiayaan masuk sekolah bagi OAP, karena kalau mereka tidak diterima di sekolah Negeri, maka masuk sekolah swasta harus membayar biaya pembangunan. Jadi, kita akan bantu melalui dana Otsus Pendidikan,” tutur Frans Pekey di Jayapura, pada Rabu, 3 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

06 Agustus

- Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Fransiskus Asisi Jayawijaya mengalami pergantian dari pengurus lama, Stefanus Naban kepada pimpinan baru, Edyson Wantik pada Kamis, 4 Agustus 2022 di Wamena. Kini, YPPK Jayawijaya mengelola 1 PAUD, 2 TK, 23 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi yang menghadiri acara serah terima jabatan pimpinan YPPK Jayawijaya mengatakan bahwa YPPK perlu mengatur dan menerapkan kebijakan agar para Guru betah mengabdikan di Yayasan, karena banyak guru tergiur dengan jabatan struktural sehingga meninggalkan sekolah. “Sekolah di lembah ini dimulai oleh Yayasan. Kami berharap dengan kepemimpinan baru di YPPK Jayawijaya ini, pendidikan semakin berkembang. Pemerintah tidak lupa dengan Guru Yayasan. Kalau ada pengangkatan K2, sekolah Yayasan akan mendapatkan jatah Guru,” tutur Marthin Yogobi pada Kamis, 4 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).
- Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw mencanangkan SD Negeri Abeale 1 dan 2 Sentani sebagai sekolah berkarakter Papua pada Jumat, 5 Agustus 2022 di

Sentani. Dengan pencanangan ini, maka SD Negeri Abeale 1 dan 2 Sentani akan menerapkan muatan lokal pembelajaran bahasa ibu (bahasa daerah) dan atribut adat. “Hari ini, kita launching atribut adat dan muatan lokal bahasa ibu, sehingga ini menjadi salah satu sekolah berkarakter budaya Papua. Anak-anak punya wawasan akan terbuka bahwa jati diri dan kebudayaan adalah upaya untuk membangun sikap dan perilaku yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Otsus sudah berlangsung selama 20 tahun di Papua, kita bicara tentang proteksi, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap OAP, tetapi isinya tidak muncul dalam praktek sehari-hari. Dengan launching atribut adat dan muatan lokal bahasa ibu ini memunculkan kesan bahwa Papua memang berada dalam erat Otsus,” tutur Maitus Awoitauw (Cenderawasih Pos).

10 Agustus

Menyikapi peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Provinsi Papua ke pemerintah kabupaten/kota, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan sekolah SMA/SMK harus menyiapkan data lengkap untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Jayapura agar dapat disinkronkan dengan data-data yang telah ada di dinas tersebut. “Kami harap kepala sekolah dapat terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan data-data lengkap agar proses administrasinya tidak menghambat aktivitas belajar-mengajar di sekolah dan hak-hak guru dapat terpenuhi,” tutur Frans Pekey pada Jumat, 5 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

16 Agustus

- Anggota Komisi II DPR-RI Dapil Papua, Komaruddin

Watubun mengatakan, dana Otsus akan ditransfer pada bulan Agustus 2022. Dana Otsus sebesar 12,187 triliun (provinsi Papua 8,187 triliun dan Papua Barat, 4,688 triliun) harus dimanfaatkan sesuai UU Otsus. Ia menjelaskan bahwa data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa wilayah Papua kekurangan 20.639 guru SD, SMP, SMA, SMK pada tahun 2020, belum termasuk guru PAUD dan SLB. Selain itu, diperlukan pula pendirian sekolah dan perekrutan guru untuk memberikan kesempatan belajar bagi 476.534 penduduk OAP usia sekolah yang belum bersekolah. “Hingga awal Agustus 2022, saya belum melihat adanya rencana dan upaya nyata dari pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk merekrut dan melatih para calon guru agar kekurangan guru sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat terpenuhi,” tutur Komaruddin Watubun (Cenderawasih Pos).

- Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat merekrut sebanyak 44 tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Rajin bekerja, disiplin dan tetap berada di tempat tugas masing-masing untuk mendidik generasi muda harapan bangsa,” tutur Bupati Maybrat, Bernard Sagrim saat menyerahkan SK P3K kepada 44 tenaga guru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu mengatakan pembekalan diberikan kepada guru P3K agar membawa pendidikan ke depan menjadi jauh lebih baik guna menciptakan generasi yang unggul, berkualitas dan berintelektual (Cenderawasih Pos dan www.antara.com).
- Bupati Manokwari, Hermus Indou menyerahkan SK guru P3K kepada 545 orang di Hotel Aston Manokwari. Ia berharap para

guru berjuang untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. “Kita masih membutuhkan 240 guru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lagi pengangkatan guru untuk yang belum berkesempatan diangkat menjadi tenaga P3K,” tutur Bupati Hermus (Cenderawasih Pos).

02-03 September

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama memprioritaskan pembangunan rumah dinas bagi guru di daerah terpencil. Itu supaya para guru betah di daerah penugasan. “Banyak guru dilaporkan tidak berada di tempat tugas dalam kurun waktu lama sehingga aktivitas belajar-mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah juga tidak jarang diliburkan lantaran tidak ada guru,” kata Jonathan Sembiring, kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Teluk Wondama. Anggota Komisi A DPRD Teluk Wondama Markus Webori mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat mengenai kondisi sekolah di daerah terpencil. “Mereka hanya bertahan (rutin mengajar) dalam beberapa pekan pada saat awal bertugas. Setelah itu, cuma sesekali mengejar karena kembali menetap di kota [Wasior]. Dinas pendidikan harus tertibkan ini [menindak guru mungkir],” kata Webori (Koran Jubi Edisi 02-03 September).

03 September

Masyarakat adat dari marga Ondi dan Yokhu sepakat membuka palang sekolah SMP Negeri 1 Sentani yang sudah dipalang oleh masyarakat adat tersebut sejak 28 Desember 2021 lalu. “Dosa besar kalau kita menghalangi pendidikan. Semua bertanggung jawab atas kegiatan belajar mengajar,”

tegas Bastian Ondi mewakili masyarakat adat suku Ondi. Pembukaan palang itu disaksikan oleh Sekda Hanna Hikoyabi mewakili Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Y. Mokay, serta Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura, Elvina Situmorang dan unsur TNI-Polri (Cenderawasih Pos).

12-13 Oktober

Pendidikan bermutu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari proses yang berjalan dengan baik, efektif, dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 9 Jayapura Anggoro Subiakto kepada Jubi di kota Jayapura, Senin, (10/10). Menurut Anggoro, peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya dilaksanakan dengan membuat program kegiatan sesuai program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Misalnya di bidang pembelajaran kami menyiapkan guru lebih kreatif yang menggunakan IT dengan mengirim 3 orang guru mengikuti pembelajaran digital,” Ujarnya. Sementara di bidang keamanan, sekolah bekerja sama dengan kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan mutu pendidikan di SMP 9 Jayapura sesuai program dan kegiatan dibutuhkan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran yang baik (Koran Jubi Edisi 12-13 Oktober).

14-15 Oktober

Pemerintah Kabupaten Jayapura segera menyalurkan dana Otsus sebesar Rp 7 miliar khusus untuk membiayai program pendidikan dan keagamaan di wilayah itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengatakan, dana

Otsus sebesar Rp 7 miliar tersebut telah diterima dan dikelola oleh bidang kesekretariatan dan sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Jayapura. Anggaran tersebut mulai disalurkan pekan depan kepada lembaga keagamaan dan pendidikan. Menurut Hanna, sebanyak 80 lembaga keagamaan di Bumi Kenambai Umbai akan menerima bantuan tersebut untuk program pengembangan pendidikan dan keagamaan. Jumlah besaran bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan (Koran Jubi Edisi 14-15 Oktober).

04 November

- Proses belajar mengajar di SMA Gabungan Jayapura dalam beberapa bulan terakhir terganggu akibat aksi pemalangan. Aksi pemalangan tersebut mulai terjadi saat SMA Gabungan Jayapura sedang proses pembangunan ruangan kelas baru yang saat ini sudah progres 70 persen. “Kami menginisiasi ruang-ruang yang belum pernah terpakai untuk peserta didik agar bisa ditempati walaupun berhimpitan,” ungkap kepala sekolahnya di Kota Jayapura, Rabu (2/11) (Cenderawasih Pos).
- Ketua Senat Dosen Universitas Cenderawasih, Balthasar Kambuaya mengharapkan agar para dosen di setiap kampus di Papua untuk tidak hanya mengejar jabatan rektor dan dekan. Para dosen harus dapat mengejar jabatan tertinggi akademik yaitu Guru Besar atau Profesor. “Hari ini bersama 2 orang professor yang baru dikukuhkan saya menyampaikan bahwa kita jangan hanya mengejar jabatan tinggi seperti rektor dan dekan, coba tunjukkan gelar akademik kita hingga menjadi guru besar dalam bidangnya masing-masing,” kata Prof. Kambuaya. (Cenderawasih Pos).

08 November

Menteri Pendidikan, Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan rekrutmen tenaga guru di Tanah Papua melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2022. “Dalam kebijakan rekrutmen CASN 2022, pemerintah memfokuskan pada kebijakan afirmasi salah satunya untuk daerah khusus, seperti Papua. Pemerintah juga memprioritaskan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang mendukung arah pembangunan nasional dan potensi daerah,” ujar Anwar melalui rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (7/11) (Cenderawasih Pos).

09 November

Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Mumfor Papua telah menggunakan sistem digital untuk layanan publik di bidang pendidikan agar cepat diakses masyarakat setempat. “Berbagai layanan digital bidang pendidikan saat ini sudah diterapkan Dinas Pendidikan Biak,” ujar Japosman Situmorang di Biak (Cenderawasih Pos).

03 Desember

Dana Otsus yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Jayapura diharapkan bisa dialokasikan untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi dana Otsus ini diharapkan juga memprioritaskan sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didiknya OAP agar pemanfaatan dana Otsus tepat sasaran. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam penyampaian pendapat komisi gabungan DPRD Kota Jayapura yang disampaikan Yoan A. Wambitman dalam sidang di DPRD Kota Jayapura, beberapa hari lalu (Cenderawasih Pos).

09-10 Desember

Organisasi kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WNI) menyebutkan masih banyak anak di Kabupaten Asmat, yang belum bisa membaca sehingga membutuhkan intervensi yang melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Education Team Leader WVI, Marten Sattu Sambo menyebutkan bahwa 89 persen anak tidak bisa membaca dan hanya sekitar 11 persen dapat membaca dan memahami isi bacaan. Hal itu didasarkan pada survei awal (*baseline*) yang dilakukan WVI pada tahun ini dengan melibatkan anak-anak kelas 3 SD di empat sekolah yang didampingi organisasi tersebut. “Sebenarnya kalau dirunut lagi ke bawah, akar masalah ada di anak ini sejak kecil itu tidak diberikan kesempatan untuk mengakses tulisan. Sempelnya seperti itu,” kata Marthen di Senayan City, Jakarta, Rabu (7/12/). Menurut dia, terkadang faktor lingkungan hingga *mindset* orang tua masih menjadi penghambat anak untuk dapat memiliki kemampuan membaca secara baik. Mengingat masih banyak anak yang belum bisa membaca, Marthen mengatakan, WVI mengupayakan intervensi paling mendasar bagi anak-anak yaitu mengajarkan mereka cara membaca mulai dari level paling dasar. Menurutnya, idealnya sejak kelas 3 SD sudah bisa membaca, bahkan bisa membaca sekaligus memahami suatu bacaan (Koran Jubi Edisi 09-10 Desember).

Stunting dan HIV/AIDS Makin Menyebar

— Bernardus B. Koten

Persoalan kesehatan di Tanah Papua tidak jauh berbeda dengan situasi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran dalam bidang kesehatan dan pendidikan ditentukan oleh Pemberi Layanan dan Penerima layanan serta situasi dan kondisi wilayah setempat.

Persoalan di bidang Kesehatan masih sama. Kekurangan tenaga medis, stok obat yang terbatas, akses masyarakat yang sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan, serta situasi konflik bidang sosial politik yang menghambat pelayanan kesehatan. Selain itu, Kasus HIV AIDS menjadi sorotan tiga tahun belakangan karena jumlahnya terbilang besar dan menyebar secara masif. Ada banyak wilayah atau daerah-daerah baru yang positif kasus HIV AIDS.

Mirisnya Papua yang subur dan kaya juga terdapat kasus *stunting* (gizi buruk). Kasus ini ditemukan awal tahun 2022 di beberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Jayawijaya³⁶, Kabupaten Merauke³⁷, Kabupaten Biak³⁸, dan Kabupaten Jayapura³⁹.

36 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 31 Maret 2022.

37 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 21 Mei 2022.

38 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 09 Juni 2022.

39 Bdk. Laporan Potret Kesehatan oleh SKPKC Fransiskan Papua tahun 2022.



Pemerintah dan Akses Layanan bagi Masyarakat di Papua

Di dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab IV tentang Tanggung Jawab Pemerintah, secara sangat jelas mengatur sekaligus mendorong pemerintah (pusat-daerah) selaku penyedia dan pemberi layanan untuk menjamin hak warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, dan bermartabat.

Pembangunan gedung rumah sakit di beberapa daerah di Papua 'mungkin' merupakan salah satu langkah serius pemerintah memberikan dan mempermudah akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Staf Ahli Menteri Kesehatan RI Bidang Desentralisasi Kesehatan, Kirana, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua, termasuk di antaranya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas rumah sakit.⁴⁰ Melanjutkan pernyataan ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2022 berencana membangun Rumah Sakit Tipe D di Distrik Asologaima, Jayawijaya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke walaupun masih sebatas rencana. Pada tahun 2022, Pemkab Merauke mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah sakit pertama di Kimaam. Di Kabupaten Jayapura, Pemkab Jayapura telah membangun 109 fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes di 114 kampung. Di Kabupaten Mamberamo Tengah, pemerintah meresmikan sebuah rumah sakit dan 8 gedung Puskemas. Meskipun masih juga ditemukan beberapa pembangunan fasilitas kesehatan yang tidak beres seperti halnya terjadi pada pembangunan rumah sakit tipe B di Kamundu Merauke. Pembangunan rumah sakit ini terhenti dan terbengkelai karena sudah tidak ada

40 Bdk. Koran Jubi Edisi 19-20 Januari 2022.

anggaran untuk melanjutkan. Begitu pula pembangunan 4 gedung perawat baru di RSUD Dok II. Keempat gedung ini belum bisa digunakan karena belum ada sambungan listrik, instalasi mesin hisap air, instalasi alat pemadam kebakaran gedung, dan lainnya. Keempat gedung itu adalah gedung jantung terpadu, gedung tropika disease, gedung baru tengah, dan gedung MCC⁴¹.

Selain pembangunan secara fisik, pemerintah juga berusaha menyediakan tenaga medis. Di Kabupaten Keerom, Bupati Piter Gusbager melantik 12 kepala Puskesmas yang baru. Di Kabupaten Yahukimo, Bupati Didimus Yahuli melepaskan 186 tenaga kontrak kesehatan yang akan melayani semua Puskesmas di Yahukimo. Bupati Yalimo, Nahor melepaskan 10 petugas kesehatan ke Kampung Lawe dan Mabuallem. Di Kabupaten Jayawijaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jayawijaya, Ramalia Salim mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan 996 kader *stunting* untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Di satu sisi, segala usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus digerakkan, tetapi di sisi lain, persoalan yang mengganggu pelayanan selalu terjadi. Ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan para petugas, kekurangan obat-obatan, kekurangan dokter, konflik bersenjata (daerah rawan konflik), honor atau upah tenaga kesehatan yang tidak dibayar, akses jalan, dan lain sebagainya. Misalnya para pengungsi dari Kabupaten Nduga yang berada di Kabupaten Jayawijaya bukan dilayani oleh tenaga kesehatan yang sudah berjanji untuk melayani warga Nduga melainkan oleh para relawan.⁴² Warga di Kampung Kondo, Merauke mengeluh agar petugas kesehatan

yang ditempatkan di sana dipindahkan keluar karena bidan yang yang ditempatkan tidak menghargai warga dan meminta imbalan yang berlebihan ketika warga berobat.⁴³ Di sisi lain, perwakilan tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja di RSUD Merauke melakukan demonstrasi karena telah melaksanakan kewajiban tetapi hak-hak mereka yang diatur dalam regulasi belum terealisasi.⁴⁴ Sebanyak 27 orang dokter kontrak yang bekerja di RSUD Dok 2 Jayapura melakukan aksi mogok karena sejak Januari 2022, gaji para dokter kontrak mengalami pemotongan tanpa alasan yang jelas.⁴⁵ Hal yang sama juga dialami oleh 411 tenaga paramedis di RSUD Dok 2 Jayapura yang belum menerima honor selama dua bulan, Agustus dan September.

Satu hal yang mestinya menjadi perhatian serius ialah selalu absennya petugas kesehatan di Puskesmas Saminage, Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan kisah salah satu guru relawan dari SKPKC Fransiskan Papua, petugas kesehatan di Puskesmas Saminage tidak berada di tempat tugasnya. Peran ini kadang diambil alih oleh para guru relawan yang berada di Distrik Saminage. Stok obat-obatan yang disediakan oleh guru relawan terpaksa diberikan kepada warga yang sakit. Para guru relawan di Distrik Saminage harus memainkan peran ganda, mengajar dan mengobati warga. Begitu pula penyuluhan kesehatan bagi warga dengan memberikan pemahaman tentang hidup yang sehat, mengkonsumsi jenis makanan yang bergizi sampai pengetahuan akan waktu *expire* obat.

Kasus *Stunting* di Papua

Pada tahun 2018, publik Indonesia sempat heboh dengan

41 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 10 Juni 2022.

42 Bdk. <https://jubi.co.id/legislator-papua-pertanyakan-peran-nakes-di-tengah-konflik-nduga/>

43 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 24 Maret 2022.

44 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 08 April 2022.

45 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 04 Agustus 2022.

persoalan *stunting* atau gizi buruk di Kabupaten Asmat. Kasus ini menyebabkan sekitar 70-an orang meninggal dunia. Sedangkan tahun ini, kejadian luar biasa di Kabupaten Asmat berkaitan dengan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Asmat dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, terdapat 39 kasus DBD.

Persoalan *stunting* yang terjadi di Asmat kini merebak di beberapa daerah di Papua seperti di 5 kampung di Kabupaten Jayawijaya maupun di Kabupaten Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, dr. Neville Muskita mengatakan bahwa kasus *stunting* di Merauke cukup tinggi yaitu 1.500-1.600 atau berada di 17%. Wilayah yang *stunting*nya tinggi yaitu Waan 35%; Tubang 30%; Kelurahan Karang Indah 25%.⁴⁶ Kasus *stunting* juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura. Pada Maret – Mei 2022, SKPKC Fransiskan Papua dalam riset di dua distrik (Distrik Depapre dan Distrik Ebungfauw) juga menemukan kasus *stunting*.

Kasus *stunting* di Papua menimbulkan tanda tanya besar terutama berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Mengingat perairan di Papua (laut, sungai, dan danau) kaya akan ikan, begitu pula hutan Papua yang menyediakan sumber makanan nabati dan hewani, kasus *stunting* di Papua perlu mendapat penelitian khusus.

Kasus HIV AIDS dan Jenis Penyakit Lainnya

HIV AIDS dan Narkoba juga merupakan kasus kesehatan yang terus meningkat di Papua. Data HIV-AIDS di Provinsi Papua yang mencakup 29 kabupaten/kota mencapai angka 49.011 kasus. Dari jumlah tersebut laki-laki 22.891 kasus, perempuan

26.029 kasus, dan tidak diketahui 91 kasus.⁴⁷ Ini menempatkan Papua pada urutan ketiga di tingkatan nasional. Di Papua sendiri, Kabupaten Nabire menempati urutan pertama kasus HIV AIDS.

Kronik Kesehatan

17 Januari

Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Kamundu, Merauke kini terbengkalai. Pembangunan ini tidak berjalan karena sudah tidak ada anggaran untuk melanjutkannya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Neville Mustika, pembangunan tidak berjalan karena tidak ada anggaran untuk melanjutkannya (Cenderawasih Pos).

19 Januari

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Desentralisasi Kesehatan, Kirana, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua, termasuk di antaranya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas rumah sakit. Kirana menekankan pentingnya penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022 – 2041 yang mencakup pembangunan di Bidang Kesehatan (Koran Jubi Edisi 19 – 20 Januari).

2-3 Februari

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia PNG melayani pemeriksaan kesehatan gratis kepada penderita kelumpuhan di Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Merauke. Selain itu, mereka menyumbangkan paket bahan kebutuhan

46 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 21 Mei 2022.

47 Bdk. Data SIHA Dinas Kesehatan Provinsi Papua, triwulan 2, tahun 2022

pokok kepada warga setempat. Hal ini disampaikan dalam rilis pada Minggu, 30 Januari 2022 (Koran Jubi, 2-3 Februari).

11 Februari

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya merilis angka HIV AIDS di Jayawijaya. Terdapat 6.525 kasus. Ini merupakan data tahun 2021. Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya, Pdt. Jhon Naap mengatakan bahwa 90% penularan HIV AIDS di Papua diakibatkan oleh hubungan seks yang tidak aman. Selain itu pihaknya kesulitan mendeteksi praktek-praktek prostitusi yang ada di Jayawijaya (Cenderawasih Pos).

01 Maret

Pihak Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke mendapat sorotan lantaran menolak seorang pasien anak atas nama Adriana Mahuze. Akibat penolakan tersebut, Adriana meninggal dunia. Kejadian itu *upload* di media TikTok dan menjadi viral di Merauke. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, dr. Nursito menjelaskan bahwa pada Jumat, 25 Februari 2022, pukul 19.45 pasien dibawa ke UGD RSAL dengan menggunakan mobil pick up. Kemudian, perawat dari tim langsung menuju mobil dan melakukan pemeriksaan di mobil itu. Kesimpulannya pasien sadar dan stabil. Berdasarkan penilaian itu, ditambah tidak ada dokter anak, pihaknya merujuk ke RSUD Merauke. Tetapi, pada saat sampai di RSUD Merauke, pasien meninggal dunia. Atas kejadian ini, dr. Nursito minta maaf kepada keluarga korban serta berjanji akan memproses sidang etik internal, yang dapat dimonitor oleh keluarga. “Kami bertanggung jawab sepenuhnya, dan akan ada proses sidang kode etik,” tuturnya di Merauke pada Sabtu, 26 Februari 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Nevil R

Muskita yang langsung mengecek di RSUD Merauke dan RS AL Merauke mengatakan bahwa ketika pasien tiba di RSUD Merauke kondisinya sudah memburuk dan meskipun dilakukan pertolongan, pasien meninggal dunia (Cenderawasih Pos).

10 Maret

Narkoba dan HIV-AIDS sedang menjamur di tanah Papua. Menyikapi kondisi tersebut, Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan HIV-AIDS kepada pelajar di kota Wamena pada Rabu, 9 Maret 2022 bertempat di aula Jan Bernard Reba, Polres Jayawijaya. Kegiatan ini diikuti oleh 102 siswa dari 51 sekolah yang ada di Wamena. “Kami harapkan kegiatan ini menjadi sarana edukasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, HIV-AIDS bagi remaja khususnya anak sekolah. Kita bersama-sama menolak narkoba dan menjauhkan diri dari perilaku seks bebas yang dapat menyebabkan terinfeksi HIV, menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat,” tegas Nuraeni Safey pada Rabu, 9 Maret 2022 di Mapolres Wamena (Cenderawasih Pos).

18 Maret

Demi mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya berencana membangun rumah sakit tipe D di Distrik Asologaima. Meskipun demikian, masih terdapat pro kontra terkait dampak lingkungan. Karena itu, Sekda Jayawijaya, Thony M. Mayor menggelar pertemuan bersama masyarakat Distrik Asologaima pada Kamis, 17 Maret 2022. Ia menjelaskan bahwa pro kontra bukan terkait hak ulayat, melainkan dampak lingkungan (Amdal). Karena itu, harus ada kajian lingkungan. “Kami beri apresiasi masyarakat

yang sudah terima kami untuk berdialog. Kami berterima kasih kepada anak-anak mahasiswa yang cukup jeli melihat hal ini. Ada masukan positif bahwa untuk pembangunan rumah sakit harus memperhatikan dampak lingkungan,” tutur Sekda Thony M. Mayor. Sementara itu, kepala suku Asologaima, Mulik Doga mengatakan masyarakat tidak menolak pembangunan rumah sakit, karena merupakan hal positif untuk masyarakat dan anak cucu ke depan. “Pembangunan rumah sakit ini untuk penyelamatan masyarakat kita. Kalau kami tolak nanti ada stigma masyarakat Asologaima suka tolak pembangunan,” tutur Mulik Doga (Cenderawasih Pos).

24 Maret

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dr. Willy Wambieuw mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan lintas sektor membahas aksi satu dan dua *stunting*, yang melibatkan semua OPD yang terlibat dalam tim penanganan *stunting*, yang akan turun ke kampung-kampung untuk melihat permasalahan, program yang dapat dilakukan di 21 kampung lokus *stunting* di beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya. “Bupati sudah terbitkan SK 21 kampung lokus *stunting* di Kabupaten Jayawijaya. Tim *stunting* akan lihat lagi, kalau masuk zona merah, maka akan menjadi lokus penanganannya. Kami akan turun, lihat lokasi baru rembuk lagi terkait intervensi yang akan dilakukan dalam pencegahan *stunting*,” tutur dr. Willy Wambieuw di Wamena pada Rabu, 23 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).
- Warga masyarakat di kampung Kondo mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang bertugas di kampung Kondo lantaran bidan meminta

imbalan atap daun ketika warga hendak berobat. Selain itu, bidan juga dianggap tidak menghargai masyarakat dan pasien yang datang berobat. “Kami minta bidan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kondo ditarik. Kalau kami tidak bawa atap daun, tidak dilayani oleh bidan. Kalau pasien datang berobat malam hari, bidan marah-marah dan bilang bisa makan obat daun-daunan dulu,” tutur warga Kondo, Robert Mahuze dan Domingga Basik-Basik pada Rabu, 23 Maret 2022 di Merauke (Cenderawasih Pos).

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menggelar pelatihan kader malaria kampung di Sentani. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi dalam sambutannya mengatakan, kondisi penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Jayapura saat ini masih tinggi. Ia berharap kader malaria yang ditempatkan oleh Dinas Kesehatan di setiap kampung dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan penyakit malaria. Terkait minimnya sarana penunjang seperti pendeteksi jentik, alat tes malaria dan obat malaria serta insentif kader malaria kampung pihaknya akan mengatasinya. “Mengenai insentif untuk kader malaria kampung, kami akan bicarakan di tim anggaran. Untuk obat dan alat pendukung kerja diurus oleh Dinas Kesehatan,” tutur Hana Hikoyabi pada Rabu, 23 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

31 Maret

- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sedang giat dalam penanganan *stunting*. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Thony M Mayor mengatakan bahwa kelompok sasaran prioritas penurunan *stunting* adalah ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun. Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten

Jayawijaya, Ludia Logo selaku koordinator tim *stunting* mengatakan pihaknya melakukan sinkronisasi terhadap semua kegiatan yang masuk dalam OPD guna menurunkan lokus *stunting* di lima kampung yang ada di kabupaten Jayawijaya. “Pembentukan Pokja *stunting* berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 sebagai acuannya dan SK lokus *stunting* sudah ada, tinggal ditandatangani oleh Bupati untuk tahun 2023,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Monica Mallisa mengatakan penanganan *stunting* secara prevalensi terdapat di 21 lokus, yang terdiri atas 6 kampung menjadi lokus zona merah dan 7 kampung ditetapkan sebagai zona kuning (Cenderawasih Pos).

- Masyarakat yang menjadi pemilik hak ulayat di wilayah yang ditempati Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke seluas 45 hektar melakukan gugatan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Viktor Kaisiepo mengatakan, pengadilan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi. “Sudah ada kesepakatan antara pemohon dan Pak Bupati, sehingga gugatan di pengadilan tidak dilanjutkan lagi,” tuturnya. Gugatan pemilik ulayat ini terjadi lantaran, tanah seluas 45 hektar tersebut baru dibayarkan sebesar 15 miliar pada masa pemerintahan Bupati Frederikus Gebze dari 30 miliar yang disepakati pemilik ulayat dan pemerintah Kabupaten Merauke (Cenderawasih Pos).

01 April

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, daerah pemilihan Distrik Ngguti, Moses Jeremias Kaibu mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan dari dokter Noor berkaitan dengan 85

orang warga yang menderita kusta di Distrik Ngguti. Dari jumlah tersebut ada dua orang anak berusia 2 tahun. Ia mengkritik sikap pemerintah yang selama ini hanya memperhatikan penderita kusta di kota Merauke dan menganggap penyakit kusta sudah habis. “Dalam dua tiga hari ke depan, bersama masyarakat, aparat kampung dan mahasiswa dari Distrik Ngguti dan Kaptel, kami akan melakukan demo damai sekaligus rapat dengar pendapat dengan anggota dewan dan menghadirkan Dinas Kesehatan. Penyakit kusta ini harus diperhatikan serius, kalau tidak, manusia di sana bukan bertambah banyak, tetapi akan terus berkurang karena penyakit kusta ini,” tegas Moses Jeremias Kaibu di Merauke pada Kamis, 30 Maret 2022 (Cenderawasih Pos).

02 April

Menyikapi komentar anggota DPRD Merauke, Moses Jeremias Kaibu terkait penyakit kusta di Distrik Ngguti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Nevile Muskita mengatakan bahwa sejumlah kampung di Distrik Ngguti selama ini menjadi kantong-kantong penderita kusta. Ia menjelaskan bahwa data penderita kusta di Distrik Ngguti berasal dari Puskesmas, karena petugas pergi ke kampung-kampung mencari dan mengobati penderita kusta yang ada di sana. “Penyakit kusta itu unik dan kronis. Pengobatannya membutuhkan waktu yang lama. Untuk kusta basah pengobatan selama satu tahun. Pengobatan kusta tidak hanya aspek medis saja, melainkan juga perlu dukungan sosial dan perawatan diri,” tutur dr. Nevile Muskita pada Jumat, 1 April 2022 di Merauke (Cenderawasih Pos).

08 April

- Perwakilan tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja di RSUD Merauke melakukan demonstrasi pada

Kamis, 7 April 2022 di halaman RSUD Merauke. Juru bicara aksi demo, Viktor Apaseray mengatakan pihaknya melakukan demonstrasi lantaran kecewa karena telah melaksanakan kewajiban, tetapi hak-hak mereka yang diatur dalam regulasi belum terealisasi. Ia menegaskan apabila tidak ada pembayaran dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan mogok kerja. “Kami para staf, tenaga medis dan non-medis, yang bekerja di RSUD Merauke meminta hak-hak kami yang belum direalisasikan oleh manajemen RSUD Merauke sampai saat ini,” tegas Viktor Apaseray. Di hadapan Kepala Tata Usaha RSUD Merauke, Leo Amatop dan Kabid Pelayanan RSUD Merauke, dr. Daisy, Viktor membacakan empat tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban manajemen RSUD Merauke tahun berjalan 2020-2022.
 2. Meminta pertanggung jawaban dan pembayaran insentif Covid tahun 2020, 4 bulan yang telah dibayarkan nominalnya tidak sesuai dengan peraturan Bupati Merauke yang telah ditetapkan.
 3. Meminta pertanggung jawaban dan pembayaran insentif Covid tahun 2021, yang belum dibayarkan sampai saat ini.
 4. Meminta pertanggung jawaban dan pembayaran insentif BPJS Covid-19, tahun 2020-2021, yang belum dibayarkan sampai sekarang.
 5. Meminta pertanggung jawaban BPJS reguler 2021, yang belum dibayarkan sampai sekarang.
- Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Tata Usaha RSUD Merauke, Leo Amatop mengatakan bahwa untuk poin 4 dan 5, anggaran sudah tersedia, tetapi masih menunggu audit BPK. Apabila BPK telah

melakukan audit, maka bisa segera dibayarkan. Sementara itu, Kabid Pelayanan RSUD Merauke, dr. Daisy, menjelaskan bahwa tuntutan poin 1-3, akan dikoordinasikan dengan manajemen lama RSUD Merauke (Cenderawasih Pos).

- Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengancam akan menutup Puskesmas Siepkosy lantaran masyarakat tidak memanfaatkannya. Pelayanan Puskesmas Siepkosy tidak efektif karena masyarakat takut mendapatkan vaksin covid-19 sehingga tidak mau ke Puskesmas. “Saya lihat tidak banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kalau Puskesmas ini tidak digunakan masyarakat, nanti kita tutup dan kembali ke Pustu saja,” tegas Banua. Salah seorang tenaga medis Puskesmas Siepkosy, Amaria mengatakan bahwa sebelumnya setiap bulan ratusan orang datang berobat, tetapi belakangan hanya berkisar puluhan orang saja (Cenderawasih Pos).

11 April

Demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Keerom, maka Bupati Keerom, Piter Gusbager melantik 12 Kepala Puskesmas. Pelantikan dilaksanakan di kantor Bupati Keerom. Pada kesempatan pelantikan itu, Bupati Piter menyampaikan bahwa telah terjadi regenerasi di Dinas Kesehatan, khususnya garda terdepan yaitu Puskesmas. “Kita harus menempatkan pelayanan Kesehatan seperti kita mengalungkan emas. Kita harus menjaga dan mengurus masalah Kesehatan ini sampai masyarakat benar-benar tersenyum, sampai benar-benar tidak ada lagi air mata dari masyarakat. Karena itu, Kepala Puskesmas harus harus inovatif, kreatif, melakukan terobosan dan gebrakan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan

di kampung pelosok,” tuturnya pada 8 April 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Herlina Burdam berharap agar Kepala Puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal dan senantiasa membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan. “Kita berharap dengan dilantikannya 12 Kepala Puskesmas ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan maksimal sehingga masyarakat tidak mengeluh lagi terkait pelayanan Kesehatan. Saya berharap kepala Puskesmas jeli melihat permasalahan sampai ke kampung-kampung dan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” tuturnya (Cenderawasih Pos).

18 April

- Pemukulan terhadap tenaga medis Kembali terjadi di RSUD Dok 2 Jayapura pada Sabtu, 16 April 2022. Pemukulan terhadap dr. James Gedi dilakukan oleh keluarga pasien yang meninggal, Riko Elopere. Ia meninggal setelah ditangani oleh dr. James Gedi. Roni Elopere, keluarga pasien yang meninggal mengatakan, pasien dirujuk pada tanggal 9 April 2022, tetapi baru ditangani oleh dokter pada tanggal 16 April 2022. Selain itu, pihak keluarga mendengar bahwa pasien tidak akan dioperasi, tetapi kenyataannya ada sayatan cukup lebar, seperti bekar operasi. “Kami tanya ke dokter dan dia bilang tidak operasi, tetapi kenyataannya ada luka bekas operasi. Akhirnya, dokter mengaku bahwa sempat melakukan operasi. Itulah yang membuat kami emosi. Kami curiga ada malpraktek, maka direktur RSUD Dok 2 harus periksa dokter ini,” tutur Roni Elopere. Sementara itu Direktur RSUD Dok 2, dr. Anton Mote mengatakan proses operasi sudah sesuai SOP. Pihak keluarga sudah setuju. Sudah ada surat pernyataan

kesediaan yang ditandatangani oleh pihak keluarga. “Kami himbau kepada masyarakat tindakan anarkis seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi kepada dokter, silakan disampaikan baik-baik atau silakan sampaikan ke manajemen rumah sakit,” tutur dr. Anton Mote (Cenderawasih Pos).

- Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengingatkan kepala kampung agar pada saat menyusun rencana kerja memasukan program pencegahan *stunting* karena merupakan program dari pemerintah pusat. Ia juga berpesan kepada Kepala Distrik agar dapat berkoordinasi dengan kepala kampung dan Puskesmas terkait program *stunting* sehingga dana kampung yang disediakan oleh kampung di APBK dapat digunakan tepat sasaran. “*Stunting* itu penting sekali karena ibu hamil dan anak balita perlu mendapatkan gizi seimbang. Saya harap Kepala Distrik juga dapat mengontrol kepala kampung agar dapat menyisihkan 8% anggaran Dana Desa untuk program *stunting*. Itu wajib, tidak boleh tidak,” tegas Jhon Richard Banua pada Sabtu, 16 April 2022 (Cenderawasih Pos).

29 April

- Demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kampung-kampung terpencil di Kabupaten Yahukimo, maka Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli melepas 186 tenaga kontrak kesehatan yang akan bertugas di semua Puskesmas yang ada di Yahukimo. Kegiatan itu berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Yahukimo, pada Kamis, 28 April 2022. “Saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah merekrut tenaga kesehatan untuk ditempatkan di Puskesmas guna memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Saya berharap ada sinergi, antara kesehatan dan pendidikan, juga dengan yang lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, kita semua perlu menjaga keamanan mulai dari diri sendiri, keluarga, suku, dan bangsa,” tegas Bupati Didimus Yahuli (Cenderawasih Pos).

- Sempat tutup lantaran tidak ada warga yang mau datang berobat karena takut virus corona dan takut divaksin, kini pelayanan kesehatan di Puskesmas Siepkosi, Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya kembali beroperasi. Proses pengaktifan Kembali pelayanan kesehatan di Puskesmas Siepkosi dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua pada 28 April 2022. “Sekarang kita lihat anak-anak yang datang sudah mendapatkan imunisasi. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Siepkosi kembali berjalan seperti biasa. Saya berharap petugas kesehatan yang bertugas di kampung-kampung agar terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk imunisasi lengkap untuk anak-anak,” tuturnya. Sementara itu, Hermina Oagay, salah satu ibu dari kampung Oagalo, yang membawa anaknya ke Puskesmas Siepkosi mengatakan bahwa dirinya membawa anaknya untuk berobat dan mendapatkan vaksin imunisasi. “Saya bawa anak saya ke Puskesmas Siepkosi karena kebetulan sakit, batuk, sesak napas dan panas, sekalian mendapatkan imunisasi,” tutur Hermina Oagay di Puskesmas Siepkosi, pada 28 April 2022 (Cenderawasih Pos).

30 April

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, pemerintah kabupaten Merauke telah mengalokasikan anggaran

untuk pembangunan rumah sakit pratama di Kimaam. “Ada 8 bangunan dan 1 jalan penghubung akses dengan pagu anggaran 55 miliar. Ada bangunan dengan nilai 6 miliar,” tutur Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Merauke, Ridwan Pikarima pada 29 April 2022 (Cenderawasih Pos).

20 Mei

Menyikapi adanya ancaman dan kekerasan terhadap tenaga Kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa tenaga kesehatan setiap hari menangani banyak pasien sehingga mereka tidak boleh mengalami tekanan dan intimidasi dari keluarga. Ia berharap pasien dan keluarga pasien yang datang berobat ke rumah sakit harus memperhatikan SOP yang menjadi patokan pelayanan di rumah sakit. “Rumah sakit TNI-Polri tidak ada ancaman, tetapi rumah sakit swasta dan pemerintah ancamannya sangat tinggi. Kami ingatkan, masyarakat tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dan melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan, dokter, mantri, dan sejenisnya,” tutur Frits Ramandey di Jayapura pada Kamis, 19 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

21 Mei

Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dan stakeholder teknis menggelar kegiatan pemetaan dana analisis situasi program *stunting* tahun 2022 pada Jumat, 20 Mei 2022 bertempat di Belafista Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, dr. Neville Muskita mengatakan bahwa kasus *stunting* di Merauke masih cukup tinggi yaitu 1.500-1.600, atau berada di 17%. Wilayah yang *stunting*nya tinggi yaitu Waan 35%; Tubang 30%; Kelurahan Karang Indah 25%. “Kita analisa kasus *stunting* agar intervensi

yang kita lakukan lebih detail. Misalnya, *stunting* di Distrik Kimaam, kita detailkan, kampung mana saja? Sebab, intervensi terhadap *stunting* kontribusi Dinas Kesehatan hanya 30% saja, 70% ada di instansi terkait lainnya,” tutur dr. Nevile Muskita pada Jumat, 20 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

23 Mei

Demi memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura telah membangun 109 fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes di 144 kampung. Tahun anggaran 2021/2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura juga telah membangun Puskesmas Sentani II di kampung Yobe, Komba, menggunakan dana DAK dan bantuan dari Kemenkes, karena merupakan kawasan padat penduduk. “Untuk tahun 2022, kita akan lebih banyak mengembangkan sarana dan prasarana menggunakan aplikasi ASPEK, dari 19 Distrik ada 21 Puskesmas, sehingga mencapai angka 90-100% sesuai standar Kemenkes, satu distrik satu Puskesmas, sehingga rencana pembangunan 2023-2026, tidak ada lagi pembangunan Puskesmas,” tutur Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang pada Jumat, 20 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

24 Mei

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua menggelar pelatihan basic program pengurus KPA Provinsi Papua, pada Senin, 23 Mei 2022 bertempat di hotel Ultima Horison. Ketua KPA Provinsi Papua, dr. Anton Mote mengatakan, pelatihan ini bertujuan memperkuat SDM pengurus KPA Provinsi Papua agar lebih memahami persoalan HIV-AIDS dan terlibat dalam penyusunan program 2022 dan 2023. “Hari ini sasaran

pelatihan diberikan kepada semua anggota KPA supaya mampu memahami persoalan HIV, sehingga ke depannya setiap divisi mampu menyiapkan programnya. Setelah lokakarya ini, kami akan mengundang seluruh LSM, KPA Kabupaten/Kota dan OPD terkait untuk melakukan sinkronisasi program, kalau program sudah sinkron, maka akan dilaunching program bersama yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dan 2023,” tutur dr. Anton Mote pada Senin, 23 Mei 2023 (Cenderawasih Pos).

31 Mei

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan pada bulan Mei 2022 terdapat 3 kasus demam berdarah di kelurahan Entrop dan Awiyo. Ia mengatakan peralihan musim, dari musim hujan ke musim panas atau sebaliknya sering menyebabkan terjadinya penularan demam berdarah dan malaria. Karena itu, masyarakat harus memperhatikan genangan air, karena nyamuk demam berdarah menyukai air bersih, sedangkan nyamuk malaria hidup di air kotor. “Kita perlu menjaga kebersihan lingkungan, terutama jangan membiarkan genangan air bersih dan kotor. Air di bak kamar mandi perlu dibersihkan setiap lima hari atau ditaburi abate,” tuturnya pada Senin, 30 Mei 2022 (Cenderawasih Pos).

09 Juni

Meskipun memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masih banyak anak balita di Biak Numfor yang mengalami *stunting* dan gizi buruk. Asisten I Setda Biak Numfor, Mahasunu mengatakan, balita dengan gizi buruk berkontribusi terhadap terjadinya *stunting* 3 kali lipat dan 11 kali lipat berisiko mengalami sakit dan kematian. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil penelitian SSGI tahun 2021, angka *stunting* di Biak mencapai 34%

dan gizi buruk 11%. “Upaya pencegahan *stunting* diperlukan untuk mencegah dan menurunkan anak gizi buruk. Demikian halnya, pelaksanaan pengelolaan gizi buruk terintegrasi diperlukan konsultasi di tingkat kabupaten yang bersifat manajerial untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya penanggulangan gizi buruk, khususnya pencegahan gizi buruk pada balita,” tutur Mahasunu di hotel Mapia, Biak pada Rabu, 8 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

10 Juni

Empat gedung perawatan di RSUD Dok II sampai saat ini belum dapat digunakan lantaran belum ada sambungan listrik, instalasi mesin hisap air, instalasi alat pemadam kebakaran gedung dan lainnya. Keempat gedung itu adalah gedung jantung terpadu, gedung tropika disease, gedung baru tengah dan gedung MCC. Wakil Direktur Pelayanan Medis, dr. Andreas Pekey menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena belum memberikan pelayanan maksimal. “Kami minta maaf karena sampai saat ini, masih ada pasien yang kami rawat di ruang IGD. Empat gedung baru untuk perawatan belum bisa beroperasi karena sejumlah sarana prasarana belum terpasang walaupun sebagian alat kesehatan dan tempat tidur sudah ada,” tutur dr. Andreas Pekey pada Rabu, 8 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

17 Juni

Keluarga pasien kembali mengeluhkan pelayanan di RSUD Dok 2 yang tidak maksimal. Hal itu terjadi lantaran pasien yang siap dioperasi harus tertunda lantaran tidak ada kasa steril. “Saya dengar kemarin, beberapa pasien operasi harus ditunda karena tidak ada kasa steril. Dokter tidak bisa operasi kalau tidak ada kasa steril,” jelas seorang keluarga pasien pada Kamis, 16

Juni 2022. Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik, dr. Andreas Pekey mengakui adanya keterlambatan *dropping* kasa steril. “Setelah *didrop* harus disterilisasi sehingga perlu waktu. Pengadaan barang di RSUD itu kompleks. Pelayanan non-stop 24 jam, tetapi anggaran belum tentu 24 jam,” tutur dr. Andreas Pekey (Cenderawasih Pos).

24 Juni

Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Papua, Vera Wanda mengatakan apabila *stunting* tidak ditangani secara serius, maka akan mengganggu investasi Sumber Daya Manusia di tanah Papua. Ia menegaskan bahwa *stunting* harus ditangani dengan serius karena terkait generasi masa depan Papua. Jika tumbuh kembang anak tidak diperhatikan dengan baik maka kualitasnya akan buruk. “Kita harus melahirkan manusia-manusia Papua berkualitas yang didukung dengan lingkungan yang berkualitas. SDM Papua harus berkualitas, sehat, nyaman dengan diri sendiri dan lingkungannya, nyaman hidup di Papua dan percaya diri sebagai orang Papua,” tegas Vera Wanda di Jayapura pada Kamis, 23 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

25 Juni

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, dr. Dedet Steavano mengatakan saat ini, stok obat malaria di RS Bhayangkara menipis. Ia mengatakan hanya tersedia obat malaria pil, sedangkan obat suntik stoknya kosong. “Di RS Bhayangkara, stok obat malaria menipis sekali. Ada obat pil, tetapi yang paling efektif sebenarnya obat suntik, tapi stok sedang kosong. Kami sudah pesan ke Makassar sebanyak 1000 fial, tetapi 1-3 bulan ke depan baru bisa terima obatnya. Karena itu, sementara kami pakai obat pil, tapi pasien tetap dirawat supaya mendapatkan

penanganan yang baik,” tutur dr. Dedet Steavano pada Jumat, 24 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

27 Juni

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Nerijs Auparai mengatakan, berdasarkan data survei nasional, angka prevalensi *stunting* di Provinsi Papua masih di atas rata-rata nasional yaitu 29% yang bervariasi di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, dengan angka tertinggi per kabupaten adalah Pegunungan Bintang 55% dan terendah Nabire sebesar 20%. “Kami berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, maka kami berharap pada evaluasi akhir tahun angkanya akan menurun. Tingginya angka *stunting* di Provinsi Papua disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang 1000 hari pertama kehidupan janin di dalam kandungan, yang berujung pada tidak adanya asupan gizi untuk proses pertumbuhan janin,” tutur Nerijs Auparai pada Jumat, 24 Juni 2022 di Jayapura (Cenderawasih Pos).

30 Juni

- Direktur RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Petronela Risamasu mengatakan bahwa dalam dua minggu terakhir, pihaknya mengalami keterbatasan obat malaria. Ia sangat miris, karena Papua merupakan daerah endemik malaria, tetapi obat malaria tidak tersedia. Ia juga berharap agar pada bulan Juli nanti obat malaria sudah tersedia kembali di RSUD Yowari. “Saya sedih, kita masih daerah endemik malaria, tetapi obat malaria sebagai senjata untuk lawan malaria tidak ada. Bagaimana kita mau berperang melawan malaria? Kami berupaya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten, provinsi sampai di Kementerian agar

obat malaria segera tersedia,” tutur Petronela Risamasu, di kantor Bupati Jayapura pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

- Dinas Kesehatan Provinsi Papua menerbitkan Data Sistem Informasi HIV-AIDS triwulan 2 tahun 2022. Dalam rilis data SIHA yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame tampak bahwa data HIV-AIDS di Provinsi Papua, yang mencakup 29 kabupaten/kota mencapai angka 49.011 kasus. Dari jumlah tersebut laki-laki 22.891 kasus, perempuan 26.029 kasus dan tidak diketahui 91 kasus (Sumber: Data SIHA Dinas Kesehatan Provinsi Papua, triwulan 2, tahun 2022).

01 Juli

Wakil Bupati Biak Numfor, Calvin Mansnembra mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan *stunting* perlu sebuah tim lintas sektor untuk melaksanakan aksi integrasi. “Perlu intervensi untuk mencegah terjadinya kasus *stunting*,” tegas Bupati Calvin saat membuka kegiatan rembuk *stunting* di Swissbel Hotel Biak, pada 30 Juni 2022. Di Biak, di kampung Woniki, Distrik Biak Timur, ditemukan 12 kasus *stunting* sedangkan untuk angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di kampung Wasori, Biak Timur dengan angka prevalensi 62,50% (Cenderawasih Pos).

02 Juli

Kebersihan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke sangat memprihatinkan. Pada halaman rumah sakit tampak sampah berserakan dan rumput liar yang tumbuh subur, tanpa ada penataan taman yang indah di area rumah sakit. Selain tidak adanya penataan taman, sampah-sampah di RSUD Merauke disebabkan juga oleh pengunjung

yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Menyikapi minimnya kebersihan di lingkungan RSUD Merauke, Direktur RSUD Merauke, dr. Ignatius Yerry Mario mengatakan, pihaknya akan segera membenahi kebersihan di RSUD Merauke. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kepala BKAD, Kepala Dinas Kesehatan untuk membahas tenaga juga kelengkapan peralatannya. Kita semua harus melaksanakan tugas-tugas kita agar RSUD Merauke menjadi lebih bersih dan indah,” tegasnya di Merauke pada Rabu, 29 Juni 2022 (Cenderawasih Pos).

04 Juli

Kabupaten Asmat Kembali dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Roby Kayame mengatakan pihaknya telah menerima laporan adanya DBD di Asmat, tetapi pihaknya belum mengetahui persis di distrik mana, karena laporannya masih lisan. “Saya sudah perintahkan Kabid P2P, dr. Aaron Romainum untuk mempersiapkan peralatan dan keperluan lainnya dalam pengendalian DBD, lalu turun ke Asmat, sambil kita tunggu laporan dari Asmat. Kita akan turun ke Asmat. Hari Selasa, 5 Juli 2022, kita akan rapat, kemudian turunkan tim ke Asmat untuk cek kondisi di sana,” tutur Roby Kayame di Jayapura, pada Minggu 3 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

05 Juli

- Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Asmat telah terjadi sejak bulan Mei 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Yonathan Kambu mengatakan bahwa demam berdarah di Asmat pertama kali ditemukan pada bulan Mei 2022. Pihaknya langsung menangani kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan

jentik, *fogging*, penyuluhan di jalan, dan pembagian *leaflet* DBD. “Kami membutuhkan logistik dari provinsi Papua, seperti *fogging* dan lainnya, tetapi sampai saat ini, belum ada tim dari provinsi Papua yang turun ke Asmat,” tuturnya di Agats, pada Senin, 4 Juli 2022. Sementara itu, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Romainum mengatakan, ada 37 kasus DBD, yang tersebar di empat kampung di Distrik Agats dan satu kampung di Distrik Suru-Suru. “Dilaporkan 22 kasus di kampung Bis Agats, satu di antaranya meninggal dunia. Kemudian, 13 kasus di kampung Mbait, 1 kasus di kampung Kaye, 1 kasus di kampung Syuru dan 1 kasus di kampung Tomor, Distrik Suru-Suru,” tegasnya di Jayapura, pada 4 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Dok 2 Jayapura, dr. Andreas Pekey mengatakan, stok obat malaria tablet dan suntik di RSUD Dok 2 habis. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kimia Farma. Pekey berharap, masyarakat yang baru datang ke Papua agar mengambil langkah-langkah pencegahan malaria dengan menggunakan kelambu, tutup tempat penampungan air dengan rapat, dan makan secara teratur. “Harusnya pemerintah pusat tidak membiarkan stok obat malaria sampai kosong. Mereka tahu di Papua, malaria merupakan penyakit endemi, jadi kebutuhan obat malaria di Papua harus selalu ada,” tegas dr. Andreas Pekey di Jayapura, pada Senin, 4 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

06 Juli

Kasus DBD di Kabupaten Asmat bertambah menjadi 39 kasus, dengan 16 kasus *probable*. Sebelumnya, hanya terdapat 37 kasus. Menyikapi kasus DBD di Asmat, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Papua, Roby Kayame mengatakan pihaknya telah mempersiapkan semua permintaan dari Dinas Kesehatan Asmat seperti obat-obatan, alat *fogging*, *abate* dan kebutuhan lainnya. “Kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pertemuan pada tanggal 5 Juli 2022. Kami akan turunkan tim ke Asmat minggu depan. Kami akan menggunakan pesawat Hercules ke Agats,” tutur Roby Kayame di Jayapura pada Selasa, 5 Juli 2022. Sementara itu, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Romainum mengatakan bahwa dari 39 kasus DBD di Asmat, delapan anak dan enam orang dewasa dinyatakan sudah sembuh serta dua anak dinyatakan rawat jalan. Ia berharap warga melakukan pencegahan dengan memeriksa jentik nyamuk, menguras, menutup dan *fogging* (Cenderawasih Pos).

07 Juli

- Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan. Pada bulan Januari-2 Juli 2022, ditemukan 32 kasus terkonfirmasi laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan, kasus DBD di Mimika ditemukan di wilayah Tembagapura, sedangkan di Timika ditemukan di Puskesmas Timika, Puskesmas Pasar Sentral, RS Kasih Herlina, dan RSUD Mimika. “Kita meminta petugas menaburkan *abate* dan penyemprotan di wilayah kasus dengue. Masyarakat perlu melakukan Langkah pencegahan dengan membersihkan bak penampung air secara rutin, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Ada pun gejala DBD mirip dengan malaria, yaitu demam dan panas, yang membedakan adalah kalau DBD muncul bitnik merah,” tutur Reynold Ubra di Timika pada Senin, 4 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame mengatakan sekitar 60% Puskesmas di Papua tidak memiliki dokter. Untuk mengatasi kekosongan dokter di Puskesmas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Cenderawasih dan program beasiswa pada tahun 2023. “Diharapkan dengan hadirnya RSP ini, maka anak-anak Papua bisa kuliah kedokteran di daerahnya dan tidak perlu keluar. Ada pula beasiswa dari Kemenkes untuk Pendidikan dokter umum dan dokter gigi bagi anak Papua di tahun 2023. Selain itu, kami telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Uncen untuk membuka kelas dokter spesialis pada bulan Agustus 2022 ini. Dengan demikian, tahun 2030, Papua sudah bisa memproduksi tenaga dokter, bahkan melahirkan dokter keluarga. Jadi, nanti di setiap RT ada dokter sehingga bisa menekan angka kematian dan kesakitan, serta meningkatkan angka harapan hidup,” tutur Robby Kayame pada kegiatan ekspos kinerja bidang Kesehatan Provinsi Papua pada Selasa, 5 Juli 2022 di Jayapura (Cenderawasih Pos).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok 2 Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional. Meskipun demikian, masih ada banyak kekurangan di RSUD Dok 2. Menyikapi hal tersebut, Direktur RSUD Dok 2, dr. Anton Mote mengatakan, demi memperbaiki RSUD Dok 2, maka pihaknya telah melakukan presentasi di Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. “Banyak anggaran Pemprov Papua yang dipangkas, APBD Provinsi Papua turun drastis. Maka, saya pesimis Pemprov

Papua akan bangun karena keterbatasan anggaran. Karena itu, perlu bantuan pemerintah pusat karena Kemenkes sudah kasih label RS rujukan nasional, jangan hanya kasih label saja, tapi tidak ada kasih program kegiatan dan anggaran,” tutur dr. Anton Mote di Jayapura pada Rabu, 6 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang mengatakan sebanyak 21 Puskesmas di Kabupaten Jayapura telah memiliki tenaga dokter. Meskipun demikian, belum disesuaikan dengan aturan Menteri Kesehatan terkait standarisasi penempatan tenaga dokter di setiap fasilitas kesehatan. “Di Kabupaten Jayapura, tahun 2022 ini, sudah kita penuh Puskesmas dengan tenaga dokter, walaupun belum sesuai standar peraturan Menteri Kesehatan. Misalnya, Puskesmas Rawat Inap harus memiliki sekian dokter, termasuk dokter spesialis, begitu juga yang rawat jalan harus diisi oleh beberapa dokter. Untuk penempatan dokter, kita gunakan pembiayaan Otsus. Di tahun 2022 ini, anggarannya cukup besar, tetapi belum memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Puskesmas,” tutur Sihotang pada Rabu, 6 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

08 Juli

- Menyikapi krisis obat malaria yang terjadi di beberapa rumah sakit di kota Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame mengatakan, pihaknya telah menyurati Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan pihak Kemenkes sudah mengirim obat dan akan mengirimkannya lagi. “Kami akan cek obat malaria di seluruh Papua. Daerah yang memiliki stok obat malaria banyak, kita akan ambil dan kirim ke daerah yang kurang stok obat malariannya.

Misalnya, di daerah Pegunungan, malariannya kurang, maka obatnya bisa dialihkan ke Merauke, Timika, Asmat, Keerom, dan daerah lain yang banyak malaria,” tuturnya di Jayapura, pada Kamis, 7 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame mengatakan sejumlah dokter lulusan Universitas Cenderawasih belum terdaftar di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hal tersebut menjadi kendala dalam penyerapan tenaga dokter di Puskesmas. Para dokter diharapkan pergi ke kabupaten/kota untuk mendaftar dan bekerja sebagai dokter. “Kualitas dokter lulusan Uncen baik. Mereka anak-anak dari daerah yang tahu budaya, bahasa, dan medan di Papua. Tingkat adaptasi lebih cepat. Sedangkan soal kemampuan kembali kepada yang bersangkutan dan fasilitas yang tersedia,” tegas Robby Kayame di Jayapura pada Kamis, 7 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

09 Juli

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jayawijaya, Ramalia Salim mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan 996 kader *stunting* di Kabupaten Jayawijaya. Para kader *stunting* akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Setiap kampung ada tiga kader *stunting*. “Tim yang kami bentuk dari BKKBN terdiri dari 996 kader. Satu kampung tiga kader. Di Jayawijaya ada 328 kampung dan 4 kelurahan. Kader *stunting* akan membantu Pemda Jayawijaya dalam mengendalikan angka *stunting* dari 29,73% pada bulan Agustus 2021 agar bisa turun hingga 14%,” tutur Ramalia Salim di Wamena, pada Jumat, 8 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

11 Juli

- Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Damario Sriyono mengatakan selama bulan Januari-April 2022, sebanyak 6.156 orang melakukan *voluntary counselling and testing* (VCT). Dari jumlah tersebut, 67 orang dinyatakan positif terinfeksi HIV-AIDS. “Kalau dilihat dari yang positif terinfeksi HIV-AIDS tergolong tinggi. Selama empat bulan ini, yang mengikuti VCT tergolong sedikit. Hal ini terjadi lantaran pembatasan karena covid-19,” tutur Damario Sriyono di Merauke pada Kamis, 7 Juli 2022. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1992, sampai saat ini kasus HIV-AIDS di Merauke sebanyak 2.465. Jumlah tersebut terdiri atas IRT sebanyak 559 kasus (21,1%); swasta 335 kasus (12,7%); petani 260 kasus (9,8%); ASN 183 kasus (6,9%); pelajar mahasiswa 129 kasus (4,9%); buruh 105 kasus (4%); TNI-Polri dan nelayan tenaga kerja asing jumlahnya sama yaitu 68 kasus (2,6%). Dari 2.465 kasus HIV-AIDS tersebut, 1.552 adalah HIV; 1.009 AIDS, 732 orang meninggal (Cenderawasih Pos).
- Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Romainum telah berada di Agats dalam rangka respon KLB DBD di Asmat. Ia menjelaskan dirinya ke Agats menggunakan uang pribadi dengan membawa 300 botol pembasmi jentik nyamuk, buku pedoman, alat periksa DBD sebanyak 120 alat, dan kartu pemantau jentik. “Minggu depan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke lapangan setelah dana cair. Sedangkan, Kementerian Kesehatan kemungkinan akan tiba di Agats pada 17 Juli 2022. Khusus untuk mencegah DBD ini, kita harus punya persediaan lengkap, alat tes harus lengkap, pembunuh jentik harus

lengkap dan perlunya sosialisasi ke warga masyarakat,” tutur dr. Aaron Romainum di Agats, pada Minggu, 10 Juli 2022. Sampai tanggal 10 Juli 2022, terdapat 47 kasus DBD di Asmat. Jumlah tersebut dengan rincian, rawat inap 2 kasus, rawat jalan 7 kasus, sembuh 33 kasus, *probable* 18 kasus, meninggal dunia 1 kasus (Cenderawasih Pos).

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, Helda Wally mengatakan dirinya dan staf Dinas Kesehatan sejak tanggal 9 Juli 2022 telah meninggalkan Kobakma. Hal ini dilakukan mengingat situasi keamanan di Kobakma tidak kondusif pasca penetapan Bupati Ham Pagawak menjadi tersangka kasus korupsi dan gratifikasi oleh KPK. “Beberapa kali keributan, petugas kesehatan menjadi korban. Jadi, kami pikir lebih baik kami keluar dulu, ke Wamena. Karena, Polres saja dipalang, lalu kami minta perlindungan kepada siapa? Kalau siang, mungkin kami bisa mengamankan diri, tetapi kalau malam hari siapa yang tahu pelaku menganiaya kami? Itu yang kami takutkan sehingga kami memilih sementara waktu keluar dari Kobakma,” tutur Helda Wally pada Minggu, 10 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

12 Juli

Pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah merekrut tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peluang ini dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan mengusulkan 300 tenaga honor untuk masuk dalam program PPPK. “Kami di Dinas Kesehatan Mimika dapat kuota 300 orang. Jadi, tenaga honor yang belum terakomodir di K2, kami usulkan lewat PPPK. Kami sedang melakukan seleksi administrasi. Syarat utama

adalah Pendidikan minimal D3, memiliki STR, memiliki surat ijin praktek profesi, dan tentu saja tenaga honor yang ditetapkan dengan SK Bupati,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra di Mimika pada Senin, 11 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

13 Juli

Menyikapi tidak tersedianya obat malaria di Provinsi Papua, Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram mengajak masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena pemerintah Indonesia sedang berupaya mendatangkan obat malaria. Ia juga berharap agar isu tidak adanya obat malaria di Papua ini tidak dijadikan isu *hoax* yang membuat masyarakat resah dan takut. “Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan tidak termakan isu karena pemerintah sedang membangun komunikasi secara berjenjang untuk mendapatkan obat malaria di Papua dan secara khusus di Yahukimo,” tegas Esau Miram (Cenderawasih Pos).

14 Juli

Menyikapi krisis obat malaria di Provinsi Papua, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melki Laka Lena mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk mengirim obat malaria ke Papua, karena penyakit malaria di Papua merupakan penyakit serius sehingga pemerintah wajib menyediakan obat malaria. “Kasus malaria jangan dianggap sepele, maka kami akan respon masalah ini secara serius. Saya ke Papua untuk mengetahui permasalahan di bidang kesehatan. Walaupun saya dari Dapil NTT, tetapi masalah kesehatan di Papua menjadi tanggung jawab saya,” tutur Laka Lena saat berkunjung ke kampus FKIP Uncen, pada Senin, 11 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

16 Juli

- Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Romainum mengatakan bahwa per 13 Juli 2022, jumlah kasus DBD di Kabupaten Asmat bertambah menjadi 52 kasus. Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah tiba di Agats pada 13 Juli 2022 dan langsung melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat serta melakukan kunjungan dan sinkronisasi data di RSUD Agats. “Tim dari Provinsi melakukan pemantauan jentik berkala untuk mengetahui angka bebas jentik per kampung, yang dilakukan di kampung Bis Agats dan kampung Mbait serta melakukan analisa kasus DBD 4 tahun terakhir,” tutur Romainum di Agats pada Jumat, 15 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).
- Penyakit HIV-AIDS di Provinsi Papua semakin meningkat. Data Sistem Informasi HIV-AIDS per Maret 2022 47.962 kasus, dengan jenis kelamin laki-laki 22.458 dan perempuan 25.413 dan tak diketahui jenis kelaminnya sebanyak 91 kasus. Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, dr. Anton Mote mengatakan beberapa tahun terakhir ini masalah HIV-AIDS ditutupi oleh Covid-19. Meskipun demikian, ia berharap masyarakat tidak lengah dengan melakukan pemeriksaan diri. Sebab, penularan HIV tidak saja melalui hubungan seksual, tetapi juga melalui transfusi darah serta dari ibu kepada janinnya. Ia juga mengajak masyarakat agar tidak melakukan seks bebas. “Kami lihat dari data Dinas Kesehatan selama ini, di beberapa kabupaten jumlah kasusnya sama, artinya bisa saja pendataan tidak berjalan. Kami akan ke kabupaten-kabupaten untuk melakukan verifikasi supaya kita bisa mendapatkan data

HIV-AIDS yang lebih valid,” tutur dr. Anton Mote di Jayapura pada Jumat, 15 Juli 2022. (Cenderawasih Pos).

- Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dok 2, dr. Andreas Pekey mengatakan saat ini stok obat malaria injeksi sudah tersedia kembali. “Sebelumnya kami sudah melakukan pemesanan obat malaria di Kimia Farma dan Dinkes Provinsi Papua dan sekarang sudah ada penambahan sebanyak 3.200 vial,” tutur dr. Andreas Pekey di Jayapura pada Jumat, 15 Juli 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame mengatakan bahwa keterlambatan pengiriman obat malaria ke Papua lantaran obat tersebut didatangkan dari luar negeri yaitu dari India dan China. “Kita berharap dalam minggu ini, kita mendapatkan 36 ribu produk obat malaria sehingga bisa didistribusikan ke rumah sakit kota dan kabupaten di Provinsi Papua,” tutur Robby Kayame (Cenderawasih Pos).

18 Juli

Sekretaris Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Jayapura, Binton Nainggolan mengatakan pada tahun 2022 ini, KPA Kota Jayapura mulai aktif kembali, setelah sempat berhenti karena pandemi Covid-19. “Selama tahun 2022, kami mulai aktif melakukan pemeriksaan VCT, karena tahun 2021, kami juga kehabisan *reagen*. Pemeriksaan dilakukan di Puskesmas dan Pusat Kesehatan Reproduksi di Kotaraja,” tutur Nainggolan di Jayapura pada Jumat, 15 Juli 2022. Menurutnya, berdasarkan data yang tersedia, menunjukkan animo masyarakat yang melakukan pemeriksaan meningkat. Dari hasil tes VCT memperlihatkan bahwa ada penurunan kasus HIV-AIDS di Kota Jayapura. Tahun 2020 ada 225 kasus, tahun 2021 turun menjadi 119 kasus;

sedangkan data kumulatif HIV-AIDS di Kota Jayapura sampai Januari 2022 sebanyak 7.520 kasus (Cenderawasih Pos).

20 Juli

Universitas Cenderawasih dan Unicef Kantor Perwakilan Papua dan Papua Barat melakukan penandatanganan MoU untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua dalam penanganan gizi pada anak, remaja, dan perempuan di wilayah Papua. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Papua pada Selasa, 19 Juli 2022 dan disaksikan langsung oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua. “Unicef sangat senang bekerjasama dengan Uncen dalam pencegahan anak *stunting*. Data Provinsi Papua menunjukkan bahwa 29,5% anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* di Papua dan 8,8% anak di bawah lima mengalami gizi buruk. Maka, kerjasama ini untuk mendukung intervensi berbasis bukti melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencegah malnutrisi pada kelompok rentan seperti remaja, perempuan, dan anak usia dini,” tegas Robert Gass selaku Acting Representative Unicef Indonesia (Cenderawasih Pos).

21 Juli

Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih melaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan dokter umum ke-XXXVII, pada Rabu, 20 Juli 2022 di Hotel Horison Ultima, Entrop, Kota Jayapura diikuti oleh 59 dokter. Pelantikan itu dipimpin oleh Rektor Uncen, Dr. Apolo Safanpo. Dekan Fakultas Kedokteran Uncen, dr. Trajanus L. Jembise menjelaskan bahwa ke-59 dokter yang baru dilantik tersebut, 23 orang adalah orang asli Papua. Ia menambahkan bahwa sejak berdirinya,

tahun 2022, Fakultas Kedokteran Uncen telah menghasilkan total 935 dokter. Pelantikan dokter yang dihasilkan dari Fakultas Kedokteran Uncen untuk pertama kali dilakukan pada tahun 2009 dan berlangsung sampai sekarang. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat memanfaatkan tenaga dokter ini dalam memenuhi kebutuhan dokter di Papua. Sebab, lulusan dokter Fakultas Kedokteran Uncen tidak kalah skill, kompetensi, wawasan dengan lulusan dokter yang ada di luar Papua,” tutur dr. Trajanus L. Jembise (Cenderawasih Pos).

23 Juli

Kasus DBD di Asmat per 21 Juli 2022 berjumlah 70 kasus. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Darsono mengatakan, terjadi peningkatan kasus DBD di Asmat. Ia menjelaskan peningkatan DBD terjadi lantaran kondisi rumah warga yang terbuat dari papan dan berdiri di atas rawa-rawa. Selain itu, hampir semua penampung air tanpa penutup. “Kebutuhan air kami dari air hujan, sehingga semua orang punya penampungan air di Asmat. Kemungkinan setiap rumah memiliki jentik nyamuk. Apa lagi jika penampung air terbuka,” tutur Darsono di Agats pada Jumat, 22 Juli 2022 (Cenderawasih Pos).

26 Juli

Menyikapi tidak tersedianya obat malaria jenis DHP (Dihydroartemisinin 40mg, Piperaquine Phosphate 320mg) di Provinsi Papua, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie mengatakan bahwa meskipun obat malaria jenis DHP sedang kosong, tetapi penanganan malaria di wilayah Kabupaten Jayapura tidak mengalami hambatan. “Obat malaria kurang, tidak ada pengaruhnya karena kami memiliki obat lini

kedua yaitu kina. Jadi kami gunakan kina untuk layani pasien. Memang terkait kurangnya obat malaria ini, kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, dan bulan Agustus nanti sudah ada obatnya,” tutur Lie pada Senin, 25 Juli 2022 di Sentani (Cenderawasih Pos).

04 Agustus

Sebanyak 27 orang dokter kontrak yang bekerja di RSUD Dok 2 Jayapura melakukan aksi mogok pada Rabu, 3 Agustus 2022. Mogok dilakukan karena sejak Januari 2022, gaji para dokter kontrak sebesar 10 juta mengalami pemotongan, tanpa alasan yang jelas, sehingga para dokter hanya menerima 4,7 juta. “Kami sudah pernah kirim surat resmi ke Direktur pada bulan April lalu untuk mempertanyakan pemotongan gaji kami, tetapi kami diabaikan, maka hari ini kami mogok,” tutur salah satu dokter yang tidak mau menyebutkan namanya karena ada ancaman dan intimidasi pada Rabu, 3 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

05 Agustus

- Pelayanan Kesehatan di RSUD Dok 2 kembali normal, setelah sehari sebelumnya, 3 Agustus 2022, para dokter kontrak melakukan mogok kerja lantaran gaji mereka dipotong tanpa penjelasan. Direktur RSUD Dok 2, dr. Anton Mote mengatakan bahwa pengurangan gaji itu terjadi lantaran ada pengurangan anggaran dari pemerintah pusat terhadap anggaran untuk pemerintah Provinsi Papua. “Kebijakan anggaran pemerintah pusat menyebabkan RSUD Dok 2 tidak mampu membayar penuh gaji dokter kontrak. Ada juga tenaga kontrak yang sementara berhenti karena tidak ada anggaran, sedangkan tenaga dokter kami pertahankan agar pelayanan tidak

terganggu,” tutur Anton Mote di Jayapura pada Kamis, 4 Agustus 2022. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengatakan pihaknya telah mendengar banyak permasalahan di RSUD Dok 2 mulai dari sarana prasarana, komplain pasien yang berkaitan dengan manajemen internal rumah sakit dan kini terulang lagi dokter mogok kerja. “Kami heran karena rumah sakit rujukan ini selalu ‘sakit!’ Kami akan undang Direktur RSUD Dok 2 dan perangkat tim medisnya untuk mengecek kondisi ini,” tutur Jack Komboy pada Kamis, 4 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

- Total kasus DBD di Asmat per 3 Agustus 2022 berjumlah 111 kasus. Dari jumlah kasus tersebut dapat dirincikan sebagai berikut; 1 orang rawat inap, 14 orang rawat jalan, 1 orang rujukan ke Mimika, kasus *probable* 38 orang, sembuh 94 orang dan 1 orang meninggal dunia. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Darsono mengatakan pihaknya telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar di Asmat untuk menekan penyebaran DBD di Asmat. Salah satunya terkait penggunaan *abate*. “Sebanyak 60% masyarakat di Asmat sudah menggunakan *mosnon* dan *abate*. Khusus untuk para pegawai dan non-Papua, kami berikan *abate*, sedangkan untuk masyarakat asli Asmat, kami berikan tablet *mosnon*. *Abate* dan *mosnon* sangat penting karena setiap rumah memiliki tempat penampungan air yang ada jentiknya,” tutur Darsono di Agats pada Kamis, 4 Agustus 2022 (Cenderawasih Pos).

19 September

Bupati Yalimo, Nahor melepaskan 10 petugas kesehatan

ke Kampung Lawe dan Mabualem. Pemberangkatan tenaga kesehatan ini adalah Program Rindu Yalimo yang merupakan visi misi bupati dan wakil bupati Yalimo. “ Sasaran utamanya adalah masyarakat yang ada di Yalimo. Program mobile klinik Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo ini merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang ada di balik gunung karena mereka sangat susah datang ke Elelim karena transportasi yang sulit,” Ungkap Bupati Yalimo Nahor Nekwek di bandara Elelim Yalimo, 16 September 2022 (Cenderawasih Pos).

23 September

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo Yunus Sambom mewakili Bupati Yalimo Nahor Nekwek membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis bagi petugas Puskesmas terkait surveilans gizi dan intervensi gizi Tahun 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo Yunus Sambom menyatakan kegiatan surveilans gizi dan intervensi gizi melibatkan semua petugas Puskesmas dan dilaksanakan selama 2 hari. “Kalian harus perhatikan kesehatan bayi atau balita, Oleh karena itu harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri karena kesehatan dan gizi sangat penting bagi kita semua,” pungkasnya (Cenderawasih Pos).

12-13 Oktober

Masyarakat di Kampung Necheibe, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, mengeluhkan soal kekosongan tenaga kesehatan di Pustu Kampung Necheibe. Ondoafi Kampung Necheibe, Gustaf Toto mengatakan “dua pekan yang lalu ada dua tenaga kesehatan yang bertugas di Pustu namun hanya beberapa hari saja bertugas, Pustu kembali dalam kondisi tertutup hingga sekarang. Di awal bulan, dua tenaga kesehatan ini bergantian

datang bekerja, satu dua hari kemudian, Pustu tidak terbuka lagi hingga habis bulan,” ujar Gustaf, Senin (10/10). Pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, agar ditindaklanjuti soal kinerja petugas kesehatan tersebut. “Padahal negara membayar semua beban kerja mereka” ujarnya (Koran Jubi Edisi, 12-13 Oktober).

19-20 Oktober

Gaji 411 tenaga paramedis di RSUD Dok 2 Jayapura belum dibayarkan. Ketua Komite Medik RSUD Dok 2 Jayapura, dr. Yunique Howay mengatakan gaji atau honorarium 411 tenaga kerja paramedis yang bekerja di rumah sakit itu belum dibayarkan selama dua bulan. Hal itu disampaikan Howay di Kota Jayapura, Senin (17/10). Howay menjelaskan upah yang belum dibayar itu adalah gaji atau honorarium untuk paramedis bulan Agustus dan September 2022. Gaji dokter umum dan ahli yang harus diterima sebesar Rp 5 juta per bulan. Sedangkan untuk perawat Rp 3,5 juta per bulan. Kemudian tenaga penunjang seharusnya menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, dr. Anton Mote mengatakan kepada wartawan, Senin (17/10) bahwa gaji Agustus untuk paramedis tersebut akan dibayarkan Selasa (18/10). Mote mengatakan keterlambatan pembayaran gaji para medis tersebut disebabkan adanya sentralisasi anggaran dan perubahan tata kelola anggaran Dana Otsus Papua (Koran Jubi Edisi 19-20 Oktober).

10 November

Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, dr Anton Mote menyebut, hingga kini pihak rumah sakit memberikan pelayanan hak rumah sakit untuk mereka yang masih menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS). “Anggarannya sudah disupport pemerintah, sekalipun

terbatas, Nakes di RSUD Dok 2 tetap memberikan pelayanan medis kepada pasien yang berobat,” kata Anton Mote saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (9/11) (Cenderawasih Pos).

11 November

Pelayanan medis di RSUD Dok 2 Jayapura berjalan di tengah keterbatasan yang ada. Beberapa stok obat kosong, kasa steril yang tak ada hingga tak adanya Bahan Habis Pakai (bhp) untuk Nakes. Beberapa dokter RSUD sudah menyampaikan keluhan akan tetapi hingga kini kekosongan tersebut belum dipenuhi oleh pihak manajemen rumah sakit. “Bahkan Selasa (8/11) malam semua pasien operasi ditunda karena kasa steril tidak ada di rumah sakit yang sebesar ini. Yang pasti, RSUD Jayapura saat ini melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien di bawah standar. Masa orang mau operasi harus ditunda dengan alasan kasa yang tidak ada,” tegas dr. Jan, salah satu dokter di RSUD Dok 2 (Cenderawasih Pos).

22 November

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua menggelar kegiatan-kegiatan *Rekonsiliasi Stunting* bersama Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horizon Padang Bulan, Kota Jayapura, Senin (21/11). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Neries Auparay, menyampaikan penyiapan Sumber Daya Manusia merupakan hal penting dalam pembangunan. Namun dalam upaya tersebut beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar. Menurut Neries, berdasarkan hasil studi status Gizi Indonesia

(SSGI) Tahun 2021 angka prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 24,4%. Sementara hasil studi yang sama menunjukkan bahwa angka perevalensi *stunting* Provinsi Papua berada di bawah 29,5% pada tahun 2021 (Cenderawasih Pos).

01 Desember

Staf ahli Gubernur, Elsy Rumbekwan menyampaikan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dalam menangani gizi buruk di wilayah setempat belum terlalu optimal. Beberapa hambatan dalam penanganan gizi buruk di Papua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga. “Hal ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi dalam keluarga, padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak,” kata Elsy Saat membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe pada pertemuan tingkat tinggi kepala daerah yang digelar Pemprov Papua bersama UNICEF di Kota Jayapura, Rabu (30/11) (Cenderawasih Pos).

05 Desember

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua mencatat, Papua berada pada urutan ketiga atau keempat kasus HIV tertinggi tingkat Nasional berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022. Pelaksana tugas harian Wakil Ketua KPA Provinsi Papua, Meki Wetipo menyampaikan, sebaiknya setiap orang memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri guna mengetahui status HIV. “Ketika kita memeriksakan diri, dengan begitu menjadi tahu apakah posisi kita aman atau sudah positif HIV. jika sudah positif, bisa dicarikan penanggulangan dan banyak tim medis dan pendamping untuk memberikan pelayanan kesehatan,” katanya (Cenderawasih Pos).

06 Desember

Ketua Harian KPA Provinsi Papua, dr. Anton Mote menyebut, beragam peranan dilakukan KPA ketika kasus HIV/AIDS di Bumi Cenderawasih mencapai angka 50.011 kasus. “Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten dan di kota salah satunya adalah meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata dr. Anton Mote dalam rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos (Cenderawasih Pos).

10 Desember

Pemerintah Kota Jayapura bersama KPA Kota Jayapura berkomitmen akan mengatasi masalah penyebaran AIDS di Kota Jayapura serta memperhatikan kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) agar tidak mendapatkan stigma di tengah masyarakat yang bisa menjatuhkan mental mereka. Hal ini disampaikan Pjb. Wali Kota Jayapura Frans Pekey ketika menghadiri kegiatan Jalinan Tali Asih Nuansa Natal dalam rangka peringatan hari AIDS sedunia yang diselenggarakan KPA Kota Jayapura berlangsung di Aula Biara Fransiskan APO Jumat (9/12) kemarin. “Harapan kita ke depan lebih kompak lagi, kita lebih melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* terutama dengan penggiat dan aktivis HIV-AIDS sekota Jayapura, karena ini bagian pencegahan dan penanganan, kemudian terhadap komunitas yayasan bisa kerjasama karena mereka bergerak di lapangan sudah bertahun-tahun,” katanya (Cenderawasih Pos).

19 Desember

Lemahnya peran pemerintah kabupaten/kota di Papua membuat angka peningkatan HIV-AIDS di Papua cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022,

sejak tahun 1992 hingga 2022, terdapat 50.011 kasus HIV-AIDS di Papua, yang terdiri dari 20.0441 HIV positif dan 29.570 AIDS. “Kami melihat angka peningkatan HIV di Papua cukup tinggi dikarenakan ada kelemahan pada lembaga atau peran pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS,” kata Ketua Harian KPA Provinsi Papua, dr Anton Mote pada acara Lokakarya Sosialisasi Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Papua tahun 2022, Sabtu (17/12) (Cenderawasih Pos).

Biodata Penulis

Alexandro F. Ranga OFM

Pater Sandro, OFM, begitulah dia disapa. Pater Alexandro, OFM menyelesaikan studi S2 komunikasi sosialnya di Roma, Italia. Pater Sandro juga aktif sebagai penulis baik itu opini, esay dan buku. Dua buku yang telah diterbitkan oleh SKPKC Fransiskan Papua adalah Fenomena Papua (kumpulan esai-esai Sosial) dan Tindakan Politik Bagi Papua: Relevansi Pemikiran Hannah Arendt. Saat ini Pater Sandro, OFM adalah staf di Kantor SKPKC Fransiskan Papua

Bernadus B. Koten

Bernard Koten merupakan staf SKPKC Fransiskan Papua. Sejak bergabung dengan SKPKC Fransiskan Papua, Bernard melanjutkan tradisi SKPKC Fransiskan Papua untuk menulis dan menerbitkan buku Seri Memoria Passionis.

Frits Ramandey

Lahir di waropen 46 tahun lalu. Ketika mahasiswa sudah aktif di berbagai organisasi. Pernah menjadi Ketua Panel Mahasiswa Dewan Presidium Papua 2000-2005 dan Ketua Ikatan Alumni Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan STISIPOL Silas Papare Jayapura. Selain aktif di organisasi, Frits juga berminat di dunia jurnalistik. Dia adalah deklarator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua tahun 2000 dan Mantan Wartawan Tabloid Jubi.

Saat ini dia menjabat Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Frits juga adalah seorang Aktivis Reformasi untuk Pembebasan Papua 1998.

Helmi

Lahir di Jayapura pada, 18 Maret 1990. Dia adalah lulusan Sarjana Hukum di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Saat ini bekerja di Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP). Sebagai advokat, dia dipercayakan untuk menangani kasus makar, sengketa pilkada dan lainnya. Di Papua, dia juga terlibat dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua. Dia juga aktif menulis opini atau artikel di koran-koran lokal Papua.

Hipolitus Wangge

Peneliti dan Pengajar Tidak Tetap di Australian National University. Sejumlah karya berdasarkan penelitian telah diterbitkan di *Publius: The Journal of Federalism*, *The Pacific Review*, *Contemporary Southeast Asia*, *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, dan *the Journal of Contemporary Asia*.

Paskalis Kossay

Salah satu politisi dari Wamena- Papua yang pernah menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar pada tahun 2009-2014. Menulis banyak buku tentang Papua yang diterbitkan oleh Penerbit Tollelegi antara lain *Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi* (2011), *Inisiatif Membangun Papua Tanah Damai Melalui Evaluasi 10 Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus* (2012), *Pemekaran Wilayah di Tanah Papua: Solusi atau Masalah* (2012), *Membangun Papua dengan Hati* (2013), *Jalan Panjang yang Berliku: Refleksi 50 Tahun Integrasi Papua ke dalam NKRI* (2013), dan *Kesepakatan*

Papua Bersatu: Menyikapi Isu Pemekaran Daerah (Editor, 2014), *Jalan Damai Menuju Papua Sejahtera* (2015).

Petrus Pit Supardi

Petrus Pit Supardi, Alumni STFT Fajar Timur, 2006. Sejak tahun 2012, bekerja untuk isu keterbukaan informasi publik, perbaikan tata kelola pemerintahan kampung, sekolah dasar, Puskesmas dan pencegahan HIV-AIDS di Tanah Papua. Dia juga seringkali menulis opini tentang persoalan sosial (Pendidikan dan Kesehatan) di Tanah Papua.

Yuliana Langowuyo

Yulianan bekerja di SKPKC Fransiskan Papua sejak tahun 2010. Menjadi pembicara berkaitan dengan situasi Hak Asasi Manusia Papua di dalam dan luar negeri. Saat ini menjadi Direktris SKPKC Fransiskan Papua.

Terpasung di Rumah Sendiri. Judul Memoria Passionis No.41 ini tidaklah berlebihan jika mencermati situasi Papua selama tahun 2022. Beragam peristiwa dalam bidang sipil dan politik maupun bidang ekonomi, sosial dan budaya menegaskan situasi keterpasungan tersebut. Berbagai penolakan masyarakat terhadap Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru dijawab dengan penetapan Otsus Jilid II dan Pemekaran 4 Provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya. Begitu pula gagasan dialog damai terpasung oleh saling curiga dan tanpa saling percaya antara Papua dan Jakarta. Keterpasungan ini makin kentara oleh kepungan konflik bersenjata yang makin intens antara TPNPB/OPM dan TNI/Polri dari satu pihak dan kebebasan berekspresi yang terbelenggu di pihak lain. Belum lagi persoalan yang belum tuntas seperti penyelesaian kasus-kasus HAM Papua maupun keterpasungan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

"Belajar dari implementasi Otsus Jilid I selama 20 tahun, Pemerintah Indonesia mesti memperbaiki pendekatan pembangunan di Papua. Pendekatan ini mesti menjamin proteksi dan penghormatan terhadap Orang Asli Papua."

— Paskalis Kossay

"Pembangunan bukan jawaban mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Papua. Semua pihak mengakui bahwa dialog adalah cara yang paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik di Papua karena akar masalah konflik di Papua bukan hanya kemiskinan."

— Alexandro F. Ranga OFM

"Kondisi keamanan di Papua sulit untuk membaik dikarenakan sejumlah peritiswa kekerasan dan konflik sosial tidak dilihat dalam pandangan kegagalan pemerintah untuk mengelola hubungan pusat dan daerah, khususnya yang memiliki sejarah konflik politik yang begitu lama, dan kebijakan-kebijakan negara di bidang keamanan tidak mengakomodir keberadaan dan kepentingan masyarakat asli Papua."

— Hipolitus Wangge

"Papua adalah daerah rawan konflik. Akan tetapi seringkali konflik di Papua dilihat tanpa memahami konteksnya secara historis, sosio-kultural, dan antropologis. Akibatnya muncul stereotip tanpa memahami mengapa orang Papua berjuang untuk menegakkan hak-haknya atas tanah ulayat, Sumber Daya Alam, dan Hak Asasi Manusia (HAM)."

— Frits Ramandey

"Penyelesaian masalah HAM Papua sudah sejak lama dibicarakan bahkan silih berganti presiden tapi upaya penyelesaiannya belum menunjukkan keseriusan dari Pemerintah. Fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah."

— Helmi

"Pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan lebih luas kepada Orang Asli Papua untuk mengekspresikan hidupnya secara bebas, tanpa tekanan di atas tanah Papua. Cara-cara lama dengan pendekatan keamanan dan militer harus diubah dengan cara-cara yang lebih manusiawi."

— Petrus Pit Supardi

"Meskipun kita semua tahu dan menyadari banyak dan kompleksnya permasalahan di Papua, tetapi kita tidak bisa menyepelekan masalah korupsi yang terjadi dalam semua tingkatan pemerintahannya kita."

— Yuliana Langowuyo

"Persoalan kesehatan di Tanah Papua tidak jauh berbeda dengan situasi pendidikan. Kekurangan tenaga guru dan tenaga medis, stok obat yang terbatas, akses masyarakat yang sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan, serta situasi konflik bidang sosial politik yang menghambat pelayanan kesehatan dan pendidikan."

— Bernard B. Koten

